



**BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 07 TAHUN 2016

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah untuk jangka waktu lima tahun perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
dan
BUPATI BANGKA BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2016-2021, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Bangka Barat untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ditunjuk pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
13. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan pembangunan adalah arah dan/atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Arah kebijakan adalah instrumen perencanaan yang memandu ke mana prioritas pembangunan diarahkan agar lebih fokus dalam upaya mencapai tujuan.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJM Nasional.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 menjadi pedoman bagi :

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

Dokumen RPJMD terdiri atas sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN
Berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan Dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan dokumen RJPMD disusun.
- b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Menggambarkan kondisi umum daerah mencakup aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
- c. BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
Menjelaskan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.
- d. BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Mengemukakan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Bangka Barat.
- e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan serta sasaran setiap misi pembangunan.
- f. BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta pentahapan arah kebijakan tiap tahunnya.
- g. BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Menjelaskan kebijakan umum yang digunakan sebagai penentuan program pembangunan daerah.

- h. BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Menjelaskan semua program prioritas Kabupaten Bangka Barat yang disertai dengan pendanaannya.
- i. BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Menjelaskan penetapan indikator kinerja daerah yang menggambarkan target yang ditetapkan dan capaian keberhasilan pencapaian visi dan misi bupati terpilih pada masa akhir periode masa jabatan.
- j. BAB X PEDOMAN MASA TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Berisi prinsip-prinsip pedoman masa transisi pada saat pergantian masa jabatan serta kaidah pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD.
- k. Bab XI PENUTUP

Pasal 5

Uraian lebih lanjut tentang RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam hal terjadi perubahan target capaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dalam hal tidak merubah target capaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 04 November 2016

BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 04 November 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

ttd.

H. M. EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 3 SERI E

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : 7.7/TAHUN 2016**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 07 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016-2021**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD wajib disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016–2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat untuk kurun waktu lima tahun yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat terpilih periode tahun 2016-2021 yang disusun berdasarkan analisis permasalahan dan isu-isu strategis daerah, sehingga melahirkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah beserta indikator sasaran dan target pencapaian pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang bertumpu pada program pembangunan daerah lengkap dengan kerangka pendanaan indikatif serta kaidah pelaksanaannya.

RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016–2021 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah serta acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Untuk mengakomodir perubahan-perubahan terkait dengan perubahan kebijakan serta peraturan baik ditingkat pusat dan daerah seperti Standar Pelayanan Minimal, dan peraturan lainnya yang belum tersedia pada saat penyusunan dokumen RPJMD, serta perubahan lingkungan baik internal dan eksternal pemerintah Kabupaten Bangka Barat selanjutnya dapat disesuaikan melalui peraturan bupati.

Pasal 9

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 5

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021
Nomor : 07 Tahun 2016
Tanggal : 04 November 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI -----	i
DAFTAR TABEL -----	iv
DAFTAR GAMBAR -----	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang -----	1 - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan -----	1 - 4
1.3. Hubungan Antar Dokumen -----	1 - 7
1.4. Sistematika Penulisan -----	1 - 8
1.5. Maksud dan Tujuan -----	1 - 10
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1. Aspek Geografi dan Demografi -----	2 - 1
2.1.1. Karakteristik Wilayah Kabupaten Bangka Barat -----	2 - 1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Bangka Barat -----	2 - 7
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Bangka Barat -----	2 - 9
2.1.4. Kondisi Demografi Kabupaten Bangka Barat -----	2 - 10
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat -----	2 - 13
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi -----	2 - 13
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial -----	2 - 23
2.2.3. Fokus Seni Budaya -----	2 - 32
2.3. Aspek Pelayanan Umum -----	2 - 32
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib -----	2 - 40
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan -----	2 - 93
2.4. Aspek Daya Saing Daerah -----	2 - 106
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah -----	2 - 106
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur -----	2 - 115
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi -----	2 - 123
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia -----	2 - 125

BAB 3 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu -----	3 - 2
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD -----	3 - 6
3.1.2. Neraca Daerah -----	3 - 36
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu -----	3 - 47
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran -----	3 - 50
3.2.2. Analisis Pembiayaan -----	3 - 52
3.3 Kerangka Pendanaan -----	3 - 54
3.3.1. Proyeksi Data Masa Lalu -----	3 - 55
3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan -----	3 - 59

BAB 4 ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan -----	4 - 1
4.1.1. Permasalahan Bidang Ekonomi -----	4 - 1
4.1.2. Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup -----	4 - 10
4.1.3. Permasalahan Bidang Sosial -----	4 - 11
4.1.4. Permasalahan Bidang Tata Kelola Pemerintahan -----	4 - 17
4.2 Isu Strategis -----	4 - 21
4.2.1. Isu Strategis Internasional -----	4 - 22
4.2.2. Isu Strategis Nasional -----	4 - 25
4.2.3. Isu Strategis Regional -----	4 - 29
4.2.4. Isu Strategis Tingkat Provinsi -----	4 - 30
4.2.5. Isu Strategis Kabupaten Sekitar -----	4 - 31
4.2.6. Isu Strategis Kabupaten Bangka Barat -----	4 - 32
4.3 Isu Strategis Terkait Kewilayahan -----	4 - 35

BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi -----	5 - 1
5.2 Misi -----	5 - 3
5.3 Tujuan dan Sasaran -----	5 - 7

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 Strategi -----	6 - 2
6.2 Arah Kebijakan -----	6 - 8

BAB 7	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
7.1	Prioritas Pembangunan -----	7 - 1
7.2	Kebijakan Umum -----	7 - 2
BAB 8	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN -----	8 - 1
BAB 9	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH -----	9 - 1
BAB 10	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN -----	10 - 1
BAB 11	PENUTUP -----	11 - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat	2 - 2
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015	2 - 11
Tabel 2.3	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015	2 - 11
Tabel 2.4	Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015	2 - 12
Tabel 2.5	Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015	2 - 13
Tabel 2.6	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (%)	2 - 15
Tabel 2.7	Kontribusi Sektor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015 (%)	2 - 17
Tabel 2.8	Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015 (%)	2 - 18
Tabel 2.9	Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin dan di Atas Garis Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2014	2 - 21
Tabel 2.10	Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015	2 - 25
Tabel 2.11	Daftar Penerbitan Peraturan/Kebijakan/Regulasi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015	2 - 37
Tabel 2.12	Rekapitulasi Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat SKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2015	2 - 38
Tabel 2.13	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015	2 - 41
Tabel 2.14	Rasio Guru/Murid Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015	2 - 42
Tabel 2.15	Rasio Sarana Kesehatan Per Satuan Penduduk	2 - 44
Tabel 2.16	Rasio Tenaga Kesehatan Per 100.000 Penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 – 2015	2 - 45
Tabel 2.17	Kondisi Jalan Kabupaten dan Desa Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 – 2015	2 - 47
Tabel 2.18	Penetapan Lokasi Daerah Irigasi Prioritas Kabupaten Bangka Barat	2 - 48

Tabel 2.19	Rasio Tempat Beribadah per Satuan Penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 – 2014	2 - 49
Tabel 2.20	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 – 2014	2 - 50
Tabel 2.21	Persentase Bangunan ber-IMB Kabupaten Bangka Barat tahun 2011 – 2015	2 - 51
Tabel 2.22	Persentase Keluarga yang Menggunakan Air Bersih Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 – 2014	2 - 52
Tabel 2.23	Jumlah Pemberian Bantuan Perlindungan Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015	2 - 56
Tabel 2.24	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015	2 - 57
Tabel 2.25	Persentase penanganan kasus tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012-2015.....	2 - 62
Tabel 2.26	Kualitas Udara Ambient Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2016	2 - 66
Tabel 2.27	Kualitas Sumber Air Baku PDAM Kabupaten Bangka Barat	2 - 67
Tabel 2.28	Kualitas Air Sungai Utama di Kabupaten Bangka Barat.....	2 - 68
Tabel 2.29	Penanganan Persampahan di Perkotaan Muntok	2 - 69
Tabel 2.30	Jumlah Sarana Prasarana dan Arus Penumpang dan Barang Angkutan Umum.....	2 - 77
Tabel 2.31	Jaringan Trayek Kabupaten Bangka Barat	2 - 77
Tabel 2.32	Uji KIR Angkutan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015	2 - 78
Tabel 2.33	Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bis di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015	2 - 79
Tabel 2.34	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015	2 - 80
Tabel 2.35	Jumlah Pelanggan Telepon dan Speedy di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012	2 - 81
Tabel 2.36	Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015	2 - 82
Tabel 2.37	Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009-2015	2 - 85
Tabel 2.38	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 - 2015	2 - 89
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 – 2015	2 - 92
Tabel 2.40	Jumlah Nelayan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015	2 - 93

Tabel 2.41	Pantai/Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Bangka Barat	2 - 95
Tabel 2.42	Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Bangka Barat	2 - 95
Tabel 2.43	Jumlah Hotel/Penginapan/Homestay dan Even Wisata Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015	2 - 96
Tabel 2.44	Jumlah Produksi dan Luas Panen Tanaman Pangan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 – 2015	2 - 98
Tabel 2.45	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bangka Barat (Persen) Tahun 2010-2014	2 - 110
Tabel 2.46	Produktivitas Total Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah)	2 - 111
Tabel 2.47	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 - 2015	2 - 115
Tabel 2.48	Mobilitas Orang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 - 2015	2 - 116
Tabel 2.49	Mobilitas Bongkar Muat Barang Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2014	2 - 117
Tabel 2.50	Mobilitas Bongkar Muat Barang Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015	2 - 117
Tabel 2.51	Jumlah Bank dan ATM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014	2 - 119
Tabel 2.52	Jumlah Layanan Perbankan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014	2 - 119
Tabel 2.53	Jumlah Penginapan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015	2 - 121
Tabel 2.54	Jumlah Daya Listrik Terpasang Kabupaten Bangka Barat, Tahun 2010-2014	2 - 122
Tabel 2.55	Lama Proses Pelayanan Perizinan Kabupaten Bangka Barat	2 - 124
Tabel 2.56	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2010-2015	2 - 125
Tabel 2.57	Rasio Ketergantungan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 – 2015	2 - 127
Tabel 3.1	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007-2015 (Dalam Ribuan)	3 - 4
Tabel 3.2	Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Periode Tahun 2010-2015 (dalam %)	3 - 5
Tabel 3.3	Perkembangan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Bangka Barat, 2005-2015	3 - 8
Tabel 3.4	Pertumbuhan APBD Kabupaten Bangka Barat, 2006 - 2015 (dalam persentase)	3 - 9
Tabel 3.5	Perkembangan Anggaran dan Realisasi Penerimaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2006 - 2015	3 - 10
Tabel 3.6	Pertumbuhan Tahunan dan Rata-rata Penerimaan Kabupaten Bangka Barat Periode Tahun 2005 – 2015 (dalam %)	3 - 13

Tabel 3.7	Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015	3 - 17
Tabel 3.8	Target dan Realisasi PAD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 s.d. 2015 .	3 - 19
Tabel 3.9	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 s.d. 2015	3 - 24
Tabel 3.10	Target dan Realisasi lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 s.d. 2015.....	3 - 30
Tabel 3.11	Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Bangka Barat Periode Tahun 2007-2015 (dalam ribu rupiah).....	3 - 32
Tabel 3.12	Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007-2015	3 - 35
Tabel 3.13	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Bangka Barat Periode 2007-2015	3 - 36
Tabel 3.14	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007-2015 (juta rupiah)	3 - 38
Tabel 3.15	Rasio Lancar Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007-2015	3 - 43
Tabel 3.16	Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007-2015	3 - 44
Tabel 3.17	Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007-2015	3 - 45
Tabel 3.18	Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007-2015	3 - 46
Tabel 3.19	Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007-2015	3 - 47
Tabel 3.20	Opini BPK terhadap LKD Kabupaten Bangka Barat, 2006 – 2014	3 - 49
Tabel 3.21	Proporsi Anggaran Belanja Kabupaten Bangka Barat, 2007-2015	3 - 50
Tabel 3.22	Anggaran Belanja Urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Barat, 2005-2015	3 - 51
Tabel 3.23	Pertumbuhan Anggaran Belanja Urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Barat, 2006-2015 (dalam persentase)	3 - 51
Tabel 3.24	Proporsi Anggaran Belanja Urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Barat, 2005-2015 (dalam persentase)	3 - 51
Tabel 3.25	Realisasi SILPA Kabupaten Bangka Barat, 2005-2015	3 - 53
Tabel 3.26	Persentase Anggaran SILPA Kabupaten Bangka Barat untuk Pendanaan APBD, 2015-2015	3 - 53
Tabel 3.27	Daya Pajak (<i>Tax Effort</i>) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015.....	3 - 55
Tabel 3.28	PAD Per Kapita, Pajak Per Kapita dan PDRB Per Kapita Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015.....	3 - 57

Tabel 3.29	Elastisitas PAD dan Pajak Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015.....	3 - 58
Tabel 3.30	Estimasi Penerimaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 (dalam rupiah)	3 - 60
Tabel 3.31	Belanja Pegawai Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007-2015	3 - 61
Tabel 3.32	Pertumbuhan Belanja Pegawai Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008-2014	3 - 62
Tabel 3.33	Perkiraan Jumlah Pegawai Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021	3 - 62
Tabel 3.34	Perkiraan Belanja Pegawai Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021....	3 - 62
Tabel 3.35	Anggaran dan Realisasi Program yang Bersifat Rutin Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007-2014	3 - 63
Tabel 3.36	Perkiraan Kebutuhan Pendanaan untuk Program yang Bersifat Rutin Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021	3 - 63
Tabel 3.37	Perkiraan Kapasitas Riil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021	3 - 64
Tabel 3.38	Estimasi Belanja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021	3 - 64
Tabel 3.39	Pendanaan Prioritas Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021	3 - 65
Tabel 3.40	Alokasi Bidang Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021.....	3 - 66
Tabel 3.41	Batas Maksimum Pinjaman Kabupaten Bangka Barat	3 - 66
Tabel 3.42	Target Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021.....	3 - 68
Tabel 5.1	Keselarasan Misi antara RPJMN Tahun 2014-2019, RPJMD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 dan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021	5 - 6
Tabel 5.2	Kesesuaian Misi RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021.....	5 - 7
Tabel 5.3	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021	5 - 8
Tabel 5.4	Keterkaitan Misi dan Tujuan Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021	5 - 11
Tabel 5.5	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran beserta indikator dan target Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021	5 - 15
Tabel 8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bangka Barat	8 - 4
Tabel 9.1	Penetapan Target Indikator Makro RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021	9 - 2

Tabel 9.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021	9 - 3
Tabel 9.3	Matriks Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021	9 - 7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan RENSTRA SKPD dan Dokumen RKPd	1 - 4
Gambar 1.2	Keterkaitan Dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	1 - 8
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Bangka Barat	2 - 2
Gambar 2.2	Luasan Kawasan Peruntukan Perkebunan Besar per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat (hektar)	2 - 5
Gambar 2.3	Luasan Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat Per Kecamatan Kabupaten Bangka Barat (hektar)	2 - 6
Gambar 2.4	Peta Kawasan Strategis Kabupaten Bangka Barat	2 - 9
Gambar 2.5	Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya	2 - 10
Gambar 2.6	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015	2 - 14
Gambar 2.7	PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015 (juta rupiah)	2 - 16
Gambar 2.8	PDRB per Kapita Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 – 2015 (dalam ribu rupiah).....	2 - 20
Gambar 2.9	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2014	2 - 22
Gambar 2.10	Perkembangan Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015	2 - 22
Gambar 2.11	Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2015 (persentase)	2 - 23
Gambar 2.12	Angka Melek Huruf Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015	2 - 24
Gambar 2.13	Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 dan 2015	2 - 26
Gambar 2.14	Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 dan 2015	2 - 27
Gambar 2.15	Perkembangan Nilai Ujian Nasional di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015	2 - 28
Gambar 2.16	Jumlah Kematian Bayi, Angka Kematian Bayi dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1.000 kelahiran hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015	2 - 29
Gambar 2.17	Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 - 2015.....	2 - 30
Gambar 2.18	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015 .	2 - 31
Gambar 2.19	Jumlah Sanggar Kesenian dan Sanggar Kesenian yang Dibantu/Dibina Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015	2 - 32

Gambar 2.20	Jumlah PNS Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011-2015	2 - 33
Gambar 2.21	Jumlah PNS Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Pendidikan Tahun 2011-2015	2 - 34
Gambar 2.22	Jumlah PNS Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Golongan Tahun 2011-2015	2 - 34
Gambar 2.23	Nilai komponen SAKIP Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014	2 - 35
Gambar 2.24	Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015	2 - 37
Gambar 2.25	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012-2015	2 - 40
Gambar 2.26	Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015 (persentase)	2 - 43
Gambar 2.27	Jumlah Posyandu Aktif dan Rasio Posyandu per 100 Balita Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015	2 - 44
Gambar 2.28	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 – 2015	2 - 53
Gambar 2.29	Persentase Keluarga Bersanitasi Dasar Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2014	2 - 53
Gambar 2.30	Indikator Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 s.d 2015	2 - 54
Gambar 2.31	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015.....	2 - 56
Gambar 2.32	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 – 2014	2 - 60
Gambar 2.33	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 – 2013	2 - 60
Gambar 2.34	Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012-2015	2 - 61
Gambar 2.35	Produksi Padi dan Ketersediaan Pangan Utama Beras Lokal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 – 2015	2 - 63
Gambar 2.36	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 - 2015 (dalam persentase)	2 - 64
Gambar 2.37	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015	2 - 70
Gambar 2.38	Persentase Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015	2 - 71
Gambar 2.39	Persentase Bayi dan Penduduk Berakte Kelahiran Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015	2 - 71
Gambar 2.40	Piramida Penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007 dan 2015	2 - 74

Gambar 2.41	Persentase Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015	2 - 75
Gambar 2.42	Tingkat Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 – 2014	2 - 75
Gambar 2.43	Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak aktif serta Anggota Koperasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015	2 - 83
Gambar 2.44	Cakupan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Klasifikasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013 - 2015	2 - 84
Gambar 2.45	Sebaran Usaha Mikro per Kecamatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2015	2 - 84
Gambar 2.46	Jumlah Lapangan Olahraga dan Rasio Lapangan Olahraga per 1.000 Penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 – 2015	2 - 87
Gambar 2.47	Persentase Keterisian Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 – 2015	2 - 88
Gambar 2.48	Jumlah Perpustakaan dan Pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 – 2015	2 - 91
Gambar 2.49	Koleksi Buku Perpustakaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 – 2015	2 - 91
Gambar 2.50	Jumlah Produksi Perikanan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015 (ton).....	2 - 94
Gambar 2.51	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 – 2015 (persentase)	2 - 97
Gambar 2.52	Kontribusi Subsubsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan serta Jasa Pertanian dan Perburuan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 – 2015 (persentase)	2 - 98
Gambar 2.53	Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 – 2015 (ton/ha)	2 - 99
Gambar 2.54	Produksi Tiga Komoditi Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015 (ton)	2 - 100
Gambar 2.55	Data Populasi Ternak dan Produksi Sapi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012-2015	2 - 101
Gambar 2.56	Luas Kawasan Hutan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2014 (Hektar)	2 - 102
Gambar 2.57	PDRB dan Kontribusi Subsubsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 – 2015 (persentase)	2 - 102
Gambar 2.58	Luas Hutan Kritis Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2013 (Hektar)	2 - 103
Gambar 2.59	Jumlah Industri Kecil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015	2 - 105
Gambar 2.60	PDRB Per Kapita (ADHB dan ADHK) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015	2 - 107
Gambar 2.61	Pendapatan per Kapita berdasarkan ADHB dan ADHK Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2014	2 - 107
Gambar 2.62	Proporsi Komponen Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2014	2 - 108

Gambar 2.63	Nilai Konsumsi RT ADHB (miliar rupiah) serta Pertumbuhannya Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2014	2 - 109
Gambar 2.64	Nilai Konsumsi per Rumah Tangga dan per Kapita per Tahun Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2014 (dalam ribu)	2 - 110
Gambar 2.65	Produktivitas Total Daerah dan Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2014	2 - 112
Gambar 2.66	Nilai Ekspor menurut ADHB dan ADHK (miliar rupiah) serta Proporsi Ekspor Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2014	2 - 113
Gambar 2.67	Nilai Impor menurut ADHB dan ADHK (miliar rupiah) serta Proporsi Impor Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2014.....	2 - 114
Gambar 2.68	Distribusi Net Ekspor Terhadap PDRB menurut ADHB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2014	2 - 115
Gambar 2.69	Nominal Uang Terhimpun dari Pihak Ketiga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2013 (juta rupiah)	2 - 120
Gambar 2.70	Nilai Subsektor Makan Minum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015 (juta rupiah).....	2 - 120
Gambar 2.71	Jumlah Demonstrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015	2 - 124
Gambar 3.1	Indeks Kinerja Keuangan Kabupaten Bangka Barat, 2010-2015	3 - 6
Gambar 3.2	Pertumbuhan APBD Kabupaten Bangka Barat, 2007-2015	3 - 9
Gambar 3.3	Realisasi PAD per Jenis Pendapatan Kabupaten Bangka Barat Periode 2006-2015	3 - 15
Gambar 3.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Bangka Barat Periode 2007-2015	3 - 36
Gambar 3.5	Proporsi Anggaran Belanja Urusan Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Barat, 2011-2015 (dalam %).....	3 - 52
Gambar 3.6	Daya Pajak (<i>Tax Effort</i>) Kabupaten Bangka Barat, 2010-2015.....	3 - 56
Gambar 5.1	Keterkaitan Visi RPJMN Tahun 2014-2019, RPJMD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 dan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021	5 - 2
Gambar 5.2	Keterkaitan Visi RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021	5 - 3
Gambar 7.1	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Barat dengan Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Prioritas Nasional	7 - 2

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Bangka Barat diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka panjang dua puluh tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka menengah lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka pendek satu tahun.

Dengan telah selesainya Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bangka Barat pada akhir tahun 2015, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat (4), Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD ditetapkan paling lama enam bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Kepala Daerah terpilih Kabupaten Bangka Barat dilantik oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 22 Maret 2016.

1.1 Latar Belakang

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima tahun yang berisikan visi dan misi jangka menengah daerah yang juga memproyeksikan rencana pencapaian dan pembangunan dalam kurun waktu RPJMD tersebut berlaku. RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu lima tahun.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah memberikan arahan dan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, di tingkat nasional, daerah, maupun antar daerah, serta untuk lebih memaksimalkan potensi-potensi sumber daya alam dan menjelaskan kondisi dan kemampuan daerah.

RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016–2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat untuk kurun waktu lima tahun yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat terpilih berdasarkan analisis permasalahan dan isu-isu strategis daerah, sehingga melahirkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah beserta indikator sasaran dan target pencapaian pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang bertumpu pada program pembangunan daerah lengkap dengan kerangka pendanaan indikatif serta kaidah pelaksanaannya.

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 (tahap III), hasil evaluasi pembangunan daerah jangka menengah pada periode pembangunan sebelumnya (tahun 2005-2010 dan tahun 2010-2015) dengan tetap memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019 serta RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017.

Guna memperoleh dokumen perencanaan yang baik, penyusunan dilakukan menggunakan beberapa pendekatan untuk mengakomodir semua kepentingan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016–2021 dilakukan dengan menggunakan empat pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Teknokratis

Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode ini merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan kerangka manajemen strategis dan berbasis kinerja tahapan penyusunan dokumen perencanaan.

b. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan penyusunan. Keterwakilan seluruh unsur masyarakat merupakan prasyarat dalam pendekatan partisipatif ini, termasuk keterwakilan unsur kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan menerapkan pengarusutamaan gender.

c. Pendekatan Politis

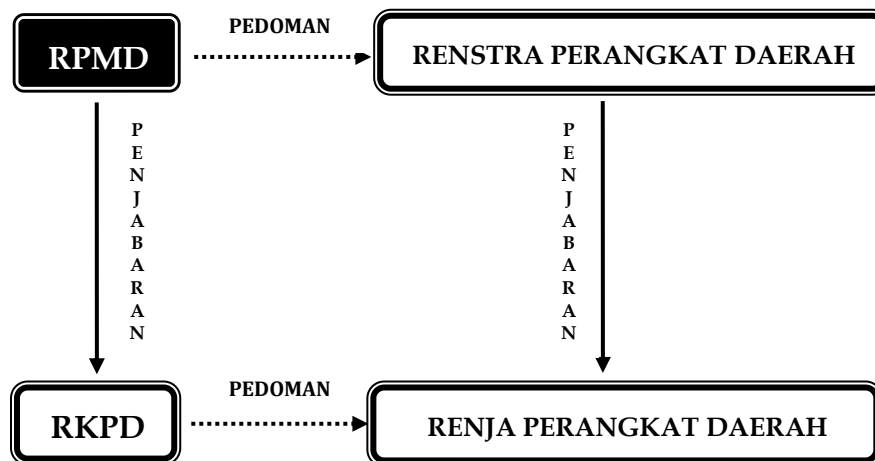
Pendekatan politis merupakan penawaran janji-janji politik, visi, serta misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye yang diterjemahkan secara sistematis ke dalam program pembangunan dan dengan masukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada draf Rancangan Awal RPJMD. Tahapan berikutnya yaitu pembahasan rancangan akhir RPJMD untuk selanjutnya disahkan dan ditetapkan sebagai Perda tentang RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun Tahun 2016–2021.

d. Pendekatan *Top Down* dan *Bottom Up*

Pendekatan *top down* dilakukan melalui penyelarasan dokumen perencanaan pada tingkat provinsi dan tingkat nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional, termasuk target sasaran *Sustainable Development Goals* (SDG's) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Pendekatan *bottom up* dilakukan lewat *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan di enam kecamatan dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD di tingkat kabupaten.

Melalui keempat pendekatan di atas, penyusunan dokumen RPJMD ini diharapkan dapat berkualitas sehingga secara konsisten dapat dilaksanakan, dimonitoring, dievaluasi dan dilaporkan setiap tahunnya, maupun untuk pelaporan pertanggungjawaban di akhir masa berlaku lima tahun.

Dokumen RPJMD juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) serta dijabarkan menjadi RKPD setiap tahun. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, berpedoman pada dokumen RPJMD dan bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun.



Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan RENSTRA PD dan Dokumen RKPD

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang mendasari proses penyusunan dokumen RPJMD antara lain sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 8) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 9) Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
- 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
- 11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 03);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 06 Seri E);
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 01 Seri E);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 09 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 6 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);

- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 76);
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 seri E);
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1A Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 4 Seri D);
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 64);
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 seri D).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

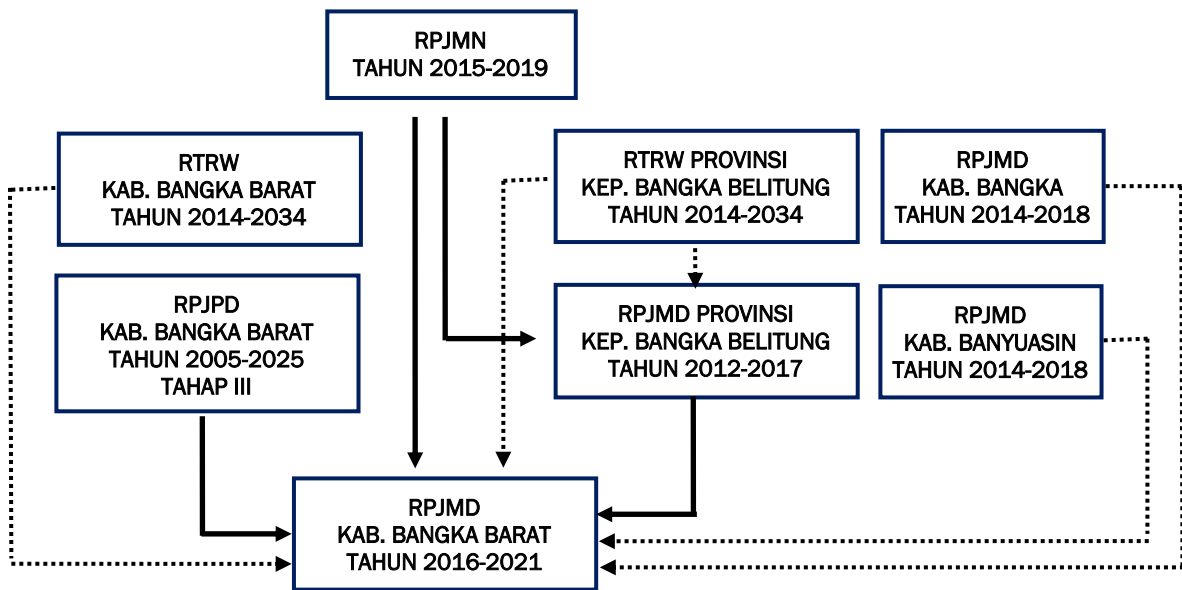
RPJMD merupakan penerjemahan yang tepat dan sistematis atas perspektif pembangunan yang berlaku secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dirumuskan dalam bentuk visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 memperhatikan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan di wilayah Kabupaten Bangka Barat yang telah tertuang di dalam RPJMN Tahun 2014-2019 serta juga memperhatikan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017

yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Kabupaten Bangka Barat. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2005-2025 (tahap III). Sesuai amanat peraturan perundangan, dalam penyusunan Dokumen RPJMD perlu juga memperhatikan RPJMD Kabupaten/Kota sekitar agar tercipta sinkronisasi dan sinergi antar kabupaten, dalam hal ini adalah Kabupaten Bangka dan Kabupaten Banyuasin.

Dalam penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 ini juga mempedomani dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 sesuai Perda Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014.

Secara ringkas, keterkaitan antara RPJMD dengan rangkaian dokumen lainnya, yaitu mulai dari RPJPD dan RTRW Kabupaten Bangka Barat sebagai panduan, serta RPJMN dan RPJMD provinsi untuk sinkronisasi serta memperhatikan dokumen RPJMD Kabupaten Bangka dan RPJMD Kabupaten Banyuasin sebagai daerah yang berbatasan langsung, digambarkan secara sistematis dalam bentuk diagram alur seperti dibawah ini:



Gambar 1.2 Keterkaitan Dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan tahap-tahap perumusan dokumen perencanaan, dalam sistematika RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 ini meliputi sebelas bab yang terdiri dari :

- BAB I Pendahuluan**
Berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dokumen RPJMD disusun, hubungan dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.
- BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah**
Menggambarkan kondisi umum daerah mencakup aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
- BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan**
Menggambarkan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.
- BAB IV Analisis Isu-isu Strategis**
Mengemukakan permasalahan-permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Bangka Barat.
- BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**
Berisi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.
- BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan**
Berisi strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta pentahapan arah kebijakan tiap tahunnya.
- BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah**
Menjelaskan kebijakan umum yang digunakan sebagai penentuan program pembangunan daerah.
- BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan**
Berisi semua program prioritas Kabupaten Bangka Barat yang disertai dengan pendanaan indikatif.
- Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah**
Menjelaskan penetapan indikator kinerja daerah yang menggambarkan target yang ditetapkan dan capaian keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan pada masa akhir periode masa perencanaan.
- Bab X Pedoman Masa Transisi dan Kaidah Pelaksanaan**
Berisi prinsip-prinsip pedoman masa transisi pada saat pergantian masa jabatan serta kaidah pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD.
- Bab XI Penutup**
Merupakan penutup dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat.

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 adalah untuk memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan di Kabupaten Bangka Barat secara sinergis.

Adapun tujuan penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 antara lain adalah :

- 1) Memberikan penjabaran visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ke dalam perencanaan strategis yaitu penjabaran lebih lanjut ke dalam rumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan untuk jangka waktu lima tahun;
- 2) Menyediakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Renstra Perangkat Daerah agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dalam dokumen RPJMD;
- 3) Menyediakan penjabaran dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif;
- 4) Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Bangka Barat memberikan gambaran tentang kondisi daerah serta capaian pembangunan Kabupaten Bangka Barat secara umum. Gambaran umum daerah menjadi pijakan awal terkait penyusunan rencana pembangunan lima tahun ke depan melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Rencana pembangunan suatu daerah disusun berdasarkan pertimbangan karakteristik serta kondisi wilayah agar pembangunan yang dilakukan dapat dijalankan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dengan melihat gambaran umum kondisi daerah berdasarkan data yang ada, dapat diketahui sisi mana yang menjadi kekuatan daerah, serta sisi mana yang menjadi kelemahan daerah, untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

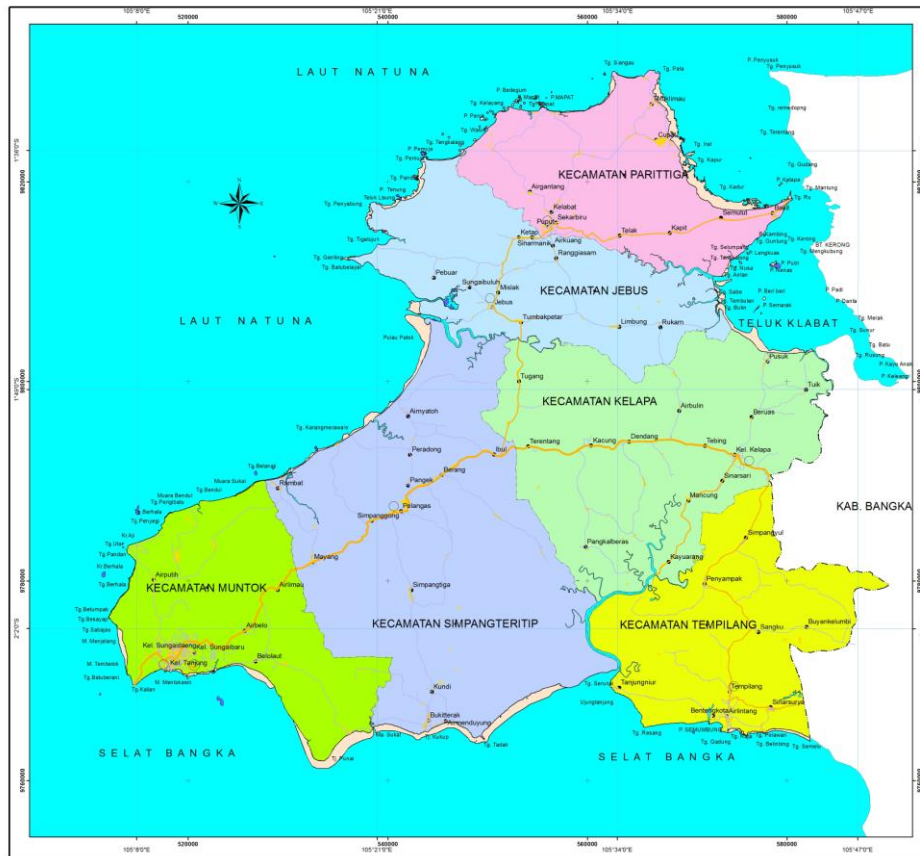
2.1.1 Karakteristik Wilayah Kabupaten Bangka Barat

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bangka Barat berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 memiliki luas wilayah 284.886,05 Ha.

Secara geografis, Kabupaten Bangka Barat terletak antara 105°00' – 106°00' Bujur Timur dan antara 01°00' – 02°10' Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah meliputi :

- Sebelah utara : Laut Natuna;
- Sebelah timur : Teluk Kelabat, Kecamatan Bakam, Kecamatan Puding Besar dan Kecamatan Mendo Barat (Kabupaten Bangka);
- Sebelah selatan : Selat Bangka; dan
- Sebelah barat : Selat Bangka.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Bangka Barat
 Sumber: RTRW Kab. Bangka Barat, Tahun 2014-2034

Kabupaten Bangka Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Bangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka. Sampai dengan saat ini, masih terjadi permasalahan terkait batas wilayah antara Kabupaten Bangka Barat dengan Kabupaten Bangka, salah satunya pada perbatasan wilayah Desa Buyan Kelumbi.

Secara administratif, Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 Kecamatan, 4 Kelurahan dan 60 Desa sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (ha)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1.	Muntok	3 kelurahan, 4 desa	36.795,25	12,92
2.	Simpangteritip	13 desa	78.447,89	27,54
3.	Kelapa	1 kelurahan, 13 desa	59.140,76	20,76

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (ha)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
4.	Tempilang	9 desa	39.019,21	13,70
5.	Jebus	11 desa	38.811,63	13,62
6.	Parittiga	10 desa	32.671,31	11,47
Total		4 kelurahan, 60 desa	284.886,05	100,00

Sumber : RTRW Kab. Bangka Barat Tahun 2014-2034

Kecamatan Simpangteritip memiliki wilayah terluas yaitu 27,54 persen dari wilayah Kabupaten Bangka Barat, sedangkan Kecamatan Parittiga memiliki wilayah terkecil yaitu sebesar 11,47 persen dari luas wilayah Kabupaten Bangka Barat. Jumlah kelurahan dan desa di setiap kecamatan relatif seimbang, dimana Kecamatan Kelapa memiliki jumlah desa dan kelurahan paling banyak dan Kecamatan Muntok memiliki jumlah desa dan kelurahan paling sedikit. Secara umum Kabupaten Bangka Barat tidak termasuk pada kategori daerah pedalaman, dan tidak ada wilayah di Kabupaten Bangka Barat yang letaknya terisolir atau terpencil yang sulit untuk diakses.

Kabupaten Bangka Barat merupakan wilayah kepulauan yang memiliki 36 pulau-pulau kecil dengan luasan \pm 214,85 ha dimana sebagian pulau belum berpenghuni. Kabupaten Bangka Barat memiliki kawasan pesisir yang cukup luas dengan panjang pantai sebesar 297,38 km. Wilayah kepulauan serta pesisir yang luas tersebut sampai dengan saat ini belum dimanfaatkan secara optimal sebagai daya tarik wisata.

2.1.1.2 Topografi, Geologi, Hidrologi dan Klimatologi

Topografi Kabupaten Bangka Barat secara umum adalah datar, dimana 4 persen berbukit, 51 persen berombak dan bergelombang, 20 persen datar, 25 persen rawa. Berdasarkan data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Bandung (1995), struktur dan karakteristik geologi Kabupaten Bangka Barat memiliki jenis batuan yang tersebar di seluruh kecamatan yaitu :

- a. Bongkah, kerakal dan kerikil, seluas 73.687,21 Ha
- b. Aluvial, seluas 4.538,03 Ha
- c. Granit, seluas 71.118,39 Ha
- d. Perselingan batu pasir, seluas 135.115,5 Ha
- e. Filit dan sekis, seluas 426,89 Ha.

Potensi kandungan mineral di wilayah Kabupaten Bangka Barat juga sangat beragam seperti kaolin di Kelabat, pasir kuarsa di Bakit, zirkon di Semulut, batu granit di Air Putih,

bauksit di Teluk Limau, serta mineral timah di daerah yang terkenal sejak zaman penjajahan dulu dengan istilah daerah sabuk timah. Terlepas dari berbagai potensi kandungan mineral yang besar tersebut, pemerintah kabupaten dibatasi dalam pengembangan dan pengelolaannya oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terkait hidrologi, Kabupaten Bangka Barat memiliki 87 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas keseluruhan 96.513 Ha, dimana DAS Mancung dengan luas 59.844 Ha merupakan DAS terluas. Kabupaten Bangka Barat memiliki 470 sungai yang tersebar di seluruh kecamatan. Secara umum, kerusakan lingkungan mulai terjadi pada DAS di Kabupaten Bangka Barat seperti mulai berkurangnya debit dan menurunnya kualitas air karena aktivitas masyarakat yang kurang memperhatikan lingkungan.

Iklm di Kabupaten Bangka Barat termasuk dalam iklim tropis dan basah, yaitu daerah dengan bulan basah selama 7–9 bulan dan bulan kering selama 3 bulan per tahun pada keadaan normal. Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Bangka Barat berkisar lebih dari 2.000 mm/tahun dengan jumlah hari hujan tahunan rata-rata lebih dari 200 hari/tahun. Variasi curah hujan berkisar antara 84,5 mm – 406,1 mm setiap bulannya dengan curah hujan terendah pada bulan Februari. Intensitas penyinaran matahari rata-rata bervariasi antara 19,0– 57,3 persen dengan tekanan udara antara 1008,9 – 1011,1 mbs. Arah angin terbanyak terjadi di bulan Desember dan Januari dari arah Utara, pada bulan April dari arah Barat kemudian pada bulan berikutnya bergeser ke arah Selatan, Tenggara dan Timur dan pada bulan November kembali ke arah Barat. Suhu udara per bulan berkisar antara 26,20° C sampai 27,80° C dengan tingkat kelembaban rata-rata 80 - 87 persen.

Dengan curah hujan yang cukup tinggi, tingkat persediaan air baik air tanah maupun air permukaan sangat memadai. Berdasarkan data curah hujan, Kabupaten Bangka Barat hampir sama dibandingkan dengan rata-rata curah hujan nasional (2.364,25 mm/tahun).

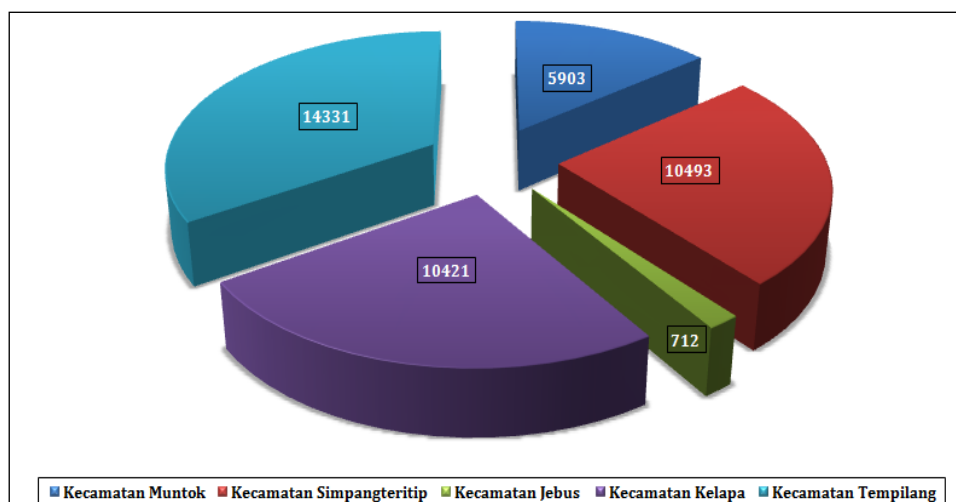
2.1.1.3 Peruntukan Lahan

Secara umum, peruntukan lahan Kabupaten Bangka Barat telah diatur dalam RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034. Rencana Pola Ruang Kabupaten Bangka Barat terdiri atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Untuk pengembangan wilayah Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan kawasan budidaya, secara detail diperuntukkan untuk kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perkotaan dan permukiman perdesaan, serta untuk kawasan peruntukan lainnya.

- a. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Bangka Barat tersebar di semua Kecamatan dengan total luasan mencapai ± 77.742 Ha yang terdiri dari hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan desa, serta hutan tanaman hasil rehabilitasi.
- b. Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Bangka Barat dengan total luasan ± 2.050 Ha juga tersebar di semua kecamatan. Kecamatan yang memiliki kawasan peruntukan hutan rakyat yang terluas yaitu Kecamatan Simpangteritip dengan luasan ± 851 Ha, dan diikuti dengan Kecamatan Kelapa dengan luasan ± 741 Ha.
- c. Kawasan peruntukan pertanian diklasifikasi menjadi peruntukan pertanian tanaman pangan, peruntukan pertanian hortikultur, peruntukan peternakan serta peruntukan perkebunan.

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan mempunyai luasan ± 15.812 Ha, akan tetapi sebagian besar kawasan tersebut (± 11.099) berada di kawasan hutan. Kawasan peruntukan pertanian hortikultur mempunyai luasan ± 1.598 Ha. Kawasan peruntukan peternakan terdapat di Kecamatan Kelapa, Kecamatan Muntok dan Kecamatan Jebus dengan luasan ± 72 Ha. Kawasan peruntukan perkebunan seluas ± 121.645 Ha dibagi menjadi dua jenis yaitu kawasan peruntukan perkebunan besar (± 41.860 Ha) serta kawasan peruntukan perkebunan rakyat (± 79.785 Ha).

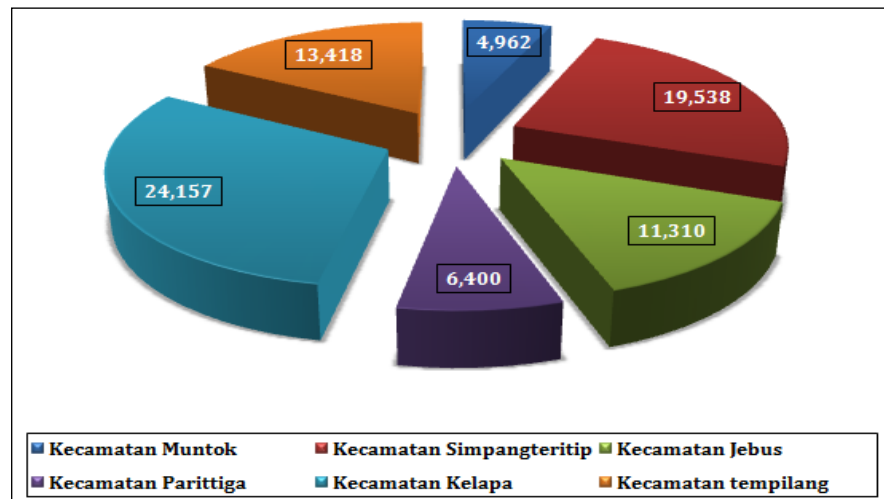
Kawasan peruntukan perkebunan besar di Kabupaten Bangka Barat tersebar hampir di semua kecamatan, kecuali Kecamatan Parittiga. Peruntukan perkebunan besar dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.2 Luasan Kawasan Peruntukan Perkebunan Besar per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat (hektar)

Sumber: RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, Tahun 2014

Kawasan peruntukan perkebunan rakyat di Kabupaten Bangka Barat tersebar di semua kecamatan. Dari luasan perkebunan rakyat sebesar ± 79.785 Ha , terdapat ± 166 Ha berada di kawasan hutan produksi. Secara detail luasan per kecamatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.3 Luasan Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat Per Kecamatan Kabupaten Bangka Barat (hektar)

Sumber: RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, Tahun 2014.

- d. Kawasan Peruntukan Perikanan secara umum dibagi menjadi tiga klasifikasi yaitu peruntukan perikanan tangkap, peruntukan budidaya perikanan (air tawar dan air payau) serta peruntukan pengolahan hasil perikanan. Kawasan peruntukan perikanan saat ini telah didukung dengan adanya pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berlokasi di Kecamatan Muntok, serta didukung oleh Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) yang berlokasi di Kecamatan Kelapa.
- Luasan kawasan budidaya perikanan yang terdiri dari budidaya air tawar dan air payau dikembangkan di hampir seluruh kecamatan dengan luas ± 11.899 ha.
- e. Kawasan Peruntukan Pertambangan di Kabupaten Bangka Barat tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat. Sampai dengan saat ini masih banyak kawasan peruntukan pertambangan yang belum dikelola dan ruang pasca tambang yang sampai dengan saat ini belum dimanfaatkan.
- f. Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Bangka Barat terdapat di Kecamatan Muntok yang dibagi menjadi dua kawasan industri yaitu Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) yang berlokasi di Desa Air Putih, Tanjung Ular dengan luas ± 1.275 Ha serta kawasan industri di Kelurahan Tanjung sekitar pantai Tanjung Kalian dengan luas ± 139 Ha.

- g. Kawasan Peruntukan Pariwisata di Kabupaten Bangka Barat dibagi menjadi dua jenis yaitu kawasan peruntukan pariwisata alam dan kawasan peruntukan pariwisata budaya.
- h. Kawasan peruntukan pariwisata dibagi menjadi tiga Satuan Kawasan Wisata (SKW) yaitu SKW I yang terdapat di Kecamatan Muntok dan Kecamatan Simpangteritip, SKW II yang terdapat di Kecamatan Jebus dan Kecamatan Parittiga, serta SKW III yang terdapat di Kecamatan Kepala dan Kecamatan Tempilang.
- i. Kawasan Peruntukan Perkotaan dan Permukiman Perdesaan di Kabupaten Bangka Barat tersebar di seluruh kecamatan. Luasan Kawasan Perkotaan yang ada yaitu ± 9.331 Ha serta luasan Kawasan Permukiman Perdesaan yang ada yaitu ± 11.987 Ha.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Bangka Barat

Kabupaten Bangka Barat memiliki posisi yang strategis sebagai pintu masuk regional Sumatera yang menggunakan jalur laut. Sistem perkotaan wilayah Kabupaten Bangka Barat meliputi susunan hirarki perkotaan antara lain Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), serta Pusat Pelayanan Lokal (PPL).

Berdasarkan RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, rencana pengembangan sistem perkotaan Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut :

- a. Kota Muntok ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- b. Kota Kelapa dan Kota Parittiga ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- c. Pelangas, Airputih, Jebus, Tempilang, Bakit dan Ibul ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta;
- d. Airnyatoh, Kundi, Rukam, Kapit, Cupat, Kacung, Pusuk, Kayuarang, Penyampak dan Sangku ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Lokal (PPL).

Dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun 2011-2025, salah satu koridor yang utama adalah Koridor Sumatera sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi. Pada tahun 2012 Kabupaten Bangka Barat ditetapkan sebagai salah satu daerah Kawasan Perhatian Investasi (KPI) dalam MP3EI. KPI merupakan satu atau kumpulan beberapa sentra produksi/kegiatan investasi yang beraglomerasi di area yang berdekatan. Kabupaten Bangka Barat posisinya sangat strategis karena merupakan pintu gerbang penghubung antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Koridor Sumatera. Jika peluang ini dimanfaatkan secara efektif dan optimal, maka Kabupaten Bangka Barat akan memainkan peran yang sangat strategis

sebagai pusat pertumbuhan wilayah, baik pada skala Kabupaten, Provinsi, regional Sumatera dan skala Nasional.

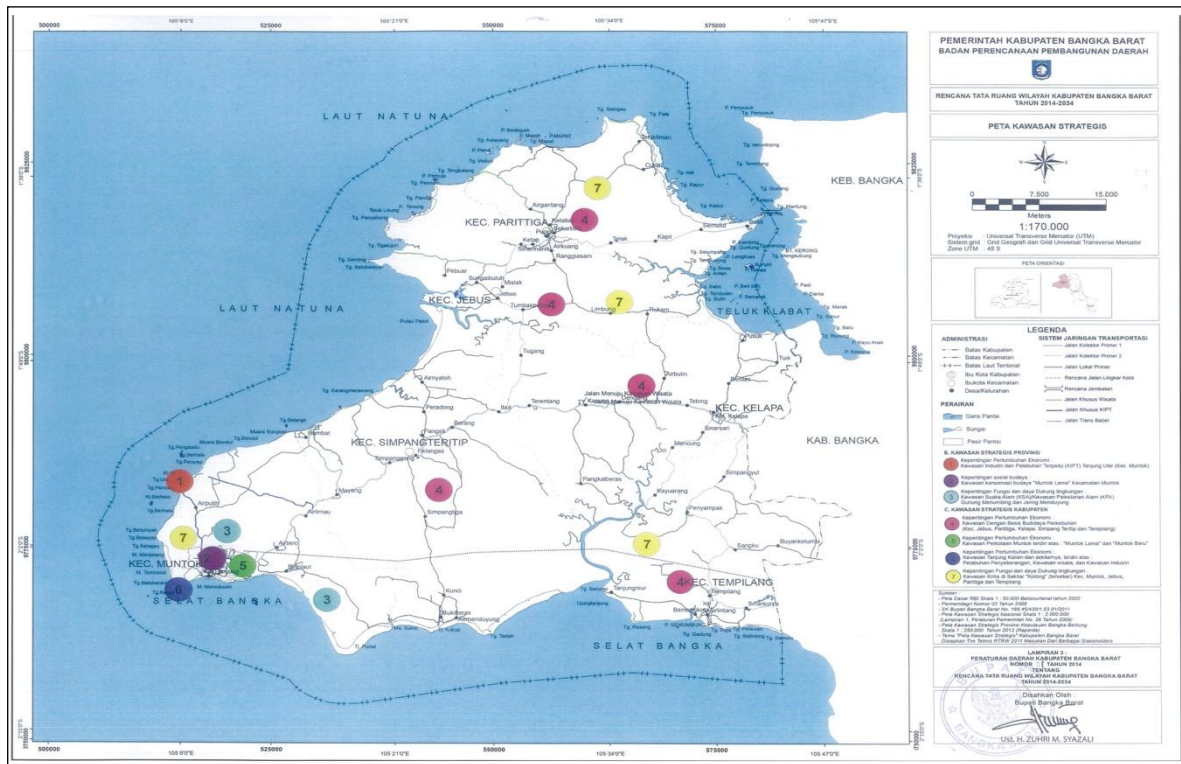
Dengan adanya potensi-potensi tersebut, pemerintah menetapkan beberapa kawasan strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan sebagai prioritas dalam rangka implementasi RTRW Kabupaten Bangka Barat meliputi:

a. Kawasan Strategis Provinsi :

- 1) Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yaitu Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular (Kecamatan Muntok).
- 2) Kepentingan sosial budaya yaitu Kawasan konservasi budaya "Muntok Lama" Kecamatan Muntok.
- 3) Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung lingkungan yaitu Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Gunung Menumbing dan Jering Menduyung.

b. Kawasan Strategis Kabupaten:

- 1) Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yaitu :
 - Kawasan dengan Basis Budidaya Perkebunan, yaitu Kecamatan Jebus, Kelapa, Simpang Teritip dan Tempilang.
 - Kawasan Perkotaan Muntok di Kecamatan Muntok terdiri atas "Muntok Lama" dan "Muntok Baru".
 - Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular di Kecamatan Muntok
 - Kawasan Tanjung Kalian dan sekitarnya, terdiri atas Pelabuhan Penyeberangan, Kawasan wisata, dan Kawasan Industri.
- 2) Kepentingan sosial dan budaya
Kawasan strategis yang ditetapkan adalah kawasan konservasi budaya Muntok Lama di Kecamatan Muntok yang akan dikembangkan dan ditata untuk pemanfaatan wisata budaya dan ilmu pengetahuan.
- 3) Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan yaitu Kawasan Kritis di sekitar "Kolong" tersebar di Kecamatan Muntok, Jebus, Parittiga dan Tempilang.



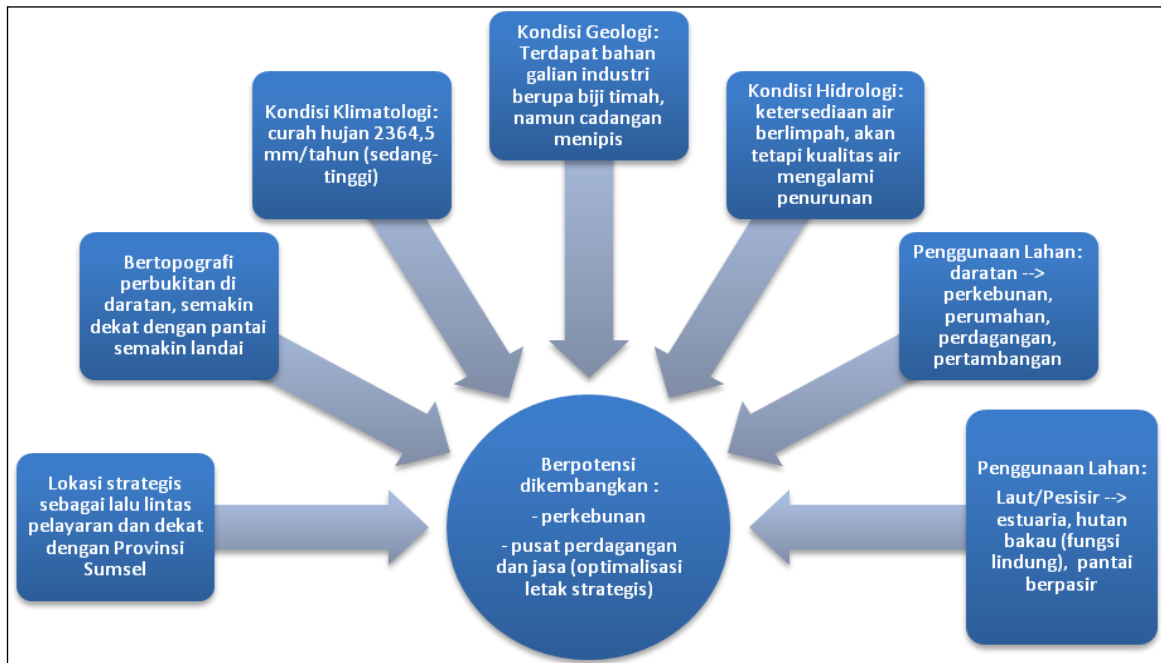
Gambar 2.4 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Bangka Barat
 Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Bangka Barat

Berdasarkan analisis dan kondisi alam lingkungan, potensi bahaya beraspek geologi di Kabupaten Bangka Barat yang utama adalah daerah berpotensi banjir/genangan dan daerah berpotensi abrasi.

Pada dasarnya di Kabupaten Bangka Barat jarang terjadi banjir yang besar. Banjir yang terjadi diakibatkan oleh faktor alam dan kerusakan lingkungan. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bangka Barat meliputi Kampung Tanjung, Kampung Ulu, dan Kampung Teluk Rubiah, Kelurahan Sungai Daeng, Kampung Culong, Ibukota Kecamatan Parittiga dan Desa Belo Laut. Sementara kawasan yang merupakan rawan abrasi pantai meliputi wilayah pesisir Kecamatan Muntok, Tempilang, Simpangteritip dan Parittiga.

Dari gambaran kondisi umum geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan kondisi wilayah rawan bencana, dapat tergambar keterhubungan ketiga kondisi tersebut sebagai berikut :



Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya
 Sumber : RPJPD Kab. Bangka Barat Tahun 2005-2025

Potensi pengembangan wilayah dengan mengoptimalkan kondisi geografis mengarah pada dua hal, yaitu potensi di sektor pertanian (dalam hal ini perkebunan) dan sektor perdagangan dan jasa. Perkebunan cenderung dapat dilakukan dengan kondisi topografi berupa perbukitan dan tanah yang memiliki tingkat kesuburan “sedang”. Sedangkan perdagangan dan jasa, dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan letak Kabupaten Bangka Barat sebagai jalur lalu lintas laut yang melewati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, keindahan ekosistem pantai dapat menjadi daya tarik tersendiri dan dimungkinkan untuk pengembangan sektor pariwisata sebagai turunan sektor perdagangan dan jasa.

2.1.4 Kondisi Demografi Kabupaten Bangka Barat

2.1.4.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat meningkat dari 163.514 jiwa pada tahun 2010 menjadi 206.293 jiwa pada tahun 2015. Tren pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bangka Barat secara umum mengalami penurunan pertumbuhan.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015

No.	TAHUN	PENDUDUK		JUMLAH	PERTUMBUHAN PENDUDUK
		L	P		
1	2010	84.613	78.901	163.514	
2	2011	92.707	86.580	179.287	9,65%
3	2012	98.663	92.229	190.892	6,47%
4	2013	103.995	97.206	201.201	5,40%
5	2014	104.382	97.921	202.303	0,55%
6	2015	106.457	99.836	206.293	1,97%
Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk					4,81%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, 2016

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bangka Barat dalam lima tahun terakhir relatif tinggi dengan kecenderungan mengalami penurunan di setiap tahunnya. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di tahun 2011-2013 sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan dari migrasi penduduk.

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kabupaten Bangka Barat lebih didominasi oleh laki-laki dengan proporsi 51,67 persen dibandingkan perempuan hanya sebanyak 48,33 persen dari jumlah penduduk.

Berdasarkan tempat tinggal di tahun 2015, Kecamatan Muntok merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 52.915 jiwa (25,65 persen), sedangkan Kecamatan Jebus merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling kecil yaitu sebanyak 22.458 jiwa (10,89 persen).

Tabel 2.3 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (ha)	Kepadatan Penduduk
1.	Muntok	52.915	36.795,25	0,70 ha/jiwa
2.	Simpangteritip	29.713	78.447,89	2,64 ha/jiwa
3.	Jebus	22.458	59.140,76	2,63 ha/jiwa
4.	Kelapa	34.951	39.019,21	1,12 ha/jiwa
5.	Tempilang	28.623	38.811,63	1,36 ha/jiwa
6.	Parittiga	37.633	32.671,31	0,87 ha/jiwa
	Total	206.293	284.886,05	1,38 ha/jiwa

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, 2016

2.1.4.2 Tingkat Struktur Penduduk

Penduduk di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2015 yang masuk dalam kategori penduduk produktif (usia 15 – 64 tahun) adalah sebanyak 137.551 jiwa atau 66,67 persen dari total keseluruhan penduduk. Kabupaten Bangka Barat mempunyai peluang untuk mendapatkan “bonus demografi” yang ditandai dengan rendahnya rasio ketergantungan (*dependence ratio*) penduduk non usia kerja terhadap penduduk usia kerja. struktur penduduk ini menggambarkan tingginya suplai angkatan kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*) dan kualitas sumber daya manusia (*human capital*). Tingkat ketergantungan penduduk non usia kerja terhadap penduduk usia kerja di Kabupaten Bangka Barat tidak lebih dari 50 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 2.4 Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015

Struktur Usia	Kecamatan						TOTAL
	Muntok	Simpang teritip	Jebus	Kelapa	Tempilang	Parittiga	
0-4 tahun	5,144	2,856	2,204	3,193	2,508	3,423	19,328
5-9 tahun	5,429	3,213	2,357	3,309	2,744	3,984	21,036
10-14 tahun	4,703	3,180	2,257	3,338	2,670	3,689	19,837
15-19 tahun	3,927	2,793	1,816	3,334	2,577	2,894	17,341
20-24 tahun	3,770	2,443	1,619	2,811	2,209	2,652	15,504
25-29 tahun	4,817	2,969	2,038	3,670	2,945	3,524	19,963
30-34 tahun	5,281	2,645	2,229	3,339	2,774	3,874	20,142
35-39 tahun	4,729	2,398	2,057	2,886	2,476	3,486	18,032
40-44 tahun	3,571	1,733	1,575	2,425	1,864	2,533	13,701
45-49 tahun	2,806	1,513	1,206	1,897	1,478	1,909	10,809
50-54 tahun	2,296	1,224	916	1,540	1,312	1,589	8,877
55-59 tahun	2,273	983	812	1,138	1,074	1,476	7,756
60-64 tahun	1,636	664	565	752	777	1,032	5,426
65-69 tahun	1,121	438	372	485	520	727	3,663
70-74 tahun	574	284	197	360	312	375	2,102
> 75 tahun	838	377	238	474	383	466	2,776
JUMLAH	52,915	29,713	22,458	34,951	28,623	37,633	206,293

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, 2016

2.1.4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat kualitas masyarakat di suatu wilayah. Sampai dengan saat ini, kualitas pendidikan penduduk di Kabupaten Bangka Barat masih sangat rendah. Lebih dari 70 persen penduduknya maksimal merupakan tamatan sekolah dasar saja serta penduduk berpendidikan diatas sekolah menengah atas tidak lebih dari 4 persen dari total keseluruhan penduduk. Dari gambaran data terkait pendidikan,

dapat disimpulkan bahwa *human capital* yang ada di Kabupaten Bangka Barat masih sangat minim, dan harus terus ditingkatkan dengan berbagai jenis arah kebijakan.

Tabel 2.5 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015

Tingkat Pendidikan	Muntok	Simpang teritip	Jebus	Kelapa	Tempilang	Parittiga	TOTAL
Tidak/belum sekolah	10,645	10,039	5,768	9,056	6,905	8,523	50,936
Belum tamat SD	6,428	4,755	3,152	4,762	4,074	5,545	28,716
Tamat SD/Sederajat	13,593	8,934	7,887	12,255	11,296	11,933	65,898
SLTP/Sederajat	6,793	2,979	2,511	3,774	2,826	5,996	24,879
SLTA/Sederajat	12,310	2,556	2,558	4,201	2,930	4,835	29,390
Diploma I & II	345	123	127	188	163	149	1,095
Diploma III	1,035	92	146	233	134	230	1,870
D IV dan Strata I	1,710	232	306	472	291	415	3,426
Strata II	55	3	3	9	3	7	80
Strata III	1	0	0	1	1	0	3
JUMLAH	52,915	29,713	22,458	34,951	28,623	37,633	206,293

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, 2016

2.1.4.4 Agama/Kepercayaan Masyarakat

Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat di Kabupaten Bangka Barat yaitu sebanyak 91,20 persen dan diikuti oleh penganut agama Budha sebanyak 4,88 persen, kepercayaan Konghucu sebanyak 1,89 persen, Kristen Katolik sebanyak 1,5 persen, Kristen Protestan sebanyak 0,52 persen dan Hindu sebanyak 0,02 persen. Toleransi antar pemeluk agama/kepercayaan sangat dijunjung tinggi dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat, sehingga kasus perpecahan yang berhubungan dengan SARA tidak pernah terjadi di Bumi Sejiran Setason ini.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

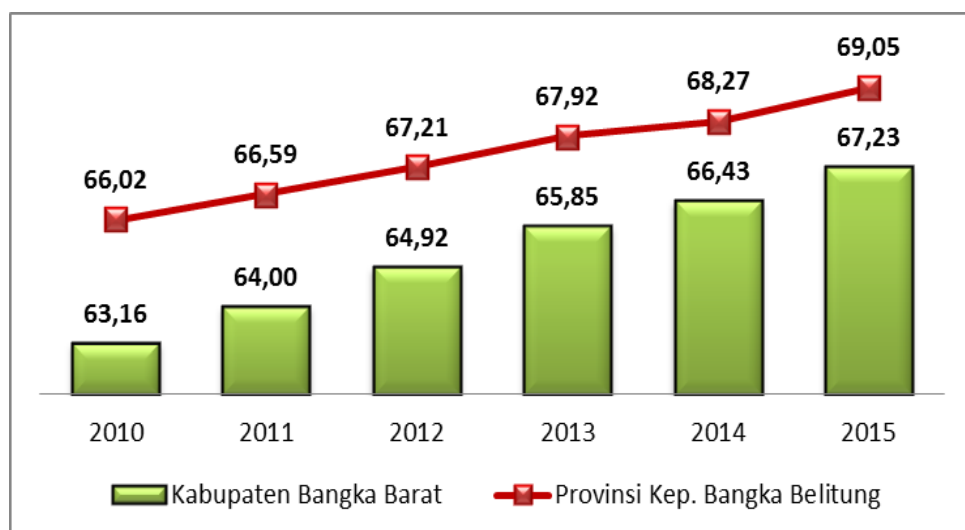
Analisis kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ditinjau melalui empat aspek, yaitu (1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); (2) PDRB per Kapita; (3) Angka Kemiskinan; dan (4) Angka Kriminalitas. Selanjutnya, melalui analisis empat aspek ini diharapkan mampu

memproyeksikan rencana pembangunan jangka menengah dalam aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

2.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Jika dilihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mulai tahun 2010 sampai tahun 2015, tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat cukup baik yang ditunjukkan dengan indeks yang meningkat meskipun tidak terlalu besar, yaitu dengan rata-rata peningkatan per tahun 0,81.

Meskipun terjadi peningkatan, namun jika dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, IPM Kabupaten Bangka Barat tergolong masih rendah, bahkan selama empat tahun terakhir selalu menduduki peringkat ke-6. Jika IPM Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2015 (nilai IPM sebesar 67,23) dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (nilai IPM sebesar 69,05) dan nasional (nilai IPM sebesar 69,55), maka IPM Kabupaten Bangka Barat masih cukup jauh tertinggal. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk merumuskan strategi dan program yang dapat meningkatkan kinerja khususnya di sektor-sektor pendukung IPM.



Gambar 2.6 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat, 2016

2.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak pembangunan yang dilaksanakan di suatu wilayah, khususnya di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Untuk melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) secara berkala.

Tabel 2.6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (persentase)

Kategori	LAPANGAN USAHA	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,44	8,00	11,16	8,57	6,42
B	Pertambangan dan Penggalian	2,88	3,89	0,01	1,04	2,25
C	Industri Pengolahan	3,42	2,56	1,94	2,66	3,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas	23,86	14,08	8,13	9,03	4,66
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,89	3,21	5,84	6,26	7,27
F	Konstruksi	12,12	14,58	13,27	5,96	8,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,93	11,90	11,05	9,23	7,22
H	Transportasi dan Pergudangan	8,11	6,77	9,94	5,17	5,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,88	11,90	13,67	11,35	5,17
J	Informasi dan Komunikasi	8,23	7,92	9,28	7,63	8,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,42	11,43	11,53	9,09	4,58
L	Real Estate	10,92	9,92	12,15	9,76	4,61
M,N	Jasa Perusahaan	7,18	9,57	7,31	7,08	4,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14,62	10,08	10,54	9,21	9,55
P	Jasa Pendidikan	11,99	10,37	11,87	9,42	9,63
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,07	12,11	10,69	8,21	8,58
R,S,T,U	Jasa lainnya	13,25	8,45	8,38	8,50	8,66
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,51	5,49	5,09	4,69	4,73

Keterangan : *) angka sementara

**) angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2016

Selama kurun waktu tahun 2011 - 2015 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,10 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 5,51 persen dan pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 4,73 persen. Dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi di atas, sudah menggunakan tahun dasar 2010 sebagai tahun dasar baru yang sebelumnya menggunakan tahun dasar 2000. Kabupaten Bangka Barat secara

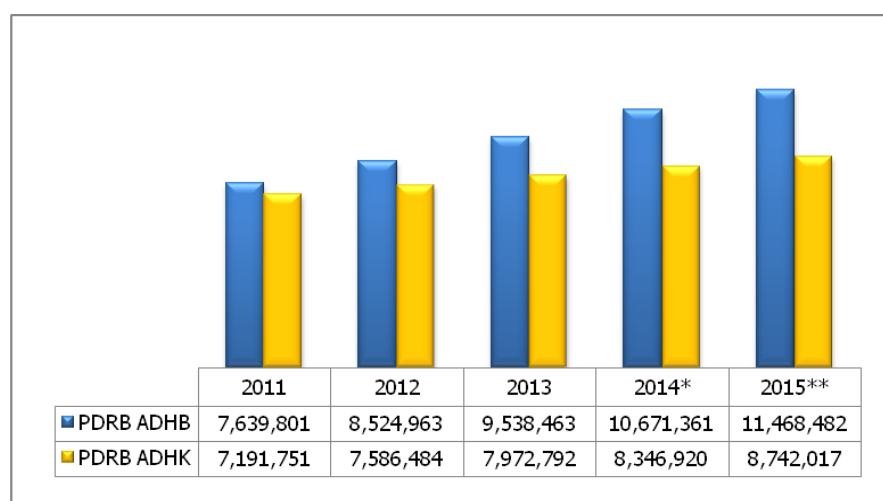
umum ditopang oleh subsektor industri pengolahan serta subsektor pertambangan dan penggalian. Kondisi ini merupakan "warning" karena tahun 2013 merupakan titik balik, yaitu terjadi "declining growth" dari yang semula pada empat tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi terjadi secara linier dengan tren terus meningkat. Faktor utama yang ditengarai menjadi penyebab hal ini terjadi adalah menurunnya produksi bijih timah di tahun 2013.

Jika dilihat secara parsial pada tahun 2015, dari 17 kategori, 7 diantaranya laju pertumbuhannya mengalami perlambatan, sedangkan 10 kategori lainnya meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, masing-masing kategori laju pertumbuhannya positif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Jasa Pendidikan sebesar 9,63 persen, sedangkan pertumbuhan yang paling rendah adalah pada kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 2,25 persen.

Perlu dicermati pada pertumbuhan dalam lima tahun terakhir ada beberapa sektor yang tetap stabil namun ada juga beberapa sektor yang mengalami anomali dengan fluktuasi yang sangat tajam.

2.2.1.3 Perkembangan PDRB Kabupaten Bangka Barat

Kondisi perekonomian Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2015 secara umum menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari total PDRB yang diperoleh pada tahun 2015 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp 11.468.482 juta, meningkat sebesar 7,47 persen dibandingkan tahun 2014, namun dalam peningkatan ini masih terdapat faktor kenaikan harga.



Keterangan : *) angka sementara **) angka sangat sementara

Gambar 2.7 PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015 (juta rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2016

Dalam PDRB tahun 2015, Badan Pusat Statistik telah menggunakan tahun dasar 2010 menggantikan tahun dasar 2000 yang sebelumnya digunakan. Peningkatan PDRB di Kabupaten Bangka Barat terus mengalami peningkatan baik yang menggunakan harga berlaku maupun menggunakan harga konstan.

2.2.1.4 Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh program dan sasaran yang telah dicapai pada satu periode tertentu. Peranan setiap sektor terhadap PDRB dapat dilihat dari sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB setiap tahunnya. Melalui data peranan masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB, dapat dilihat seberapa jauh keberhasilan dari kebijakan yang telah dilakukan. Dengan kata lain, analisis ini dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Tabel 2.7 Kontribusi Sektor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015 (persentase)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,03	12,54	13,40	13,90	14,38
B	Pertambangan dan Penggalian	14,83	14,16	13,06	12,45	11,81
C	Industri Pengolahan	49,94	48,21	47,21	45,79	43,64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	4,42	4,91	5,30	5,53	5,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,87	10,64	10,83	11,52	12,55
H	Transportasi dan Pergudangan	0,78	0,79	0,85	0,86	0,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,88	0,94	1,02	1,07	1,11
J	Informasi dan Komunikasi	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,30	0,34	0,36	0,38	0,39
L	Real Estate	1,58	1,69	1,81	1,88	1,96
M,N	Jasa Perusahaan	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,05	3,31	3,59	3,85	4,21
P	Jasa Pendidikan	1,11	1,22	1,30	1,42	1,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,54	0,58	0,59	0,64	0,71
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,23	0,23	0,23	0,25	0,27
PDRB ADHB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan : *) angka sementara **) angka sangat sementara
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2016.

Tabel 2.8 Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015 (persentase)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,95	12,24	12,94	13,42	13,64
B	Pertambangan dan Penggalian	15,03	14,81	14,09	13,60	13,28
C	Industri Pengolahan	50,24	48,84	47,38	46,46	45,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	4,40	4,78	5,15	5,21	5,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,63	10,21	10,79	11,26	11,52
H	Transportasi dan Pergudangan	0,77	0,78	0,82	0,82	0,83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,85	0,90	0,97	1,03	1,04
J	Informasi dan Komunikasi	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,32	0,34	0,36	0,37	0,37
L	Real Estate	1,61	1,68	1,79	1,88	1,87
M,N	Jasa Perusahaan	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,90	3,03	3,18	3,32	3,47
P	Jasa Pendidikan	1,09	1,15	1,22	1,27	1,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,54	0,57	0,60	0,62	0,64
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,23	0,24	0,24	0,25	0,26
PDRB ADHB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat, 2016

Dari data di atas, sektor yang berperan paling besar terhadap pembentukan PDRB ADHB maupun ADHK Kabupaten Bangka Barat di tahun 2015 masih pada sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 43,64 persen pada PDRB ADHB dan 45,86 persen pada PDRB ADHK, walaupun jika dilihat trend data lima tahun terakhir kontribusinya selalu menurun di setiap tahunnya.

Jika dilihat dari kontribusi masing-masing sektor, peningkatan terjadi pada semua sektor dan yang tertinggi setelah sektor industri pengolahan adalah pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kedua sektor tersebut merupakan sektor-sektor unggulan yang berkontribusi besar untuk perekonomian Kabupaten Bangka Barat dan terlihat berkembang secara stabil dan terus meningkat. Kedua sektor ini menunjukkan potensi untuk

dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang dikarenakan sebagian besar masyarakat bergelut di sektor tersebut, sebagai alternatif sumber ekonomi Kabupaten Bangka Barat selain pertambangan dan penggalian yang semakin melambat dan sudah kurang cocok dengan konsep *green economy* yang mulai dicanangkan secara global.

Pada tabel 2.8 terlihat bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan 2015, struktur perekonomian di Kabupaten Bangka Barat relatif tidak banyak mengalami perubahan. Pada tahun 2015 sektor sekunder masih mendominasi perekonomian dengan total kontribusi sebesar 49,66 persen, diikuti sektor primer berkontribusi sebesar 26,19 persen dan sektor tersier memberikan kontribusi sebesar 24,15 persen.

Jika dilihat lebih detail terkait sektor primer, peranan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan sektor pertambangan dan penggalian tercatat masing-masing sebesar 14,38 persen dan 11,81 persen. Jika dilihat dari tren data lima tahun terakhir, penyokong sektor primer ini mengalami perubahan, dimana semula lebih didominasi sektor pertambangan dan penggalian kemudian beralih ke sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami peningkatan kontribusi yang ditopang oleh peningkatan kontribusi subsektor tanaman perkebunan yang tercatat paling besar di sektor pertanian dengan kontribusi 73,06 persen dari nominal sektor pertanian. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian, komoditas timah yang termasuk dalam sub sektor pertambangan bijih logam merupakan hasil tambang memberikan kontribusi terbesar sebesar 87,57 persen dari nominal sektor pertambangan dan penggalian.

Sementara itu sektor sekunder pada tahun 2015 memberikan kontribusi sebesar 49,66 persen dari total PDRB dengan penyumbang kontribusi terbesar dari industri pengolahan, meskipun distribusinya terhadap struktur PDRB di Kabupaten Bangka Barat selalu mengalami penurunan pada lima tahun terakhir.

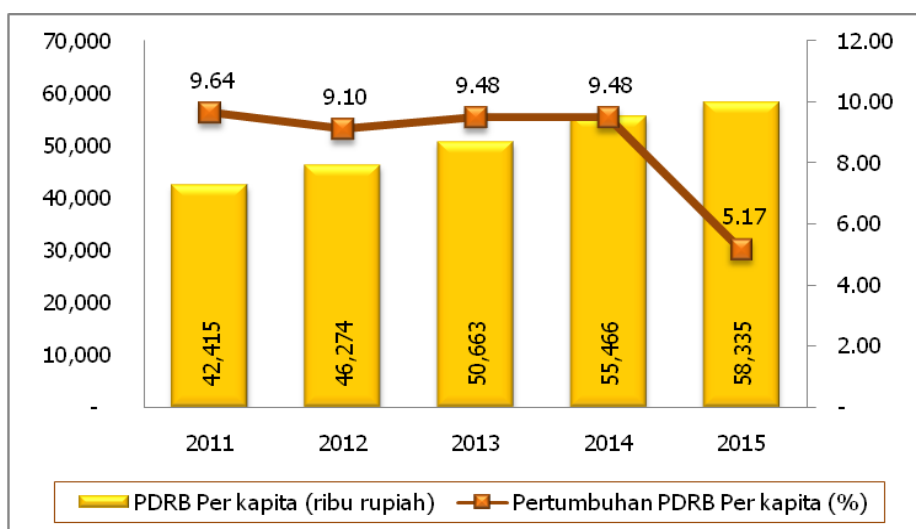
Di sisi lain, sektor tersier memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Bangka Barat sebesar 24,15 persen dan selalu mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Yang paling dominan berkontribusi pada sektor tersier adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 51,96 persen dari nominal pembentukan sektor tersier.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Bangka Barat masih memiliki ketergantungan yang tinggi kepada sub sektor industri pengolahan logam dasar yaitu pengolahan logam timah. Kelangsungan industri pengolahan timah ini ditopang oleh produksi komoditas timah dari sektor pertambangan sebagai bahan baku

utamanya, namun dari tahun ke tahun kecenderungan produksi timah semakin berkurang, sejalan dengan sumber daya alam yang memang tidak dapat diperbaharui. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena Kabupaten Bangka Barat tidak akan selamanya menggantungkan perekonomian kepada produksi sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui seperti timah.

2.2.1.5 PDRB per Kapita

PDRB per kapita adalah PDRB yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. PDRB per kapita suatu tahun diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB tahun tersebut dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun tersebut. Indikator ini merupakan salah satu ukuran makro yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian dan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah, artinya berapa nilai tambah yang dapat dinikmati setiap penduduk secara rata-rata dalam satu tahun. Kenaikan PDRB per kapita merupakan indikasi awal dari perekonomian masyarakat yang semakin baik.



Gambar 2.8 PDRB per Kapita Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 – 2015 (dalam ribu rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2016

Pada gambar di atas dapat kita cermati bahwa pada tahun 2015, PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat tumbuh sebesar 5,17 persen, menurun dari tahun 2014 dengan pertumbuhan sebesar 9,48 persen. Pada tahun 2015, PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat mencapai 58,33 juta rupiah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan hingga 37,53 persen. Sementara itu, laju pertumbuhan PDRB per kapita

berturut-turut selama kurun waktu 2011-2015 adalah 9,64 persen, 9,10 persen, 9,48 persen, 9,48 persen dan 5,17 persen. Melihat kondisi tersebut, maka masih cukup baik karena pertumbuhan PDRB per kapita masih lebih cepat dari pertumbuhan penduduk.

Tingkatan PDRB per kapita ini menunjukkan bahwa perekonomian dan tingkat kemakmuran penduduk Kabupaten Bangka Barat secara umum semakin membaik dari tahun ke tahun meskipun pertumbuhannya semakin menurun. Tantangan selanjutnya bagi pemerintah daerah adalah memastikan bahwa peningkatan perekonomian makro yang terjadi setiap tahunnya secara nyata dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat karena tingginya pendapatan yang diikuti ketimpangan yang juga tinggi mengindikasikan nilai tambah yang tercipta lebih banyak mengalir ke luar daerah.

2.2.1.6 Angka Kemiskinan

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangka Barat cenderung menurun yaitu dari 5,25 persen di tahun 2010 menjadi 3,15 persen di tahun 2014, sehingga persentase penduduk di atas garis kemiskinan pun meningkat yaitu dari 94,75 persen di tahun 2010 menjadi 96,85 persen di tahun 2014. Garis kemiskinan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2010 sebesar Rp 271.761,00 menjadi Rp. 388.493,00 di tahun 2014. Tren garis kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat semakin meningkat seiring dengan kenaikan harga barang yang disebabkan oleh inflasi.

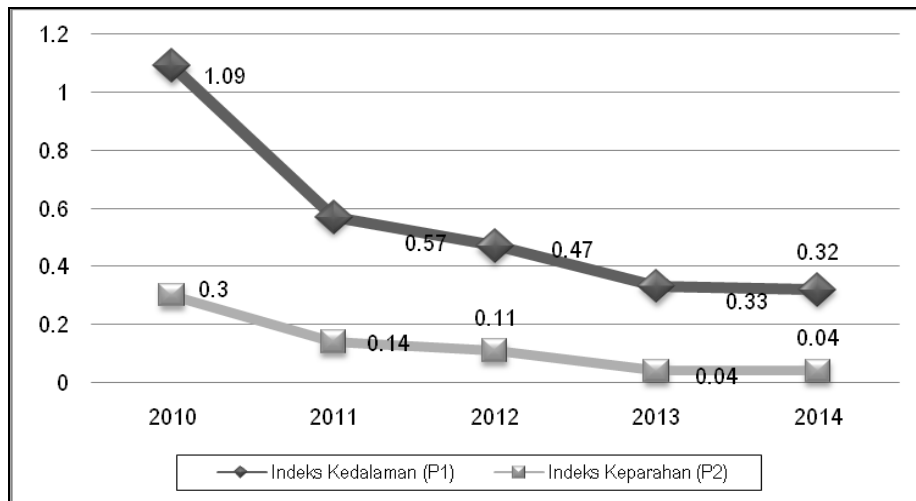
Tabel 2.9 Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin dan di Atas Garis Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Garis Kemiskinan (Rp)	271.761	305.500	331.971	366.365	388.493
Persentase Penduduk Miskin	5,25	3,59	3,72	3,26	3,15
Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	94,75	96,41	96,28	96,74	96,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat, 2015

Dilihat dari Indeks Kedalaman (P1) Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat, turut mengalami penurunan yaitu dari 1,09 pada tahun 2010, menjadi 0,32 pada tahun 2014. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa masyarakat yang masuk dalam kategori miskin memiliki rata-rata pengeluaran tidak begitu jauh dari garis kemiskinan yang ditetapkan. Dengan melakukan intervensi program, maka kemiskinan tidak terlalu sulit untuk ditanggulangi. Gambaran kemiskinan yang ditinjau dari Indeks Keparahan (P2) di Kabupaten Bangka Barat juga mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan penurunan dari tahun 2010

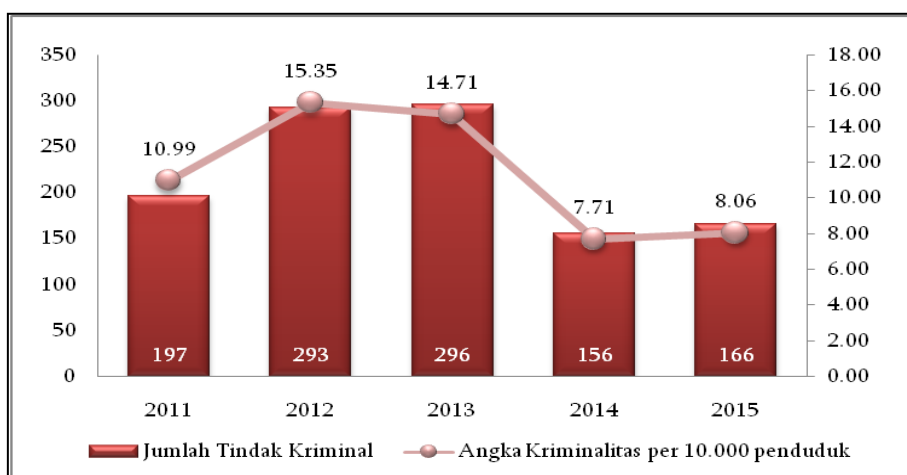
sebesar 0,3 menjadi 0,04 di tahun 2014. Hal ini diartikan ketimpangan antar penduduk miskin yang ada di Kabupaten Bangka Barat semakin kecil.



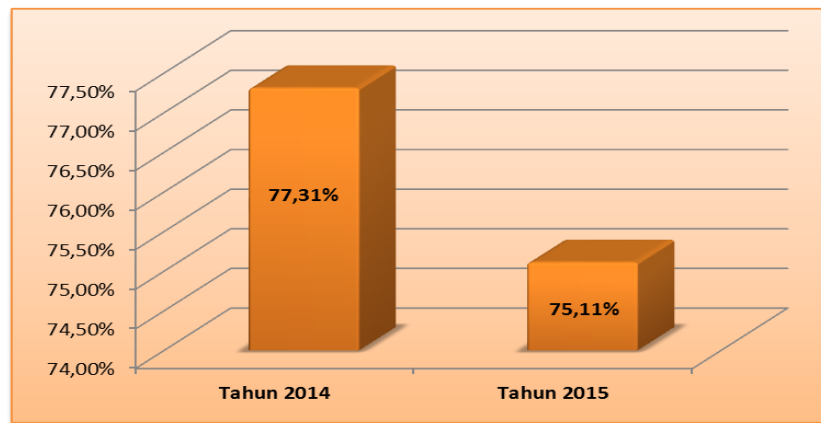
Gambar 2.9 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2014
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat, 2015

2.2.1.7 Angka Kriminalitas yang Tertangani

Angka kriminalitas sangat terkait dengan angka kemiskinan, tingkat ekonomi, angka pengangguran dan aspek sosial lainnya sehingga angka kriminalitas menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Selama kurun waktu 2010-2015, angka kriminalitas di Kabupaten Bangka Barat berfluktuasi. Secara rata-rata tindak kriminal tertinggi setiap tahun adalah pada kasus pencurian dan perjudian.



Gambar 2.10 Perkembangan Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015
Sumber : Polres Kab. Bangka Barat, 2016



Gambar 2.11 Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2015 (persentase)

Sumber : Polres Kab. Bangka Barat, 2016

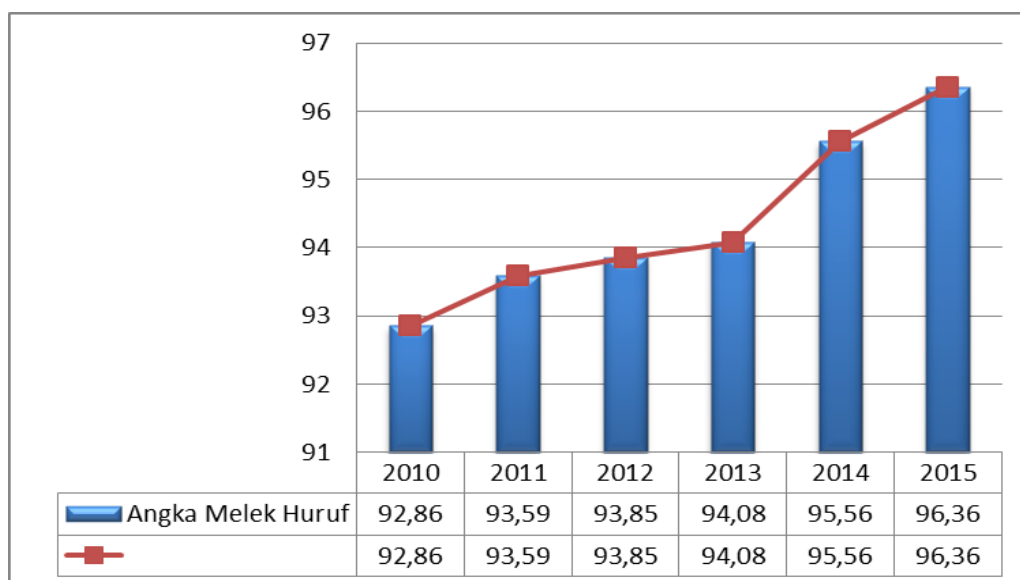
Berdasarkan Gambar 2.10 terlihat bahwa jumlah tindak pidana paling tinggi terjadi pada tahun 2013, yaitu sebanyak 296 kasus. Jumlah tindak pidana berkurang drastis dari tahun 2013 ke tahun 2014, yaitu dari 296 kasus menjadi 156 kasus, namun mengalami sedikit peningkatan kembali pada tahun 2015, yaitu menjadi sebanyak 166 kasus. Sementara untuk tren penyelesaian tindak pidana dari tahun 2014 ke tahun 2015 cenderung menurun yaitu dari sebanyak 77,31 persen menjadi 75,11 persen.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

PENDIDIKAN

2.2.2.1 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap keseluruhan penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 2.12 AMH Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015

Sumber: BPS Kab. Bangka Barat, Tahun 2016

Pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir AMH Kabupaten Bangka Barat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 AMH Kabupaten Bangka Barat hanya mencapai 92,86 persen namun di tahun 2015 menjadi 96,36 persen.

2.2.2.2 Angka Partisipasi Pendidikan

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah dikenal beberapa indikator antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Sementara APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang

bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah.

Tabel 2.10 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015

No.	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Partisipasi Kasar						
1.	SD/MI	115,2	114,15	113,5	110,07	99,88
2.	SMP/MTs	86,06	87,56	94	72,56	82,21
3.	SMA/MA/SMK	64,16	65,46	76,34	59,97	67,96
Angka Partisipasi Murni						
1.	SD/MI	95,92	95,97	96,04	94,14	85,45
2.	SMP/MTs	54,23	76,93	77,05	50,74	55,36
3.	SMA/MA/SMK	42,4	42,55	42,63	37,23	40,21

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Tahun 2016

Dari data tabel diatas, dapat dilihat bahwa partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Bangka Barat tinggi, namun semakin tinggi jenjang pendidikan angka partisipasi semakin menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena siswa masih banyak yang lebih memilih untuk melanjutkan sekolah ke kota/daerah lain dan juga disebabkan karena kesadaran ataupun kemauan masyarakat untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi masih kurang.

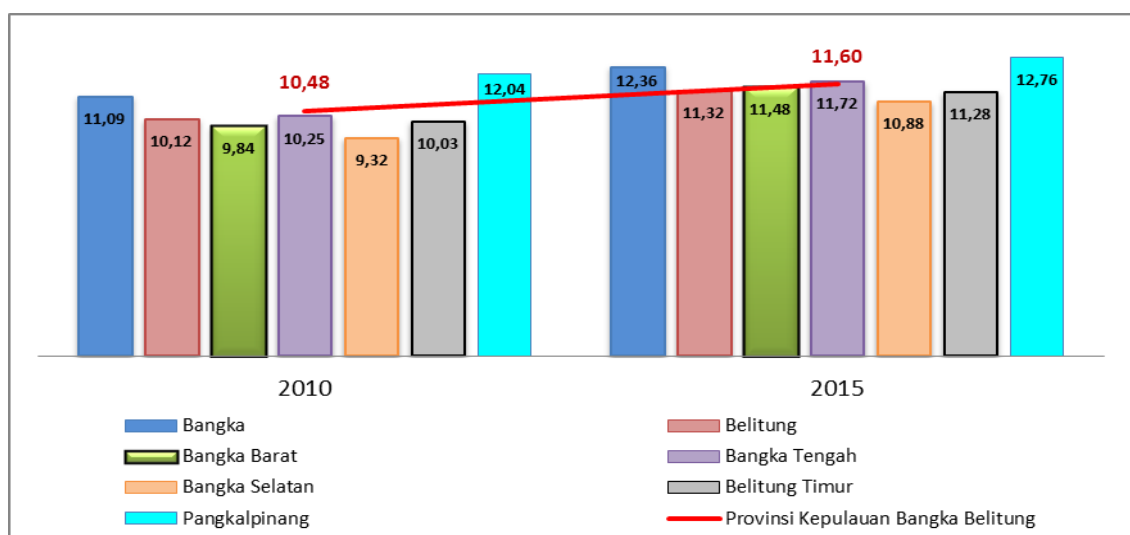
Secara rata-rata dalam lima tahun terakhir, nilai APK untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) adalah 110,56 persen. Sementara nilai rata-rata APM jenjang sekolah dasar pada lima tahun terakhir adalah 93,50 persen. Nilai APK yang lebih dari 100 persen dapat disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetap masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar dijenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Untuk rata-rata APK jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam lima tahun terakhir adalah 84,48 persen. Sedangkan rata-rata APM jenjang sekolah menengah pertama sebesar 62,86 persen. Dari data tersebut terjadi *gap* yang cukup besar baik nilai APK maupun APM antara SD ke SMP.

Rata-rata APK pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) selama lima tahun terakhir adalah 66,78 persen dan rata-rata nilai APM sebesar 41 persen. Terjadi *gap* yang serupa seperti pada tingkat SD dan SMP, dimana nilai APK maupun APM SMA lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat SMP. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan di Kabupaten Bangka Barat terlihat semakin rendah minat anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan.

2.2.2.3 Angka Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*)

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. AHLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. AHLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

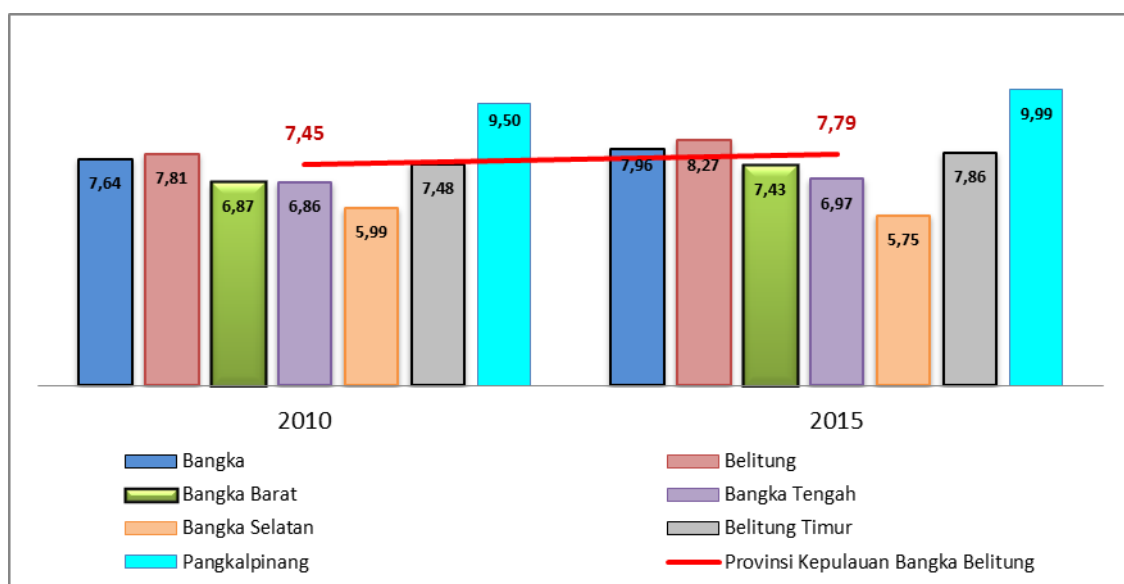


Gambar 2.13 Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 dan 2015
Sumber: BPS Kab. Bangka Barat, Tahun 2016

Jika dilihat dari gambar diatas, capaian AHLS Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan dari 9,84 pada tahun 2010 menjadi 11,48 pada tahun 2015 (membaik). Namun jika dibandingkan dengan capaian Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015, Kabupaten Bangka Barat berada pada posisi ke-4 setelah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah. Capaian pada tahun 2015 Kabupaten Bangka Barat ini pula berada dibawah rata-rata capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 11,60 tahun.

2.2.2.4 Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling*)

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.



Gambar 2.14 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 dan 2015
Sumber: BPS Kab. Bangka Barat, Tahun 2016

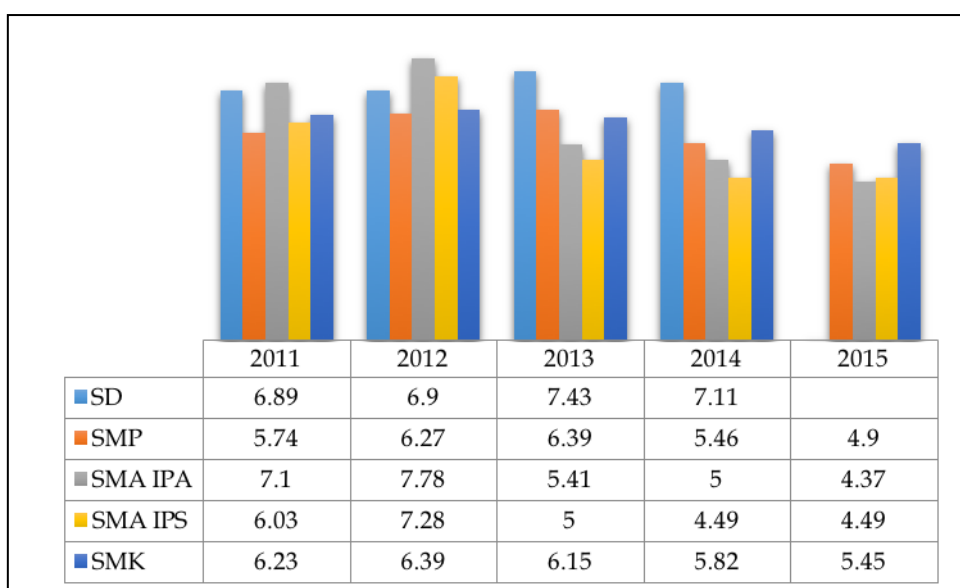
Jika dilihat dari gambar diatas, capaian rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan dari 6,87 pada tahun 2010 menjadi 7,43 pada tahun 2015 (membaik). Namun jika dibandingkan dengan capaian Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015, Kabupaten Bangka Barat berada pada posisi ke-5 setelah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung Timur. Capaian pada tahun 2015 Kabupaten Bangka Barat berada di bawah rata-

rata capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 7,79. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas masyarakat Kabupaten Bangka Barat di sisi pendidikan masih rendah.

2.2.2.5 Rata-rata Nilai Ujian Nasional

Sementara jika dilihat dari kualitas pendidikan siswa yang diukur dari rata-rata nilai ujian nasional, maka selama kurun waktu empat tahun terakhir menunjukkan trend penurunan di semua jenjang pendidikan. Hal ini sejalan dengan peringkat nilai rata-rata ujian nasional Kabupaten Bangka Barat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu membandingkan nilai rata-rata ujian nasional siswa lulusan Kabupaten Bangka Barat untuk setiap jenjang pendidikan (kecuali SD) dengan nilai rata-rata siswa kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka capaian peringkat nilai rata-rata ujian nasional Kabupaten Bangka Barat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami penurunan.



Gambar 2.15 Perkembangan Nilai Ujian Nasional di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015

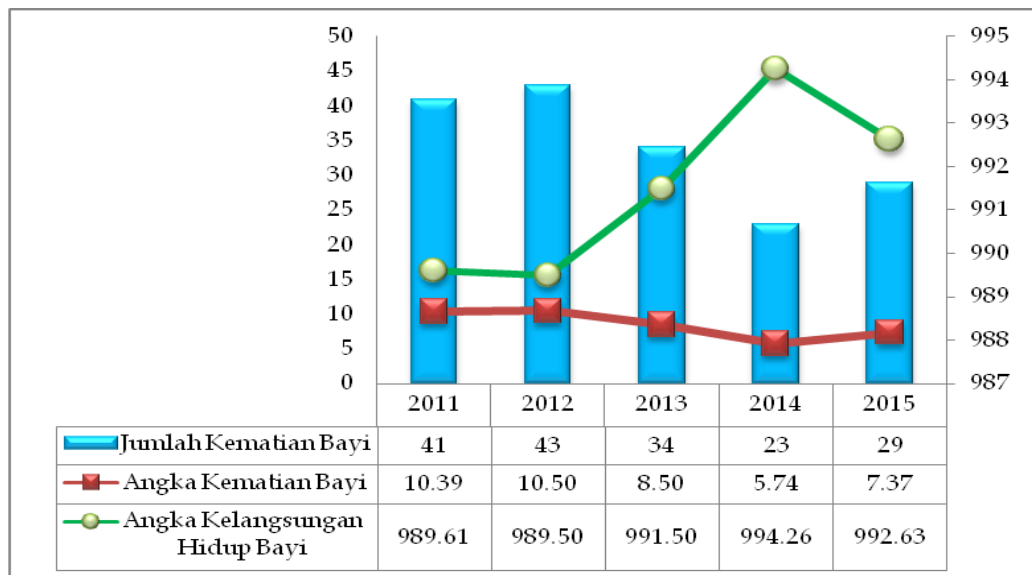
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Tahun 2016.

KESEHATAN

Beberapa indikator bidang kesehatan menunjukkan bahwa kualitas masyarakat Kabupaten Bangka Barat dari sisi kesehatan belum sesuai dengan harapan. Permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada dapat diminimalisasi dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan yang optimal.

2.2.2.6 Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0-1 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. AKB merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan masyarakat karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat tinggal dan sangat erat hubungannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian AKB merupakan tolak ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya bidang kesehatan.



Gambar 2.16 Jumlah Kematian Bayi, Angka Kematian Bayi dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1.000 kelahiran hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015
Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2016

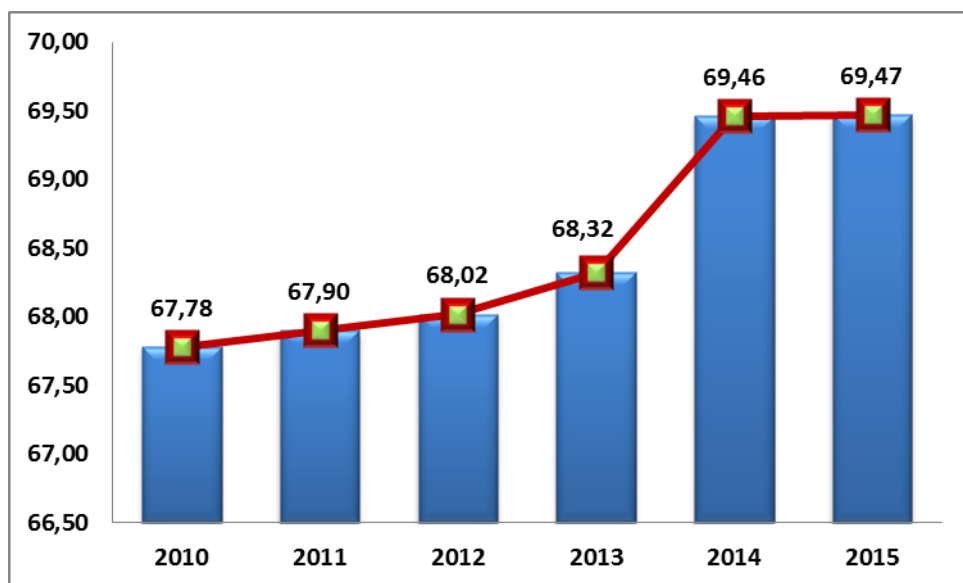
Jumlah kematian bayi usia 0-1 tahun di Kabupaten Bangka Barat berfluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2011 jumlah kematian bayi sebanyak 41 jiwa, sedangkan pada tahun 2012 meningkat menjadi 43 jiwa. Kondisi ini terus membaik dengan penurunan signifikan di tahun 2013 menjadi 34 jiwa dan di tahun 2014 sebanyak 23 jiwa. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan kematian bayi dengan jumlah sebanyak 29 jiwa.

Diantara beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat AKB adalah pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya. Hal ini disebabkan karena AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Faktor lainnya adalah perbaikan kondisi ekonomi yang

tercermin dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang berkontribusi terhadap perbaikan gizi sehingga berdampak positif pada daya tahan bayi terhadap penyakit. Di sisi lain, terdapat faktor negatif yang juga mempengaruhi AKB, antara lain masih adanya persalinan yang ditangani oleh dukun beranak/dukun bayi, infeksi pada ibu hamil, gizi ibu dan bayi yang kurang baik, kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang kehamilan dan bayi baru lahir, serta sarana prasarana yang belum memadai khususnya alat kesehatan PONED. Tren Angka Kelangsungan Hidup Bayi cenderung meningkat. Terlihat dari tahun 2011 terdapat 989 bayi hidup dari 1000 kelahiran hingga pada tahun 2015 terdapat 992 bayi hidup dari 1000 kelahiran.

2.2.2.7 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah, pada suatu tahun tertentu dan dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.



Gambar 2.17 Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015

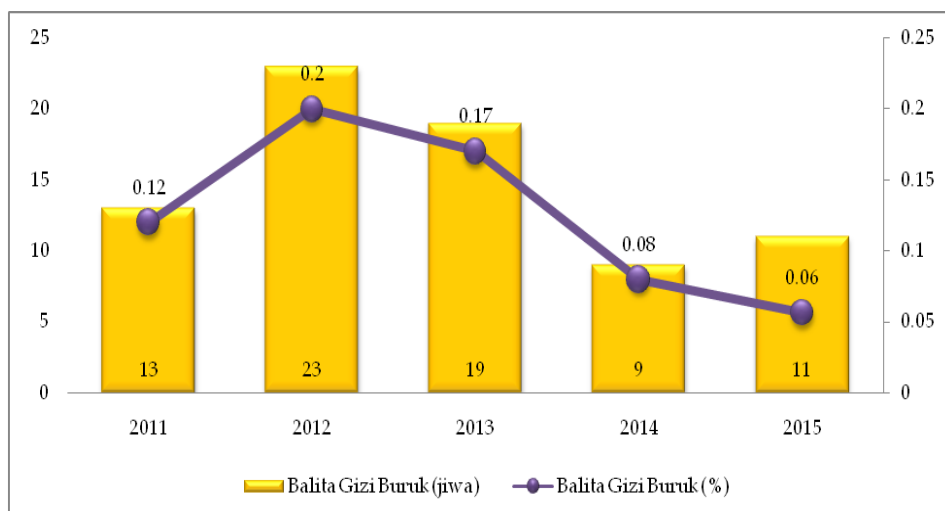
Sumber : BPS Kab. Bangka Barat, Tahun 2016

AHH merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk secara umum dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pengentasan kemiskinan.

Jika dilihat perkembangannya dari tahun 2010-2015, AHH di Kabupaten Bangka Barat terus meningkat. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk dan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat. Urusan kesehatan merupakan urusan wajib dasar yang sangat difokuskan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Guna menjamin kesehatan seluruh masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki strategi khusus yaitu dengan diluncurkannya program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesra) yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Bangka Barat tanpa terkecuali.

2.2.2.8 Balita Gizi Buruk

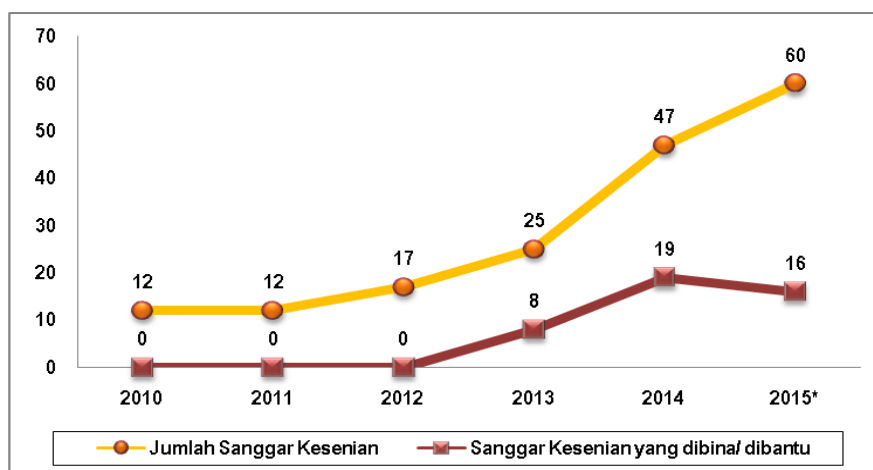
Gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan ≤ 3 standar deviasi dan atau ditemukan tanda-tanda klinis gizi buruk. Jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten Bangka Barat selama empat tahun terakhir berfluktuatif namun cenderung membaik. Pada tahun 2014, jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 9 kasus. Kondisi ini jauh lebih baik bila dibandingkan dengan jumlah kasus dua tahun sebelumnya, yaitu 23 kasus di tahun 2012 dan 19 kasus di tahun 2013. Kasus gizi buruk yang ditemukan di Kabupaten Bangka Barat seluruhnya mendapat perawatan dari tenaga kesehatan.



Gambar 2.18 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015
Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2016

2.2.3 Fokus Seni Budaya

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bangka Barat ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan nilai-nilai budaya daerah di tengah tantangan perkembangan budaya global. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, pengembangan kebudayaan di Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah grup kesenian.



* sampai dengan Juni 2015

Gambar 2.19 Jumlah Sanggar Kesenian dan Sanggar Kesenian yang Dibantu/Dibina Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015

Sumber: Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika, Tahun 2015.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

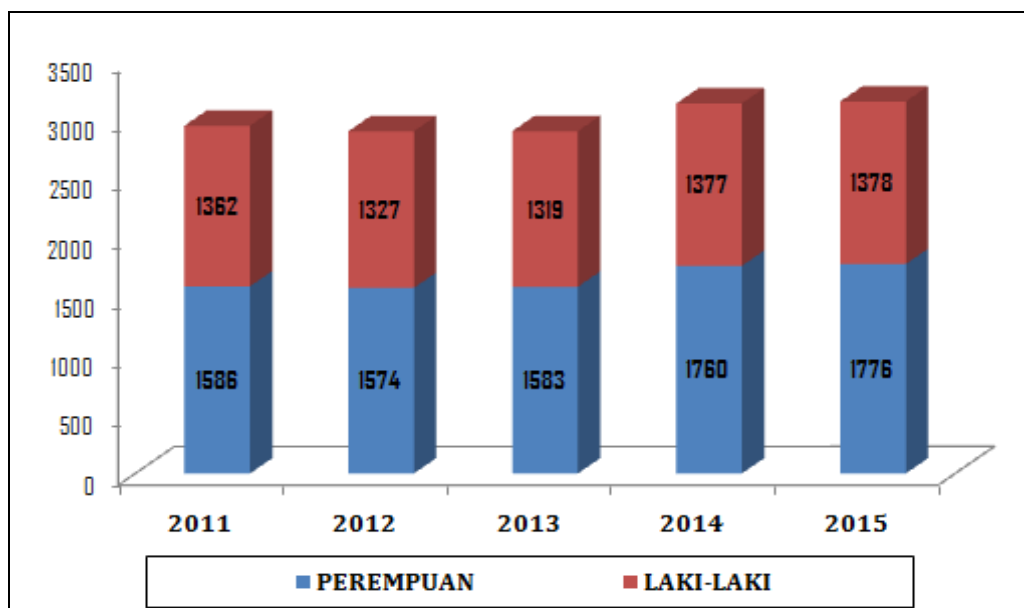
Pelayanan umum pada hakekatnya merupakan implementasi pelayanan publik, yakni segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk pelayanan barang, pelayanan jasa maupun pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan kewenangan terhadap urusan pemerintahan daerah yang sebelumnya urusan wajib terdiri dari 26 urusan menjadi 24 urusan, sementara urusan pilihan tetap berjumlah 8 urusan.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian serta urusan perencanaan pembangunan yang sebelumnya menjadi urusan wajib pemerintah daerah, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebelum diuraikan mengenai capaian kinerja fokus layanan urusan wajib dan urusan pilihan, berikut beberapa capaian kinerja terkait penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut.

a. Kepegawaian Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal utama yang menjadi unsur pendukung adalah SDM aparatur yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS). Semakin besar kuantitas maupun kualitas PNS yang dimiliki maka semakin besar pula pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat.

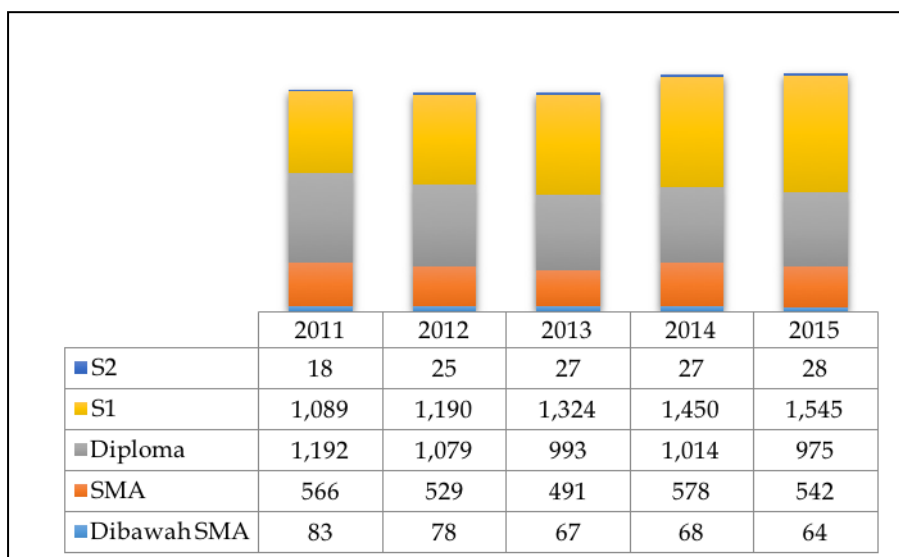


Gambar 2.20 Jumlah PNS Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011-2015

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Tahun 2016

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka Barat cenderung meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Sejak dibentuk pada tahun 2003, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus melakukan penerimaan PNS baru yang disesuaikan dengan kebutuhan.

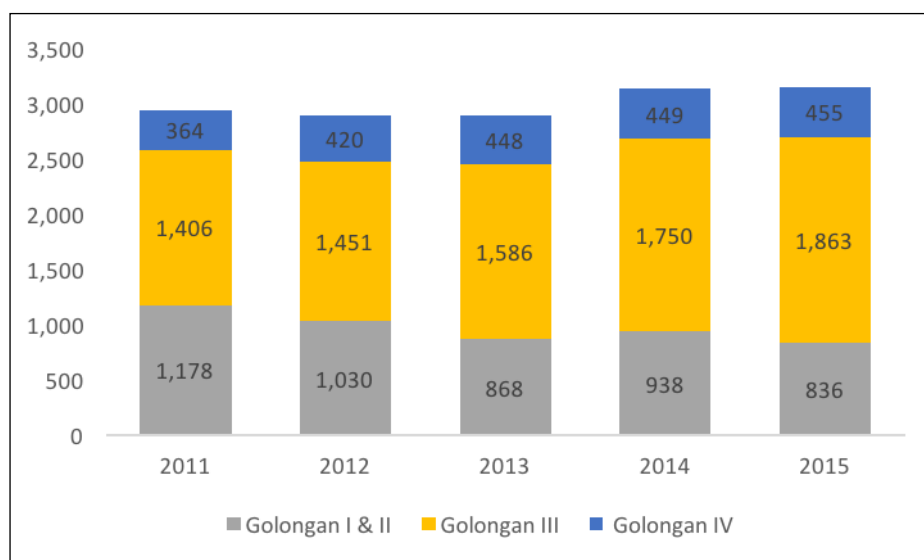
Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, persentase PNS dengan kualifikasi pendidikan di atas Diploma (S1 dan S2) memiliki proporsi terbanyak dan terus meningkat. Pada tahun 2011 PNS dengan pendidikan minimal S1 sebesar 37,55 persen dan pada tahun 2015 menjadi sebesar 49,87 persen. Hal ini disebabkan adanya pengembangan kapasitas aparatur melalui pengiriman tugas belajar maupun pemberian izin belajar kepada PNS.



Gambar 2.21 Jumlah PNS Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Pendidikan Tahun 2011-2015

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Tahun 2016

Sementara jumlah PNS berdasarkan golongan didominasi oleh golongan III. Hal ini disebabkan formasi penerimaan PNS baru lebih banyak pada kualifikasi S1, yaitu sejalan pula dengan kualifikasi pendidikan PNS yang terbanyak yaitu di atas Diploma.



Gambar 2.22 Jumlah PNS Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Golongan Tahun 2011-2015

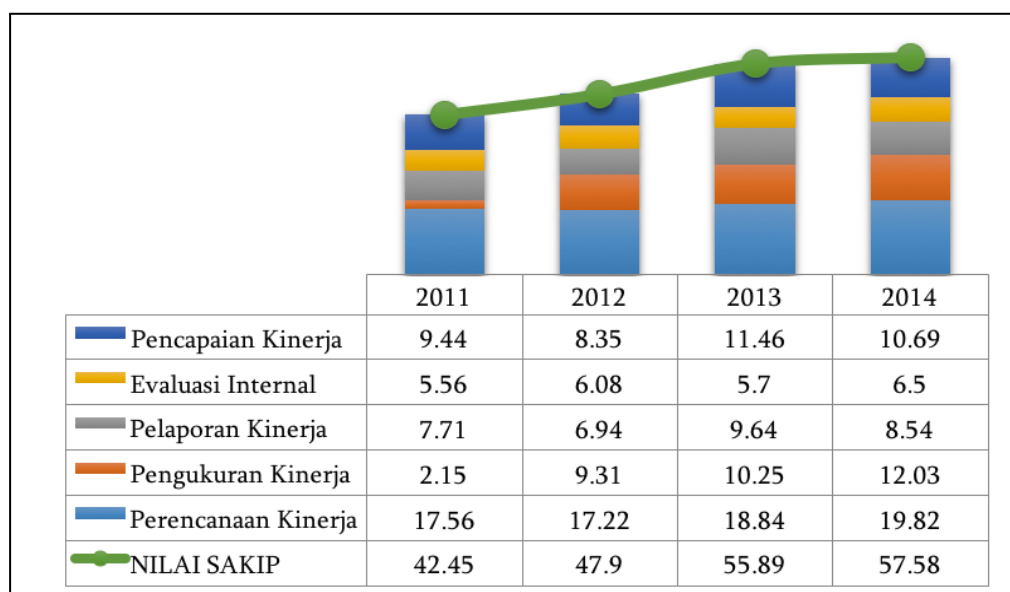
Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Tahun 2016

b. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Perbaikan sistem manajemen pemerintahan merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan

kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penilaian terhadap implementasi SAKIP dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dilihat dari lima aspek yaitu dari sisi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Dari kelima aspek tersebut, aspek dengan bobot penilaian terbesar adalah pada perencanaan kinerja yaitu 35 persen, yang selanjutnya pengukuran dan capaian kinerja masing-masing 20 persen, pelaporan kinerja dengan bobot 15 persen dan evaluasi kinerja sebesar 10 persen.



Gambar 2.23 Nilai komponen SAKIP Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014

Sumber: Kementerian PAN dan RB, Tahun 2015

Pada tahun 2015, penilaian SAKIP Kabupaten Bangka Barat tahun 2014 mendapat predikat CC (cukup/memadai) dengan nilai 57,58. Jika dilihat dari hasil tersebut, maka terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan hasil penilaian SAKIP tahun 2013 dengan nilai 55,89. Perbaikan dan peningkatan kinerja terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik.

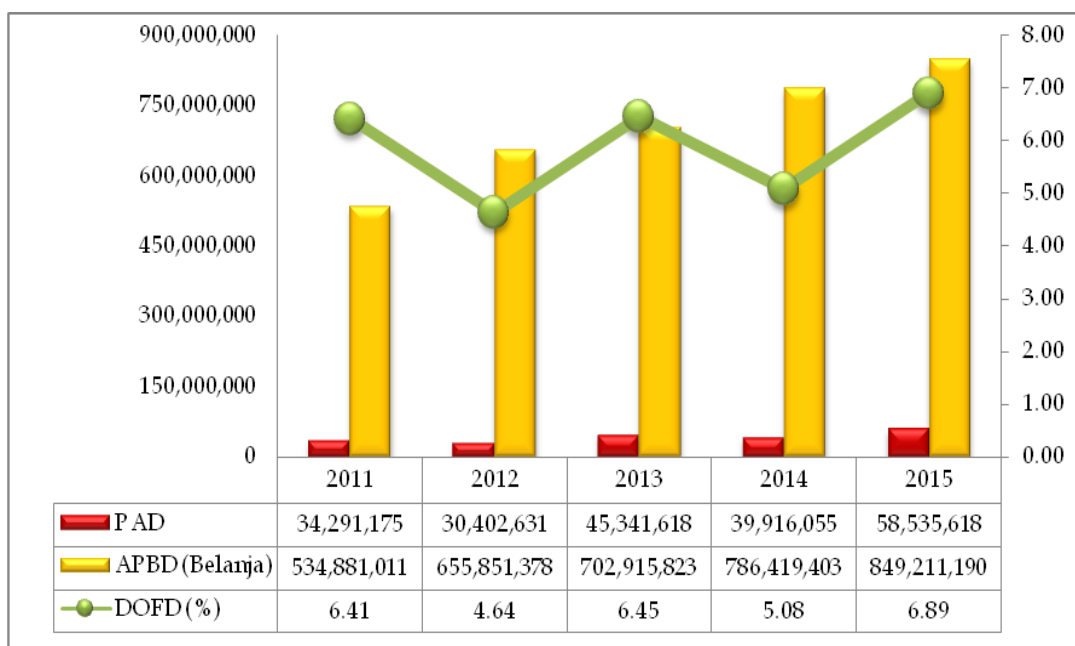
c. Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bangka Barat sampai dengan tahun 2012 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada tahun 2013 dan 2014, hasil pemeriksaan terhadap LKPD Kabupaten Bangka Barat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan

daerah telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan dengan ditandai tertibnya pengelolaan pendapatan/retribusi daerah, tertibnya pengelolaan belanja daerah, dan tertibnya pengelolaan aset daerah. Kedepannya dengan diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua, maka akan menjadi tantangan baru dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat tetap mempertahankan opini WTP atas LKPD.

Sementara jika dilihat dari perkembangan APBD Kabupaten Bangka Barat selama kurun waktu tahun 2011-2015, anggaran belanja daerah setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan rata-rata peningkatan sebesar 12,41 persen. Kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat melalui komposisi pendapatan daerah dalam APBD. Seperti halnya sebagian besar daerah lain di Indonesia, komposisi pendapatan daerah di dalam APBD Kabupaten Bangka Barat masih didominasi oleh dana transfer dari pusat. Selama empat tahun terakhir pendapatan transfer dari pusat dalam APBD Kabupaten Bangka Barat terus mengalami peningkatan dan di tahun 2015 proporsi dana transfer mencapai 76,74 persen dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 7,65 persen dari total anggaran pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat masih sangat terbatas untuk membiayai program-program pembangunan khususnya yang bersifat inisiatif daerah.

Sejalan dengan permasalahan di atas, Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kabupaten Bangka Barat selama empat tahun terakhir dapat dikategorikan masih tergolong sangat kurang atau rendah dengan rata-rata 5,89 persen. DOFD merupakan salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dengan mengukur kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Pada tahun 2015 DOFD Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan yaitu dari 6,41 persen di tahun 2011 menjadi 6,89 persen di tahun 2015. Hal ini disebabkan menurunnya realisasi PAD yaitu dari sebesar Rp 39.916.055.462,69 di tahun 2014 menjadi Rp 58.535.617.530,60 di tahun 2015 atau terjadi peningkatan sebesar 46,65 persen. Peningkatan ini disebabkan pada tahun 2015 telah termasuk realisasi pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Sejiran Setason.



Gambar 2.24 Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, 2016 (diolah)

Meskipun terjadi peningkatan PAD di tahun 2015, namun dengan masih rendahnya PAD jika dibandingkan dengan anggaran belanja daerah mengimplikasikan ketergantungan Kabupaten Bangka Barat yang sangat tinggi terhadap dana dari pusat untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan baik dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana bagi hasil dan dana transfer pusat lainnya dalam komponen lain-lain pendapatan yang sah.

d. Produk Hukum Daerah

Secara umum produk hukum yang ditetapkan pada tahun 2011-2015 berfluktuasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 2.11. Daftar Penerbitan Peraturan/Kebijakan/Regulasi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Peraturan Daerah	Peraturan Bupati	Keputusan Bupati
1.	2011	17	66	575
2.	2012	26	39	681
3.	2013	17	56	946
4.	2014	14	46	1.059
5.	2015	14	64	968

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah, 2016

Dalam rangka menyebarluaskan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, pada tahun 2014 telah dibangun Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang JDIH Kabupaten Bangka Barat. Pembangunan JDIH Kabupaten Bangka Barat bertujuan untuk dapat menyebarluaskan dan memberikan informasi hukum kepada masyarakat maupun penyelenggara pemerintah ataupun pihak swasta secara cepat dan tepat.

e. Indeks Kepuasan Masyarakat

Tugas utama dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengukur sejauh mana layanan yang diberikan dapat memuaskan masyarakat sesuai prosedur yang ditetapkan, maka dilakukan survei kepuasan masyarakat di unit-unit pelayanan masyarakat.

Pada tahun 2015, survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah dilakukan di unit-unit pelayanan yaitu sebanyak 23 unit pelayanan. Dari survei yang dilakukan, sebagian besar memiliki kategori Baik dengan rata-rata indeks IKM adalah sebesar 77,75 yaitu masuk dalam kategori B (Baik). Pada tahun 2015 terdapat empat unit pelayanan yang memperoleh kategori Sangat Baik (A) dengan nilai di atas 81,25 yaitu Puskesmas Puput, Puskesmas Tempilang, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kecamatan Tempilang. Hal ini berarti bahwa pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat telah baik dan perlu ditingkatkan lagi.

Tabel 2.12 Rekapitulasi Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2015

No.	Satuan Kerja	2014		2015	
		Skor	Kategori	Skor	Kategori
1	Dinas Kesehatan	75,62	B / Baik	78,54	B / Baik
2	Puskesmas Muntok	78,06	B / Baik	79,84	B / Baik
3	Puskesmas Simpangteritip	74,88	B / Baik	75,04	B / Baik
4	Puskesmas Kundi	69,76	B / Baik	70,80	B / Baik
5	Puskesmas Jebus	79,52	B / Baik	77,45	B / Baik
6	Puskesmas Puput	80,34	B / Baik	81,44	A /Sangat Baik
7	Puskesmas Sekar Biru	80,64	B / Baik	80,86	B / Baik
8	Puskesmas Kelapa	76,73	B / Baik	76,35	B / Baik
9	Puskesmas Tempilang	78,34	B / Baik	81,57	A /Sangat Baik
10	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	76,92	B / Baik	79,13	B / Baik
11	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	80,08	B / Baik	87,04	A /Sangat Baik

No.	Satuan Kerja	2014		2015	
		Skor	Kategori	Skor	Kategori
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79,59	B / Baik	79,96*	B / Baik
13	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	74,44	B / Baik	79,11	B / Baik
14	Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	80,1	B / Baik	77,91	B / Baik
15	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana	78,15	B / Baik	76,23	B / Baik
16	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas	75,56	B / Baik	75,58	B / Baik
17	RSUD Sejiran Setason	73,23	B / Baik	73,32*	B / Baik
18	Sekretariat Daerah	70,03	B / Baik	-	-
19	Kecamatan Muntok	79,78	B / Baik	79,34	B / Baik
20	Kecamatan Simpangteritip	82,72	A / Sangat Baik	78,86	B / Baik
21	Kecamatan Jebus	72,7	B / Baik	62,00	C / Cukup
22	Kecamatan Tempilang	79,53	B / Baik	82,04	A / Sangat Baik
23	Kecamatan Kelapa	74,38	B / Baik	79,12	B / Baik
24	Kecamatan Parittiga	76,71	B / Baik	76,62	B / Baik

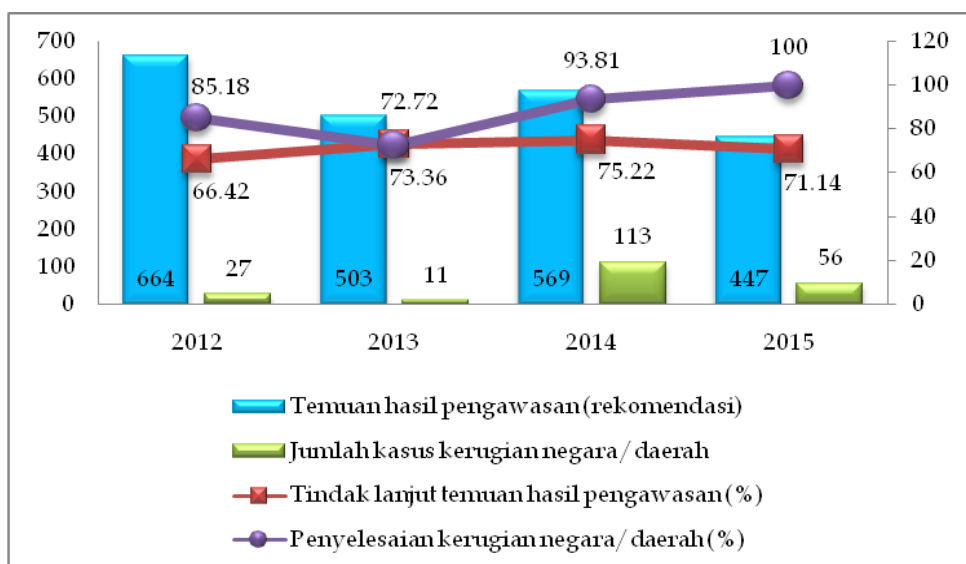
Sumber : Bagian Organisasi dan Kelembagaan Sekretariat Daerah, 2016.

* : Survei dilakukan secara mandiri tanpa pendampingan Bagian Organisasi dan Kelembagaan Sekretariat Daerah

f. Pengawasan Internal dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Sebagai salah satu implementasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah dilakukannya pengawasan internal melalui pemeriksaan berkala oleh Inspektorat Kabupaten. Pengawasan yang dilakukan antara lain adalah terhadap pengelolaan keuangan, kepegawaian, aset dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi baik di tingkat satuan kerja di daerah dan pemerintah desa.

Persentase tindak lanjut temuan hasil pengawasan selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan dan diharapkan tingkat kesadaran dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan terus membaik. Pada tahun 2012, tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan sebesar 66,42 persen dan meningkat menjadi 71,14 persen di tahun 2015 dengan jumlah temuan hasil pengawasan yang fluktuatif setiap tahunnya.



Gambar 2.25 Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012-2015

Sumber: Inspektorat Kabupaten Bangka Barat, Tahun 2016

Sementara jumlah kasus yang terkait dengan kerugian negara/daerah di tahun 2015 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 dengan jumlah kasus mencapai 113 kasus, dan di tahun 2015 menjadi 56 kasus yang seluruhnya dapat diselesaikan 100 persen. Dengan tingginya kasus yang terkait dengan kerugian negara/daerah maka perlu dilakukan pembinaan serta pengawasan yang lebih intensif agar kasus yang sama tidak terulang kembali dan dapat dikurangi.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1 Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka meningkatkan pelayanan urusan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Bangka Barat. Pencapaian kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator pendidikan diantaranya yaitu angka partisipasi sekolah, angka melanjutkan sekolah, Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah dan Rasio Guru terhadap Murid.

Capaian dari beberapa indikator tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan pelayanan umum bidang pendidikan belum optimal. Bangunan sekolah di Kabupaten Bangka Barat masih ada yang dalam kondisi tidak baik, seperti bangunan SD, data menunjukkan ruang kelas SD rusak ringan sebanyak 88,54 persen, rusak sedang sebanyak 3,8 persen, rusak berat sebanyak 5,13 persen. Secara keseluruhan, bangunan SD dengan kondisi baik

hanya mencapai 2,53 persen. Hal ini merupakan hal mendesak yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

a. Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan jenjang pendidikan tertentu per jumlah penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk mengakomodir seluruh penduduk usia pendidikan.

Tabel 2.13 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015

Jenjang Pendidikan	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
Sekolah Dasar						
Usia 7 - 12 tahun	jiwa	20.676	21.197	21.847	24.306	24.702
Jumlah Sekolah	sekolah	127	127	129	133	139
Rasio		1 : 163	1 : 167	1 : 169	1 : 183	1 : 177
Sekolah Menengah Pertama						
Usia 13 - 15 tahun	jiwa	8.702	8.981	9.670	10.981	11.643
Jumlah Sekolah	sekolah	29	30	30	31	43
Rasio		1 : 300	1 : 299	1 : 322	1 : 354	1 : 270
Sekolah Menengah Atas/Kejuruan						
Usia 16 - 18 tahun	jiwa	7.960	8.419	9.147	9.826	10.170
Jumlah Sekolah	sekolah	17	17	19	19	21
Rasio		1 : 468	1 : 495	1 : 481	1 : 517	1 : 414

Sumber data : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Tahun 2016

Dari tabel di atas, diketahui bahwa jumlah penduduk usia sekolah SD, SMP dan SMA terus meningkat. Untuk ketersediaan sekolah SD, pada tahun 2015 secara rata-rata satu sekolah SD dapat menampung 177 murid, terjadi peningkatan dari tahun 2011 ketika satu sekolah SD hanya perlu menampung 163 murid. Untuk ketersediaan sekolah SMP, pada tahun 2015 satu sekolah SMP dapat menampung 270 murid, membaik bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 ketika satu sekolah SMP hanya dapat menampung 300 murid. Hal yang sama terjadi pada rasio ketersediaan SMA/SMK, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 satu sekolah dapat menampung 414 siswa, membaik bila dibandingkan dengan tahun 2011 dimana satu sekolah dapat menampung 468 siswa.

Solusi dari permasalahan ketersediaan sekolah terhadap perkembangan jumlah penduduk usia sekolah adalah dengan melakukan strategi penambahan ruang kelas di setiap jenjang pendidikan khususnya pada sekolah-sekolah negeri.

b. Rasio Guru per Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan jenjang pendidikan dibandingkan dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar yang juga menunjukkan kondisi ideal proporsi guru dan murid untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Tabel 2.14 Rasio Guru/Murid Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015

Jenjang Pendidikan	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
Sekolah Dasar						
Guru	orang	1.610	1.430	1.368	1.346	1.292
Jumlah Siswa	orang	23.819	24.196	24.796	24.198	24.673
Rasio		1 : 15	1 : 17	1 : 18	1 : 18	1 : 19
Sekolah Menengah Pertama						
Guru	orang	572	400	390	426	569
Jumlah Siswa	orang	7.511	7.063	7.998	7.337	9.572
Rasio		1 : 13	1 : 18	1 : 21	1 : 17	1 : 17
Sekolah Menengah Atas/Kejuruan						
Guru	orang	379	382	315	374	441
Jumlah Siswa	orang	5.107	5.156	5.609	5.838	6.912
Rasio		1 : 13	1 : 13	1 : 18	1 : 16	1 : 16

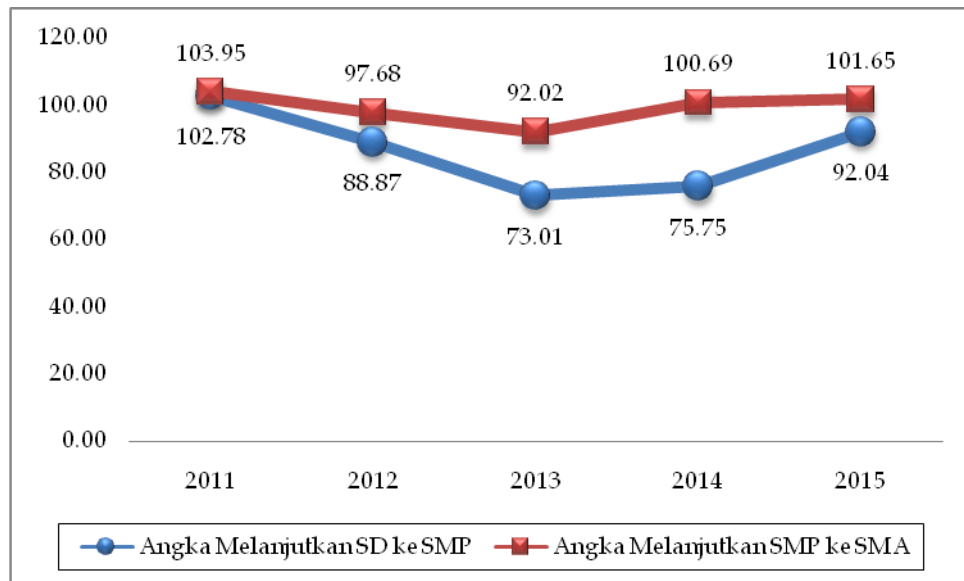
Sumber data : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Tahun 2016

Data pada tabel diatas menunjukkan rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SD tahun 2015 adalah 1 : 19. Angka ini berarti seorang guru SD mengajar murid sebanyak 19 orang. Selama kurun waktu tahun 2011-2015 rasio ketersediaan guru di Kabupaten Bangka Barat untuk seluruh jenjang pendidikan dari SD, SMP, dan SMA cenderung tidak berubah signifikan. Hal tersebut dapat dipastikan karena penambahan jumlah guru juga berimbang dengan peningkatan jumlah murid pada jenjang tersebut.

c. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan sekolah digunakan untuk melihat seberapa besar antusias dan keinginan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Angka

melanjutkan sekolah merupakan salah satu penentu dalam kualitas pendidikan yang dihubungkan dengan tingkat partisipasi sekolah.



Gambar 2.26 Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015 (persentase)
 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Tahun 2016

Grafik di atas menunjukkan bahwa Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Bangka Barat di beberapa tahun terdapat nilai melebihi 100 persen. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, hal tersebut disebabkan karena terdapat siswa yang berasal dari luar Bangka Barat khususnya yang berada di daerah perbatasan melanjutkan sekolah di Kabupaten Bangka Barat.

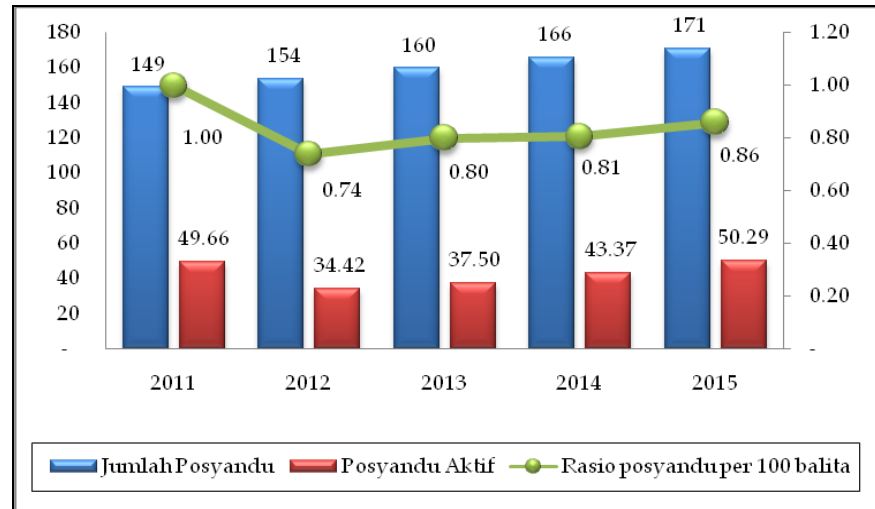
2.3.1.2 Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pemenuhan hak dasar rakyat adalah mempermudah masyarakat di dalam memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan dengan perlengkapan dan tenaga kesehatan yang tersedia di Kabupaten Bangka Barat terbilang cukup memadai, dan telah tersebar sampai tingkat dusun/desa. Untuk terus memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus memperbanyak jumlah fasilitas kesehatan maupun jumlah tenaga kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat.

a. Rasio Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan merupakan salah satu sarana pelayanan umum dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sarana kesehatan yang mencakup rumah sakit, puskesmas, poliklinik dan posyandu merupakan sarana kesehatan

yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis, serta pengobatan penyakit bagi masyarakat. Semakin tinggi ketersediaan sarana kesehatan akan mampu menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat dengan catatan adanya dukungan akses pelayanan kesehatan yang baik.



Gambar 2.27 Jumlah Posyandu Aktif dan Rasio Posyandu per 100 Balita Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015
Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2016

Rasio ketersediaan posyandu, dapat dilihat pada grafik di atas. Dapat dilihat bahwa rasio posyandu di Kabupaten Bangka Barat fluktuatif namun cenderung meningkat selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.15 Rasio Sarana Kesehatan Per Satuan Penduduk

No.	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Penduduk (jiwa)*	179.209	186.143	191.856	197.852	208.219
2.	Jumlah Rumah Sakit Umum	1	1	1	1	2
3.	Jumlah Puskesmas	8	8	8	8	8
4.	Jumlah Puskesmas Keliling	14	18	19	22	22
5.	Jumlah Puskesmas pembantu	19	19	19	19	19
6.	Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7.	Rasio Puskesmas per 1.000 penduduk	0,12	0,14	0,14	0,15	0,12
8.	Rasio Puskesmas Pembantu per 1.000 penduduk	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2016

* Data Profil Kesehatan

Data pada tabel sarana kesehatan diatas menunjukkan bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 tidak ada penambahan sarana kesehatan yang berarti di Kabupaten Bangka Barat. Untuk rasio puskesmas per satuan penduduk dalam tabel diatas, puskesmas yang dihitung adalah seluruh puskesmas baik rawat inap maupun non rawat inap beserta puskesmas keliling. Untuk sarana kesehatan di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2014 dan 2015 telah memiliki 2 rumah sakit umum yaitu RSUD Sejiran Setason dan Rumah Sakit Bakti Timah Muntok. Untuk jumlah Puskesmas di Kabupaten Bangka Barat belum ada penambahan baru, namun untuk jumlah tempat tidur di Puskesmas terjadi peningkatan yaitu 74 unit di tahun 2015 dan sebelumnya di tahun 2014 sebanyak 67 unit.

b. Rasio Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Kondisi tenaga kesehatan sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Bangka Barat. Jumlah tenaga kesehatan, yang terdiri atas dokter dan tenaga medis lainnya, jika tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang harus dilayani akan mengakibatkan pelayanan yang kurang efektif, bahkan tidak tertanganinya kasus-kasus kesehatan.

Tabel 2.16 Rasio Tenaga Kesehatan Per 100.000 Penduduk
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 – 2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Dokter (Spesialis, Umum dan Gigi)	45	63	69	68	75
Jumlah Bidan	152	145	165	184	192
Jumlah Perawat	314	283	309	304	324
Jumlah Tenaga Kefarmasian	41	38	33	40	32
Jumlah Tenaga Sanitasi	19	21	20	21	14
Jumlah Tenaga Gizi	18	17	18	19	17
Rasio Tenaga Medis (Dokter) per 100.000 Penduduk	25,11	33,84	35,96	34,37	36,02
Rasio Bidan per 100.000 Penduduk	84,82	77,90	86,00	93,00	92,21
Rasio Perawat per 100.000 Penduduk	175,21	152,03	161,06	153,65	155,61

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Tenaga Kefarmasian per 100.000 Penduduk	22,88	20,41	17,20	20,22	15,37
Rasio Tenaga Sanitasi per 100.000 Penduduk	10,60	11,28	10,42	10,61	6,72
Rasio Tenaga Gizi per 100.000 Penduduk	10,04	9,13	9,38	9,60	8,16

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2016

Pada Tahun 2015, rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Bangka Barat adalah 36,02 dengan jumlah dokter sebanyak 75 orang. Rasio dokter per satuan penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Jumlah dokter spesialis yang ada di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2015 sebanyak 13 orang yaitu menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 17 orang. Dokter spesialis di Bangka Barat sebagian besar merupakan dokter mitra atau bukan dokter tetap dari luar Bangka Barat. Dokter spesialis yang bertugas di RSUD Sejiran Setason yang merupakan dokter mitra berkurang sehingga perlu dilakukan upaya untuk menambah ketersediaan dokter spesialis dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pekerjaan Umum

Indikator pekerjaan umum di Kabupaten Bangka Barat dilihat dari beberapa kondisi terkait urusan pekerjaan umum, yaitu jaringan jalan, jaringan irigasi dan rasio tempat ibadah.

i. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Kinerja jaringan jalan dapat digambarkan melalui kondisi jalan yang dikategorikan menjadi beberapa kondisi, yaitu baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Kondisi jalan dikategorikan baik, apabila permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6 persen), sehingga arus lalu-lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan desain dan tidak ada hambatan.

Kondisi jaringan jalan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Kondisi jaringan jalan berkaitan dengan konektivitas

suatu daerah dengan daerah lain di sekitarnya mengingat jalur perhubungan utama masih dipegang oleh perhubungan darat. Jaringan jalan yang baik memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat.

Selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2011-2015, panjang jalan Kabupaten Bangka Barat meningkat 7,41 persen yaitu dari 831,05 km di tahun 2011 menjadi 898,00 km di tahun 2015. Sementara jalan berkondisi baik pada tahun 2011 sebesar 44,31 persen dan pada tahun 2015 menjadi 72,26 persen.

Pada tahun 2015 panjang jalan Kabupaten Bangka Barat 898,00 km yang terdiri dari 700,92 km jalan kabupaten dan 197,10 km jalan desa. Berdasarkan data jalan di Kabupaten Bangka Barat, panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2015 sepanjang 648,91 km.

Kondisi jalan di Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2011-2015 terlihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel. 2.17 Kondisi Jalan Kabupaten dan Desa Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 – 2015

Kondisi Jalan	2011		2012		2013		2014		2015	
	KM	%	KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
Kondisi Baik	368,23	44,31	400,68	48,95	402,58	46,97	635,92	71,17	648,91	72,26
Kondisi Sedang	375,99	45,24	278,27	34,00	256,47	29,93	109,92	12,30	64,36	7,17
Kondisi Rusak Ringan	58,65	7,06	108,73	13,28	152,26	17,77	51,67	5,78	94,15	10,48
Kondisi Rusak Berat	28,18	3,39	30,835	3,77	45,71	5,33	95,96	10,74	90,58	10,09
Total	831,05	100	818,52	100	857,02	100	893,47	100	898,00	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2016

Walaupun cakupan jalan dengan kriteria baik di Kabupaten Bangka Barat terus mengalami peningkatan, tetapi masih terdapat infrastruktur jalan dengan kondisi yang rusak ringan maupun rusak berat. Kondisi jalan dengan kriteria rusak berat mengalami peningkatan 100 persen di tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini seharusnya dapat segera diatasi dengan manajemen pembangunan yang baik, agar permasalahan yang ada dapat diminimalisir.

Secara umum terjadi penambahan jalan di setiap tahun kecuali pada tahun 2012 yang mengalami penurunan dikarenakan pengalihan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Meskipun penambahan jalan telah dilakukan namun dirasakan masih belum berimplikasi secara langsung dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat yang semakin melambat.

ii. Jaringan Irigasi

Kabupaten Bangka Barat memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Pembukaan lahan sawah terus dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan untuk mendukung mengembangkan persawahan tersebut telah dibangun irigasi primer di beberapa lokasi persawahan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Namun sampai saat ini irigasi tersebut belum dapat digunakan sesuai fungsinya dikarenakan belum memiliki sistem jaringan pengairan lanjutan yang baik dan optimal.

Tabel 2.18 Penetapan Lokasi Daerah Irigasi Prioritas Kabupaten Bangka Barat

No.	Lokasi		Luas Eksisting (Ha)	Luas Potensi (Ha)
	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
1.	Kecamatan Kelapa	Kelurahan Kelapa	159	
		Desa Beruas	115	
		Desa Tuik	255	100
		Desa Tebing	50	50
		Desa Air Bulin	50	
		Dsn. Juru, Desa Dendang	30	
		Desa Mancung	108	
		Dsn. Belit, Desa Dendang	100	
		Dsn. Ganjan, Desa Dendang	50	
		Desa Pangkal Beras	50	
		Desa Kacung	99	
		Dsn. Kebayan, Desa Kacung	42	20
2.	Kecamatan Simpangteritip	Desa Ibul	100	
		Desa Peradong	110	
		Dsn. Taragunung, Desa Air Nyatoh	65	
3.	Kecamatan Jebus	Desa Jebus (transmigrasi)	80	
		Desa Pebuar	130	
		Desa Tumbak Petar	50	
		Desa Limbung	86	150
4.	Kecamatan Tempilang	Dsn. Kamat, Desa Simpang	100	

No.	Lokasi		Luas Eksisting (Ha)	Luas Potensi (Ha)
	Kecamatan	Desa/Kelurahan		
		Yul		
		Dsn. Buyan, Desa Buyan Kelumbi	155	
		Dsn. Kelumbi, Desa Buyan Kelumbi	50	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2016

iii. Rasio Tempat Beribadah per Satuan Penduduk

Pelayanan peribadahan merupakan salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Rasio tempat beribadah di Kabupaten Bangka Barat sampai dengan tahun 2014 cenderung mengalami penurunan yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan peningkatan jumlah tempat ibadah. Data jumlah Masjid pada tahun 2011 dan tahun 2012 mengalami penurunan dari tahun 2010 disebabkan oleh perbedaan definisi Masjid dan Langgar secara total jumlah tempat ibadah tersebut meningkat.

Tabel 2.19 Rasio Tempat Beribadah per Satuan Penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 – 2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Masjid	176	164	151	169	170
2.	Langgar	97	115	122	122	61
3.	Gereja	20	20	20	21	21
4.	Pura	0	0	3	3	11
5.	Vihara + Kleteng	19	21	24	26	31
6.	Jumlah Tempat Ibadah	312	320	320	341	294
7.	Jumlah Penduduk	163.514	179.287	190.892	201.201	202.303
8.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1,91	1,78	1,68	1,69	1,45

Sumber : Bangka Barat Dalam Angka, SIPD Tahun 2015;
Data penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

b. Penataan Ruang

Kondisi Kabupaten Bangka Barat terkait urusan penataan ruang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain adalah sebagai berikut:

i. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah yang pada umumnya diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi. RTH ini dimaksudkan untuk mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung seperti fungsi keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan suatu wilayah.

Tabel 2.20 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 – 2014

No.	Uraian	2012	2013	2014
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)	13.102,35	13.102,35	13.102,35
2.	Luas wilayah ber HPL/HGB (Ha)	36.372	36.372	36.372
3.	Luas wilayah	284.886,05	284.886,05	284.886,05
4.	Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2)	36,02	36,02	36,02

Sumber: LPPD Kab. Bangka Barat 2012 – 2014

Pada tabel di atas, terlihat bahwa rasio RTH di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2012 dan 2013 sebesar 36,02 persen. Angka tersebut telah memenuhi SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menargetkan 25 persen pada tahun 2014.

ii. Persentase Bangunan Ber-IMB

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB diperlukan sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dan agar bangunan memenuhi standar persyaratan teknis. Setiap orang/badan usaha di Kabupaten Bangka Barat yang akan mendirikan gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung harus sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Kondisi Bangunan yang telah memiliki IMB Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2011-2015 sebagai berikut:

Tabel 2.21 Persentase Bangunan ber-IMB Kabupaten Bangka Barat tahun 2011 – 2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB pada tahun n	184	317	211	156	225
2.	Jumlah Bangunan ber-IMB sampai dengan tahun n	675	992	1203	1359	1584
3.	Jumlah Bangunan	41.681	41.681	42.517	42.517	42.517
4.	Persentase bangunan ber-IMB	1,62%	2,38%	2,83%	3,20%	3,73%

Sumber : Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, Tahun 2016

Pada tabel terlihat bahwa persentase bangunan ber-IMB per satuan bangunan mengalami peningkatan yang tidak signifikan dan masih tergolong sangat rendah yaitu 1,62 persen pada tahun 2011 meningkat menjadi 3,73 persen pada tahun 2015, capaian ini masih berada di bawah target akhir tahun 2015 sebesar 4 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mengoptimalkan mekanisme IMB dalam mengendalikan pemanfaatan ruang yang didorong oleh rendahnya efektivitas pelayanan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian.

iii. Dokumen Perencanaan Tata Ruang

Sebagai acuan dalam pembangunan terkait penataan ruang, maka keberadaan dokumen RTRW sangatlah penting. Pada tahun 2014 Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bangka Barat telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034.

Sementara untuk Dokumen Rencana Detail Tata Ruang tersusun 2 dokumen, yaitu untuk wilayah Kecamatan Kelapa dan Muntok, namun kedua dokumen tersebut belum memiliki kekuatan hukum dikarenakan belum disahkan/ diperdakan sesuai dengan peraturan perundangan. Sementara pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya masih rendah karena kurangnya sosialisasi pemanfaatan ruang.

2.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

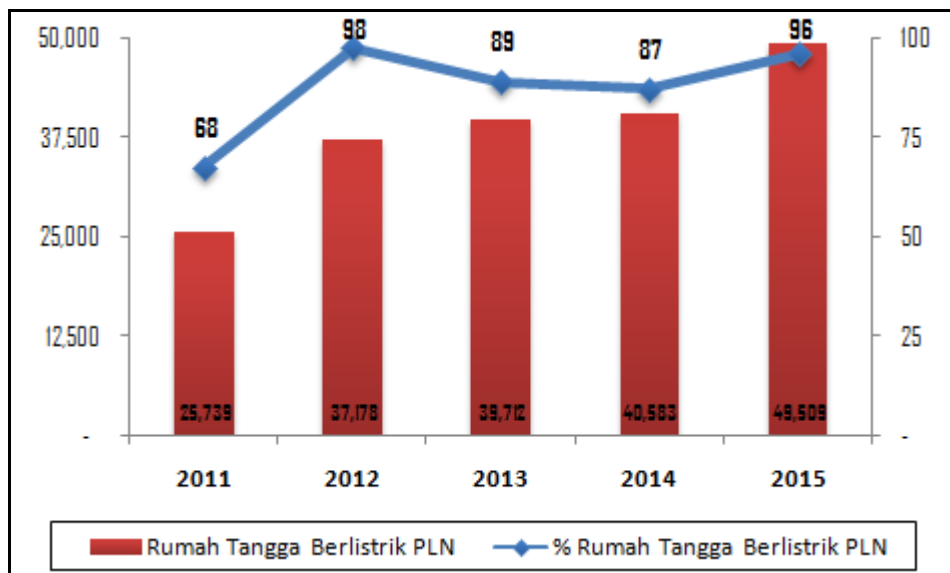
Kondisi daerah Kabupaten Bangka Barat terkait dengan urusan perumahan rakyat dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain adalah pemenuhan Air Bersih, Listrik, dan Sanitasi.

Cakupan pelayanan air bersih mengalami peningkatan dari tahun 2010 sekitar 70,86 persen menjadi 77,58 persen di tahun 2014. Jika dibandingkan capaian setiap tahun akan terlihat nilai yang fluktuatif, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan definisi operasional.

Tabel 2.22 Persentase Keluarga yang Menggunakan Air Bersih Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 – 2014

No	Sumber Air Bersih	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Sumur gali terlindung	23.253	27.029	27.012	34.559	28.178
2.	Sumur gali dengan pompa	-	-	-	-	45
3.	Sumur bor dengan pompa	-	-	377	-	1.231
4.	Terminal air	-	-	-	-	156
5.	Air Kemasan	-	-	-	-	-
6.	Mata air terlindung	-	-	-	-	-
7.	Penampungan air hujan	-	-	-	145	120
8.	Leding/Perpipaan (PDAM/BPSPAM)	3.087	2.942	1.011	2.772	2.213
9.	Lainnya	1.985	1.805	199	936	
10.	Total Jumlah keluarga yang menggunakan air bersih (Keluarga)	28.325	31.780	28.599	38.413	31.944
11.	Jumlah Keluarga yang ada	39.976	42.106	39.711	43.935	41.174
12.	Jumlah Keluarga yang di periksa	30.065	39.230	39.711	43.935	41.174
13.	Persentase Keluarga yang menggunakan air bersih (10/12), (% terhadap Keluarga yang di periksa)	94,21%	81,01%	72,02%	87,43%	77,58%
14.	Persentase Keluarga yang menggunakan air bersih (10/11), (% terhadap Keluarga yang ada)	70,86%	75,48%	72,02%	87,43%	77,58%

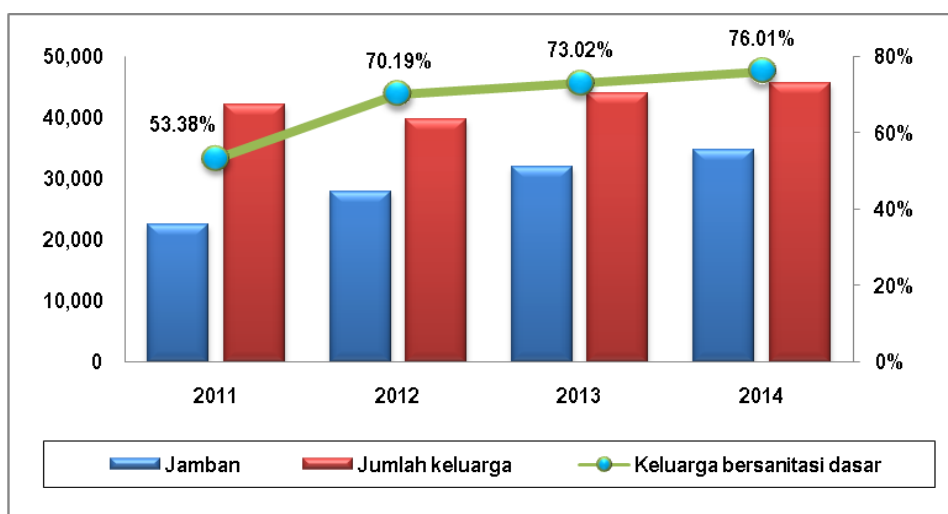
Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2016



Gambar 2.28 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 – 2015

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2016

Untuk pelayanan listrik, jaringan listrik sudah menjangkau 100 persen perdesaan di Kabupaten Bangka Barat, meskipun tidak seluruh rumah tangga menggunakan listrik. Rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2011 sebesar 67,66 persen dan meningkat signifikan hingga mencapai 96,16 persen pada tahun 2015. Kapasitas listrik di Kabupaten Bangka Barat terbatas pada konsumen kecil seperti rumah tangga dan belum mampu menyediakan listrik dalam kapasitas besar untuk kebutuhan kawasan industri. Salah satu implikasi ketersediaan listrik yang terbatas adalah jika dilakukan pemeliharaan terhadap unit pembangkit listrik, maka akan terjadi pemadaman di beberapa lokasi. Meskipun saat ini, pemadaman listrik relatif jarang dilakukan.



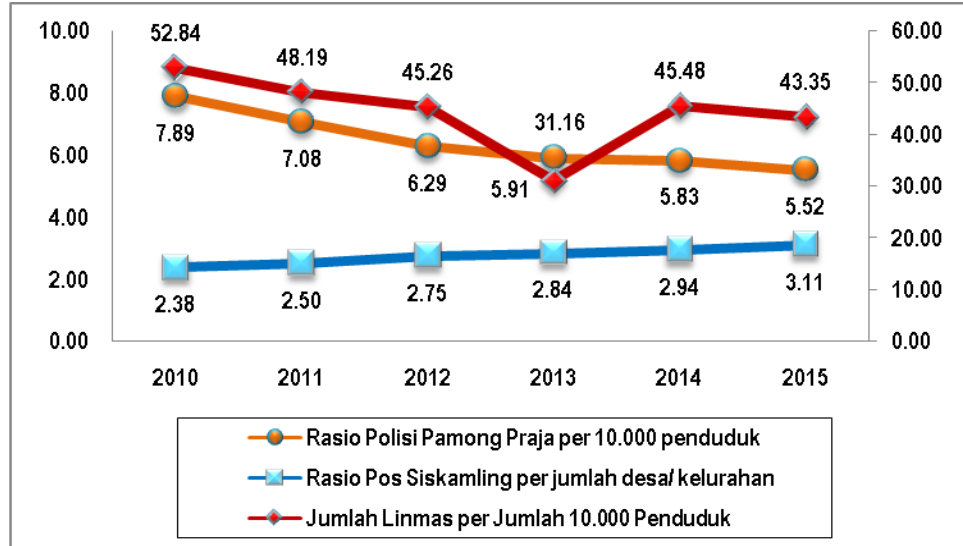
Gambar 2.29 Persentase Keluarga Bersanitasi Dasar Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 – 2014

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2016

Selain air bersih dan listrik, kewajiban pemerintah dalam menyediakan perumahan rakyat adalah memenuhi kebutuhan sanitasi. Cakupan rumah tangga/keluarga bersanitasi dilihat dari keluarga yang memiliki jamban sehat sebagai sanitasi dasar. Perkembangan keluarga bersanitasi yang layak terlihat pada gambar diatas, dimana pada tahun 2011 rumah tangga yang bersanitasi sebesar 53,38 persen dan sejalan dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan sanitasi yang layak menyebabkan peningkatan setiap tahunnya hingga menjadi sebesar 76,01 persen di tahun 2014.

2.3.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah daerah. Indikator terkait pencapaian urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah dari ketersediaan polisi pamong praja, petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Pos Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sebagaimana tergambar di bawah ini.



Gambar 2.30 Indikator Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 s.d 2015

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2016

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa terjadi penurunan pada rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk dan jumlah Linmas per 10.000 penduduk. Penurunan pada rasio jumlah polisi pamong praja disebabkan oleh berkurangnya

jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ada yaitu dari 129 orang di tahun 2010 menjadi 113 orang di tahun 2015. Untuk membangun kesatuan keamanan masyarakat yang baik, tentu jumlah ini perlu ditingkatkan. Kebutuhan ideal untuk jumlah Polisi Pamong Praja yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja adalah sebanyak 251 sampai dengan 350 PNS dengan perhitungan berdasarkan kriteria umum yang telah ditetapkan di dalam peraturan tersebut.

Sementara untuk jumlah anggota Linmas yang ada selama lima tahun terakhir cukup bervariasi dan cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena anggota Linmas adalah dari pengamanan pada saat pelaksanaan pemilu. Tahun 2014 memiliki jumlah anggota linmas terbanyak yaitu 920 orang dan telah dilaksanakan kegiatan pelatihan dasar Linmas sebanyak 150 orang dengan harapan anggota Linmas memiliki bekal keterampilan dan pengetahuan yang cukup dalam pelaksanaan tugasnya.

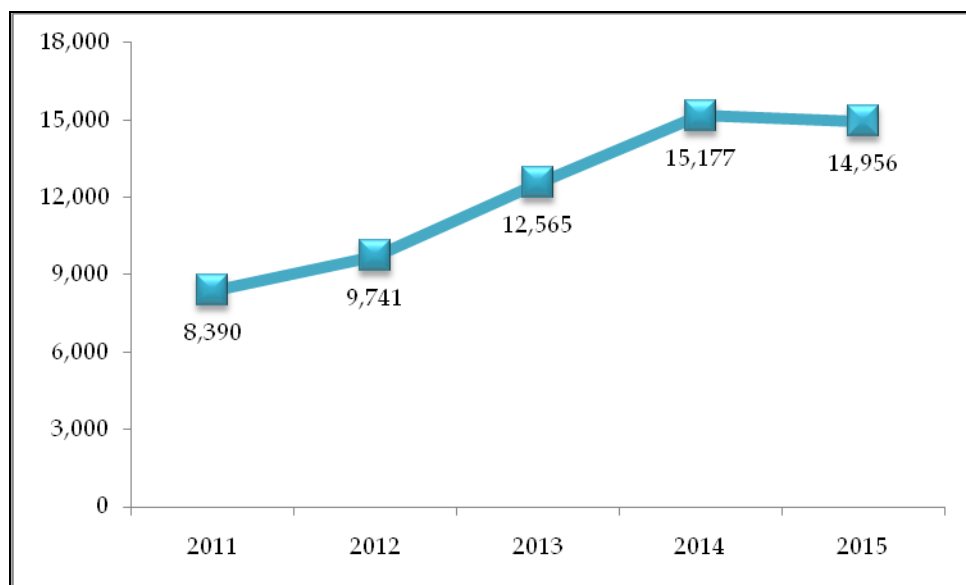
Salah satu indikator dalam pelaksanaan pengamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah dilihat dari ketersediaan Poskamling. Dilihat dari rasio jumlah Poskamling per desa/kelurahan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 jumlah Poskamling sebanyak 152 Poskamling menjadi 199 Poskamling di tahun 2015.

2.3.1.6 Sosial

Angka kemiskinan pada beberapa tahun di Kabupaten Bangka Barat menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk miskin dan merupakan jumlah penduduk miskin terendah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kurun lima tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangka Barat cenderung menurun yaitu dari 5,25 persen pada tahun 2010 menjadi 3,15 persen pada tahun 2014.

Akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan, Perangkat Daerah yang memfokuskan pada penanganan kemiskinan hanya Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial saja yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar. Sementara itu, untuk pemberdayaan masyarakat miskin serta peningkatan taraf hidup masyarakat miskin belum dilakukan secara berkesinambungan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, khususnya urusan yang berkaitan dengan aspek ekonomi.

Terkait pemberdayaan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial berbagai program terkait pelayanan sosial yang telah diberikan oleh berbagai pemangku kepentingan. Namun pelaksanaan program terkait pelayanan sosial tersebut masih jauh dari yang diharapkan bila dibandingkan dengan data PMKS. Trend jumlah PMKS di Kabupaten Bangka Barat dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan sosial di Kabupaten Bangka Barat masih sangat minim, sehingga penanganan yang dilakukan untuk PMKS dirasa belum dilakukan secara optimal.



Gambar 2.31 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2016

Untuk program bantuan perlindungan sosial yang diberikan kepada penduduk miskin di Kabupaten Bangka Barat merupakan komplementaritas Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diantaranya Program Beras Miskin, Program Rumah Layak Huni, Program Keluarga Harapan, Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) serta pemberian jaminan hidup.

Tabel 2.23 Jumlah Pemberian Bantuan Perlindungan Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015

No.	JENIS BANTUAN SOSIAL	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Beras Miskin (Raskin)	Orang	-	4.950	4.950	4.744	4.744	4.744
2.	Rumah Layak Huni (RLH)	KK/unit	-	-	34	40	35	32

No.	JENIS BANTUAN SOSIAL	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
3.	Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bersumber APBD II	Orang	250	149	75	150	5	12
4.	Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bersumber APBN, APBD I, APBD II	Kelompok	56	12	45	34	100	45
5.	Bantuan Jaminan Hidup bersumber APBD II	Orang	15	17	108	131	125	125

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2016

2.3.1.7 Ketenagakerjaan

Urusan ketenagakerjaan memiliki aspek multi dimensi dan lintas sektoral sehingga perannya menjadi salah satu aspek yang strategis dalam pembangunan manusia.

Tabel 2.24 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Angkatan Kerja	93.757	87.221	84.949	92.206	86.854	91.923
Bekerja	89.828	84.044	81.732	88.601	84.219	86.480
Pengangguran	3.929	3.177	3.217	3.605	2.635	5.443
Bukan Angkatan Kerja	38.187	38.700	44.897	41.092	49.959	48.485
Jumlah Penduduk Usia Kerja (15+)	131.944	125.921	129.846	133.298	136.813	140.408
TPAK(Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) (%)	71,06	69,30	65,42	69,17	63,48	65,47
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)	4,19	3,64	3,79	3,91	3,03	5,92

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2016

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara banyaknya angkatan kerja dengan banyaknya penduduk usia kerja. TPAK selama periode tahun 2010-2015 mengalami fluktuasi dan bahkan cenderung mengalami penurunan yaitu dari 71,06 persen pada tahun 2010 menjadi 65,47 persen pada tahun 2015.

Sejalan dengan TPAK, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bangka Barat dari waktu ke waktu juga menunjukkan capaian yang bervariasi dan cenderung menurun. Pada tahun 2010 TPT Kabupaten Bangka Barat sebesar 4,19 persen, pada tahun 2015 telah meningkat menjadi 5,92 persen. Hal ini menunjukkan adanya penurunan aktivitas perekonomian di beberapa sektor terutama untuk sektor primer yang menjadi penyumbang PDRB terbesar untuk Kabupaten Bangka Barat. Disamping

itu pula, yang menjadi kendala bagi Kabupaten Bangka Barat sampai dengan saat ini adalah minimnya ketersediaan lapangan usaha di sektor perindustrian walaupun wilayah di Kabupaten Bangka Barat jauh-jauh hari telah ditetapkan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT).

2.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada era sekarang ini, peran perempuan telah merambah berbagai bidang ilmu dan pekerjaan. Perempuan tidak lagi dipandang sebagai ibu rumah tangga, namun ikut pula mencari nafkah bagi keluarga. Kemandirian perempuan juga menempatkannya pada posisi tawar yang setara atau bahkan pada beberapa kasus lebih tinggi dari laki-laki. Untuk itu, terkait pembangunan daerah informasi mengenai partisipasi perempuan dalam lingkungan kerja juga perlu ikut dipertimbangkan.

Keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia yang diukur melalui IPM masih belum cukup efektif memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan baik di level nasional, provinsi maupun kabupaten dan kota. Oleh sebab itu, pemerintah baik di pusat dan daerah harus mampu menyusun program pembangunan yang lebih responsif gender, sehingga kesetaraan gender bisa terwujud. Hal tersebut ditujukan agar perempuan juga mampu secara optimal menikmati perannya sebagai subyek sekaligus objek pembangunan.

Dari jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat tahun 2015 sebanyak 206.293 jiwa, 48,40 persen diantaranya adalah perempuan (99.836 jiwa) dan 51,60 persen laki-laki (106.457 jiwa). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komposisi penduduk menurut jenis kelamin hampir berimbang. Dalam bidang politik, keterwakilan perempuan di DPR masih relatif kecil, di mana untuk jumlah perempuan yang menduduki kursi legislatif dari tahun 2010 hingga sekarang berjumlah 2 orang. Sedangkan untuk partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah khususnya Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2015 mencapai 1.776 orang atau sebesar 56,31 persen. Hal ini menunjukkan tidak terlihat perbedaan yang berarti antara proporsi perempuan dan laki-laki yang bekerja di lembaga pemerintah. Bahkan, jumlah pegawai perempuan lebih banyak dari pada laki-laki yang bekerja pada lembaga pemerintah di Kabupaten Bangka Barat.

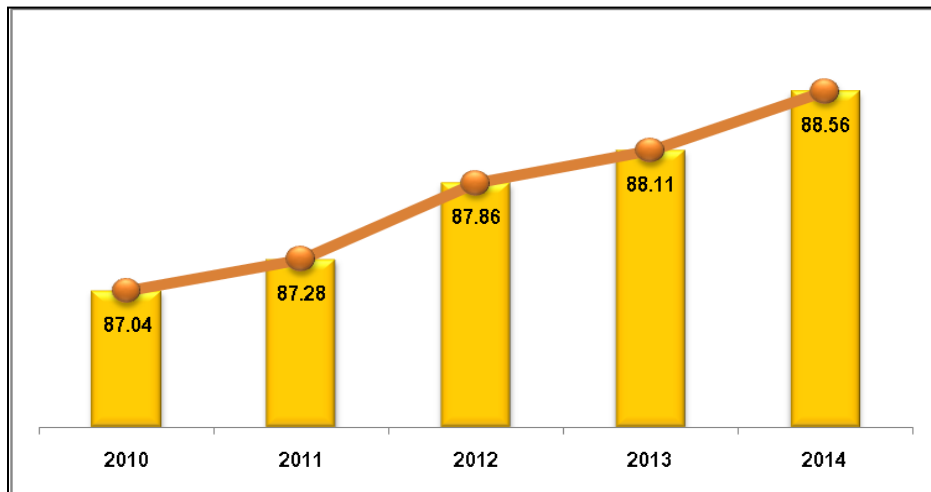
Saat ini potensi dan peluang pengembangan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak semakin besar yang ditandai dengan menguatnya isu-isu *cross cutting* termasuk *Sustainability Development Goals*, yaitu semakin kuatnya tuntutan publik terhadap mutu pelayanan publik yang responsif gender. Sehingga untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi pengembangan

pembangunan gender dan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, dalam pembangunan nasional dan daerah, koordinasi dan dukungan lintas sektor serta *stakeholders* lainnya menjadi salah satu prasyarat yang sangat penting. Di sisi lain, penguatan pada produk hukum tentang perlindungan terhadap perempuan juga harus mulai digalakkan termasuk antara produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga perlindungan terhadap perempuan belum dapat terlaksana secara komprehensif.

Permasalahan yang dialami kaum perempuan di lingkungan pekerjaan adalah tenaga kerja perempuan terutama di sektor informal belum mendapat perhatian serius, antara lain dalam permodalan, teknologi, pendidikan dan pelatihan, upah sangat rendah tanpa uang lembur, tanpa promosi kerja, jaminan kesehatan kerja menjadi tanggungan pribadi. Tenaga kerja perempuan yang bekerja di perusahaan masih sering dieksploitasi oleh pengusaha, mendapat perlakuan kekerasan, pelecehan seksual, pemberian upah yang lebih rendah, perlakuan diskriminatif di tempat kerja, jam kerja yang tidak menentu, kesempatan karir dan lain-lain. Sedangkan permasalahan di bidang politik adalah keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi perempuan dalam politik belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dari rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik dan organisasi-organisasi profesi lainnya.

Keberhasilan di bidang pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat juga sebenarnya tidak terlepas dari peranan seluruh lapisan masyarakat baik dari kaum perempuan dan laki-laki sebagai pelaku pembangunan dan penerima manfaat pembangunan. Ukuran kualitas keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari 3 aspek: yaitu IPM yang mengukur kualitas hidup dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi; Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai indikator untuk mengukur kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan serta Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai alat ukur untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusi dalam aspek ekonomi maupun sosial.

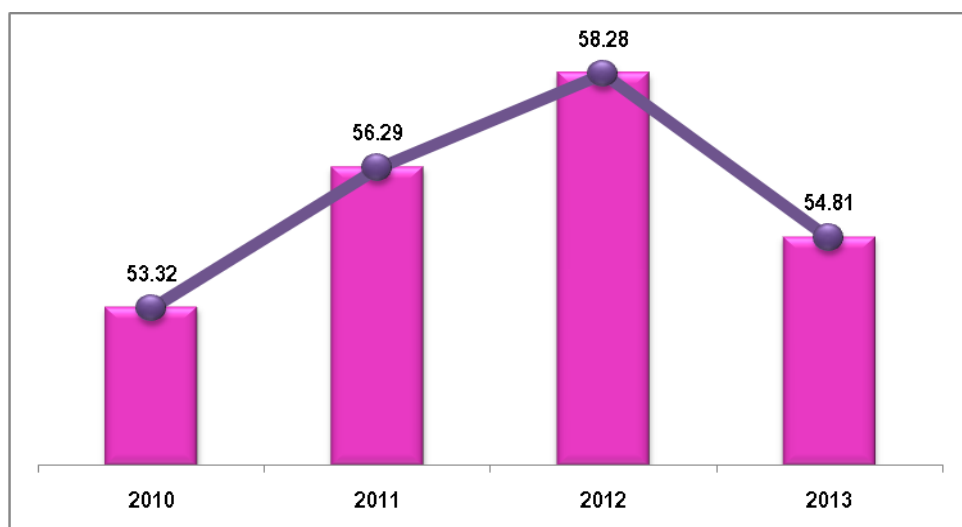
IPG menggunakan dimensi yang sama dengan IPM, tetapi telah memperhitungkan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Pencapaian IPG di Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan setiap tahun. Capaian IPG Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2010 sebesar 87,04 meningkat menjadi 88,56 pada tahun 2014 dengan rata-rata kenaikan setiap tahunnya sebesar 0,38.



Gambar 2.32 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 - 2014

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2015

IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu: 1) Keterwakilan perempuan dalam parlemen; 2) Perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan 3) Sumbangan pendapatan. Nilai IDG Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2013 mengalami penurunan yaitu dari 58,28 di tahun 2012 menjadi 54,81 di tahun 2013. Hal ini dapat diartikan bahwa peranan perempuan ternyata masih lebih rendah dari laki-laki, baik dalam partisipasi politik, pengambilan keputusan, maupun dalam perekonomian. Permasalahan tersebut disebabkan oleh pembangunan yang selama ini ada lebih dominan menguntungkan kaum laki-laki dimana oleh kaum perempuan belum secara optimal dimanfaatkan dengan baik.

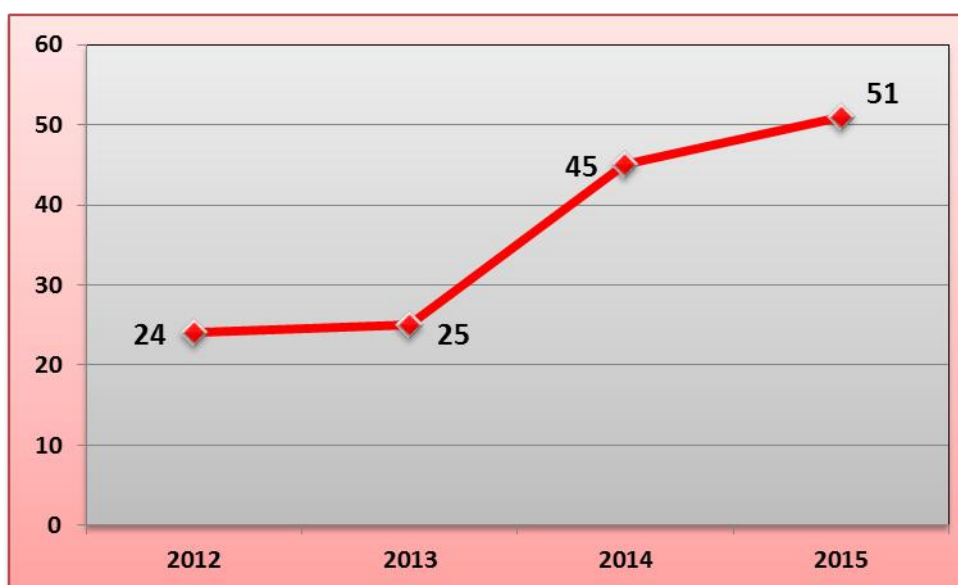


Gambar 2.33 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 - 2013

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2014

Kualitas hidup anak juga ditentukan dari perlindungan terhadap tindak kekerasan. Pada masa sekarang kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup menonjol. Kasus pelecehan seksual yang terjadi yang berujung pada kematian merupakan fenomena yang marak terjadi di saat sekarang. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan menjadi salah satu penyebab kasus kekerasan terhadap anak tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya. Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan, mengingat kekerasan terhadap anak akan sangat berdampak terhadap tumbuh kembang mereka.

Dalam rangka melindungi anak, Pemerintah Daerah telah mengupayakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan prinsip *restorative justice* yang mengedepankan *diversi* seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Restorative justice* ini dilakukan dalam penyelesaian perkara tidak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku secara bersama-sama mencari penyelesaian secara adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.



Gambar 2.34 Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012-2015

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa, 2016

Dari kasus yang dilaporkan terjadi di tahun 2015 sebanyak 51 kasus di Kabupaten Bangka Barat, seluruhnya bisa ditangani oleh masing-masing unit pelayanan terkait penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

seperti kepolisian, kejaksaan, RSUD Sejiran Setason, Puskesmas serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bangka Barat. Namun, dari 51 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut hanya 37 kasus atau 72,55 persen yang sampai ke ranah hukum. Tidak semua kasus yang sampai ke ranah hukum dikarenakan korban tidak melaporkan ke aparat penegak hukum (APH) serta perdamaian dengan perjanjian antara korban dengan pelaku serta.

Tabel 2.25 Persentase penanganan kasus tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012-2015

Tahun	Jumlah kasus yang dilaporkan	Jumlah penanganan	penyelesaian kasus
2012	24	24	100%
2013	25	25	100%
2014	45	40	89%
2015	51	51	100%

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Pemerintahan Desa, 2016

Dalam upaya peningkatan kapasitas anak di dalam pembangunan Kabupaten Bangka Barat dalam bidang perlindungan anak meliputi peringatan Hari Anak Nasional yang setiap tahun dilaksanakan, adanya kegiatan Kongres Anak daerah sebagai bentuk komitmen penyuaran suara anak di tingkat daerah. Sesuai dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Anak (GN-AKSA) juga mengamanatkan agar pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendorong percepatan terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memerlukan peran berbagai pihak seperti dunia usaha, masyarakat dan media massa. Mulai tahun 2013 Kabupaten Bangka Barat sudah mendukung terbentuknya Kabupaten Layak Anak hal ini ditandai dengan adanya Bus sekolah, pembentukan forum anak daerah serta tempat bermain anak. Masih banyak hal-hal lain yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kapasitas anak dalam bidang pembangunan. Sehingga kedepan harus disusun sebuah kebijakan yang mengarah pada pemenuhan hak dan perlindungan anak.

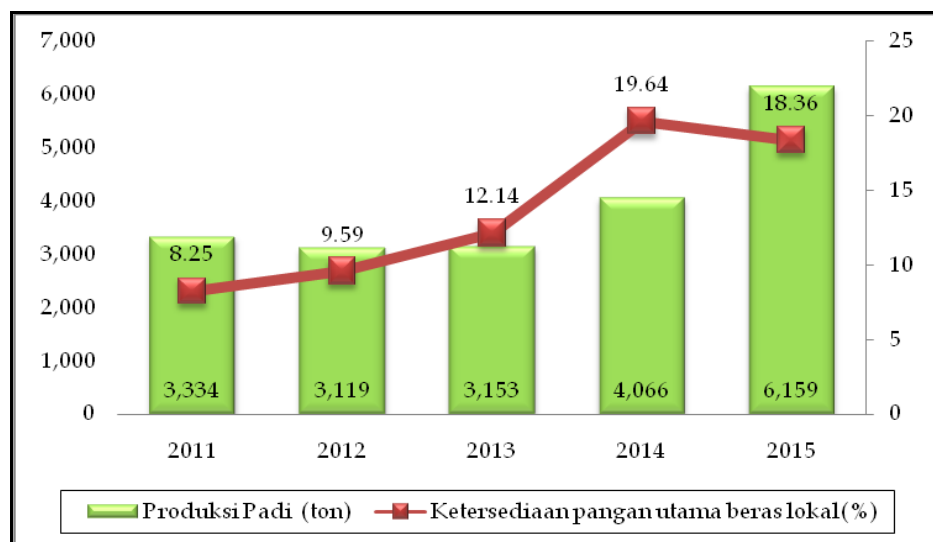
2.3.1.9 Pangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan

perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Penyelenggaraan urusan pangan berdasarkan SPM Bidang Ketahanan Pangan memiliki empat jenis pelayanan dasar yaitu Ketersediaan dan Cadangan Pangan, Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan serta Penanganan Kerawanan Pangan.

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah mengeluarkan beberapa regulasi antara lain di tahun 2014 berupa Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Kabupaten Bangka Barat serta Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Barat.

Untuk penyelenggaraan urusan pangan di Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2011-2015 terus mengalami perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator terkait ketahanan pangan yaitu produksi padi yang menunjukkan ketersediaan pangan utama maupun dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang menunjukkan pola konsumsi masyarakat yang terus meningkat.



Gambar 2.35 Produksi Padi dan Ketersediaan Pangan Utama Beras Lokal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 - 2015

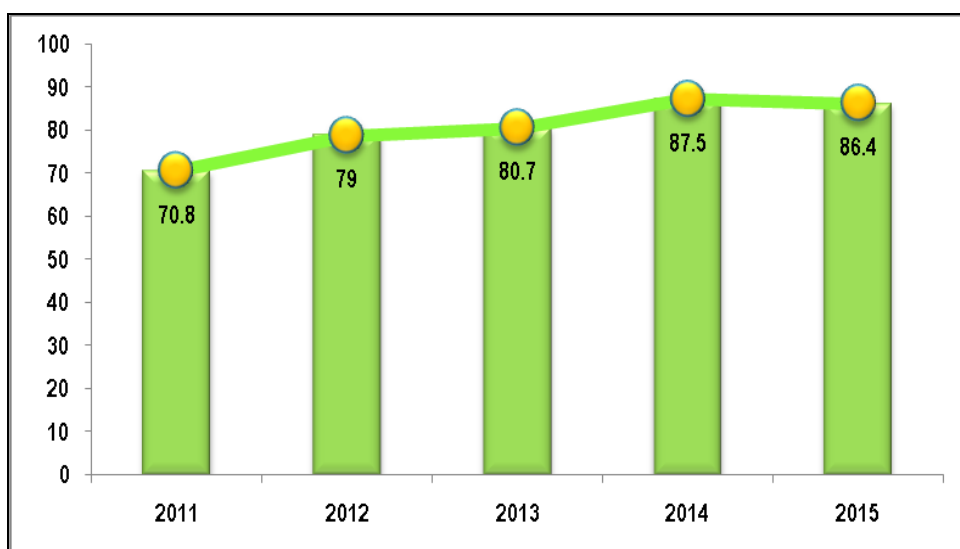
Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Tahun 2016

Sebagaimana tergambar di atas, meskipun produksi padi lokal di Kabupaten Bangka Barat terus meningkat, namun belum dapat memenuhi kebutuhan beras masyarakat

Bangka Barat sendiri. Sampai dengan tahun 2015, ketersediaan pangan utama beras yang berasal dari wilayah Bangka Barat (lokal) hanya mencapai 18,36 persen.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga belum memiliki cadangan pangan pemerintah kabupaten, sehingga sebagian besar bahan pangan khususnya beras masih tergantung dari daerah lain. Hal ini menyebabkan tugas pemerintah dalam menjaga jalur distribusi bahan pangan agar harga dan pasokan pangan tetap stabil.

Sementara dari skor PPH, terlihat bahwa pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam dengan gizi seimbang mencakup energi, protein, vitamin dan mineral serta aman di Kabupaten Bangka Barat terus mengalami perbaikan dengan hampir mendekati target SPM nasional yaitu sebesar 90 persen. Pada tahun 2011, skor PPH Kabupaten Bangka Barat hanya sebesar 70,8 persen dan di tahun 2015 mencapai 86,40 persen .



Gambar 2.36 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 - 2015 (dalam persentase)

Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Tahun 2016

2.3.1.10 Pertanahan

Tanah merupakan sumber daya yang penting dan strategis karena menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia yang sangat mendasar. Pengelolaan pertanahan diperlukan untuk mendukung keseluruhan elemen pelaksanaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa negara menjamin hak-hak masyarakat atas tanahnya dan memberikan pengakuan atas hak-hak atas tanah yang ada.

Indikator pertanahan bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan. Semakin besar prosentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah yang pada akhirnya berperan mengurangi kasus – kasus tanah negara. Salah satu faktor penghambat dalam pembangunan tidak terlepas dari aspek pertanahan atau lahan.

Dengan tidak jelasnya status kepemilikan lahan oleh masyarakat, menjadi salah satu faktor terjadinya kasus tanah. Selama kurun waktu 2011-2015, kasus tanah yang terjadi hanya pada tahun 2013 yaitu satu kasus dan tahun 2014 sebanyak 3 kasus. Kasus pertanahan yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2014 yaitu kasus tanah SMKN 1 Kelapa di Desa Dendang, kasus tanah gedung obat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat dan kasus Sdr. Mino di jembatan Kadur. Dari 3 kasus tersebut 1 kasus yang belum terselesaikan yaitu kasus tanah gedung obat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat yang berkaitan dengan kawasan hutan.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah sering kali membutuhkan lahan masyarakat untuk dibebaskan. Dalam pelaksanaan pembebasan lahan milik masyarakat, sering kali terjadi permasalahan dilapangan, khususnya terkait harga yang ditawarkan oleh pemerintah dirasa belum layak. Untuk meminimalisir permasalahan terkait pembebasan lahan yang berhubungan dengan harga, pemerintah telah menggunakan metode penilaian (*appraisal*) oleh pihak yang berkompeten dibidangnya sesuai dengan peraturan perundangan.

Terkait dengan izin lokasi yang diajukan ke Pemerintah Kabupaten Bangka Barat hanya terdapat 13 izin, yaitu 1 izin pada tahun 2011, 8 izin yang diajukan pada tahun 2012 dan 4 izin pada tahun 2015. Dari 13 izin tersebut, 1 izin pada tahun 2011 disetujui, 7 izin yang disetujui pada tahun 2012 dan 3 izin pada tahun 2015.

Permasalahan yang sering muncul terkait izin lokasi untuk kepentingan penanaman modal adalah izin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah sering kali pelaksanaannya ditunda oleh pihak terkait tanpa ada penjelasan secara terperinci.

2.3.1.11 Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup saat ini sering menjadi sorotan, karena tingkat kesadaran dunia dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan semakin meningkat. Beberapa komponen yang sangat erat dengan lingkungan hidup adalah terkait udara dan air. Apabila kedua komponen tersebut tercemar, maka akan menimbulkan perubahan

terhadap kualitas kehidupan. Kualitas udara dan air di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.26 Kualitas Udara Ambient Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2015 – 2016

No.	Parameter yang Diukur	Satuan	Tahun		Baku Mutu (PP No. 41/1999)
			2015	2016	
Perkantoran					
1	Karbon Monoksida (CO)	µg/Nm ³	1145	2290	30000
2	Sulfur Dioksida (SO ₂)	µg/Nm ³	95	94,5	900
3	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	µg/Nm ³	45	97,1	400
4	TSP	µg/Nm ³	29,5	32,4	230 (24 jam)
5	Oksidan (O ₃)	µg/Nm ³	78	89,5	235
6	Hidrocarbon (HC)	µg/Nm ³	<12,3	<1,23	160
7	Ammonia (NH ₃)	Ppm	0,110	0,061	2 (24 jam)
8	Sulfida (H ₂ S)	Ppm	<0,01	<0,01	0,02
9	Kebisingan	dB	55,4	50,8	60
Masjid					
1	Karbon Monoksida (CO)	µg/Nm ³	1145	1145	30000
2	Sulfur Dioksida (SO ₂)	µg/Nm ³	88	79,7	900
3	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	µg/Nm ³	42	97,3	400
4	TSP	µg/Nm ³	21,5	22,9	230 (24 jam)
5	Oksidan (O ₃)	µg/Nm ³	76	89,7	235
6	Hidrocarbon (HC)	µg/Nm ³	<12,3	<1,23	160
7	Ammonia (NH ₃)	Ppm	0,095	0,089	2 (24 jam)
8	Sulfida (H ₂ S)	Ppm	<0,01	<0,01	0,02
9	Kebisingan	dB	51,3	42,8	60
Pasar					
1	Karbon Monoksida (CO)	µg/Nm ³	2290	2290	30000
2	Sulfur Dioksida (SO ₂)	µg/Nm ³	81	94,6	900
3	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	µg/Nm ³	51	97,3	400
4	TSP	µg/Nm ³	24,7	33,7	230 (24 jam)
5	Oksidan (O ₃)	µg/Nm ³	65	108	235
6	Hidrocarbon (HC)	µg/Nm ³	12,3	<1,23	160
7	Ammonia (NH ₃)	Ppm	0,210	0,097	2 (24 jam)
8	Sulfida (H ₂ S)	Ppm	<0,01	<0,01	0,02
9	Kebisingan	dB	57,5	53,5	60
Terminal					
1	Karbon Monoksida (CO)		<1145	1145	30000
2	Sulfur Dioksida (SO ₂)		91	94,2	900
3	Nitrogen Dioksida (NO ₂)		62	96,8	400
4	TSP		30,8	52,3	230 (24 jam)
5	Oksidan (O ₃)		78	98,1	235
6	Hidrocarbon (HC)		24,6	<1,23	160
7	Ammonia (NH ₃)		0,088	0,194	2 (24 jam)
8	Sulfida (H ₂ S)		<0,01	<0,01	0,02
9	Kebisingan		59,1	51,3	60

No.	Parameter yang Diukur	Satuan	Tahun		Baku Mutu (PP No. 41/1999)
			2015	2016	
Pemukiman					
1	Karbon Monoksida (CO)		1145	2290	30000
2	Sulfur Dioksida (SO ₂)		85	75,6	900
3	Nitrogen Dioksida (NO ₂)		41	97,2	400
4	TSP		20,1	33,7	230 (24 jam)
5	Oksidan (O ₃)		86	89,6	235
6	Hidrocarbon (HC)		<12,3	<1,23	160
7	Ammonia (NH ₃)		0,093	0,024	2 (24 jam)
8	Sulfida (H ₂ S)		<0,01	<0,01	0,02
9	Kebisingan		55,4	41,5	60

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah, Tahun 2016.

Berdasarkan uji kualitas udara ambient yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka barat di tahun 2015 – 2016 diketahui bahwa kualitas udara di Kabupaten Bangka Barat dalam keadaan baik dan masih jauh berada dibawah batas yang ditentukan oleh Pemerintah. Tingginya kualitas udara di Bangka Barat dipengaruhi oleh rendahnya kegiatan-kegiatan yang menimbulkan pencemaran udara seperti pemukiman padat penduduk, transportasi, dan lain sebagainya. Faktor pendukung lainnya adalah tingginya kesadaran perusahaan swasta mengelola dan memantau emisi udara yang dihasilkan disamping pemantauan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Disamping kualitas udara yang baik, kualitas air di Bangka Barat cukup baik walaupun dalam beberapa tahun terakhir, tekanan pertambangan cukup mempengaruhinya. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat diketahui bahwa 4 sumber air baku untuk PDAM dalam keadaan baik dan telah memenuhi kualitas air kelas 1 yang disyaratkan Pemerintah sebagai sumber air baku untuk air minum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.27 Kualitas Sumber Air Baku PDAM Kabupaten Bangka Barat

No.	Parameter	Satuan	Kolong Tarabek	Waterpang	Kolong Menjelang	Kolong Sekarbiru	PP No. 82/2001 (Kelas 1)
1	BOD	Mg/l	1,85	1,45	1,82	1,61	2
2	COD	Mg/l	8,36	8,44	8,17	8,72	10
3	TDS	Mg/l	112	24	44	28	1000
4	TSS	Mg/l	6,88	14	7	10,2	50
5	Nitrat (NO ₃)	Mg/l	0,207	0,177	0,189	0,194	10
6	Nitrit (NO ₂)	Mg/l	0,009	0,005	0,008	0,009	-
7	Kesadahan total	Mg/l	53,5	55,4	41,6	47,5	
8	Besi (fe)	Mg/l	0,073	0,235	0,161	0,009	

No.	Parameter	Satuan	Kolong Tarabek	Waterpang	Kolong Menjelang	Kolong Sekarbiru	PP No. 82/2001 (Kelas 1)
9	Chlorine	Mg/l	<0,01	0,14	0,07	0,04	
10	Cobalt	Mg/l	0,009	0,007	<0,0041	0,007	
11	Clorida	Mg/l	13,15	16,19	12,60	18,49	
12	Mangan	Mg/l	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	
13	Sulfat	Mg/l	<0,01	0,023	0,013	0,01	
14	Timbal (Pb)	Mg/l	0,031	0,023	0,040	0,029	
15	Sulfida	Mg/l	<0,01	0,023	0,013	0,01	

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah, Tahun 2016.

Selain pemantauan sumber air baku, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga melakukan pemantauan di sungai utama yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Pada tahun 2016 dilakukan pemantauan di 4 sungai utama yaitu: Sungai Antan, Sungai Sukal, Sungai Kampak, dan Sungai Kayu Arang.

Tabel 2.28 Kualitas Air Sungai Utama di Kabupaten Bangka Barat

No.	Parameter	satuan	S. Antan	S. Kampak	S. Sukal	S. Kayu arang
1	BOD	Mg/l	1,94	1,80	1,97	1,89
2	COD	Mg/l	8,22	7,88	9,09	8,54
3	TDS	Mg/l	12750	36.320	9670	10.770
4	TSS	Mg/l	17,6	23,1	91,8	21,3
5	Nitrat (NO3)	Mg/l	0,201	0,182	0,189	0,198
6	Nitrit (NO2)	Mg/l	0,009	0,010	0,006	0,007
7	Clorida	Mg/l	39,99	5,60	214,4	21,02

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah, Tahun 2016.

Berdasarkan tabel di atas, pada umumnya kualitas air sungai masih berada di bawah baku mutu air kelas 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Parameter yang masih berada diatas baku mutu adalah parameter TDS di Sungai Kampak, Antan, dan Sungai Kayu arang. Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab tingginya TDS antara lain seperti pertambangan dan lain sebagainya.

Selain itu salah satu tugas besar dari pelaksanaan urusan lingkungan hidup yang langsung berhubungan dengan masyarakat adalah terkait penanganan persampahan, dan sampai saat ini masih fokus pada Kecamatan Muntok sebagai Ibukota Kabupaten Bangka Barat. Akan tetapi, kemampuan daerah untuk menangani persampahan belum maksimal karena keterbatasan sarana dan prasarana serta porsonil yang ada.

Pengelolaan persampahan di kawasan perkotaan di Wilayah Kabupaten Bangka Barat selain kawasan perkotaan Muntok belum dilakukan secara baik dan terpadu dan hanya mengelola persampahan di kawasan perkotaan Jebus, Kelapa dan Parittiga.

Tabel 2.29 Penanganan Persampahan di Kawasan Perkotaan Muntok

	Indikator		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Produksi Sampah	m ³	1.635.993,88	1.741.889,50	1.835.959,13	1.846.014,88	1.882.423,63
2.	Sampah yang ditangani/ diangkut	m ³			5.460	5.888	9.531
3.	Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Aktif	Unit			1	1	1
4.	Tempat pembuangan sampah (TPS)	Unit	10	10	10	11	18
5.	Pasukan Kuning	Orang	30	37	120	138	144

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah, Tahun 2016.

Dari data diatas, dapat terlihat penanganan sampah yang ada di Kawasan Perkotaan Muntok sebagai ibukota Kabupaten Bangka Barat masih sangat kecil, dengan pencapaian masih dibawah 4 persen dari estimasi produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Penambahan sarana prasarana oleh pemerintah daerah dirasa belum mengimbangi penambahan jumlah penduduk yang berimbas pada penambahan produksi sampah.

Pencapaian sebagai kota bersih (Kota Muntok) yang mewakili Kabupaten Bangka Barat dirasa cukup baik, dengan telah meraih penghargaan Adipura sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 2009, 2010 dan 2013. Walaupun cakupan penanganan sampah di Kecamatan Muntok masih sangat kecil, akan tetapi tingkat kebersihan pada fasilitas umum dan publik dapat dikatakan sangat baik.

Untuk fasilitas umum seperti pasar dan terminal pada kecamatan kecamatan lain, terkait pengelolaan sampah untuk sampai saat ini masih dikelola oleh pihak kecamatan, seperti pada Kecamatan Kelapa, Kecamatan Jebus dan Kecamatan Parittiga.

Terkait urusan lingkungan hidup lainnya yaitu pada perusahaan/ badan usaha/ pemilik usaha yang memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan tingkatannya. Berdasarkan tingkatan dokumen lingkungan yang ada untuk perusahaan/ badan usaha dibagi 3 yaitu

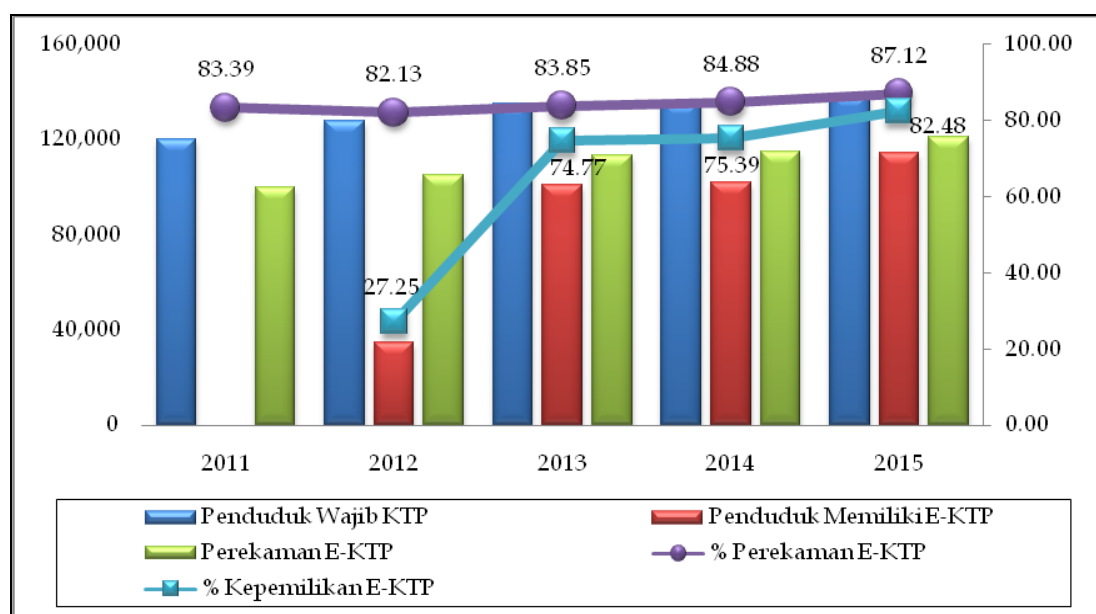
Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), dan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).

Dari data yang ada, perusahaan yang wajib amdal justru kepemilikan atas dokumen amdalnya baik, hampir semua perusahaan memilikinya. Semakin rendah tingkatan/level dokumen lingkungannya, dirasa kesadaran oleh perusahaan/badan usaha/pemilik usaha semakin rendah.

2.3.1.12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu pelayanan wajib pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya e-KTP serta pencatatan kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil lebih mudah namun tetap memiliki kendala terkait dengan pencetakan e-KTP yang dilakukan di pusat.

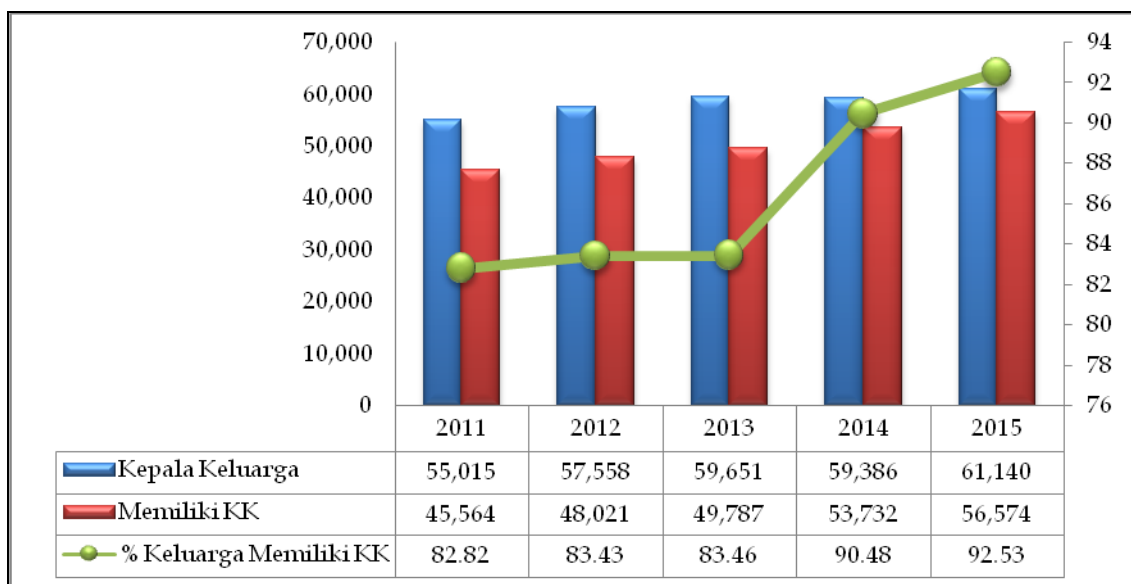
Hingga tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat masih mengeluarkan KTP manual untuk mengakomodir penduduk yang belum memiliki e-KTP yaitu yang telah melaksanakan perekaman namun belum memegang e-KTP. Namun terhitung mulai 1 Januari 2015 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak mengeluarkan KTP manual, hanya mengeluarkan surat keterangan untuk mengakomodir penduduk yang telah melaksanakan perekaman namun belum memiliki e-KTP.



Gambar 2.37 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2016

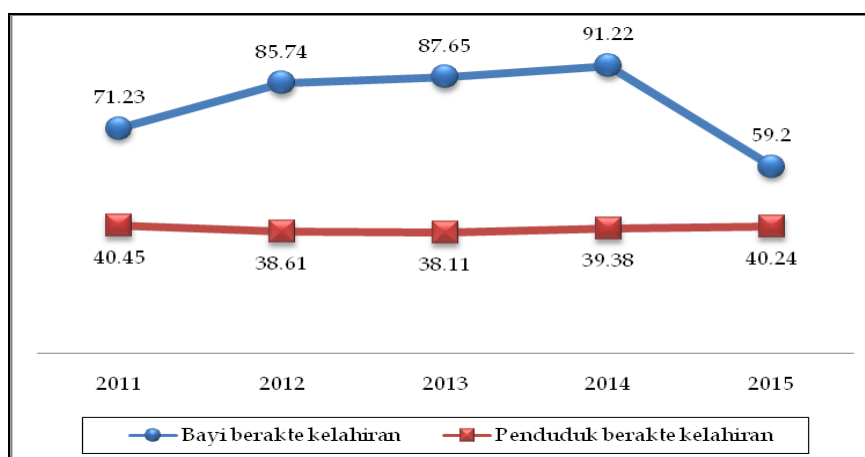
Hingga tahun 2015, penduduk yang telah memiliki e-KTP sebesar 82,48 persen dari jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP sebanyak 138.836 penduduk. Sementara penduduk yang telah melakukan perekaman pada tahun 2015 sebanyak 120.959 penduduk atau 87,12 persen.



Gambar 2.38 Persentase Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2016

Salah satu administrasi kependudukan yang harus dimiliki selain KTP adalah Kartu Keluarga (KK). Kepemilikan KK di Kabupaten Bangka Barat cukup tinggi dan terus meningkat. Pada tahun 2010 jumlah keluarga yang memiliki KK sebesar 81,85 persen dan pada tahun 2015 keluarga yang telah memiliki KK sebanyak 92,53 persen.



Gambar 2.39 Persentase Bayi dan Penduduk Berakte Kelahiran Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2016

Selama kurun waktu tahun 2011-2014, persentase bayi yang memiliki akte kelahiran terus meningkat, yaitu dari 71,23 persen di tahun 2011 menjadi 91,22 persen di tahun 2014. Namun pada tahun 2015 terjadi penurunan yang signifikan sehingga jumlah bayi yang berakte kelahiran menjadi sebesar 59,2 persen. Sementara untuk persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran sampai dengan tahun 2015 masih rendah dikarenakan yang tercatat hanya sebesar 40,24 persen. Hal ini disebabkan karena penduduk yang memiliki akte kelahiran yang dikeluarkan sebelum Kabupaten Bangka Barat terbentuk (sebelum pemekaran) tidak tercatat di Kabupaten Bangka Barat namun di Kabupaten Bangka (kabupaten induk sebelum pemekaran).

2.3.1.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya dapat berhasil apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan.

Sesuai dengan Agenda Pembangunan Nasional ketiga dalam RPJMN 2014-2019 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Strategi pembangunan desa dan kawasan perdesaan diantaranya dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan dan pembentukan modal sosial budaya, serta pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disertai dengan peraturan pelaksana yang secara tidak langsung menjadikan desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah yang memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterahkan rakyatnya. Beberapa perubahan yang sangat mendasar terhadap status desa berdasarkan perundangan tersebut meliputi kedudukan dan jenis desa, kewenangan desa, keuangan dan aset desa.

Penetapan perundangan tentang desa dan peraturan pelaksana, menuntut penyiapan dan penguatan kapasitas, baik aparatur pemerintahan desa maupun masyarakat. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan unsur-unsur masyarakat yang terlibat secara langsung dalam tata kelola desa menjadi syarat agar pelaksanaan perundangan tentang desa dapat berjalan optimal. Peranan kelembagaan di tingkat desa juga memiliki peran yang penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan

di desa. Menurut perundangan tentang desa terdapat 6 (enam) lembaga desa yang terdiri dari pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, kerjasama antar desa serta Badan Usaha Milik Desa.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, khususnya terkait dengan perencanaan, masih terdapat desa yang belum menyusun dokumen perencanaan seperti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), sehingga dalam pelaksanaan pembangunan belum didasarkan pada tahap perencanaan yang benar dan sistematis.

Dengan ditetapkannya perundangan tentang desa, konsekuensi yang terjadi yaitu dana desa akan dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa, yang sebelumnya merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Nasional (PNPM) Mandiri Perdesaan. Dengan penghentian kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan secara mendadak dan tidak adanya persiapan pemerintah untuk melaksanakan perundangan tentang desa di Tahun 2015 secara tidak langsung dapat mengancam pelaksanaan dan harapan dari perundangan tentang desa itu sendiri.

Kabupaten Bangka Barat memiliki 60 desa yang tersebar di 6 (enam) kecamatan. Masing-masing desa yang ada tentunya memiliki potensi yang berbeda-beda. Potensi desa tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dengan kehadiran salah satu lembaga desa yang bergerak di bidang perekonomian yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes yang ada di Kabupaten Bangka Barat sampai dengan saat ini belum berjalan dengan optimal. Masih banyak desa yang belum memiliki BUMDes walaupun jika dilihat dari segi potensi yang dimiliki sangat memungkinkan untuk dibentuk BUMDes.

Saat ini hampir seluruh desa yang telah dilakukan fasilitasi pembentukan BUMDes. Hanya saja karena kurangnya pemahaman serta pembinaan yang dilakukan kepada desa sehingga banyak desa yang enggan untuk membentuk BUMDes. Padahal, sejak perundangan tentang desa diberlakukan, BUMDes yang notabene merupakan salah satu lembaga desa diharapkan dapat membangun desa melalui pemberdayaan masyarakatnya dalam mengolah potensi di desanya. BUMDes diharapkan akan menjadi jembatan penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan potensi desa untuk mensejahterakan masyarakat perdesaan.

2.3.1.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Struktur kependudukan suatu daerah mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang ada disuatu wilayah. Secara visual, struktur kependudukan lebih mudah dilihat dengan menggunakan piramida penduduk. Piramida penduduk Kabupaten Bangka Barat di tahun 2007 dan tahun 2015 mengalami perubahan yang cukup signifikan, khususnya pada kelompok usia muda. Dari gambar di bawah dapat dilihat pengendalian penduduk dari program keluarga berencana belum berkontribusi secara nyata, dimana perkembangan kelompok usia muda sangat besar.

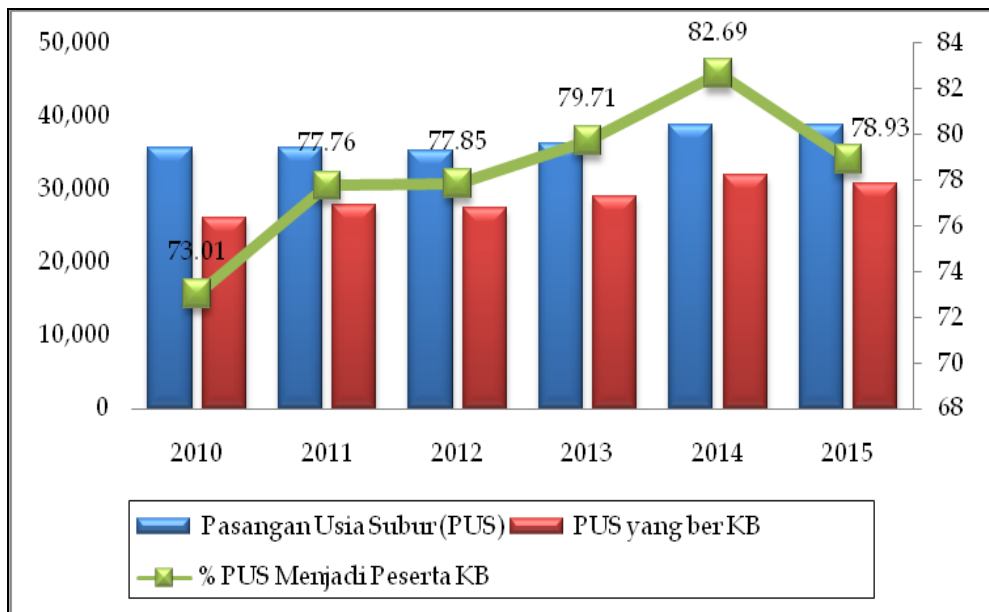


Gambar 2.40 Piramida Penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007 dan 2015

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangka Barat, 2016

Tujuan program Keluarga Berencana (KB) secara demografi adalah untuk menurunkan angka kelahiran sehingga diharapkan dapat mewujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera, dan berkualitas. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan pemerintah adalah dua orang anak lebih baik.

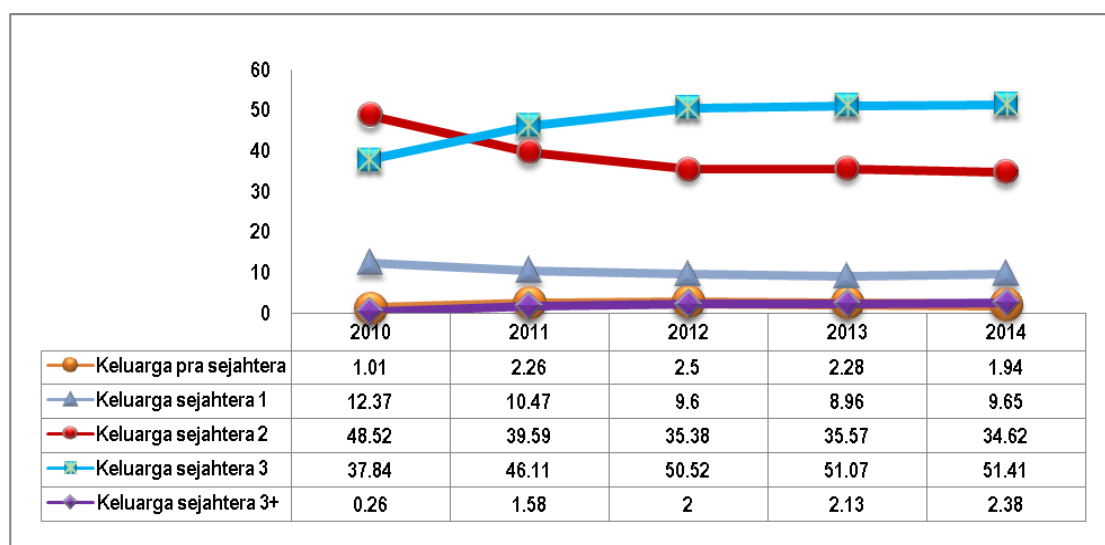
Capaian indikator terkait urusan KB Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun terakhir bervariasi namun cenderung meningkat kecuali di tahun 2015. Pada Tahun 2014, pasangan usia subur yang ber-KB sebanyak 82,69 persen dan menurun menjadi 78,93 persen di tahun 2015. Berdasarkan capaian tersebut menunjukkan kesungguhan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk menekan angka laju pertumbuhan penduduk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tentunya capaian tersebut juga didukung dengan adanya bantuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan alat dan obat kontrasepsi yang ditujukan untuk masyarakat yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.



Gambar 2.41 Persentase Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015

Sumber : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Tahun 2016

Selain melalui pelaksanaan program dan kegiatan terkait KB, untuk menarik minat masyarakat menjadi peserta KB aktif tentunya tidak terlepas dari peran para penyuluh KB. Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) pada tahun 2015 berjumlah 31 orang yang terdiri dari 18 PNS dan 13 PHL. Tentunya dengan melihat dari jumlah PLKB/PKB yang ditugaskan di 6 (enam) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat ini belum mencukupi untuk melayani kebutuhan masyarakat sesuai dengan SPM yaitu satu petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan (64 desa/kelurahan).



Gambar 2.42 Tingkat Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 – 2014

Sumber : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Tahun 2015

Sedangkan untuk tingkat kesejahteraan keluarga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 88,76 persen di tahun 2013 menjadi 88,41 persen di tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh menurunnya kondisi perekonomian Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2014 khususnya di sektor pertambangan yang mulai menurun.

2.3.1.15 Perhubungan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan yang mempunyai daya dorong dalam pembangunan kepariwisataan serta sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah sehingga terciptanya kenyamanan, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas, diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana transportasi yang memadai.

Dalam kurun waktu 2010 hingga 2015, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan transportasi sebagai salah satu hak dasar setiap warga negara. Kebutuhan pelayanan transportasi dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Seiring dengan peningkatan kebutuhan ini, maka tidak sedikit persoalan yang timbul di dalam penyelenggaraannya.

Kebijakan pembangunan sistem transportasi ke depan hendaknya dipadukan dalam sebuah bingkai sistem transportasi yang berkelanjutan yaitu suatu sistem yang memungkinkan kebutuhan akses yang mendasar dari masyarakat dapat terpenuhi dengan selamat, terjangkau, efisien, memberikan pilihan moda transportasi dan mendukung perkembangan ekonomi.

Berikut beberapa kondisi daerah Kabupaten Bangka Barat terkait dengan urusan perhubungan antara lain :

a. Arus Penumpang Angkutan Umum

Indikator jumlah penumpang/barang yang diangkut menggambarkan mobilitas masyarakat dalam menggerakkan perekonomian di daerah yang diukur dengan menghitung jumlah penumpang/barang yang datang/berangkat dengan kendaraan umum. Rincian penumpang per jenis angkutan terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.30 Jumlah Sarana Prasarana dan Arus Penumpang dan Barang Angkutan Umum

No.	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Penumpang Bis Datang (org)	33.578	43.410	52.930	67.885	30.431	54.026

No.	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2	Jumlah Penumpang Bis Berangkat (org)	42.709	49.974	50.128	66.859	31.154	59.637
3	Jumlah Penumpang Kapal Laut Datang (org)	199.586	255.321	198.690	136.370	171.777	94.711
4	Jumlah Penumpang Kapal Laut Berangkat (org)	167.866	201.094	230.145	190.845	121.412	80.288
5	Jumlah Angkutan Umum						
	- Jumlah Bus / Travel	51	59	62	70	120	112
	- Kapal Laut	9	9	10	11	9	8
	- Angkutan Kota	-	-	-	-	13	12

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika, Tahun 2016

Dari tabel di atas, secara umum dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada arus penumpang bis baik itu keberangkatan maupun kedatangan pada tahun 2015. Sedangkan untuk arus penumpang keluar masuk kapal laut pada akhir tahun 2015 juga mengalami penurunan. Hal ini ditenggarai karena semakin menurunnya jumlah masyarakat urban penambang timah dari luar pulau Bangka yang mencari pekerjaan di Kabupaten Bangka Barat akibat dari semakin sedikitnya cadangan tambang timah di pulau ini.

b. Jaringan Trayek

Jumlah trayek antar kota dalam provinsi pada tahun 2015 adalah delapan trayek: trayek Terminal Muntok–Pangkalpinang, Pelabuhan Tanjung Kelian–Pangkalpinang, Kelapa–Pangkalpinang, Kundi–Pangkalpinang, Parittiga–Pangkalpinang, Jebus–Pangkalpinang dan Tempilang–Pangkalpinang. Sementara untuk jumlah trayek perkotaan terdiri dari dua trayek, yaitu terminal Muntok–Pelabuhan Tanjung Kalian dan Angkutan Dalam Kota Muntok. Sedangkan untuk trayek pedesaan Terminal Muntok-Terminal Parittiga, Terminal Muntok-Terminal Kelapa dan Terminal Muntok - Kecamatan Tempilang, Terminal Muntok-Mayang dan Muntok–Kundi.

Tabel 2.31 Jaringan Trayek Kabupaten Bangka Barat

No.	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah trayek antar kota dalam provinsi	8	8	8	8	8	8
2.	Jumlah trayek perkotaan dalam kabupaten	-	-	-	-	2	2
3.	Jumlah trayek pedesaan dalam kabupaten	3	3	3	5	5	5

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika, Tahun 2016

Dari data diatas, jika dibandingkan dengan jumlah desa yaitu sebanyak 60 desa, maka dengan jumlah trayek dalam pedesaan sebanyak lima trayek adalah kecil. Namun hal ini juga bisa diartikan bahwa ada alternatif lain dalam keterhubungan transportasi antar desa yaitu berupa ketersediaan jasa ojek dan kurangnya minat masyarakat untuk mengguna jasa transportasi pedesaan.

c. Uji KIR Angkutan Umum

Sampai dengan tahun 2013, pengujian KIR dilakukan di Pangkalpinang dikarenakan Bangka Barat belum memiliki alat uji KIR. Namun pada tahun 2013 Kabupaten Bangka Barat telah memiliki 1 unit kendaraan uji KIR keliling yang akan dioperasikan pada tahun 2014 dengan jumlah petugas sebanyak 2 orang. Dalam 1 kali pelaksanaan uji KIR dibutuhkan waktu \pm 25 menit. Pada Tahun 2014, jumlah kendaraan yang diuji KIR sebanyak 2.598 unit atau 42,18 persen dari jumlah kendaraan yang wajib uji KIR, sedangkan untuk tahun 2015 jumlah kendaraan yang diuji KIR sebanyak 1.910 unit. Namun sampai dengan tahun 2015 Kabupaten Bangka Barat belum memiliki tempat yang representative sesuai standar untuk pengujian kendaraan bermotor, selain itu kurangnya SDM yang terlatih menjadi kendala yang cukup berarti. Untuk biaya pengujian KIR berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Tabel 2.32 Uji KIR Angkutan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015

No.	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tempat Uji KIR	-	-	-	-	1	1
2.	Petugas Uji KIR	-	-	-	-	2	2
3.	Lama Pengujian KIR (menit)	25	25	25	25	25	25
4.	Jumlah kendaraan	36.187	45.215	38.236	45.161	35.338	42.247
	- Kendaraan Roda Dua	32.158	40.117	37.657	38.455	29.643	35.734
	- Kendaraan Roda Empat/lebih	4.029	5.098	5.790	6.706	5.695	65.13
5.	Jumlah Kendaraan wajib KIR yang diuji KIR	2.104	2.335	2.239	2.828	2.598	1.910
	- Ulang	1.929	1.999	1.888	2.508	2.383	-
	- Baru	175	336	351	320	215	-
6.	Biaya Pengujian KIR						

No.	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	- Mobil penumpang	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- Mobil Bus	-	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- Mobil Barang	-	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	- Kereta	-	-	-	-	-	-
	- Kereta gandeng	-	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika, Tahun 2016

d. Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bus

Saat ini, Kabupaten Bangka Barat memiliki tiga pelabuhan laut, yaitu Pelabuhan Muntok, Pelabuhan Unit Metalurgi dan Pelabuhan Tanjung Kelian. Pelabuhan Muntok diperuntukkan sebagai pelabuhan bongkar muat barang dan ikan. Kondisi pelabuhan Muntok semakin kritis dikarenakan terjadinya sedimentasi/pengendapan tanah di daerah pesisir pelabuhan. Hal ini berdampak pada sulitnya kapal untuk mendekati ke daerah pantai. Kapal harus berhenti sekitar 50-100 meter dari pantai. Sedangkan untuk Pelabuhan Unit Metalurgi dikhususkan untuk keperluan bongkar muat PT. Timah, Tbk saja. Pelabuhan Tanjung Ular merupakan pelabuhan penumpang sekaligus pelabuhan barang karena sebagian besar barang masuk atau keluar dari Kabupaten Bangka Barat ke Pulau Sumatera melalui pelabuhan ini dengan menggunakan fasilitas kapal feri.

Tabel 2.33 Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bis di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015

No.	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pelabuhan Laut	3	3	3	3	3	3
2	Terminal Bis	3	3	3	3	3	3

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika, Tahun 2016

Untuk melayani transportasi antarkota dan di dalam kota, Kabupaten Bangka Barat memiliki tiga buah terminal, yang terletak di Kecamatan Muntok, Kecamatan Kelapa dan Kecamatan Parittiga. Tipe terminal tertinggi yang dimiliki saat ini adalah tipe C yang terletak di Kecamatan Muntok. Rute bis via terminal yang ada saat ini belum melingkupi hingga ke seluruh pelosok daerah yang ada di Kabupaten Bangka Barat.

Guna meningkatkan upaya keselamatan, keamanan, ketertiban dan mencegah serta mengurangi kecelakaan lalu lintas, dari tahun 2010 hingga tahun 2015 telah dilakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 683 unit, lampu

lalu lintas (*traffic light*) sebanyak 24 unit di empat lokasi, pagar pengaman jalan sepanjang 2.412 meter, *delineator* sebanyak 542 unit, pengecatan marka jalan sepanjang 17.800 meter, *warning light* 20 unit, pengadaan *traffic cone* sebanyak 270 unit dan pemasangan median jalan sepanjang 155,83 meter.

Tabel 2.34 Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015

No.	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah rambu-rambu lalu lintas (unit)	211	285	364	504	604	683
2	Jumlah Traffic Light (lokasi/unit)	-	-	3/18	4/24	4/24	4/24
3	Panjang Pagar pengaman jalan (m)	324	432	844	1.732	2.032	2.412
4	Jumlah Deliniator (unit)	191	191	191	542	542	542
5	Panjang Marka jalan (m)	100	100	1.100	6.800	12.800	17.800
6	Jumlah Warning Light (unit)	0	6	6	10	20	20
7	Jumlah Traffic Cone (unit)	0	0	0	130	130	270
8	Panjang Median jalan (m)		155,83	155,83	155,83	155,83	155,83

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika, Tahun 2016

Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika sedang melakukan kajian penyusunan Rencana Induk Transportasi Perkotaan (RITP) yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui kebutuhan akan sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Bangka Barat selanjutnya.

2.3.1.16 Komunikasi dan Informatika

Keterbukaan informasi sudah menjadi kebutuhan masyarakat suatu daerah agar dapat bersaing secara global. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang mendukung pertukaran informasi dan terjadinya komunikasi. Semakin baik akses masyarakat terhadap teknologi, maka semakin baik pula pemahaman terhadap informasi.

Kabupaten Bangka Barat merupakan wilayah yang perkembangannya tidak bisa terlepas dari interaksi dengan wilayah sekitarnya. Pada bagian-bagian sebelumnya, telah diutarakan bahwa terdapat banyak potensi-potensi internal daerah Bangka Barat, yang bisa berkembang dengan adanya suntikan investasi ataupun kerjasama dengan investor dari luar daerah. Oleh karena itu, akses terhadap informasi dan komunikasi merupakan salah

satu poin krusial dalam menunjang perkembangan dan pembangunan di wilayah ini. Apalagi dengan kondisi fisik geografisnya yang berada pada wilayah kepulauan, perlu adanya infrastruktur penunjang yang bisa mengatasi kendala (*barrier*) fisik ini. Teknologi nirkabel (*wireless*) merupakan salah satu tumpuan dalam sistem informasi dan komunikasi di Kabupaten Bangka Barat. Keberadaan jaringan telekomunikasi dari PT. Telkom (*Speedy*) beserta operator-operator telepon seluler saat ini menjadi primadona untuk komunikasi jarak jauh masyarakat setempat.

Tabel 2.35 Jumlah Pelanggan Telepon dan Speedy di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012

Kecamatan	Pengguna Telepon	Pengguna <i>Speedy</i>	Total
Muntok	1.396	266	1.662
Simpang Teritip	-	-	-
Kelapa	58	16	74
Tempilang	8	10	18
Jebus	69	23	92
Parittiga	677	172	849
Total	2.208	487	2.695

Sumber: Bangka Barat Dalam Angka 2013

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung telah membangun fasilitas internet gratis bagi masyarakat yang diletakan di beberapa titik strategis. Urusan Komunikasi dan Informatika mempunyai peranan penting untuk menjelaskan kebijakan, program, kegiatan dan agenda yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah kepada seluruh masyarakat. Di lain pihak masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui dan memperoleh informasi secara utuh mengenai berbagai hal yang menyangkut kepentingannya maupun kepentingan publik. Dampak dari berkembangnya teknologi dengan pesat adalah keterbukaan komunikasi dan informasi bagi seluruh masyarakat, dengan berkembangnya teknologi masyarakat dapat berkomunikasi dan mendapatkan informasi secara cepat sesuai kepentingannya dan mengetahui kepentingan publik lainnya.

Pada Tahun 2014 Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika telah menyusun Peraturan Bupati tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam rangka penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika guna meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana maka bidang komunikasi dan informatika merancang suatu indikator kinerja. Adapun indikator kinerja bidang komunikasi dan informatika ditunjukan untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan seluruh masyarakat. Untuk lebih lanjut tentang

kondisi umum capaian penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika dari tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36 Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah SIM di Kabupaten Bangka Barat	1	7	10	22	22	22
- Jumlah SIM berbasis aplikasi desktop		3	4	4	4	4
- Jumlah SIM berbasis aplikasi web	1	4	6	18	18	18
Jumlah Publikasi Media Massa						
- Televisi				1	1	1
- Media Cetak		5	6	6	6	5
- Radio	1			1	1	2
Jumlah Radio lokal	2	2	2	2	2	2
Jumlah pengunjung <i>website</i> milik Pemda	8.299	27.080	59.422	3.655	1.770	1.443

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika, Tahun 2016

Pada tahun 2010 jumlah SIM yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat hanya 1 SIM, yaitu pengelolaan *website* pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Hingga tahun 2015 jumlah SIM yang dikelola berdasarkan hasil pantauan Bidang Informatika Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika Kabupaten Bangka Barat sejumlah 22 SIM, yang terdiri dari 18 SIM berbasis aplikasi *web* dan 4 SIM berbasis aplikasi *desktop*. Namun dari semua SIM diatas hanya ada 8 SIM yang aktif atau difungsikan. Selain itu dari semua SIM belum satupun yang terintegrasi.

Dalam kurun waktu Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015, secara rutin Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika telah melakukan publikasi ke beberapa media massa baik cetak maupun elektronik. Sampai dengan tahun 2015 terdapat 8 media massa yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan publikasi informasi pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

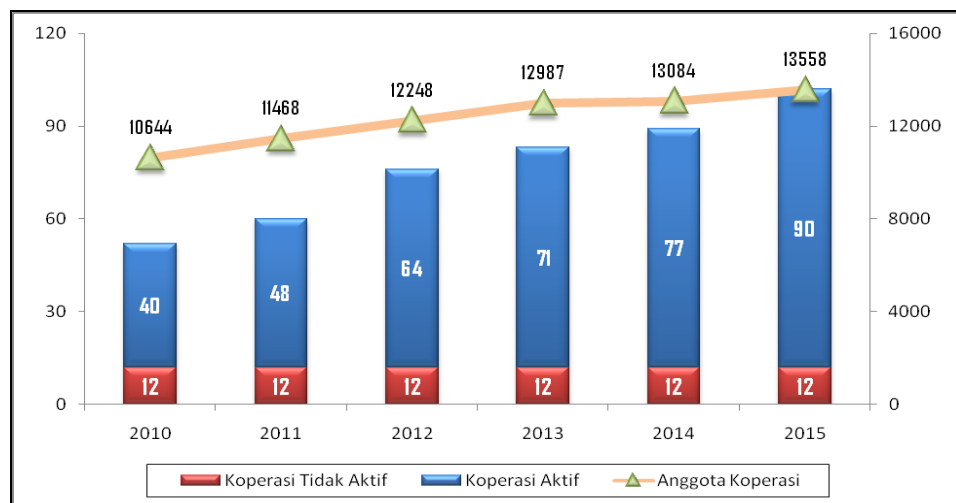
Dalam hal jumlah pengunjung *website* Kabupaten Bangka Barat terjadi tren penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan mulai tahun 2013 *website* Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mulai memberlakukan sistem penyaringan terhadap *website* tersebut.

Sehingga tidak terdapat lagi *spam* yang sebelumnya banyak terdapat pada list kunjungan yang ada. Namun jika dilihat dari jumlah kunjungan riil terhadap *website* Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2014 yaitu sejumlah 1.443 kunjungan maka hal ini menunjukkan kurangnya minat pengguna internet untuk mengunjungi *website* Kabupaten Bangka Barat.

2.3.1.17 Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi dengan landasan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam era desentralisasi daerah, koperasi berperan besar sebagai lembaga keuangan yang kokoh guna menjangkau lapisan bawah dari ekonomi kerakyatan, khususnya di wilayah perdesaan. Keberadaan koperasi juga berperan dalam menahan arus keluar sumber keuangan daerah karena beragam studi menunjukkan bahwa lembaga keuangan yang berbasis daerah akan lebih efektif dalam menahan arus kapital keluar.

Perkembangan koperasi di Kabupaten Bangka Barat dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Hadirnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya koperasi di tengah tengah lingkungan masyarakat serta didorong oleh pemerintah daerah lewat berbagai penyuluhan terkait koperasi dan bantuan sosial yang ditujukan koperasi membuat perkembangan koperasi di Kabupaten Bangka Barat cukup baik.

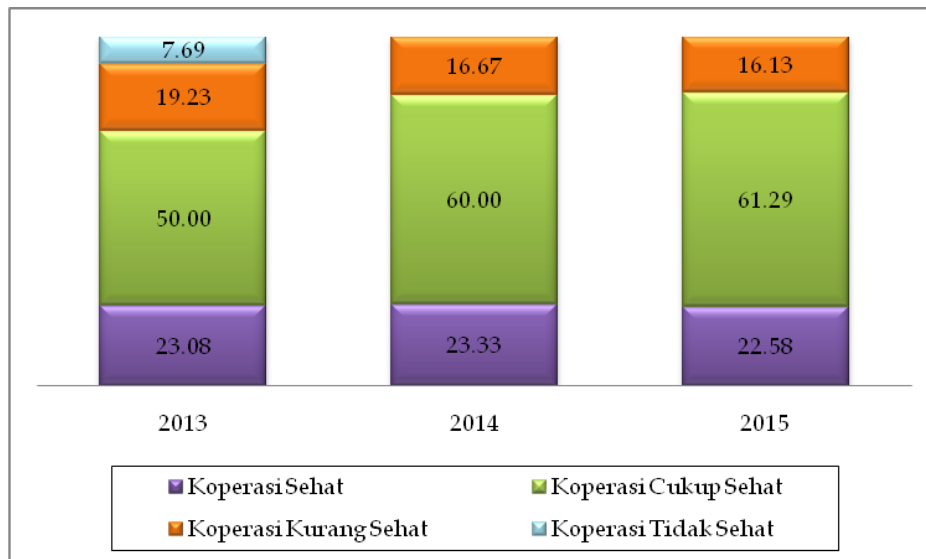


Gambar 2.43 Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak aktif serta Anggota Koperasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Tahun 2016

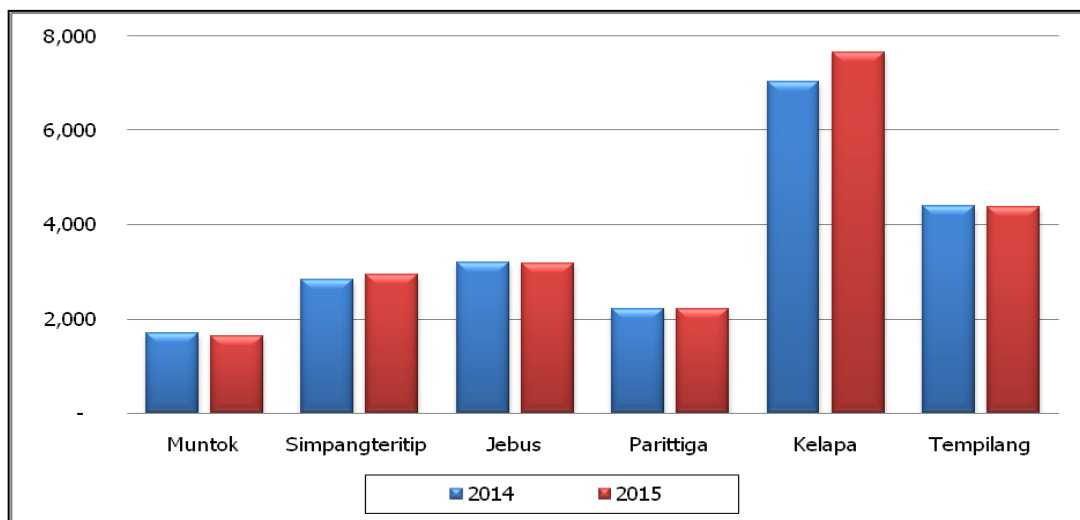
Perkembangan koperasi diharapkan turut membantu perputaran perekonomian, khususnya bagi masyarakat yang bergelut pada usaha mikro sesuai dengan kewenangan daerah.

Ketiadaan jaminan yang sering kali menjadi penghambat untuk melakukan pinjaman pada perbankan, menjadikan koperasi sebagai pilihan utama bagi masyarakat. Dari jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Bangka Barat, ± 35 persen bergerak pada usaha simpan pinjam. Terdapat pengklasifikasian terhadap koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Untuk beberapa tahun belakangan ini, koperasi simpan pinjam di Kabupaten Bangka Barat didominasi pada klasifikasi koperasi cukup sehat.



Gambar 2.44 Cakupan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Klasifikasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013-2015

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Tahun 2016



Gambar 2.45 Sebaran Usaha Mikro per Kecamatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2015

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Tahun 2016

Terkait usaha mikro yang digeluti oleh masyarakat di Kabupaten Bangka Barat, paling banyak berada pada Kecamatan Kelapa sebesar 34,78 persen yang diikuti oleh Kecamatan

Tempilang sebesar 19,92 persen. Usaha mikro inilah yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat, dan juga memiliki sumbangsih pada perolehan PDRB di Kabupaten Bangka Barat.

2.3.1.18 Penanaman Modal

Besarnya potensi yang dimiliki Kabupaten Bangka Barat khususnya di sektor perkebunan dan perindustrian membuka peluang untuk pengembangan investasi ke depan. Namun investasi yang banyak berkembang sampai saat ini adalah investasi pada usaha kecil dan menengah saja. Sementara investasi yang berskala nasional baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang telah terealisasi di Kabupaten Bangka Barat sampai tahun 2015 sebanyak 13 perusahaan yang sebagian besar bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.

Tabel 2.37 Investasi PMA dan PMDN
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009-2015

No	Jenis Investasi	Tahun Investasi	Status Investasi	Persetujuan Nilai Investasi	Realisasi Nilai Investasi
1.	Perkebunan Kelapa Sawit, CPO	2009	PMDN	83.760.000.000,00	83.760.000.000,00
2.	Perkebunan Kelapa Sawit, CPO	2009	PMDN	83.000.000.000,00	83.000.000.000,00
3.	Perkebunan Kelapa Sawit, CPO	2009	PMA	689.662.300.000,00	689.662.300.000,00
4.	Perkebunan Kelapa Sawit, CPO, Kernel	2009	PMDN	802.170.847.773,00	802.170.847.773,00
5.	Perkebunan Sawit	2009	PMA	215.609.892.881,00	215.609.892.881,00
6.	Perdagangan dan Jasa Elpiji	2009	PMDN	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00
7.	Tin Smelting dan Refining	2010	PMDN	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
8.	Pertambangan operasi produksi kaolin	2010	PMDN	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
9.	Pertambangan operasi produksi	2010	PMDN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
10.	Pertambangan operasi produksi	2010	PMDN	800.000.000,00	800.000.000,00
11.	Perkebunan Kelapa Sawit dan Nabati lainnya	2010	PMA	450.000.000.000,00	Belum terealisasi
12.	Tin Exploration, Mining, Smelting dan Refining	2012	PMDN	135.000.000.000,00	135.000.000.000,00
13.	Pertambangan	2012	PMDN	19.321.407.879,00	19.321.407.879,00

No	Jenis Investasi	Tahun Investasi	Status Investasi	Persetujuan Nilai Investasi	Realisasi Nilai Investasi
	operasi produksi				
14.	Pembangunan Stockpile Batubara	2012	PMDN	1.500.000.000.000	Belum terealisasi
15	Pabrik Pengolahan Tepung Tapioka	2015	PMDN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00

Sumber : Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, Tahun 2016

Dari 15 investasi yang masuk ke Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2009 sampai dengan 2015, hanya 13 PMA/PMDN yang dapat direalisasikan yang terdiri dari 2 PMA dan 11 PMDN. Daya serap tenaga kerja dari 13 investasi tersebut sebanyak 4.947 orang atau dengan rasio daya serap tenaga kerja sebesar 380,54. Sementara investasi yang belum terealisasi sampai dengan tahun 2015 sebanyak 2 investasi yaitu 1 PMA dibidang Perkebunan Kelapa Sawit dan Nabati lainnya serta 1 PMDN yaitu Pembangunan Stockpile Batubara. Salah satu potensi yang terus dipromosikan adalah pariwisata dan kawasan industri terpadu Tanjung Ular seiring dengan masuknya Pengembangan Pelabuhan Tanjung Ular sebagai salah satu kegiatan strategis jangka menengah nasional (RPJMN Tahun 2014-2019).

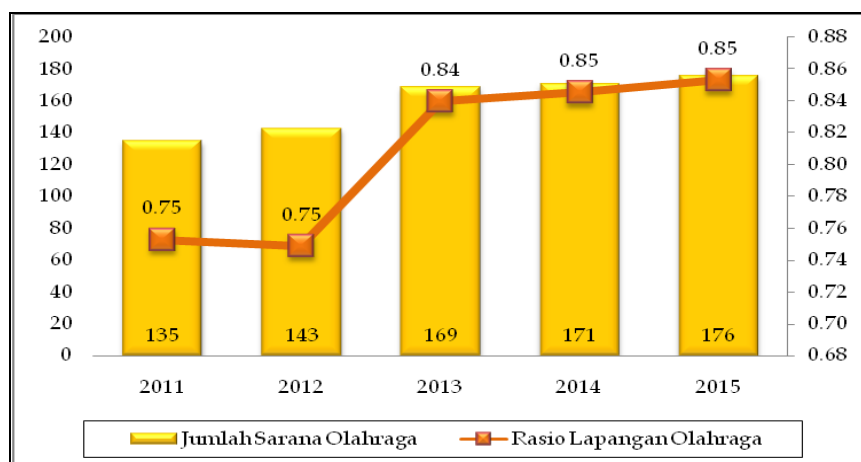
Dalam rangka menarik investasi masuk ke Kabupaten Bangka Barat, terus dilakukan upaya baik dari perbaikan pelayanan perizinan dan non perizinan serta promosi yang terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kemudahan dan kejelasan prosedur perizinan terkait investasi menjadi salah satu penentu dalam menarik investasi masuk ke daerah. Dalam rangka pelayanan penanaman modal, Kabupaten Bangka Barat telah menggunakan pelayanan secara elektronik melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Informasi Secara Elektronik (SPIPISE) dengan tujuan untuk memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan (data/informasi) penanaman modal dengan mudah, cepat, serta transparan.

Namun terkait pelayanan perizinan tertentu, masih terdapat beberapa perizinan yang belum memiliki kejelasan prosedur dikarenakan belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti izin lokasi, izin pemanfaatan ruang, dan izin prinsip penanaman modal. Selanjutnya menjadi tantangan pemerintah daerah ke depan untuk terus memperbaiki iklim investasi agar investor besar tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Bangka Barat.

2.3.1.19 Kepemudaan dan Olah raga

Fasilitas olahraga di Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan perhatian

pemerintah daerah dalam bidang olahraga cukup baik, meskipun dalam perkembangannya tidak terlalu tinggi khususnya jika dilihat dari rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk pada tahun 2013-2015.



Gambar 2.46 Jumlah Lapangan Olahraga dan Rasio Lapangan Olahraga per 1.000 Penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 – 2015

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Tahun 2016

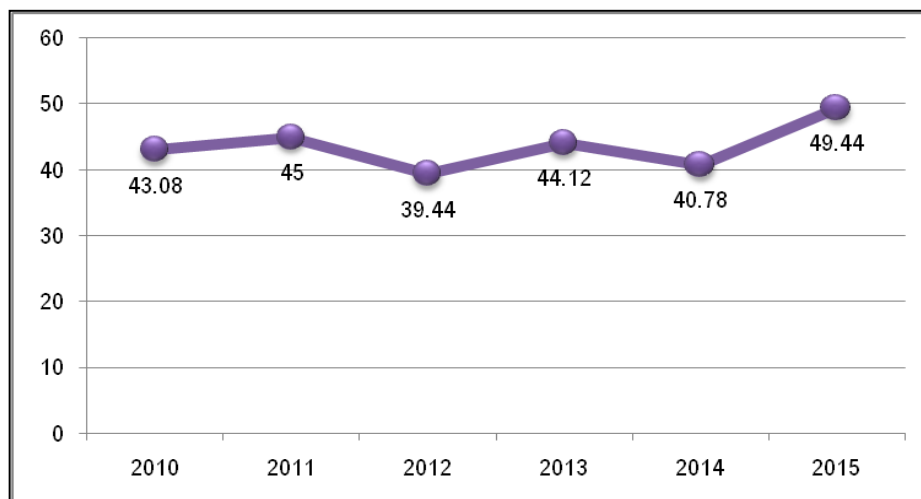
Permasalahan terkait kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Bangka Barat sejauh ini yaitu peran serta kepemudaan yang masih rendah dalam membangun daerah khususnya dilihat dari keaktifan organisasi pemuda.

2.3.1.20 Statistik

Ketersediaan data statistik sektoral bagi pemerintah daerah merupakan suatu keharusan dalam rangka menyajikan potensi serta sebagai bahan analisis perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Dalam rangka penyediaan data statistik, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah melakukan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka Barat khususnya untuk data makro seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta data statistik sektoral berupa Bangka Barat Dalam Angka (BBDA) yang diterbitkan setiap tahun. Selain kerja sama dalam penyediaan kedua buku tersebut, juga dilakukan kerja sama untuk penyusunan dokumen lain yaitu Penyusunan Indikator Ekonomi Kabupaten Bangka Barat.

Selain penyediaan data statistik yang dilakukan melalui kerja sama dengan BPS, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah melakukan pengelolaan data informasi pembangunan sebagai optimalisasi pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah. Namun demikian, untuk ketersediaan beberapa data

statistik sektoral dari Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka Barat masih belum dapat disajikan secara maksimal dikarenakan belum tervalidasi dan terkelola dengan baik sehingga kedepan masih perlu dilakukan pembenahan terhadap pengelolaan data statistik sektoral daerah.



Gambar 2.47 Persentase Keterisian Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 - 2015

Sumber : Bappeda, Tahun 2015

2.3.1.21 Persandian

Urusan persandian merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi urusan pemerintah daerah sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelumnya urusan ini tergabung dalam Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Urusan persandian di Kabupaten Bangka Barat sampai dengan tahun 2015 belum dilaksanakan mengingat persandian belum merupakan hal yang biasa digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

2.3.1.22 Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan merupakan bagian dari proses pembangunan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur. Pembangunan kebudayaan tercakup dalam pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, sesuai Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama

diarahkan pada pencapaian sasaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Dalam pembangunan kebudayaan, terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Disamping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif serta harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan ditinjau dari tingkat pemanfaatan seni dan budaya dalam penyelenggaraan *event*, baik di daerah maupun luar daerah Kabupaten Bangka Barat. Sejauh ini, seni dan budaya daerah umumnya ditampilkan pada upacara adat, seperti perang ketupat, tujuh likur, dan acara-acara resmi kedaerahan. Sementara sarana penunjang seperti gedung kesenian belum tersedia di Kabupaten Bangka Barat.

Kabupaten Bangka Barat banyak memiliki benda dan situs bersejarah. Sebagian besar merupakan peninggalan kolonial Belanda. Dari hasil survei Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi terdapat 52 benda, situs dan kawasan bersejarah di Kabupaten Bangka Barat. 6 diantaranya telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya yang dilindungi berdasarkan pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.13/PW.007/MKP/2010 Tahun 2010, yaitu Eks Kantor Pusat PN. Timah, Wisma Ranggung, Pesanggrahan Menumbing, Klenteng Kong Fuk Nio, Rumah Mayor China, dan Masjid Jami' Muntok. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya pada Tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 3 kali di wilayah Mentok Kabupaten Bangka Barat. Festival tersebut terdiri dari Festival Bujang Dayang, Festival Tari Sejiran Setason, Festival Campak, Dambus, Rudat, Rebana.

Berikut beberapa indikator terkait dengan kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan:

Tabel 2.38 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 - 2015

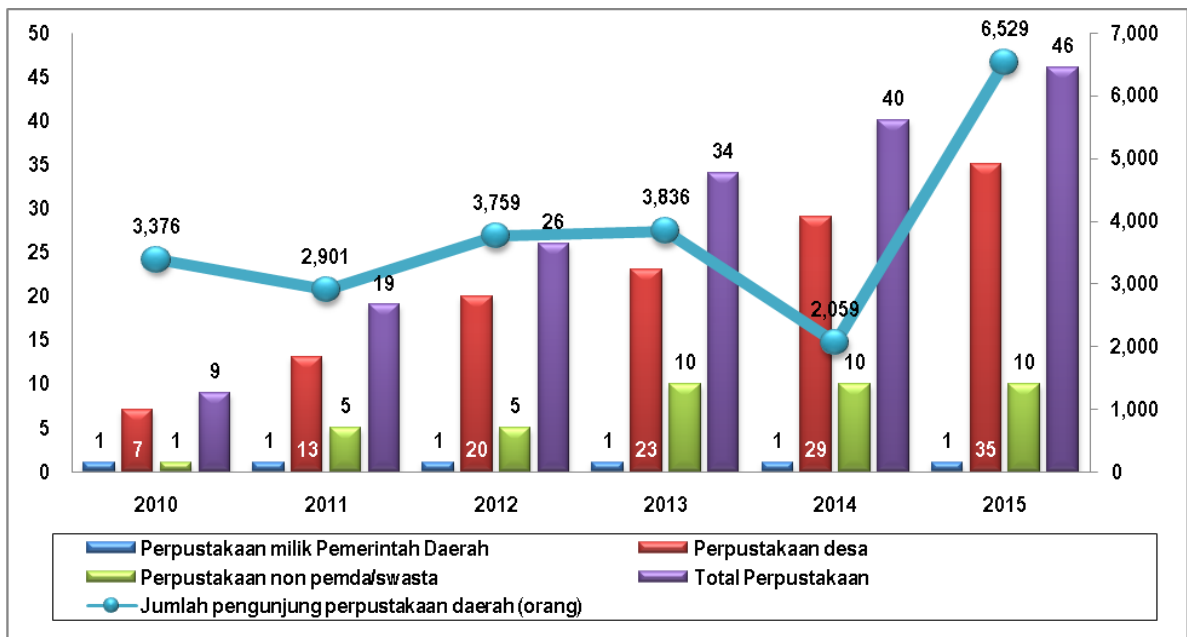
No.	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah sanggar kesenian	12	12	17	25	47	60
2.	Jumlah sanggar kesenian yang dibina/dibantu				8	19	16
3.	Event Seni tahunan	3	3	3	3	3	3

No.	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4	Event Budaya tahunan	9	9	10	11	12	15
5	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	-	-	-	-	-	-
6	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya	54	54	54	54	54	54
	- Kepemilikan pemerintah pusat	4	4	4	4	4	4
	- Kepemilikan pemerintah Provinsi Bangka Belitung	1	1	1	1	1	1
	- Kepemilikan pemerintah Kabupaten Bangka Barat	5	5	5	5	5	5
	- Kepemilikan pemerintah daerah lainnya	0	0	0	0	0	0
	- Kepemilikan lembaga/ organisasi	1	1	1	1	1	1
	- Kepemilikan yayasan	5	5	5	5	5	5
	- Kepemilikan umum	6	6	6	6	6	6
	- Kepemilikan pribadi	32	32	32	32	32	32
7	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan						
	- Kepemilikan pemerintah pusat						
	- Kepemilikan pemerintah Provinsi Bangka Belitung	1	1	1	1	1	1
	- Kepemilikan pemerintah Kabupaten Bangka Barat	1	1	1	1	1	1
	- Kepemilikan pemerintah daerah lainnya						
	- Kepemilikan lembaga/ organisasi	1	1	1	1	1	1
	- Kepemilikan yayasan	1	1	1	1	1	1
	- Kepemilikan umum						
	- Kepemilikan pribadi	2	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika, Tahun 2016

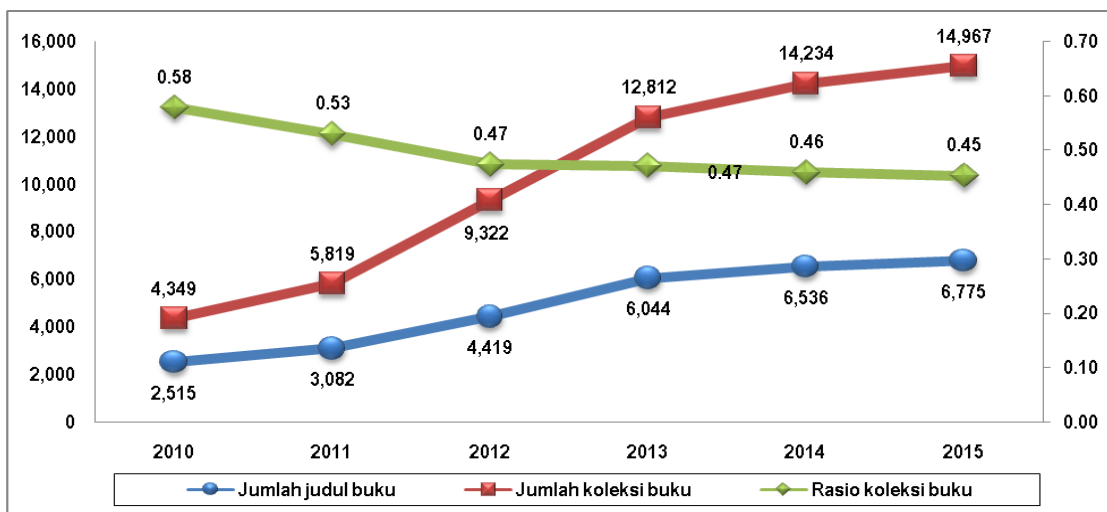
2.3.1.23 Perpustakaan

Budaya membaca merupakan kebiasaan yang perlu terus diasah dan dipupuk sejak dini. Membaca membuka wawasan terhadap berbagai macam hal yang bermanfaat. Perpustakaan sebagai gudang buku sangat berperan penting dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Bangka Barat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dengan jumlah perpustakaan pada tahun 2010 sebanyak 9 perpustakaan menjadi 46 perpustakaan di tahun 2015.



Gambar 2.48 Jumlah Perpustakaan dan Pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 - 2015

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, Tahun 2016



Gambar 2.49 Koleksi Buku Perpustakaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 - 2015

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, Tahun 2016

Untuk meningkatkan kunjungan di perpustakaan, maka ketersediaan dan keragaman buku bacaan sangat menentukan. Sampai dengan tahun 2015 koleksi dan judul buku perpustakaan terus meningkat baik yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sendiri maupun bantuan dari provinsi dan pusat.

2.3.1.24 Kearsipan

Dalam rangka pengelolaan kearsipan di Kabupaten Bangka Barat, pada tahun 2012 telah dibangun gedung *record center*/depot arsip untuk menyimpan/menyelamatkan dokumen arsip Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Untuk pencapaian pengelolaan arsip secara baku telah dilakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan SDM pengelola kearsipan dan sampai dengan tahun 2015, Perangkat Daerah yang telah mengelola arsip secara baku sebanyak 27 Perangkat Daerah atau sebesar 84,38 persen.

Tabel 2.39 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 - 2015

No.	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pengelolaan arsip secara baku (%)	-	6,45	16,13	46,88	84,38
2.	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (kegiatan)	1	1	3	1	4
3.	Jumlah arsip yang telah disimpan/diselamatkan (M ¹)	-	56	141	299,4	340

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, Tahun 2016

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1 Kelautan dan Perikanan

Produksi subsektor perikanan khususnya perikanan laut sangat dominan di Kabupaten Bangka Barat mengingat Pulau Bangka dikelilingi oleh lautan dengan sumberdaya laut yang relatif besar untuk dikembangkan. Diantara komoditi yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi antara lain adalah ikan kerapu, kakap merah, udang, cumi-cumi, sirip ikan, dan lain-lain. Selain potensi tangkapan di laut, potensi yang tak kalah besarnya adalah perikanan budidaya di sekitar pesisir, namun saat ini belum maksimal dikembangkan oleh masyarakat.

Permasalahan di bidang perikanan yang dihadapi hingga saat ini di antaranya adalah masih maraknya pencurian ikan (*illegal fishing*), ancaman kerusakan terumbu karang yang dapat mengurangi hasil tangkapan ikan, serta tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), serta modal melaut seperti sarana/prasarana menangkap ikan yang mahal.

Peningkatan jumlah masyarakat nelayan dalam empat tahun terakhir cukup menjelaskan bahwa subsektor perikanan termasuk yang diminati masyarakat sebagai ladang usaha. Adanya sumber daya alam subsektor perikanan dan sumber daya manusia yang bergerak di subsektor tersebut selanjutnya masih memerlukan keterlibatan pemerintah daerah

guna meningkatkan nilai tambah bagi perbaikan kehidupan nelayan dan perbaikan ekonomi daerah secara keseluruhan.

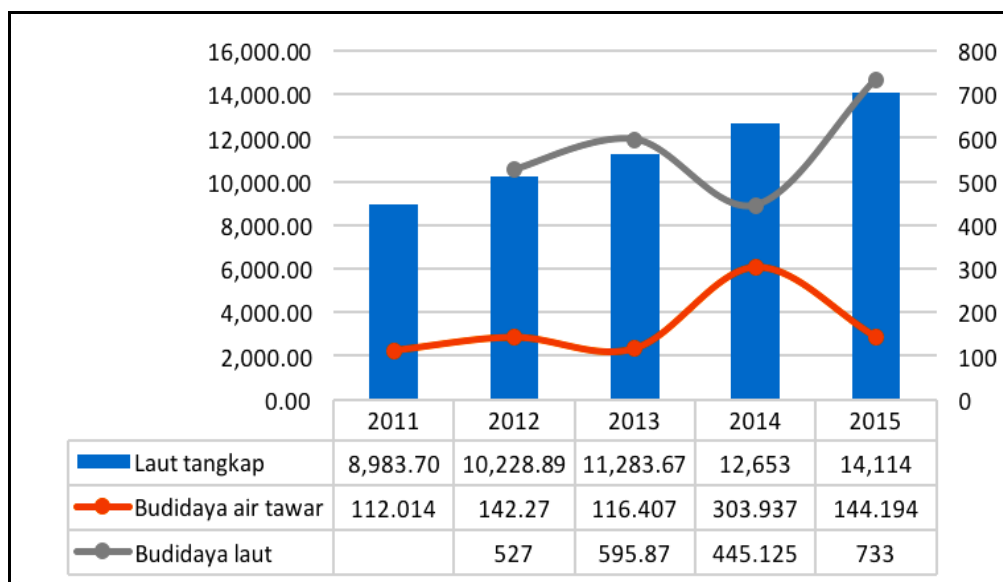
Tabel 2.40 Jumlah Nelayan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015

No.	Kecamatan	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Muntok	385	615	510	615	615	917
2.	Simpangteritip	358	360	657	736	736	754
3.	Kelapa	213	228	244	279	279	226
4.	Tempilang	478	440	650	698	698	455
5.	Jebus	427	205	200	253	253	190
6.	Parittiga		303	283	315	315	600
Jumlah Orang		1.861	2.151	2.544	2.896	2.896	3.142

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, Tahun 2016

Sejak tahun 2010, jumlah nelayan di Kabupaten Bangka Barat terus meningkat, dari 1.861 orang di tahun 2010 menjadi 3.142 orang di tahun 2015 yang tersebar di setiap wilayah kecamatan dalam Kabupaten Bangka Barat. Kecamatan Muntok merupakan kecamatan dengan jumlah nelayan paling banyak, dan diikuti oleh Kecamatan Simpangteritip serta Kecamatan Parittiga.

Secara umum, urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Bangka Barat terkendala pula karena masih rendahnya minat nelayan untuk menjadikan usaha perikanan sebagai profesi utama. Pekerjaan sebagai nelayan dianggap belum dapat memberikan penghasilan yang cukup sehingga sebagian penduduk hanya menjadi nelayan sebagai sambilan. Hal ini dipengaruhi pula oleh ketersediaan penyuluh perikanan yang masih sedikit serta belum optimalnya pemberdayaan yang dilakukan terhadap nelayan.



Gambar 2.50 Jumlah Produksi Perikanan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015 (ton)

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, Tahun 2016

Jumlah Produksi Perikanan dari tahun 2010 hingga tahun 2015 terus meningkat berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah nelayan di Kabupaten Bangka Barat. Dilihat perkembangannya sejak tahun 2010 hingga tahun 2015, produksi perikanan di Kabupaten Bangka Barat masih sangat didominasi oleh perikanan tangkap (95 persen) dibandingkan dengan perikanan budidaya (5 persen). Untuk perikanan budidaya di Kabupaten Bangka Barat masih terkendala pada masih rendahnya kualitas SDM perikanan budidaya serta minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan budidaya sehingga usaha budidaya perikanan masih sangat rendah meskipun cenderung meningkat.

2.3.2.2 Pariwisata

Perkembangan jumlah kunjungan wisata ke obyek-obyek wisata di Kabupaten Bangka Barat sampai dengan tahun 2014, secara umum menunjukkan kenaikan jumlah kunjungan yang cukup tinggi. Melalui data kunjungan yang menunjukkan kecenderungan meningkat ini sudah cukup meyakinkan bahwa pariwisata telah memiliki prospek untuk berkembang di masa mendatang. Pengelolaan/management dan pemasaran yang profesional memang memberikan peluang bagi keterlibatan dunia usaha ikut menggarap pengembangan pariwisata Bangka Barat. Potensi obyek dan daya tarik wisata yang dimiliki Kabupaten Bangka Barat cukup beragam seperti wisata alam, wisata budaya dan wisata sejarah. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu menyiapkan sejumlah kebijakan yang kondusif bagi pengembangan pariwisata Bangka Barat yang tetap mempertahankan jati diri/karakter lokal dan menjamin kelestarian lingkungan.

Tabel 2.41 Pantai/Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Bangka Barat

Kecamatan	Alam, Pantai, dan Sungai	Alam/Pegunungan	Hutan dan Taman Wisata
Muntok	Pantai Baturakit Pantai Asmara Pantai Tanjung Kalian Pantai Tanjung Ular Pantai Tanah Merah Pantai Menggris	Batu Balai	Hutan Konservasi Menumbing Kapal Ashinagara Kapal SS Vyner Brooke Perkebunan Durian dan cempedak Karang Aji Karang Berang-Berang
Simpang Teritip	Pantai Aikemas Pantai Tungau		Perkebunan Durian Simpangteritip Hutan Cempedak Rakyat Simpangtiga
Jebus	Pantai Bembang Pantai Mentiba	Sumur Dewa Danau Sekar Biru Pulau Nenas	Perkebunan Durian Jebus
Kelapa		Air Panas Dendang	Perkebunan Kelapa Sawit Dendang
Tempilang	Pantai Pasir Kuning Pantai Kedacak		Perkebunan Kelapa Sawit Tempilang
Parittiga	Pantai Siangau Pantai Jebu Darat Pantai Jebu Laut Pantai Cupat Pantai Pala Pantai Bakit		Karang Malang Guntur Teluk Limau Karang Malang Doyang Teluk Limau Karang Malang Iyu eluk Limau

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Informatika Kab.Bangka Barat, Tahun 2015.

Meskipun kontribusi dalam PDRB Kabupaten Bangka Barat untuk subsektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum masih sangat rendah, namun menunjukkan nilai yang positif yaitu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 kontribusi subsektor ini sebesar 0,88 persen dan di tahun 2015 menjadi 1,11 persen dalam PDRB.

Tabel 2.42 Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Bangka Barat

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kunjungan wisatawan asing (Mancanegara)	40	12	7	6	1	195
Kunjungan wisatawan domestic (Nasional)	5.980	6.881	10.645	11.721	9.414	44.029
Kunjungan wisata	6.020	6.893	10.652	11.727	9.415	44.222

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Informatika Kab. Bangka Barat, Tahun 2016

Peningkatan produktivitas sektor ini juga ditandai dengan peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Bangka Barat. Pada tahun 2010 kunjungan wisata yang

terdata sebanyak 6.020 orang dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 44.222 orang. Terlihat bahwa di tahun 2012 dan 2015 terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari tahun-tahun lainnya. Penghitungan kunjungan wisata dilakukan melalui kunjungan hotel/penginapan serta karcis/retribusi masuk kawasan wisata. Hanya saja kendala dalam penghitungan jumlah kunjungan wisata adalah terkait karcis/retribusi masuk ke kawasan wisata yang baru dimiliki di pintu masuk kawasan wisata Menumbing sedangkan untuk kawasan wisata lainnya tidak ada sehingga belum dapat dihitung.

Tabel 2.43 Jumlah Hotel/Penginapan/*Homestay* dan Even Wisata Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015

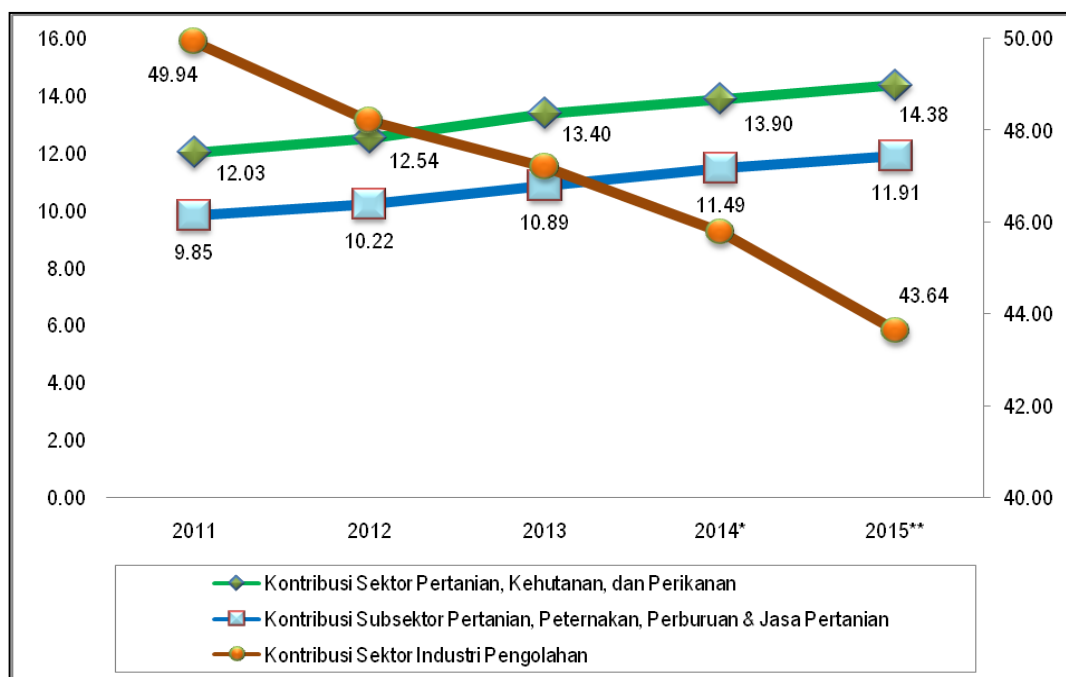
No.	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah travel agent	1	1	2	4	4	4
2	Event wisata tahunan				1	1	1
3	Jumlah hotel	1	2	2	2	3	3
4	Jumlah penginapan	8	8	9	9	9	9
5	Jumlah <i>Homestay</i>	-	-		-	-	25

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Informatika Kab. Bangka Barat, Tahun 2016

Meskipun daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Bangka Barat sangat beragam serta memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, namun sampai saat ini belum dikelola secara profesional dan belum memiliki infrastruktur yang memadai. Sampai dengan tahun 2015 dari keseluruhan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Bangka Barat yang telah dikembangkan hanya dua objek wisata yang ada di Kecamatan Muntok yaitu Kawasan Menumbing dan Pantai Batu Rakit. Kedepan perlu dilakukan pengembangan yang disinergikan dengan aspek pembangunan lainnya seperti aspek perekonomian dan sosial budaya serta aspek infrastruktur sarana prasarana seperti jalan dan fasilitas umum guna menunjang kepariwisataan.

2.3.2.3 Pertanian

Pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu sektor unggulan dalam pembangunan perekonomian. Berdasarkan distribusi PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Bangka Barat, selama dua tahun terakhir sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan telah bergeser menjadi penyumbang terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian dan perkebunan kedepan jika dikelola dengan tepat dan optimal akan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat.



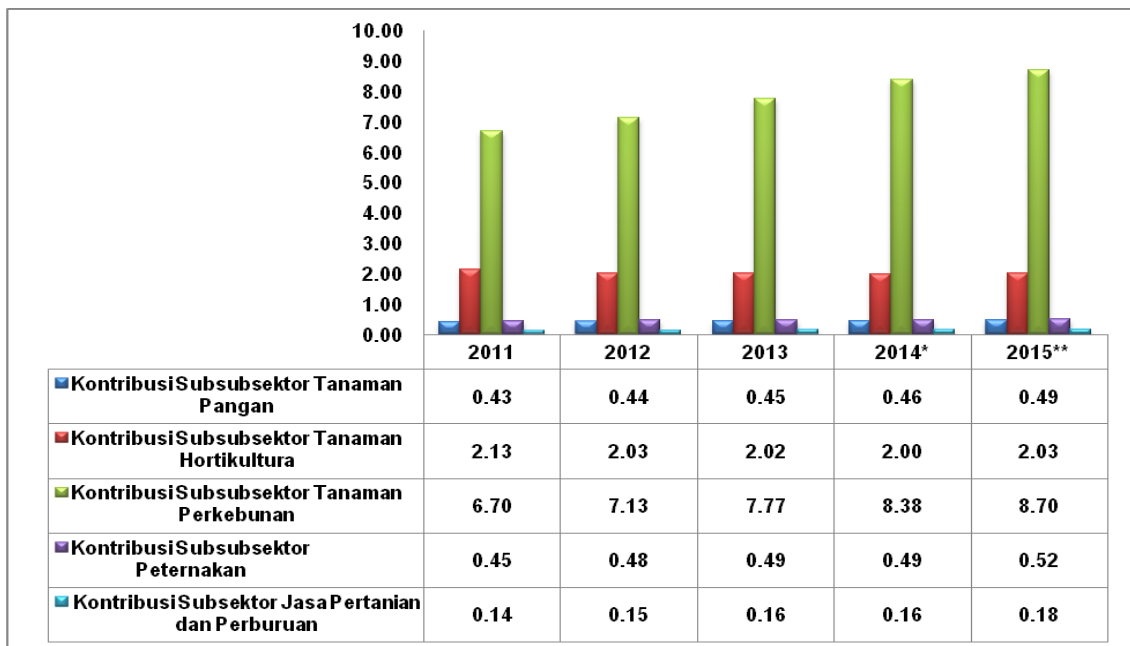
* angka sementara

** angka sangat sementara

Gambar 2.51 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 – 2015 (persentase)

Sumber : BPS Kabupaten Bangka Barat, Tahun 2016

Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, yaitu dari 12,03 persen di tahun 2011 menjadi 14,38 persen di tahun 2015, sementara untuk kontribusi pada sektor industri pengolahan sebagai penyumbang kontribusi PDRB tertinggi cenderung mengalami penurunan. Sementara jika dilihat dari kontribusi pada Subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian juga turut mengalami peningkatan yang cukup baik setiap tahun dengan rata-rata tumbuh sebesar 0,52 persen.



* angka sementara

** angka sangat sementara

Gambar 2.52 Kontribusi Subsubsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan serta Jasa Pertanian dan Perburuan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 – 2015 (persentase)

Sumber : BPS Kabupaten Bangka Barat, Tahun 2016

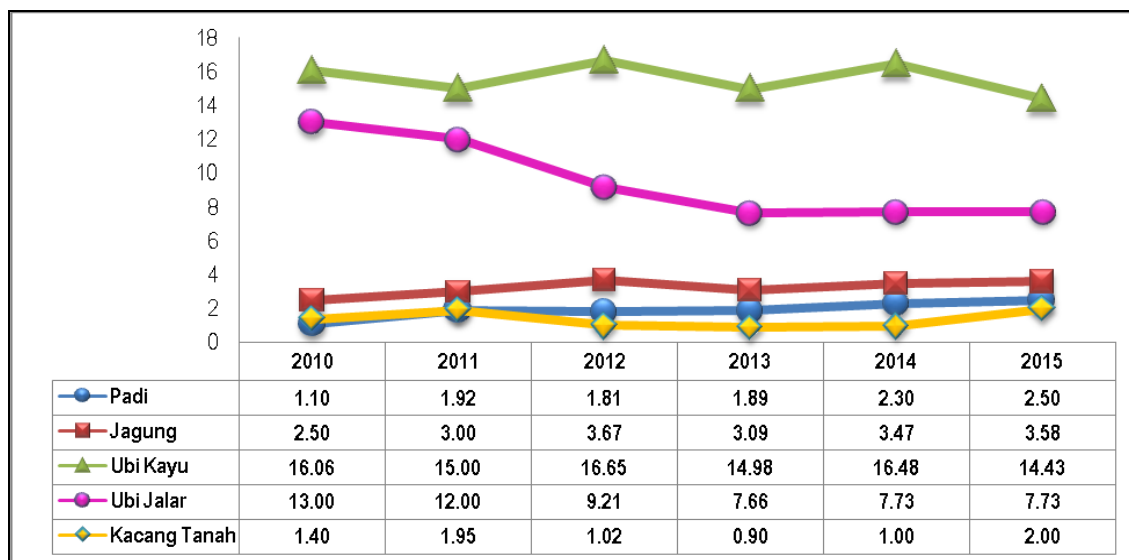
Sementara jika dilihat dari sisi produksi dan produktivitas, maka perkembangan statistik tanaman pangan di Kabupaten Bangka Barat berfluktuasi. Untuk jenis tanaman pangan padi dan ubi kayu saat ini mengalami peningkatan produksi yang cukup tinggi seiring dengan pembukaan lahan sawah baru serta minat masyarakat yang meningkat dalam menanamnya.

Tabel 2.44 Jumlah Produksi dan Luas Panen Tanaman Pangan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 – 2015

No.	Jenis Tanaman Pangan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Padi						
	Jumlah Produksi (ton)	875,1	3.334	3.119	3.153	4.066	6.159
	Luas Panen (ha)	796	1.733	1.727	1.668	2.140	2.698
2.	Jagung						
	Jumlah Produksi (ton)	260	303	158	312	311,85	186,3
	Luas Panen (ha)	104	101	79	101	90	52
3.	Ubi Kayu						
	Jumlah Produksi (ton)	8.688	3.540	2.798	2.652	3.000	7.242
	Luas Panen (ha)	541	236	168	177	182	502
4.	Ubi Jalar						

No.	Jenis Tanaman Pangan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Jumlah Produksi (ton)	1170	912	626	628	425	309,2
	Luas Panen (ha)	90	76	68	82	55	40
5.	Kacang Tanah						
	Jumlah Produksi (ton)	110,6	86	45	45	10	2
	Luas Panen (ha)	79	44	44	50	10	2

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Tahun 2016



Gambar 2.53 Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 – 2015 (ton/ha)

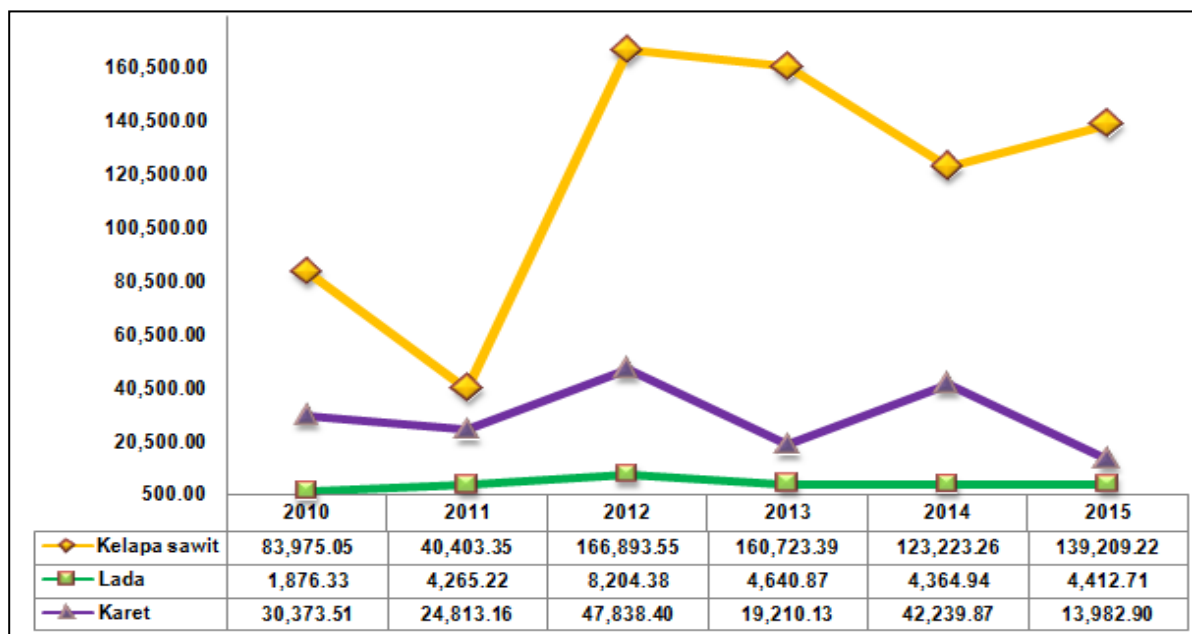
Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Tahun 2016

Produktivitas beberapa tanaman pangan di Kabupaten Bangka Barat secara umum telah menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak terlalu besar dan maksimal. Dalam rangka pembinaan dan pendampingan petani/pekebun, dari sisi jumlah tenaga penyuluh di Kabupaten Bangka Barat telah cukup memadai yaitu sebanyak 75 orang di tahun 2015. Namun dari sisi kompetensi dan kualitas, tenaga penyuluh belum dapat dikatakan baik dan ahli khususnya dibidang pertanian dan perkebunan sehingga kemampuan petani di Kabupaten Bangka Barat juga masih terbilang cukup rendah. Pada tahun 2014, jumlah kelompok tani yang ada di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 882 kelompok tani dengan total anggota 16.647 orang. Dari total kelompok tani tersebut, kelompok tani dengan kelas kemampuan lanjut hanya 29 kelompok, sementara 853 kelompok tani hanya pada kelas kemampuan pemula.

Sementara jika dilihat dari infrastruktur pertanian, untuk irigasi yang ada di Kabupaten Bangka Barat masih belum dapat difungsikan secara maksimal karena belum terbangun sistem pengairan persawahan masyarakat.

Untuk lahan perkebunan rakyat, di dalam RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, peruntukan perkebunan rakyat dicadangkan seluas ±14.331 ha dan untuk perkebunan besar seluas ±41.860 ha. Jika dilihat dari eksisting perkebunan besar sampai saat ini seluas 37.111,66 ha yang telah digunakan oleh perusahaan besar sawit, maka sisa untuk perkebunan besar dari cadangan dalam RTRW adalah hanya seluas 4.748,34 ha sehingga tidak banyak lagi potensi lahan yang dapat dikembangkan untuk perkebunan besar kecuali ada peralihan rencana/fungsi lahan dari RTRW.

Selain sawit yang telah dikembangkan oleh perusahaan dan juga masyarakat, Bangka Barat juga memiliki potensi perkebunan lain seperti karet dan lada. Untuk potensi lada, meskipun Kabupaten Bangka Barat memiliki brand yang cukup terkenal yaitu "*Muntok White Pepper*", namun belum dapat mengungkit minat masyarakat untuk bertanam lada.



Gambar 2.54 Produksi Tiga Komoditi Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015 (ton)

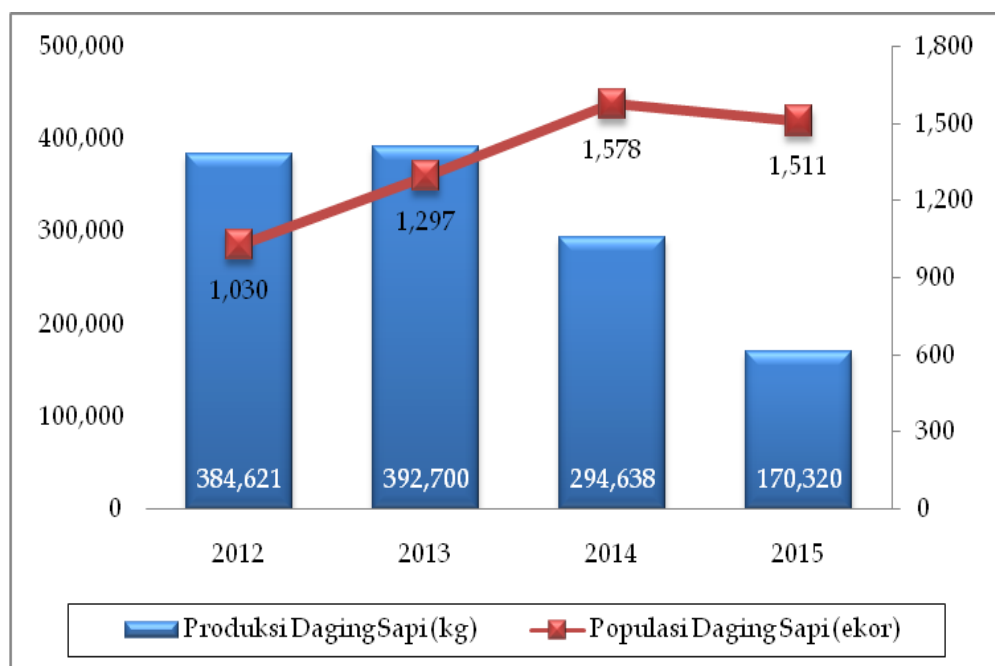
Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kab. Bangka Barat, Tahun 2016

Dari tingkat produksi hasil perkebunan rakyat untuk tiga komodi unggulan yaitu kelapa sawit, lada dan karet, terjadi penurunan di tiga tahun terakhir dikarenakan cuaca panas yang ekstrim sehingga banyak menyebabkan penurunan hasil produksi perkebunan rakyat. Kecenderungan produksi yang menurun juga seiring dengan perkembangan harga yang tidak menentu (fluktuatif) bahkan cenderung turun. Selain itu kendala dalam peningkatan

produksi perkebunan adalah belum seluruh bibit yang digunakan oleh masyarakat tersertifikasi atau bibit unggul.

Terkait peternakan, secara umum peternak di Kabupaten Bangka Barat adalah peternak sapi dan peternak kambing. Fokus dari Perangkat Daerah terkait adalah pengembangan peternakan sapi guna pemenuhan kebutuhan lokal yang sampai saat ini masih sangat tergantung dari wilayah sekitar. Secara umum peternak sapi di Kabupaten Bangka Barat dibagi menjadi dua yaitu peternak yang mulai dari pembibitan serta peternak yang fokus pada penggemukan daging.

Sebagian besar peternak yang ada di Kabupaten Bangka Barat merupakan peternak pemula, dimana terkadang pekerjaan sebagai peternak merupakan pekerjaan sampingan. Beberapa strategi telah dilakukan seperti dengan melakukan program bergulir anakan sapi, program inseminasi buatan (IB), serta program layanan kesehatan hewan agar populasi sapi meningkat dan diharapkan agar pemenuhan kebutuhan daging lokal juga terus meningkat.



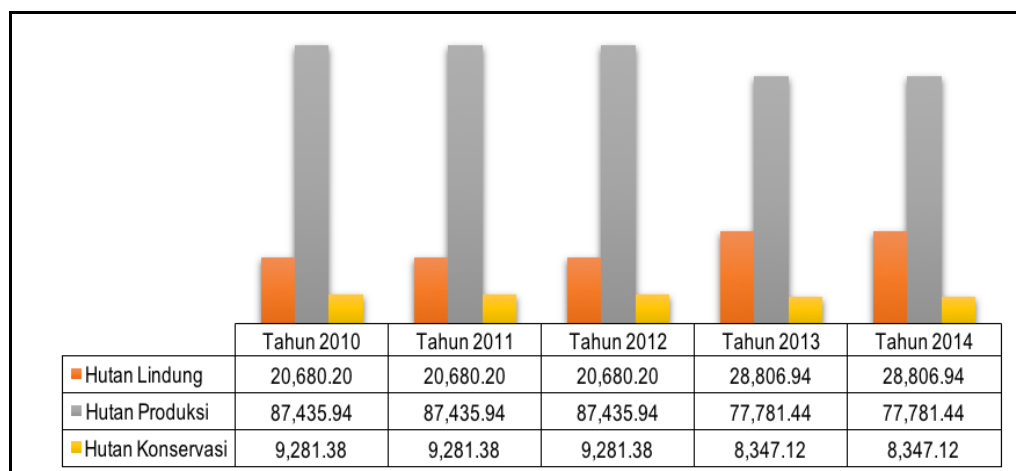
Gambar 2.55 Data Populasi Ternak dan Produksi Sapi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012 - 2015

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan, Tahun 2016

Dari data beberapa tahun terakhir, produksi daging lokal mengalami penurunan yang cukup signifikan, begitu juga dengan jumlah populasi ternak khususnya sapi. Hal ini menjadikan ketergantungan kebutuhan daging dari luar daerah Bangka Barat menjadi semakin tinggi.

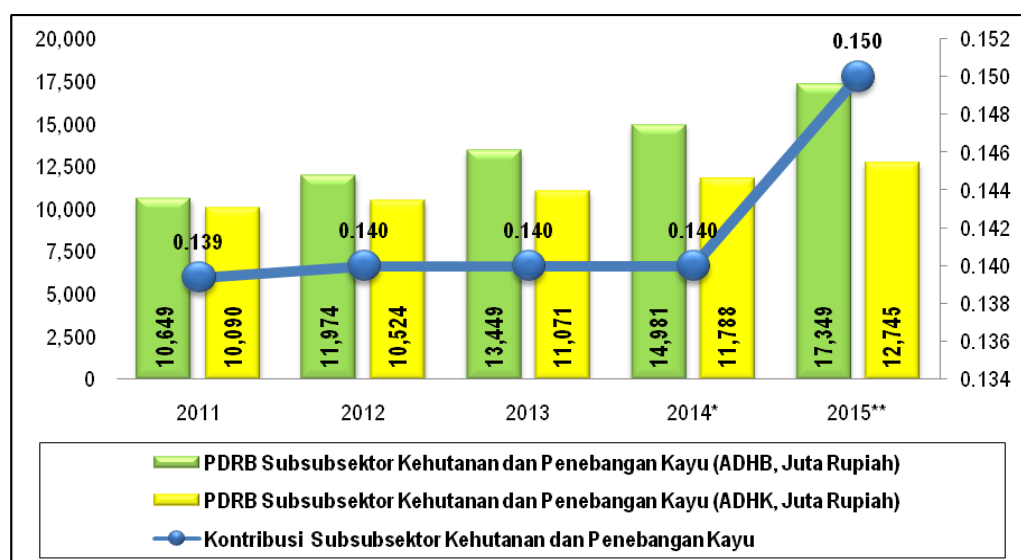
2.3.2.4 Kehutanan

Meskipun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan terkait pengelolaan kawasan hutan, namun dengan potensi kehutanan yang dimiliki Kabupaten Bangka Barat dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat.



Gambar 2.56 Luas Kawasan Hutan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2014 (Hektar)
Sumber : Dinas Kehutanan, Tahun 2015

Kabupaten Bangka Barat memiliki potensi kehutanan yang cukup besar dengan luasan hutan produksi 77.781,44 hektar. Sementara luasan hutan tanaman industri (HTI) adalah 58.449,01 hektar dan luasan hutan tanaman rakyat (HTR) 343,08 hektar.



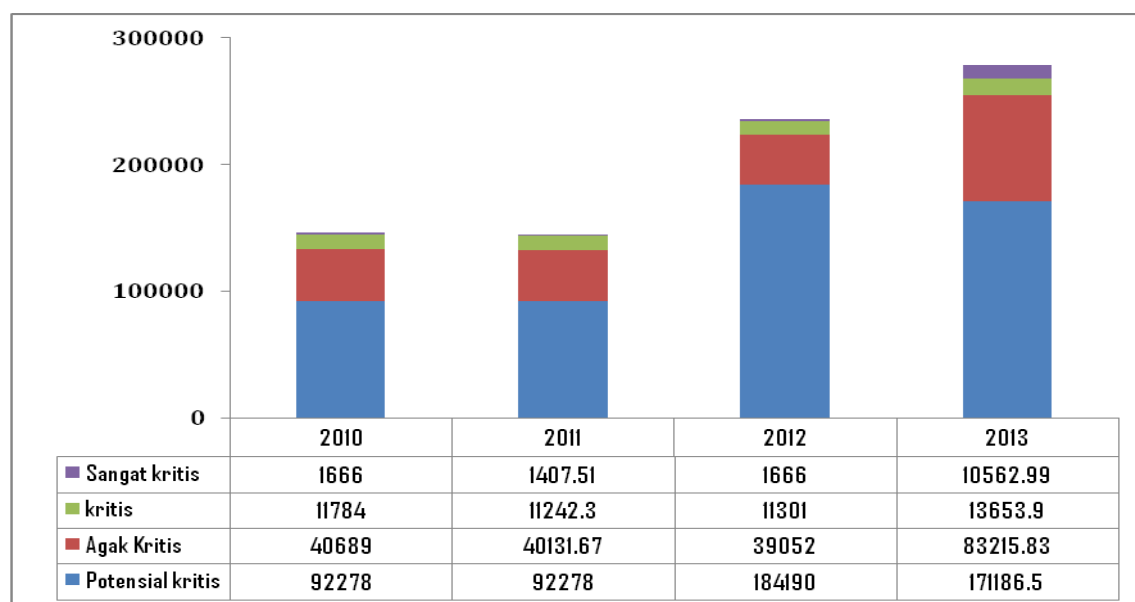
* angka sementara

** angka sangat sementara

Gambar 2.57 PDRB dan Kontribusi Subsubsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 – 2015 (persentase)

Sumber : BPS Kabupaten Bangka Barat, Tahun 2016

Berdasarkan PDRB Kabupaten Bangka Barat, Subsubsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu cenderung mengalami peningkatan meskipun kontribusi yang diberikan terhadap PDRB terbilang kecil dan stagnan yaitu sebesar 0,14 persen selama lima tahun terakhir.



Gambar 2.58 Luas Hutan Kritis Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2013 (Hektar)

Sumber : Bangka Barat Dalam Angka, Tahun 2013 (Data 2013 berdasarkan BPDAS Cerucuk)

Hutan memiliki fungsi ekologi dalam menjaga lingkungan hidup serta dapat memiliki nilai ekonomis yang kontinu jika digarap secara berkelanjutan. Namun sejalan dengan maraknya perusakan kawasan hutan khususnya terkait penambangan, luasan hutan kritis di Kabupaten Bangka Barat semakin meningkat sehingga perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

2.3.2.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Sektor pertambangan dan penggalian pada PDRB Kabupaten Bangka Barat merupakan sektor yang cukup dominan, yaitu menempati urutan kedua setelah industri pengolahan. Bahan galian yang terdapat di wilayah Kabupaten Bangka Barat dan paling banyak dieksploitasi selama ini serta telah banyak diusahakan secara besar-besaran adalah timah yang pengelolaannya selain oleh pemerintah juga dilakukan oleh penduduk setempat dan swasta. Terkait perizinan pertambangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dihentikan dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten tidak memiliki kewenangan terkait urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.

2.3.2.6 Perdagangan

Sektor perdagangan juga memerlukan pengelolaan yang optimal, sehingga dengan memanfaatkan posisi geografis yang strategis, Kabupaten Bangka Barat dapat meraih peluang pasar sebagai komplement Palembang serta pusat kegiatan pelabuhan. Selama 5 tahun terakhir, di dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Barat sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Barat cukup besar yaitu diatas 10 persen, atau menjadi urutan ke-4 diantara 17 sektor lainnya. Pada tahun 2014, kontribusi sektor ini sebesar 12,00 persen, dimana 1,70 persen disumbangkan oleh subsektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya sementara 10,29 persen disumbangkan oleh subsektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil, dan sepeda motor.

Keberlangsungan sektor perdagangan ini sangat erat kaitannya dengan sektor transportasi dan pergudangan, dimana dalam distribusi PDRB nilainya masih sangat kecil yaitu dibawah 1 persen. Sektor transportasi dan pergudangan merupakan kunci utama terkait perdagangan terutama dalam hal stabilitas harga. Sampai saat ini Kabupaten Bangka Barat belum memiliki gudang pemerintah untuk menampung bahan pangan serta bahan pokok lainnya sehingga pemenuhan kebutuhan di Kabupaten Bangka Barat masih sangat tergantung pada jalur distribusi dari wilayah sekitar khususnya dari Palembang.

Keterkaitan dengan sektor primer, khususnya di sektor pertanian juga perlu diperkuat terutama terkait ketataniagaan sehingga ketergantungan akan pemenuhan kebutuhan pada luar daerah Bangka Barat perlahan akan dikurangi sehingga kedepan diperlukan suatu perencanaan pengembangan perdagangan Kabupaten Bangka Barat.

Jumlah pasar di Kabupaten Bangka Barat masih terbilang sedikit, jika dibandingkan dengan jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang ada. Pasar yang ada semuanya masih dibawah kendali Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang berjumlah 12 pasar. Sampai dengan saat ini, di Kabupaten Bangka Barat masih belum memiliki pasar desa (pasar yang dikelola oleh desa), dimana hal tersebut yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan tata niaga sampai dengan wilayah terkecil yang berdampak pada harga barang.

2.3.2.7 Perindustrian

Sejak lama, sektor industri pengolahan merupakan sektor utama pembentuk PDRB di Kabupaten Bangka Barat, yaitu dengan adanya keberadaan Pusat Metalurgi milik PT. Timah. Adapun sektor perdagangan, juga termasuk penyumbang peringkat keempat pada pembentukan PDRB daerah setelah sektor pertambangan dan galian serta sektor

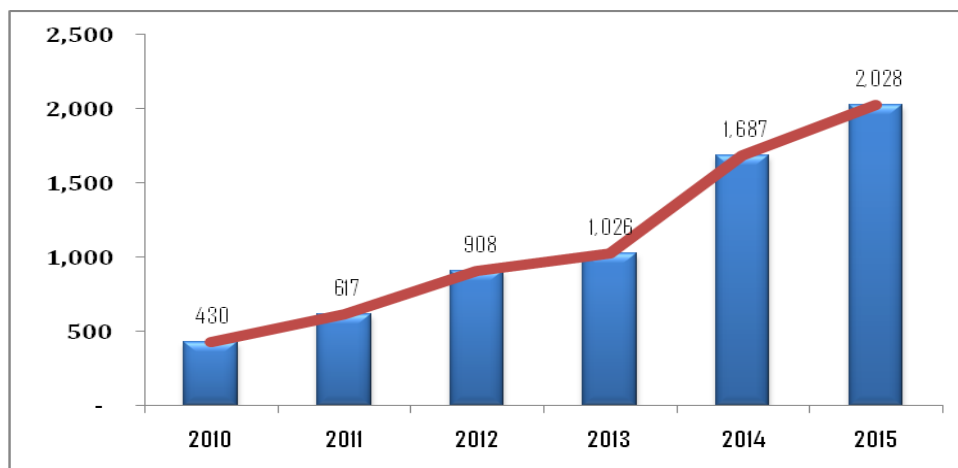
pertanian. Kondisi tersebut menegaskan bahwa perindustrian dan perdagangan merupakan motor penggerak ekonomi wilayah yang sangat vital di Kabupaten Bangka Barat.

Meskipun saat ini industri dan perdagangan memberi kontribusi yang dominan dibandingkan sektor lain, akan tetapi pertumbuhannya masih terlihat rendah. Jika melihat dari distribusi per sektor yang ada, sektor industri pengolahan dalam 5 kurun waktu terakhir mengalami kemunduran dari 49,94 persen di tahun 2011 menjadi 43,64 persen di tahun 2015 (angka sangat sementara).

Sektor industri pengolahan perlu dikelola dengan optimal sehingga menjadi motor ekonomi yang efisien, berdaya saing tinggi, mempunyai struktur yang kukuh, dapat memproduksi barang-barang bermutu, bernilai tambah tinggi, dan padat karya dengan tingkat keterampilan tinggi. Industri yang dapat dikembangkan antara lain: *home industry* seperti pembuatan terasi, akar bahar, songket cual, industri pengolahan lanjutan CPO, pasir kuarsa (*glass ware industry*), keramik (kaolin), serta *tin chemical* (industri hilir timah).

Perkembangan industri di Kabupaten Bangka Barat sangat fluktuatif, karena sangat berhubungan dengan sektor lain sebagai pendukung, dan juga regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang mempunyai efek ikutan khususnya bagi industri berskala besar. Pada tahun 2012 terjadi pengurangan industri berskala besar dari yang awalnya berjumlah 13 perusahaan menjadi 6 perusahaan. Penurunan tersebut terjadi karena beberapa smelter yang merupakan industri berskala besar tidak lagi beroperasi.

Pada tingkatan industri berskala kecil, pertumbuhannya selalu positif dengan angka yang bervariasi antara 13 - 64 persen. Perangkat Daerah terkait juga terus melakukan pembinaan dan pengembangan khususnya terhadap industri berskala kecil yang merupakan kewenangan bagi pemerintah kabupaten/kota sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.



Gambar 2.59 Jumlah Industri Kecil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Tahun 2016

2.3.2.8 Transmigrasi

Dalam rangka pelaksanaan urusan ketransmigrasian, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menetapkan beberapa wilayah sebagai daerah transmigrasi. Dalam RTRW Kabupaten Bangka Barat, wilayah yang dijadikan sebagai daerah pembangunan dan pengembangan transmigrasi berada di Kecamatan Jebus, Simpangteritip dan Kelapa. Pada tahun 2012 pelaksanaan urusan ketransmigrasian baru dalam tahap pembangunan dan penyiapan lokasi transmigrasi seluas ±700 ha. Pembukaan dan pengembangan lahan kemudian dilakukan di Desa Jebus, Kecamatan Jebus pada tahun 2013 dan 2014 dengan total luas wilayah transmigrasi 58 ha. Pembangunan rumah transmigrasi sampai dengan tahun 2015 sebanyak 68 unit rumah dan semua rumah terisi penuh oleh warga transmigran.

Dalam rangka pelaksanaan dan penempatan transmigran, Kabupaten Bangka Barat melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat, dimana pembangunan kawasan berasal dari program Pemerintah Pusat sedangkan pemerintah daerah melakukan fasilitasi penempatan transmigran dan pendukung lainnya. Penempatan transmigran dilakukan mulai tahun 2014 sebanyak 43 Kepala Keluarga (KK) 158 Jiwa, yaitu transmigran luar daerah sebanyak 20 KK dan transmigran lokal 23 KK. Pada tahun 2015 dilakukan penambahan kembali sebanyak 25 KK 94 jiwa, 15 KK transmigran luar daerah dan 10 orang KK lokal.

Mengingat pengembangan transmigrasi yang baru dimulai pada tahun 2014, maka kemandirian transmigran belum terbentuk dan masih mendapat dukungan dan bantuan dari pendanaan pusat maupun pemerintah daerah.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

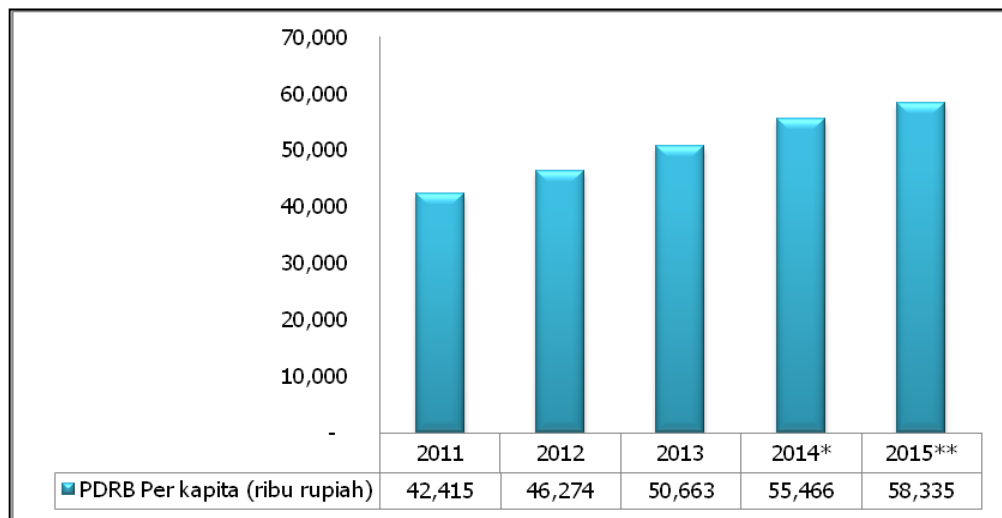
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu ukuran indikator tingkat perekonomian penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita pada tahun 2015 di Kabupaten Bangka Barat yaitu sebesar 58.335 ribu rupiah. Rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita dalam 5 tahun terakhir yaitu 8,58 persen,.

Akan tetapi jika dilihat lebih terperinci, PDRB per kapita yang ada akan berbeda pada masing-masing sektor yang telah dibandingkan dengan penduduk yang bekerja menurut kategori sektor yang ada. Perbedaan PDRB per kapita pada setiap sektor terjadi dapat dilihat dari permodalan, apakah menggunakan sistem padat karya seperti pada sektor pertanian atau menggunakan sistem padat modal seperti pada sektor industri pengolahan.

Dapat dipastikan bahwa PDRB per kapita pada sektor Industri pengolahan akan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB per kapita pada sektor pertanian.

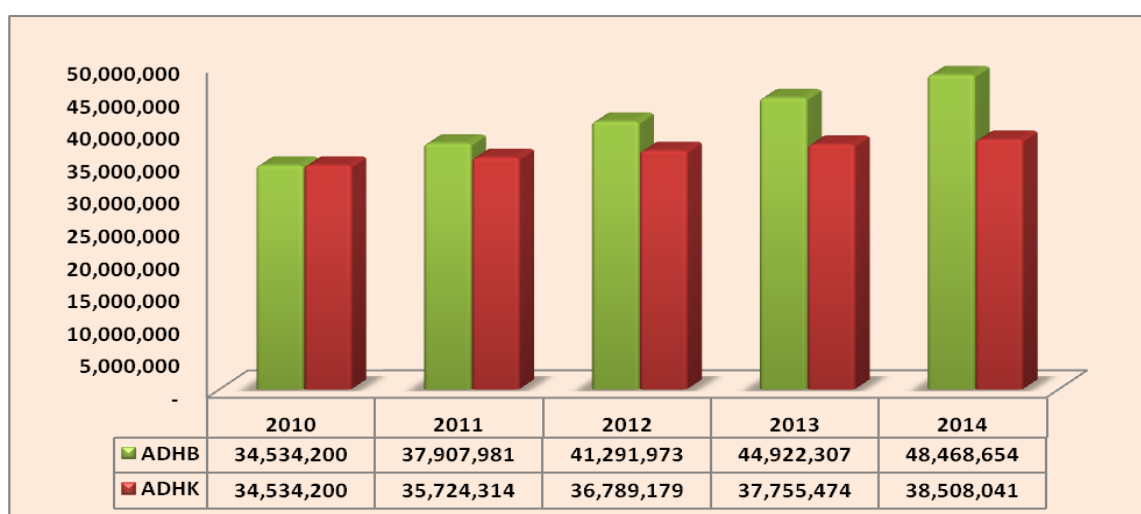


Gambar 2.60 PDRB Per Kapita Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015

Ket : *: Angka Sementara; **: Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS, Tahun 2016

Pendapatan per kapita biasa digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk yang ada di suatu wilayah. Pendapatan per kapita (ADHB) pada tahun 2014 di Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp 48.468.654 dengan rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir 8,85 persen. Sedangkan untuk ADHK dalam lima tahun terakhir yaitu 2,76 persen. Nilai pendapatan per kapita jika dilihat lebih detil akan memiliki perbedaan pada masing-masing sektor. Berikut gambaran pendapatan per kapita di Kabupaten Bangka Barat dalam lima tahun terakhir.



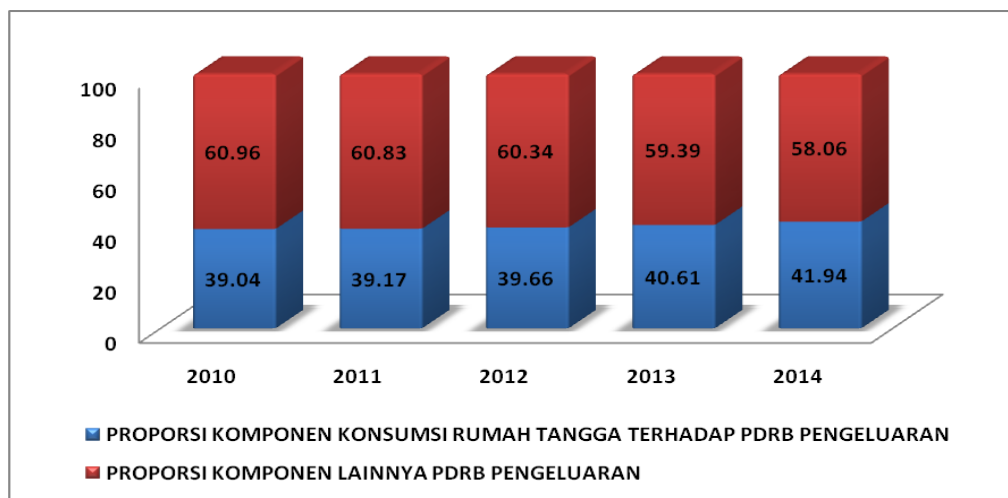
Gambar 2.61 Pendapatan per Kapita berdasarkan ADHB dan ADHK Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2014

Ket : ¹⁾ : Angka Revisi; *: Angka Sementara; **: Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS, Tahun 2015

2.4.1.2 Pengeluaran Konsumsi

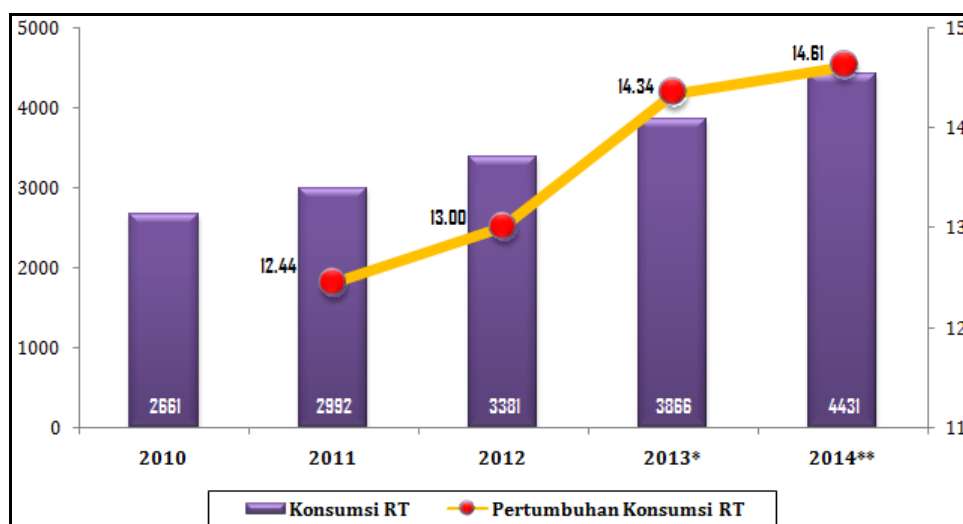
Disamping pendapatan per kapita, tingkat pengeluaran per kapita juga sering digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk. Konsumsi akhir rumah tangga memiliki porsi terbesar dalam pembentukan PDRB menurut pengeluaran. Sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Selama tahun 2010-2014 konsumsi akhir rumah tangga terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya baik dalam nominal maupun riil. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Peningkatan jumlah penduduk mendorong terjadinya peningkatan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.



Gambar 2.62 Proporsi Komponen Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2014

Ket : *: Angka Sementara; **: Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS, Tahun 2015

Nilai konsumsi Nominal konsumsi rumah tangga selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,59 persen. Data menunjukkan konsumsi rumah tangga di tahun 2010 mencapai nominal Rp 2.661 (dalam miliar rupiah) atau berkontribusi sebesar 39,04 persen dari pembentukan PDRB menurut pengeluaran dan terus mengalami peningkatan dimana di tahun 2014 mencapai nominal Rp 4.431 (dalam miliar rupiah) atau berkontribusi sebesar 41,94 persen dari pembentukan PDRB menurut pengeluaran.

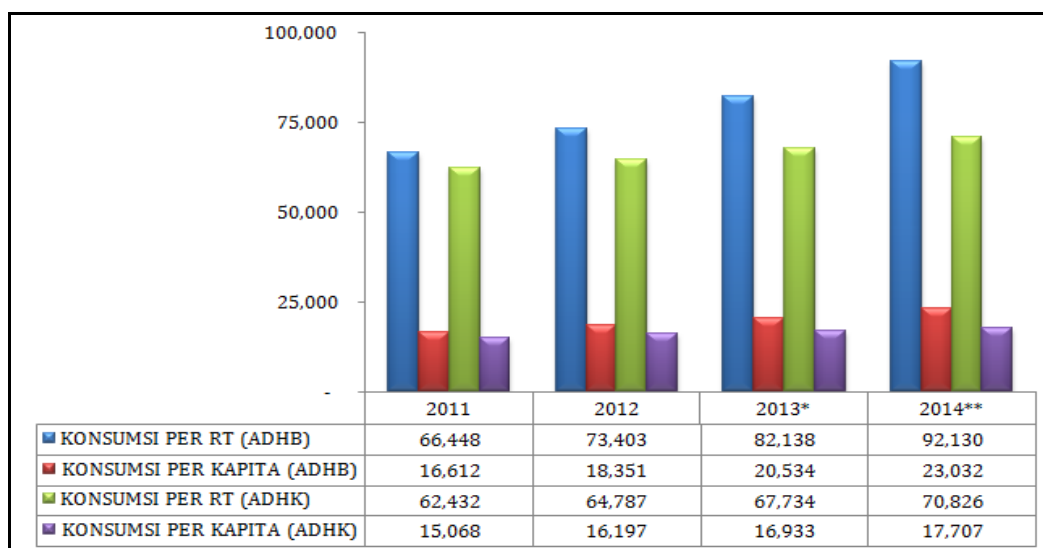


Gambar 2.63 Nilai Konsumsi RT ADHB (miliar rupiah) serta Pertumbuhannya Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2014

Ket : *: Angka Sementara; **: Angka Sangat Sementara
 Sumber: BPS, Tahun 2015

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah mengalami masa-masa lemahnya perekonomian. Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus bertambah dalam 4 tahun terakhir (2011-2014), baik atas dasar harga berlaku (11,5 persen) maupun atas dasar harga konstan 2010 (4,3 persen). Pada tahun 2011, secara umum setiap rumah tangga di Kabupaten Bangka Barat menghabiskan dana sekitar 66,45 juta rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan. Pengeluaran ini terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 92,13 juta rupiah per tahun pada tahun 2014.

Perbaikan konsumsi per rumah tangga secara langsung diikuti dengan perbaikan konsumsi per kapita. Pada tahun 2011, secara umum setiap penduduk di Kabupaten Bangka Barat menghabiskan dana sekitar 16,612 juta rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan. Pengeluaran ini terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 23,032 juta rupiah per tahun pada tahun 2014. Dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi per kapita di Kabupaten Bangka Barat hampir menembus 2 juta rupiah per bulannya, dirasa peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat semakin membaik.



Gambar 2.64 Nilai Konsumsi per Rumah Tangga dan per Kapita per Tahun Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2014 (dalam ribu)

Ket: *: Angka Sementara; **: Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS, Tahun 2015

Secara rata-rata, struktur konsumsi akhir rumah tangga selama tahun 2010-2014 didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan rokok. Proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan, minuman, dan rokok berada pada kisaran 46-47 persen dan cenderung mengalami penurunan dari 47,88 persen pada tahun 2010 menjadi 46,76 persen pada tahun 2014. Sebaliknya, proporsi pengeluaran untuk kelompok pakaian dan alas kaki; perumahan, perkakas, perlengkapan, dan penyelenggaraan rumah tangga; dan transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya cenderung meningkat. Pergeseran pola proporsi konsumsi dari kelompok makanan ke non makanan ini menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Pengeluaran untuk kebutuhan non makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat.

Tabel 2.45 Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bangka Barat (Persen) Tahun 2010-2014

No.	KELOMPOK KONSUMSI	2010	2011	2012	2013*	2014**
1	Makanan, Minuman, dan Rokok	47,88	47,47	47,29	46,81	46,76
2	Pakaian dan Alas Kaki	3,55	3,57	3,58	3,60	3,57
3	Perumahan, Perkakas, perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	15,94	16,26	16,66	17,12	17,25
4	Kesehatan dan Pendidikan	5,58	5,35	5,28	5,16	5,04
5	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	15,96	16,44	16,55	16,86	17,31
6	Hotel dan Restoran	9,07	8,83	8,57	8,36	8,10

No.	KELOMPOK KONSUMSI	2010	2011	2012	2013*	2014**
7	Lainnya	2,02	2,07	2,07	2,09	1,97
KONSUMSI RUMAH TANGGA		100	100	100	100	100

Ket: *: Angka Sementara; **: Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS, Tahun 2015

2.4.1.3 Produktivitas Total Daerah

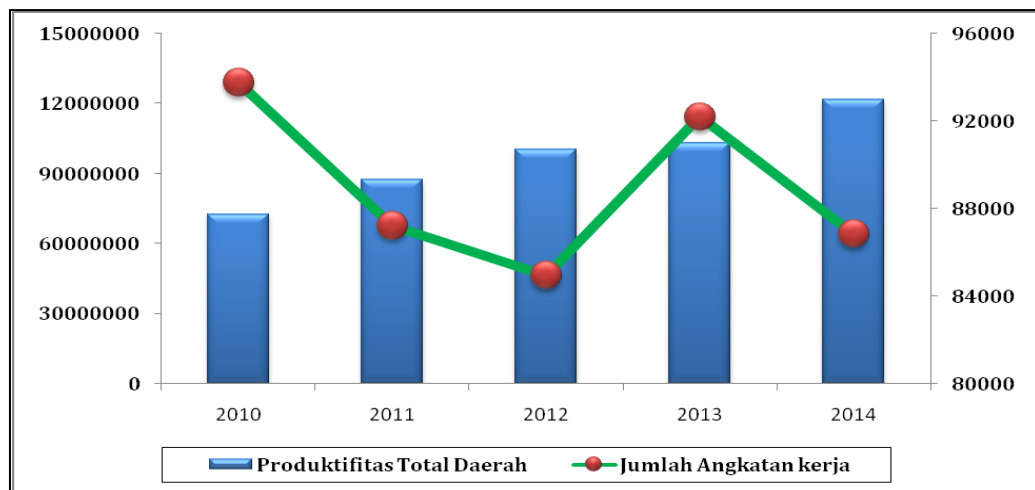
Tabel 2.46 Produktivitas Total Daerah Kabupaten Bangka Barat (Juta Rupiah)
Tahun 2010-2014

	Sektor	2010	2011	2012 ^r	2013*	2014**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	807,602.7	919,249.7	1,068,999.0	1,278,636.4	1,484,527.6
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,050,920.1	1,132,781.6	1,207,082.5	1,245,649.9	1,330,394.9
3.	Industri Pengolahan	3,493,788.5	3,815,417.9	4,110,078.9	4,434,518.5	4,724,102.8
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	1,823.6	2,186.4	2,409.6	2,499.4	4,112.7
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	446.6	481.3	513.9	587.6	676.8
6.	Konstruksi	282,251.7	337,788.6	418,325.6	513,976.8	598,102.2
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	618,452.7	753,701.1	906,910.5	1,069,414.7	1,267,876.6
8.	Transportasi dan Pergudangan	51,250.0	59,876.6	67,605.3	81,018.0	91,679.4
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	55,971.6	67,003.4	80,187.8	97,598.1	114,638.4
10.	Informasi dan Komunikasi	18,539.2	21,345.5	24,286.6	27,200.2	30,490.7
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	21,036.8	23,291.5	28,599.1	33,914.4	41,643.1
12.	Real Estate	104,372.6	120,964.6	143,843.1	172,204.6	200,733.1
13.	Jasa Perusahaan	8,451.8	9,699.3	11,364.9	13,026.7	14,865.5
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	181,925.4	232,894.4	281,826.3	342,529.3	410,355.7
15.	Jasa Pendidikan	70,297.8	84,670.6	103,972.3	127,486.4	155,571.0
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	34,346.2	41,190.4	49,202.3	57,908.5	69,790.4
17.	Jasa lainnya	14,618.5	17,258.1	19,755.3	22,811.0	27,224.4
A.	Total PDRB	6,816,096.0	7,639,800.9	8,524,963.3	9,520,980.4	10,566,785.2

	Sektor	2010	2011	2012 ^r	2013 [*]	2014 ^{**}
B.	Jumlah Angkatan Kerja	93.757	87.221	84.949	92.206	86.854
C.	Produktifitas Total Daerah	72.699	87.591	100.353	103.257	121.661

Sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, Tahun 2015

Berdasarkan data produktivitas total daerah yang tersaji pada tabel diatas, tergambar bahwa produktifitas total daerah dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar hampir 14 persen. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya nilai PDRB di setiap tahunnya dan dibarengi dengan semakin menurunnya jumlah angkatan kerja hampir di setiap tahunnya.



Gambar 2.65 Produktifitas Total Daerah dan Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2014

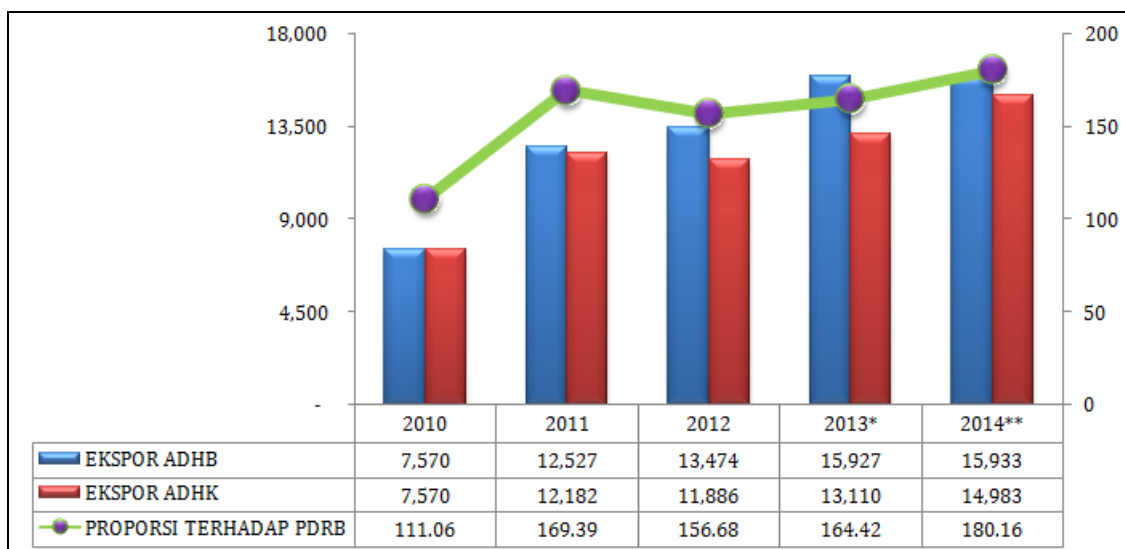
Sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, Tahun 2015

2.4.1.4 Ekspor dan Impor

Aktivitas jual beli barang antar wilayah telah ada sejak dahulu. Jenis produksi barang dan jasa yang saling melengkapi dan disparitas harga menjadi faktor utama munculnya kegiatan transaksi ekspor impor. Secara total, nilai ekspor Kabupaten Bangka Barat selama tahun 2010-2014 cenderung mengalami peningkatan baik secara nominal maupun secara riil. Proporsi ekspor terhadap total PDRB semakin meningkat di setiap tahunnya yaitu kisaran 111-180 persen. Timah batangan merupakan komoditas utama dalam perdagangan luar negeri Kabupaten Bangka Barat, sehingga bila terjadi perubahan nilai ekspor timah berpengaruh cukup signifikan terhadap nilai ekspor luar negeri Kabupaten Bangka Barat. Selain itu, komoditas hasil pertanian yang juga menjadi ekspor luar negeri

adalah CPO, karet, lada, dan hasil perikanan. Proporsi nilai ekspor yang diatas 100 persen menunjukkan tingginya nilai ekspor hasil produk Bangka Barat ditambah lagi karena adanya fenomena reexport barang dari Provinsi lain yang hanya sebatas tercatat di Pelabuhan di Muntok, kemudian dibawa ke luar negeri ataupun luar daerah.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan masih adanya ketergantungan Bangka Barat terhadap ekonomi atau produk negara ataupun daerah lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk Bangka Barat diluar Bangka Barat, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Demikian pula halnya dengan Kabupaten Bangka Barat yang tingkat ketergantungannya akan produk dari luar daerah masih cukup tinggi.



Gambar 2.66 Nilai Ekspor menurut ADHB dan ADHK (miliar rupiah) serta Proporsi Ekspor Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2014

Ket : * : Angka Sementara; ** : Angka Sangat Sementara

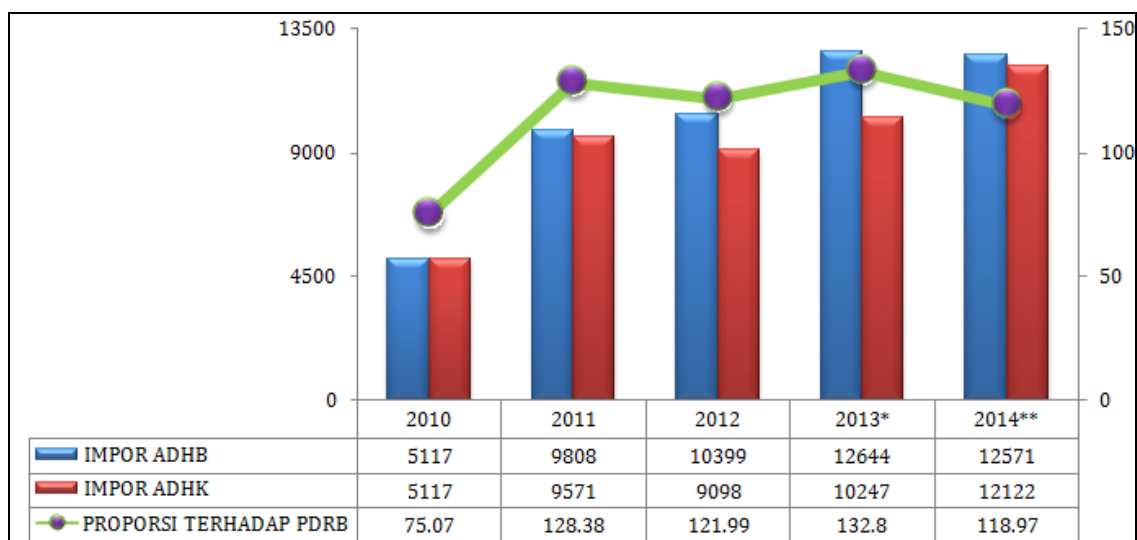
Sumber: BPS, Tahun 2015

Pola perkembangan impor Kabupaten Bangka Barat selama tahun 2010-2014 cukup berfluktuasi setiap tahunnya. Proporsi impor luar negeri terhadap total PDRB berkisar antara 75-118 persen setiap tahunnya. Komoditas impor luar negeri Kabupaten Bangka Barat sebagian besar merupakan bahan baku (untuk diproses dalam pengolahan timah) maupun barang modal seperti mesin, kendaraan dan sebagainya.

Struktur impor yang ada menunjukkan bahwa dari keseluruhan total impor Kabupaten Bangka Barat, sebagian besar merupakan impor luar provinsi. Impor luar provinsi berkisar antara 63-79 persen per tahun dari total impor. Sementara impor antar kabupaten berkisar

antara 19-32 persen dari total impor. Tingginya nilai impor dari luar provinsi menunjukkan bahwa kegiatan impor diluar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tinggi.

Pertumbuhan net ekspor selama kurun waktu 2010-2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Net ekspor mengalami pertumbuhan positif terjadi pada tahun 2011-2013 dimana besaran pertumbuhan masing-masing yaitu 6,45 persen, 6,77 persen dan 2,66 persen. Net ekspor tumbuh positif pada 3 tahun tersebut disebabkan pada tahun tersebut permintaan dari luar daerah atau luar negeri akan komoditi ekspor dari Kabupaten Bangka Barat cukup tinggi sehingga mendorong ekspor mengalami peningkatan. Faktor lainnya yang menyebabkan net ekspor tumbuh adalah meningkatnya produksi yang dilakukan pada tahun tersebut.



Gambar 2.67 Nilai Impor menurut ADHB dan ADHK (miliar rupiah) serta Proporsi Impor Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2014

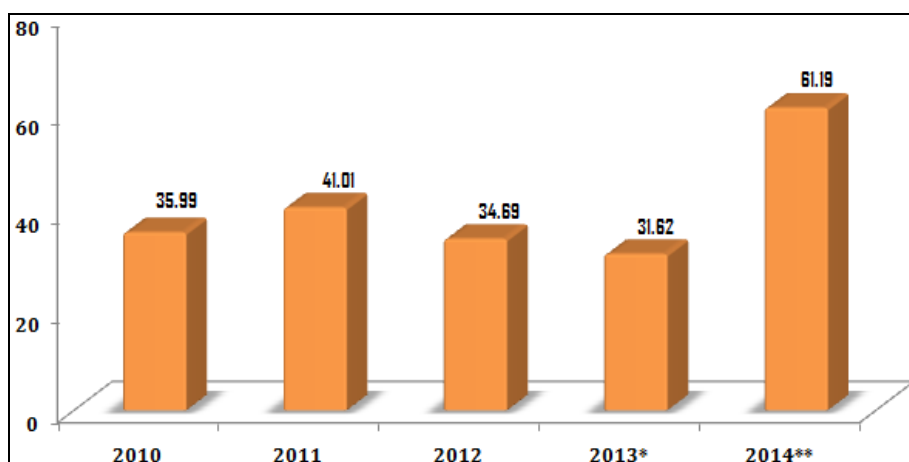
Ket : * : Angka Sementara; ** : Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS, Tahun 2015

Sementara itu, pertumbuhan negatif dari komponen net ekspor terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar minus 0,06 persen. hal ini disebabkan produksi barang dan jasa yang dihasilkan mengalami penurunan. Turunnya kuantitas produksi mengakibatkan pasokan untuk kegiatan ekspor barang dan jasa juga mengalami penurunan, jika dikaitkan dengan keadaan di lapangan.

Akan tetapi, jika dilihat dari sisi distribusi PDRB (ADHB) menurut pengeluaran, maka komponen Net Ekspor memiliki kontribusi yang cukup besar dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2014. Distribusi PRDB (ADHB) menurut pengeluaran

pada komponen Net Ekspor di tahun 2010 sebesar 35,99 persen dan mengalami peningkatan menjadi 61,19 persen di tahun 2014.



Gambar 2.68 Distribusi Net Ekspor Terhadap PDRB menurut ADHB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2014

Ket : * : Angka Sementara; ** : Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS, Tahun 2015

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1 Aksesibilitas Daerah

Aksesibilitas merupakan faktor utama guna menunjang pembangunan, baik dari sisi perekonomian maupun non perekonomian. Jarak tempuh yang jauh terkadang tidak menjadi persoalan yang utama, jika infrastruktur terpenuhi dengan kualitas yang baik. Jalan merupakan salah satu infrastruktur dasar dan wajib yang harus dimiliki pada setiap wilayah dengan tipe jalan yang disesuaikan dengan fungsi jalan, antara lain jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa.

Tabel 2.47 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 - 2015

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Panjang Jalan Total	783.89	831.052	818.52	857.006	893.48	892.62
2	Jumlah Motor*	32.158	40.117	37.657	38.455	29.643	35.734
3	Jumlah Mobil*	4.029	5.098	5.790	6.706	5.695	6.513
4	Jumlah Kendaraan*	36.187	45.215	43.447	45.161	35.338	42.247
Rasio Keseluruhan		1:47	1:58	1:58	1:59	1:40	1:47

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika, Tahun 2016

*) Data yang membayar pajak

Melihat data diatas, walaupun terjadi penambahan panjang jalan namun tidak diimbangi dengan penambahan jumlah kendaraan, baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kabupaten Bangka Barat, akan tetapi jika dilihat dari nilai rasio antara panjang jalan dan jumlah kendaraan masih terlihat normal. Secara rata rata dari lima tahun terakhir, setiap kilometer panjang jalan berbanding dengan 50 kendaraan. Masih belum terlihat kemacetan, walau di daerah perkotaan baik pada jam sibuk. Apalagi dari data jumlah kendaraan yang ada, masih didominasi oleh kendaraan roda dua yaitu diatas 85 persen.

Pelengkap aksesibilitas daerah yang penting dimiliki oleh daerah lainnya yaitu adanya sarana dan prasarana untuk angkutan umum, menjadikan Sektor transportasi di Kabupaten Bangka Barat termasuk dalam sektor strategis. Sampai dengan saat ini, Kabupaten Bangka Barat memiliki satu pelabuhan penumpang, serta dua pelabuhan non penumpang dan tiga buah terminal dengan delapan jumlah trayek antar kota dalam provinsi.

Melalui sarana angkutan umum tersebut, mobilitas penumpang dan barang terjadi yang merupakan bagian dari perputaran ekonomi di Kabupaten Bangka Barat. Perbaikan serta penambahan sarana dan prasarana pada sektor transportasi dilakukan untuk memperlancar mobilitas antar kecamatan, antar kota dalam provinsi maupun antar pulau seperti Bangka-Palembang.

Tabel 2.48 Mobilitas Orang Terangkut Angkutan Umum
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 - 2015

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Penumpang Bis Datang	Orang	33.578	43.410	52.930	67.885	30.431	54.026
2	Jumlah Penumpang Bis Berangkat		42.709	49.974	50.128	66.859	31.154	59.637
3	Jumlah Penumpang Kapal Datang		199.586	255.321	198.690	136.370	121.412	94.711
4	Jumlah Penumpang Kapal Berangkat		167.866	201.094	230.145	190.842	171.777	80.288
5	Jumlah Barang Kapal Datang	Ton	41.068	54.143	107.054	94.442	78.606	29.277
6	Jumlah Barang Kapal Berangkat		42.224	40.722	59.145	33.362	32.436	725.486

Sumber: Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika, Tahun 2016
Pergerakan penumpang lewat jalur bis mengalami peningkatan baik yang keluar maupun masuk ke Kabupaten Bangka Barat. Peningkatan penumpang yang datang ke Kabupaten

Bangka Barat terlihat lebih stabil. Akan tetapi berbeda dengan pergerakan penumpang lewat jalur laut, dimana terjadi penurunan pada penumpang yang datang maupun untuk penumpang yang berangkat.

Tabel 2.49 Mobilitas Bongkar Muat Barang
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 - 2014

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Barang Kapal Datang	Ton	41.068	54.143	107.054	94.442	78.606
2	Jumlah Barang Kapal Berangkat		42.224	40.722	59.145	33.362	32.436

Sumber: Bangka Barat Dalam Angka 2014, Tahun 2015

Mobilitas barang terlihat perbedaan yang sangat mencolok antara barang yang masuk serta barang yang keluar. Dalam 5 tahun terakhir, barang yang masuk via pelabuhan meningkat lebih dari 91,40 persen dari 41.068 ton di tahun 2010 menjadi 78.606 ton di tahun 2014, sedangkan barang keluar menurun ±23,18 persen dari 42.224 ton di tahun 2010 menjadi 32.436 ton di tahun 2014. Dari data mobilitas barang ini terlihat jelas, kebutuhan Pulau Bangka secara umum dan Kabupaten Bangka Barat secara khususnya akan kebutuhan barang dari daerah lain sangat tinggi dengan trend yang terus meningkat di setiap tahunnya.

Tabel 2.50 Mobilitas Bongkar Muat Barang Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2015

No.	Uraian	Bongkar (ton)	Muat (ton)
1.	Pelabuhan Muntok	2.554	-
2.	Pelabuhan Khusus Tanjung Kalian	15.563,000	15.563,000
3.	Pelabuhan Khusus Timah Muntok	11.159,915	709.922,845
TOTAL		29.276,915	725.485,845

Sumber: Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muntok, Tahun 2016

Dengan adanya rencana pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) di daerah Tanjung Ular Kecamatan Muntok yang merupakan salah satu proyek dari Pemerintah Pusat yang nantinya akan menjadi salah satu pemicu percepatan perekonomian di daerah Kabupaten Bangka Barat.

2.4.2.2 Penataan Wilayah

Di dalam RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, dari Rencana Peruntukan RTRW seluas 285.100,90 Ha, telah ditetapkan kawasan budidaya seluas 248.660,05 Ha sebagai potensi pengembangan wilayah.

Kawasan peruntukan terkait potensi pengembangan wilayah antara lain :

- a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat dengan luas ± 77.742 Ha
- b. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat, yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat dengan luas ± 2.050 Ha
- c. Kawasan Peruntukan Pertanian, yang terdiri atas :
 - 1) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, disetiap kecamatan dengan total luas ± 15.812 Ha, dari luas total tersebut ± 11.099 Ha berada di kawasan hutan;
 - 2) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura, disetiap kecamatan dengan total luas ± 1.598 Ha;
 - 3) Kawasan peruntukan perkebunan, terdiri atas :
 - Kawasan peruntukan perkebunan besar, seluas ± 41.860 Ha, dengan rincian:
 - a) Kecamatan Muntok seluas ± 5.903 Ha
 - b) Kecamatan Simpangteritip seluas ± 10.493 Ha
 - c) Kecamatan Jebus seluas ± 712 Ha
 - d) Kecamatan Kelapa seluas ± 10.421 Ha
 - e) Kecamatan Tempilang seluas ± 14.331 Ha
 - Kawasan peruntukan perkebunan rakyat, seluas ± 14.331 Ha, dan dari luas total tersebut ± 166 Ha berada di kawasan hutan produksi.
 - 4) Kawasan peruntukan peternakan, terdapat di Kecamatan Kelapa, Muntok dan Kecamatan Jebus seluas ± 72 Ha.

2.4.2.3 Sarana dan Prasarana Pendukung

a) Fasilitas Bank

Peranan bank sangatlah penting bagi perekonomian suatu negara dan daerah dalam hal mendukung pembangunan karena pembangunan sangat bergantung pada dinamika perkembangan dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Fakta menunjukkan bahwa dewasa ini hampir semua sektor yang berkaitan dengan kegiatan keuangan membutuhkan jasa bank.

Tabel 2.51 Jumlah Bank dan ATM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014

No.	Kecamatan	BANK	ATM
1.	Muntok	8	13
2.	Simpang Teritip	2	1
3.	Jebus	1	1
4.	Kelapa	4	2
5.	Tempilang	3	3
6.	Parittiga	6	11
Total		24	31
		2013	21

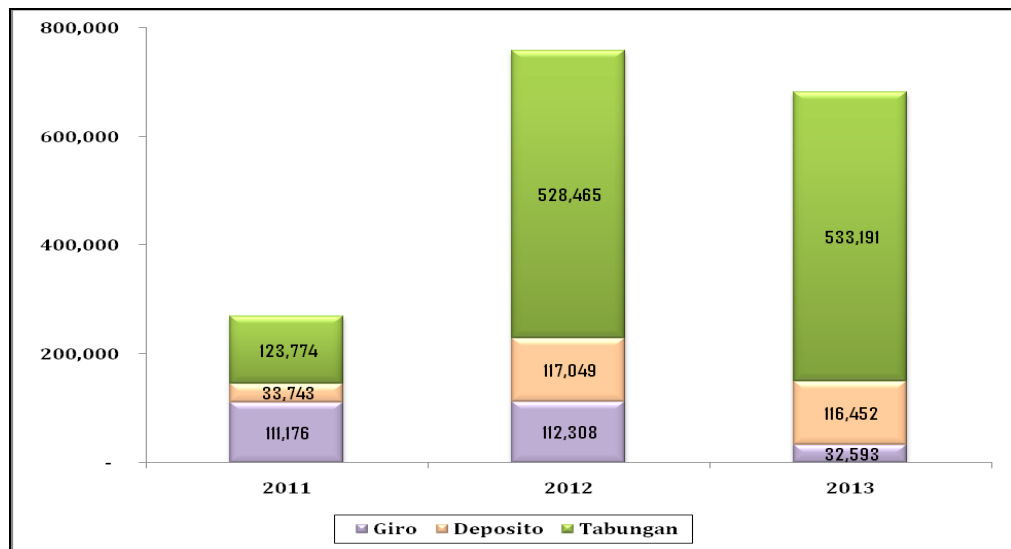
Sumber : Bangka Barat Dalam Angka 2014, Tahun 2015

Tabel 2.52 Jumlah Layanan Perbankan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014

No	Jenis	Jumlah
Bank Pemerintah		
1	Kantor Wilayah	0
2	Kantor Cabang	5
3	Kantor Cabang Pembantu	15
4	Kantor Unit Desa	24
5	Kantor Kas	13
6	Kas Mobil	7
7	Loket Pelayanan	2
Bank Swasta		
1	Kantor Cabang	0
2	Kantor Cabang Pembantu	20
3	Kantor Kas	1
4	Kas Mobil	0
B P R		
1	Kantor Pusat	1
2	Kantor Cabang	6

Sumber : Bangka Barat Dalam Angka 2014, Tahun 2015

Banyaknya jumlah bank pada suatu daerah menunjukkan perputaran uang di daerah tersebut, yang bermakna semakin banyak jumlah bank yang ada, maka semakin banyak perputaran uang yang ada di daerah tersebut. Dari tiga jenis tabungan yang ada, jenis tabungan merupakan yang paling dominan yaitu selalu diatas 96 persen dalam tiga tahun terakhir. Dari tahun 2011 sampai ke tahun 2013, terjadi peningkatan jumlah rekening jenis tabungan sebanyak hampir 200% yaitu dari 19.934 (dalam ribu) di tahun 2011 menjadi 58.296 (dalam ribu) di tahun 2013. Terkait nominal uang dari pihak ketiga di Kabupaten Bangka Barat berdasarkan jenis tabungan giro, deposito, serta tabungan di tahun 2013 terhimpun sebanyak Rp 682.236 (dalam juta). Besaran nominal dari tiap jenis tabungan sangat berfluktuatif pada setiap tahunnya, dan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

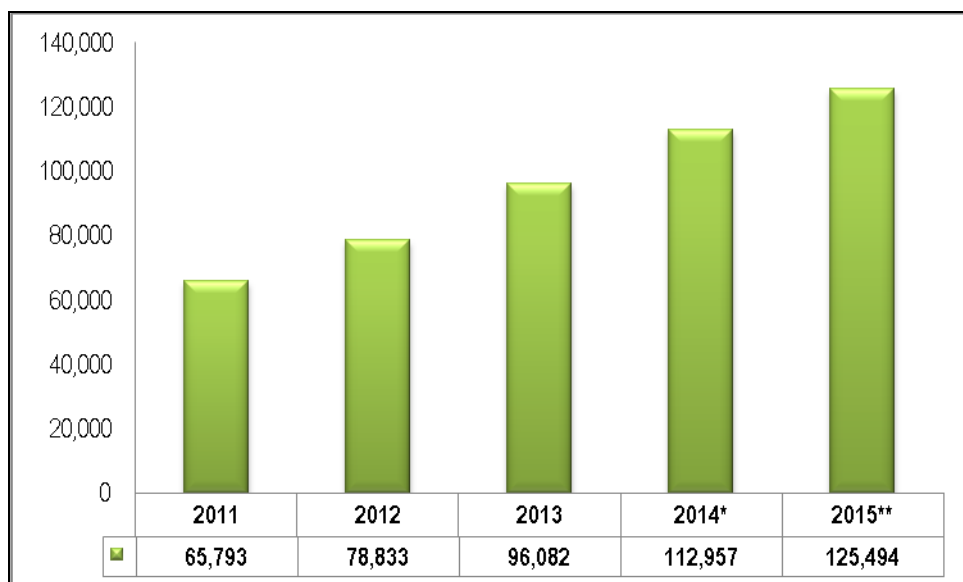


Gambar 2.69 Nominal Uang Terhimpun dari Pihak Ketiga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2013 (juta rupiah)

Sumber : Kantor Perwakilan BI Wilayah VII dalam BPS, Tahun 2014

b) Ketersediaan Restoran dan Rumah Makan

Perkembangan usaha restoran dan rumah makan di Kabupaten Bangka Barat dari sisi jumlah dapat dikatakan perkembangannya stagnan. Tidak ada penambahan jumlah restoran dan rumah makan dalam beberapa tahun terakhir. Hanya terdapat penambahan pada sisi jumlah kursi yang ada walaupun penambahannya tidak cukup signifikan.



Gambar 2.70 Nilai Subsektor Makan Minum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015 (juta rupiah)

Ket : * : Angka Sementara; ** : Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS, Tahun 2016

Akan tetapi jika dilihat dari perkembangan penyediaan makan minum dalam PDRB, rata-rata kenaikannya dalam 4 tahun terakhir cukup signifikan yaitu mencapai 17,59 persen. Kontribusi sub sektor makan minum dalam PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 telah mencapai lebih dari 1 persen.

c) Ketersediaan Penginapan

Perkembangan usaha penginapan dan hotel di Kabupaten Bangka Barat dalam lima tahun terakhir terjadi peningkatan, walau belum optimal. Dari sisi sebaran, usaha penginapan dan hotel di Kabupaten Bangka Barat masih terfokus pada Kecamatan Muntok dan Kecamatan Parittiga. Dalam perkembangannya, jumlah hotel bertambah 2 unit, serta penginapan bertambah 1 unit. Di tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dibantu dengan pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Kementerian Pariwisata mulai mengenalkan *homestay* sebagai pilihan menginap bagi para wisatawan. 25 *homestay* telah dipersiapkan untuk menunjang kepariwisataan di Kabupaten Bangka Barat, khususnya di Kecamatan Muntok, mengingat semua lokasi *homestay* berada di ibukota kabupaten. Sebaran penginapan dan hotel yang tidak merata merupakan salah satu ciri dari tidak meratanya perekonomian yang ada pada masing-masing kecamatan.

Tabel 2.53 Jumlah Penginapan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015

JUMLAH PENGINAPAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Hotel	1	2	2	2	3	3
Penginapan	8	8	9	9	9	9
Homestay						25

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika, Tahun 2015

*) : sampai dengan bulan Juni

Jika dilihat dari perkembangan subsektor akomodasi dalam PDRB, rata-rata pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir cukup signifikan yaitu mencapai 10,8 persen. Dari sisi kontribusi dalam pembentukan PDRB, nilainya masih sangat kecil yaitu ± 0.02 persen.

d) Komunikasi dan Informatika

i. Fasilitas Listrik

Listrik memegang peranan yang penting sekali dalam pembangunan, kegunaan dan intensitas penggunaan tenaga listrik bertambah luas, baik sebagai prasarana produksi maupun sebagai alat pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga. Sebagai faktor produksi tersedianya tenaga listrik cukup menentukan laju kecepatan pembangunan sektor-sektor industri, pertanian, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Pembangunan sektor-sektor ini sangat vital bagi tercapainya tujuan pembangunan seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, mengubah struktur ekonomi dan lain-lain. Disamping itu tersedianya listrik dikalangan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.54 Jumlah Daya Listrik Terpasang Kabupaten Bangka Barat, Tahun 2010-2014

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Terpasang (Kwh)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Bangka Barat	3.831	10.103	10.103	10.103	10.103
2	Kebutuhan Listrik*	40.000				
3	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	9,58	25,26	25,26	25,26	25,26

Sumber : PLN (persero) Wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2015

Dalam pemenuhan kebutuhan akan listrik, pihak PLN telah membuat jaringan kabel bawah laut yang menghubungkan Wilayah Sumatera Dan Bangka via Kota Muntok dan direncanakan akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang berlokasi di kawasan tanjung ular yang merupakan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu yang berfungsi untuk mendukung dari sisi kebutuhan energi.

ii. Fasilitas Komunikasi

Fasilitas komunikasi yang ada di Kabupaten Bangka Barat cukup baik, dimana hampir di keseluruhan wilayah memiliki jaringan tekelonunikasi. Walaupun tingkat kualitas jaringan komunikasi di setiap wilayah berbeda, akan tetapi sudah menjangkau sampai pada level perdesaan.

Jumlah rumah tangga yang memiliki alat komunikasi telepon seluler (HP) di Kabupaten Bangka Barat cukup tinggi dan mengalami peningkatan di setiap

tahunnya. Di tahun 2012 rumah tangga pengguna HP sebanyak 87,93 persen, dan mengalami peningkatan menjadi 91,81 persen di tahun 2013 (BPS, 2014).

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

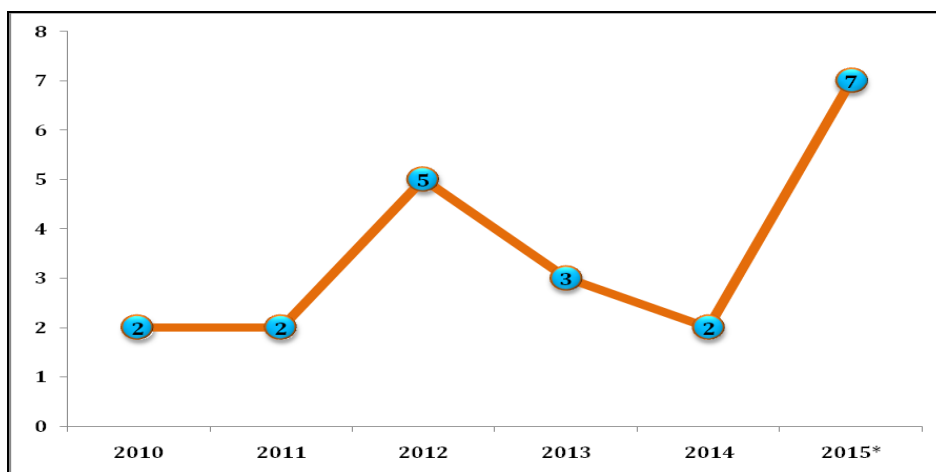
Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan meningkatkan perekonomian daerah serta sekaligus dapat mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Selain dari perhitungan secara bisnis, masuknya investor asing ke suatu wilayah juga sangat tergantung dari kondisi keamanan dan ketertiban serta politik dalam wilayah tersebut, khususnya terkait ketenagakerjaan. Kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investor di Indonesia pada umumnya, khususnya di Kabupaten Bangka Barat. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan iklim investasi salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja : Keamanan dan Ketertiban, Perizinan, Insentif dan Retribusi.

Kekurangan yang terjadi dalam iklim investasi di Kabupaten Bangka Barat adalah masih minimnya data yang berhubungan dengan potensi daerah serta belum disusunnya dokumen khusus terkait perencanaan terkait investasi sehingga daya tawar kepada para investor dirasa masih sangat minim.

2.4.3.1 Keamanan dan Ketertiban

Angka Kriminalitas mempengaruhi investasi asing yang akan masuk ke suatu wilayah / daerah. Semakin rendah angka kriminalitas pada suatu daerah, maka semakin tinggi pula ketertarikan investor untuk menanam investasi di daerah tersebut. Hal tersebut terkait investasi jangka panjang yang memerlukan modal yang cukup besar, sehingga kepastian akan keamanan sangatlah penting.

Semakin rendah jumlah demonstrasi pada suatu daerah, maka ketertarikan investor untuk menanam investasi di suatu daerah semakin tinggi, khususnya terkait persoalan ketenagakerjaan. Tingkat keamanan di suatu wilayah menjadi sangat penting bagi para investor, karena modal yang dikeluarkan untuk membangun aset dan menjalankan roda usaha sangat besar khususnya pada usaha yang berbasis padat modal. Data lengkap tentang jumlah demonstrasi di Kabupaten Bangka Barat di sajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.71 Jumlah Demonstrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015

Sumber: Kantor Penanggulangan Bencana dan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2015

*) : Sampai dengan bulan September.

2.4.3.2 Perizinan

Masalah perizinan juga merupakan faktor penentu dalam peningkatan daya saing investasi daerah khususnya terkait kemudahan dalam proses administrasi perizinan. Dalam rangka optimalisasi pelayanan perizinan, telah dibentuk Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sebagai instansi pelayanan perizinan satu atap di Kabupaten Bangka Barat. Sampai dengan tahun 2015, jenis perizinan yang ditangani oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sebanyak 13 perizinan dengan lama pengurusan, jumlah persyaratan dan biaya yang bervariasi sesuai dengan peraturan dan SOP masing-masing yang diharapkan menciptakan kemudahan dalam investasi di Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 2.55 Lama Proses Pelayanan Perizinan Kabupaten Bangka Barat

No.	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Resmi (rata-rata maks)	Keterangan
1.	SIUP	3	5	Tidak ada retribusi	Belum ada SOP
2.	TDP	3	5	Tidak ada retribusi	Belum ada SOP
3.	IUI	3	5	Tidak ada retribusi	Belum ada SOP
4.	TDI	3	5	Tidak ada retribusi	Belum ada SOP
5.	IMB	14	13	Rp 3,000,000.00	Ada SOP
6.	HO/SIG	7	7	Rp 6,000,000.00	Ada SOP
7.	Izin Jasa	7	11	Rp 90,000.00	Belum ada SOP

No.	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Resmi (rata-rata maks)	Keterangan
	Kepariwisataan				
8.	Tanda Daftar Gudang	7	13	Rp 300,000.00	Ada SOP
9.	Izin Lokasi	-	7	Tidak ada retribusi	Belum ada SOP
10.	Izin Pemanfaatan Ruang	-	7	Tidak ada retribusi	Belum ada SOP
11.	Izin Prinsip Penanaman Modal	-	-	Tidak ada retribusi	Belum ada SOP
12.	Izin Trayek	-	-	Tidak ada retribusi	Belum ada SOP
13.	IUP	-	-	Tidak ada retribusi	Belum ada SOP

Sumber: Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kab. Bangka Barat, Tahun 2016

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas SDM berhubungan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang ada (permintaan pasar tenaga kerja). Kualitas tenaga kerja di suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk di suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

Tabel 2.56 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2010-2015

Tingkat Pendidikan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Tidak/belum sekolah	31.730	37.359	42.676	47.998	49.897	50.936
Persentase Tidak/belum sekolah	19.41	20.84	22.36	23.97	24.66	24,69
Belum/tidak tamat SD	24.999	26.688	27.731	28.472	28.472	28.716
Persentase Belum/tidak tamat SD	15.29	14.89	14.53	14.22	14.07	13,92
Tamat SD	57.093	61.387	63.770	65.658	64.989	65.898
Persentase Tamat SD	34.92	34.24	33.41	32.80	32.12	31,94
Tamat SMP	20.110	22.005	23.314	24.349	24.233	24.879

Tingkat Pendidikan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Persentase Tamat SMP	12.30	12.27	12.21	12.16	11.98	12,06
Tamat SMA	24.196	26.005	27.279	28.317	28.453	29.390
Persentase Tamat SMA	14.80	14.50	14.29	14.14	14.06	14,25
Diploma I/II/III	2.684	2.877	2.985	3.094	2.965	2.965
Persentase Diploma I/II/III	1.64	1.60	1.56	1.55	1.47	1,44
S1/DIV	2.644	2.901	3.064	2.233	3.211	3.426
S2	57	64	71	77	80	80
S3	1	1	2	3	3	3
Persentase minimal S1	1.65	1.65	1.64	1.16	1.63	1,70
Total	163.514	179.287	190.892	201.201	202.303	206.293

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2016

Dari data diatas, rata-rata dalam enam tahun terakhir, jumlah penduduk berdasarkan pendidikan tiga terbesar adalah penduduk tamatan SD (31,94 persen), tidak/belum sekolah (24,69 persen) dan tidak tamat SD (13,92 persen). Terlihat sangat jelas bahwa tingkat pendidikan sebagian besar penduduk di Kabupaten Bangka Barat masih sangat minim. Sementara lulusan yang dianggap tinggi yaitu pada pendidikan Diploma I/II/III hanya sebesar 1,44 persen, dan penduduk lulusan S1/S2/S3 hanya sebesar 1,70 persen. Dilihat dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia Di Kabupaten Bangka Barat di sisi tenaga kerja masih didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dibawah Diploma. Dengan kondisi pendidikan penduduk tersebut, sering kali peluang kerja yang ada di Kabupaten Bangka Barat yang membutuhkan pendidikan yang cukup tinggi, kesempatan tersebut banyak diambil oleh penduduk luar Kabupaten Bangka Barat. Melihat kondisi tersebut pemerintah daerah harus segera mengambil strategi yang tepat untuk memperkuat daya saing penduduk, baik peningkatan keahlian dengan pelaksanaan pendidikan non formal yang saat ini sering dibutuhkan maupun membuka sekolah kejuruan yang berpotensi untuk mengelola kekayaan lokal yang ada di Kabupaten Bangka Barat.

2.4.4.2 Tingkat Ketergantungan

Rata-rata rasio ketergantungan Kabupaten Bangka Barat dalam 6 tahun terakhir sebesar 49,91 persen yang menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (umur 15–64 tahun) menanggung ± 50 penduduk yang tidak produktif (umur 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas). Rasio ketergantungan sebesar 49,91 persen ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 44,77 persen dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 5,15 persen. Untuk lebih detail terkait data rasio ketergantungan di Kabupaten Bangka Barat setiap tahunnya ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.57 Rasio Ketergantungan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 – 2015

Kelompok Umur	2010	2011	2012	2013	2014	2015
0 – 14 Tahun	50.073	54.104	57.115	59.650	59.932	60.201
65 Tahun keatas	4.370	5.404	6.333	7.298	7.737	8.541
Penduduk Usia Tidak Produktif	54.443	59.508	63.448	66.948	67.669	68.742
Penduduk Usia produktif	109.071	119.779	127.444	134.253	134.634	137.551
Rasio Ketergantungan	49.92	49.68	49.79	49.87	50.26	49.98
< 15 Tahun	45.91	45.17	44.82	44.43	44.51	43.77
> 64 Tahun	4.01	4.51	4.97	5.44	5.75	6.21

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2016

Dari data diatas, terlihat bahwa rasio ketergantungan di tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan meskipun di tahun 2015 terjadi penurunan yang tidak signifikan, yang berarti cakupan usia tidak produktif semakin tahun semakin besar yang menyebabkan beban tanggungan bagi usia yang produktif semakin besar. Rata-rata rasio ketergantungan dalam 6 tahun terakhir yaitu 50, yang secara umum disimpulkan bahwa 2 orang produktif menanggung 1 orang yang tidak produktif.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan terkait hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan memfokuskan pada program unggulan daerah (*money follow programme priority*).

Pengelolaan keuangan daerah dijiwai oleh paket perundang-undangan keuangan negara yang dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan pada tataran teknis terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya.

Perwujudan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga analisis mengenai pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan analisis pengelolaan keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya, guna menggambarkan kapasitas atau kemampuan

keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Untuk menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan tersebut, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan daerah. Analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Konsekuensi adanya otonomi daerah, yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, salah satunya adalah bahwa disatu sisi pemerintah memiliki hak untuk menjalankan proses pemerintahan daerahnya secara mandiri, namun di sisi lain pemerintah daerah juga dituntut untuk berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang diamanahkan kepadanya. Kemandirian daerah dalam menjalankan proses pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan yang bertanggung jawab pada akhirnya akan meningkatkan *local accountability* pemerintah pusat terhadap rakyat. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Otonomi daerah yang diwujudkan dalam bentuk desentralisasi, diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu:

1. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah.
2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, pengelolaan keuangan daerah masih sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah pusat yang sangat mempengaruhi

dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah bahkan juga PAD. Perubahan peraturan perundang-undangan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah cukup mempengaruhi pendapatan daerah, sebagai pemegang peranan yang sangat besar dalam perencanaan dan pendanaan pembangunan sepanjang kurun waktu tersebut. Dengan terbitnya Undang-Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentu memberikan warna baru dalam menentukan kerangka pendanaan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bangka Barat periode tahun 2011-2015 serta kerangka pendanaan pada tahun 2016-2021, khususnya terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pemberlakuan Undang-Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2009 tersebut yang kemudian diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya, diharapkan ketergantungan Kabupaten Bangka Barat terhadap dana pusat semakin berkurang, dengan demikian Kabupaten Bangka Barat dapat lebih mandiri dalam hal pendanaan pembangunan. Hal ini dimungkinkan dengan pelimpahan PBB perkotaan dan pedesaan serta BPHTB sebagai pajak daerah, sehingga akan meningkatkan kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu tolok ukur kemandirian daerah dalam era otonomi. Meskipun demikian, komitmen pimpinan daerah tetap sangat diperlukan untuk menggali potensi tersebut mulai dari pimpinan tertinggi sampai pada level terbawah.

Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dengan mengukur kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Perkembangan DOFD Kabupaten Bangka Barat periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat pada **Tabel 3.1**. Berdasarkan **Tabel 3.1** tersebut dapat dilihat bahwa DOFD Kabupaten Bangka Barat periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 rata-rata sebesar 5,91 persen. Pada tahun ke-empat pemekaran yaitu pada tahun 2007, DOFD Kabupaten Bangka Barat sebesar 5,70 persen. Pada tahun 2012 terjadi penurunan menjadi 4,64 persen dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 6,45 persen. DOFD Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2015 sebesar 7,38 persen. Hasil ini sejalan dengan penelitian pada tahun 2007 dimana kabupaten/kota di Indonesia, PAD rata-rata menyumbang sebesar 10,31 persen di tahun 1999/2000, kemudian menjadi 9,04 persen pada tahun 2000, 4,99 persen di tahun 2001 dan menjadi 6,80 persen di tahun 2006. Trend yang ada di

kabupaten/kota di Indonesia juga dialami oleh Kabupaten Bangka Barat, walau masih sedikit lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota di Indonesia.

Tabel 3.1 Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Bangka Barat, Tahun 2007-2015 (Dalam Ribuan)

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan	DOFD
2007	22.327.546	391.926.213	5,70
2008	26.376.772	437.118.617	6,03
2009	27.192.454	523.449.962	5,19
2010	27.489.105	480.318.486	5,72
2011	34.291.175	534.881.011	6,41
2012	30.402.631	655.851.378	4,64
2013	45.341.618	702.915.823	6,45
2014	39.916.056	686.289.140	5,82
2015	56.300.674	774.768.523	7,38
Rata-rata	34.404.226	576.391.017	5,91

Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, Perhitungan APBD Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

Diharapkan pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, DOFD Kabupaten Bangka Barat, dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dapat meningkat menjadi rata-rata 6,00 persen setiap tahunnya. Kenaikan itu tentu diharapkan dari kenaikan realisasi pajak terutama PBB serta BPHTB. Rendahnya angka DOFD mengimplikasikan terjadinya ketergantungan yang tinggi Kabupaten Bangka Barat terhadap dana dari pusat baik berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan dana transfer pusat lainnya dalam komponen lain-lain pendapatan yang sah, dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Laju penambahan PAD tidak sebanding dengan laju penambahan dana transfer dari pusat berupa DAU, DAK, DBH, dan dana transfer pusat lainnya dalam komponen lain-lain pendapatan yang sah yang digunakan untuk membiayai sisi pengeluaran pada APBD. Pada tahun 2021 diharapkan peran PAD dalam membiayai sisi pengeluaran pada APBD semakin besar, sedangkan peran dana perimbangan dalam pengeluaran APBD semakin mengecil.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan *United National Development Programs* menggunakan Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (IKKPD) sebagai salah satu kriteria untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam konteks pemekaran daerah, yang merefleksikan kinerja keuangan pemerintah

daerah secara mikro dan makro, sehingga diperoleh indikator-indikator yang terukur, berimbang dan komprehensif. IKKPD Kabupaten Bangka Barat periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada **Tabel 3.2**, sedangkan perkembangan IKKPD dapat dilihat berdasarkan **Gambar 3.1** sebagai berikut:

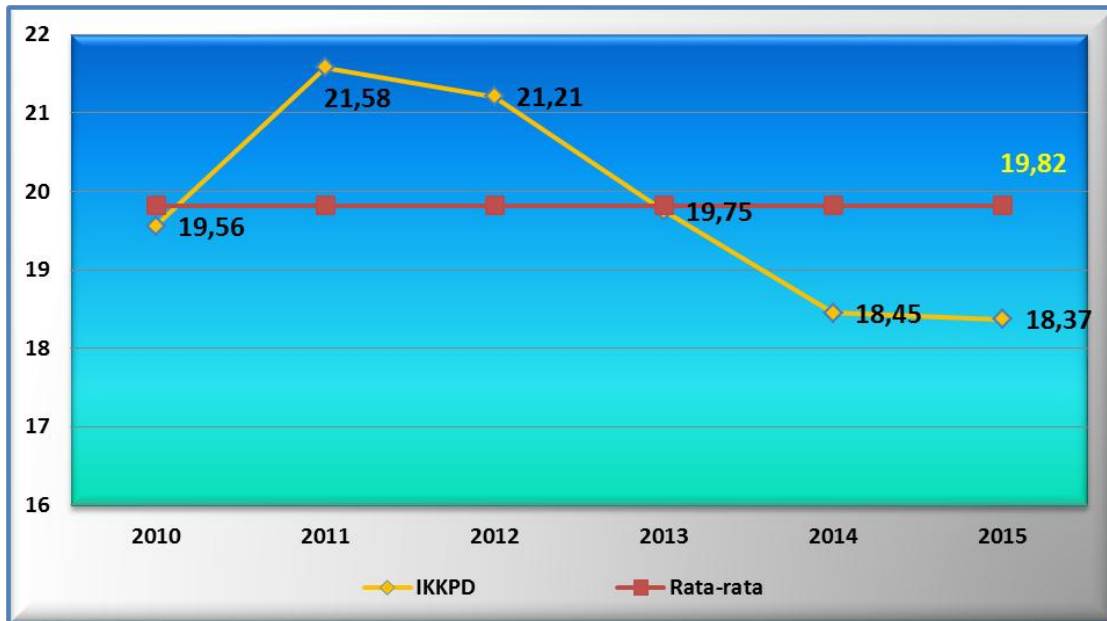
Tabel 3.2. Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Periode Tahun 2010-2015 (dalam persentase)

Tahun	100-Ketergantungan Fiskal (KF)	Kapasitas Penciptaan Pendapatan (KPP)	Proporsi Belanja Modal (PBM)	Kontribusi Sektor Pemerintah (KSP)	Indeks Kinerja Pemerintah Daerah (IKKPD)
2010	40,81	0,40	29,99	7,05	19.56
2011	48,34	0,45	30,52	7,00	21.58
2012	42,19	0,36	34,59	7,69	21.21
2013	40,04	0,48	31,08	7,38	19.75
2014	39,86	0,38	26,11	7,44	18.45
2015	78,00	0,34	22,32	6,76	18,37
Rata-rata	48,21	0,40	29,10	7,22	19,82

Sumber :DPPKA Kab. Bangka Barat, Perhitungan APBD, Tahun 2016 (diolah)

Berdasarkan **Tabel 3.2** dan **Gambar 3.1** diketahui bahwa, rata-rata indeks kinerja keuangan Kabupaten Bangka Barat adalah sebesar 19,82 persen. Pada tahun 2011 indeks mengalami kenaikan dari 19,56 persen menjadi 21,58 persen, namun menurun sampai tahun 2015 sebesar 18,37. Hal ini lebih didorong karena ketergantungan fiskal ke pemerintah pusat lebih besar dan alokasi belanja modal yang semakin mengecil secara persentase.

Indeks kinerja keuangan ini diharapkan akan meningkat kembali untuk menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat cukup berhasil. Berdasarkan data diatas, pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 indeks kinerja Keuangan Kabupaten Bangka Barat diharapkan dapat naik menjadi 22 persen. Yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah jumlah pegawai yang semakin besar dan menurunnya proporsi belanja modal serta peningkatan PAD agar angka ketergantungan terhadap pusat semakin kecil untuk dapat meningkatkan indeks kinerja keuangan sehingga mencapai 22 persen.



Gambar 3.1 Indeks Kinerja Keuangan Kabupaten Bangka Barat, 2010-2015

Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, Perhitungan APBD, Tahun 2016 (diolah)

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Struktur APBD Kabupaten Bangka Barat terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah, terdiri atas: pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah; (2) Pengeluaran Daerah, terdiri atas: belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Secara umum komponen APBD terdiri dari:

A. Komponen Pendapatan:

1. PAD yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, BPHTB (mulai tahun 2010) dan Lain-lain PAD yang sah;
2. Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU dan DAK; serta
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

B. Komponen Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
2. Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

C. Komponen Pembiayaan:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, proses perencanaan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam APBD Kabupaten Bangka Barat telah mengalami kemajuan yang cukup berarti setiap tahun, sekaligus memperlihatkan keberhasilan dari pemekaran wilayah. Keberhasilan ini dapat dilihat dari perkembangan APBD Kabupaten Bangka Barat maupun program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada periode tahun tersebut. Perubahan tersebut dapat dilihat dari perkembangan pendapatan maupun belanja pada APBD Kabupaten Bangka Barat pada **Tabel 3.3, Tabel 3.4, Tabel 3.5** dan **Gambar 3.2**.

Tabel 3.3. Perkembangan APBD dan Realisasi APBD
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2015

TAHUN	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SURPLUS/ DEFISIT	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	PEMBIAYAAN NETTO	SILPA
2005	ANGGARAN	99.287.060.450,00	120.420.215.495,00	(21.133.155.045,00)	23.158.640.145,00	2.025.485.100,00	21.133.155.045,00	-
	REALISASI	114.004.061.268,00	89.865.445.150,00	24.138.616.118,00	23.158.640.145,00	2.015.072.800,00	21.143.567.345,00	45.282.183.463,00
2006	ANGGARAN	259.776.343.038,00	296.998.580.801,00	(37.222.237.763,00)	45.282.183.463,00	8.059.945.700,00	37.222.237.763,00	-
	REALISASI	271.633.784.086,00	203.798.306.091,00	67.835.477.995,00	45.305.433.463,00	113.140.911.458,00	(67.835.477.995,00)	-
2007	ANGGARAN	285.207.802.058,00	391.926.213.515,06	(106.718.411.457,06)	111.656.399.588,06	4.937.988.131,00	106.718.411.457,06	-
	REALISASI	299.611.873.514,00	299.379.883.381,96	231.990.132,04	110.690.040.800,87	4.000.000.000,00	106.690.040.800,87	106.922.030.932,91
2008	ANGGARAN	334.199.087.044,69	437.118.617.977,60	(102.919.530.932,91)	108.422.030.932,91	5.502.500.000,00	102.919.530.932,91	-
	REALISASI	403.592.319.855,29	362.694.184.404,51	40.898.135.450,78	107.615.919.182,91	3.002.500.000,00	104.613.419.182,91	145.511.554.633,69
2009	ANGGARAN	382.160.157.328,00	523.449.961.651,74	(141.289.804.323,74)	144.792.304.323,74	3.502.500.000,00	141.289.804.323,74	-
	REALISASI	389.873.249.076,00	431.792.494.191,30	(41.919.245.115,30)	144.872.591.918,65	3.502.500.000,00	141.370.091.918,65	99.450.846.803,35
2010	ANGGARAN	386.564.753.653,89	480.318.485.824,24	(93.753.732.170,35)	99.324.357.170,35	5.570.625.000,00	93.753.732.170,35	-
	REALISASI	366.824.427.347,58	408.633.909.164,60	(41.809.481.817,02)	99.572.467.777,35	3.702.500.000,00	95.869.967.777,35	54.060.485.960,33
2011	ANGGARAN	491.494.276.031,74	534.881.011.992,07	(43.386.735.960,33)	54.060.485.960,33	10.673.750.000,00	43.386.735.960,33	-
	REALISASI	513.419.561.941,63	454.939.522.584,15	58.480.039.357,48	54.943.388.960,33	10.602.486.500,00	44.340.902.460,33	102.820.941.817,81
2012	ANGGARAN	564.298.686.453,97	655.851.378.271,78	(91.552.691.817,81)	103.820.941.817,81	12.268.250.000,00	91.552.691.817,81	-
	REALISASI	558.518.086.278,90	584.813.660.656,00	(26.295.574.377,10)	103.816.074.817,81	11.949.209.000,00	91.866.865.817,81	65.571.291.440,71
2013	ANGGARAN	646.797.032.235,28	702.915.823.675,99	(56.118.791.440,71)	66.821.291.440,71	10.702.500.000,00	56.118.791.440,71	-
	REALISASI	597.297.348.701,66	600.542.509.864,51	(3.245.161.162,85)	67.621.701.940,71	8.137.920.000,00	59.483.781.940,71	56.238.620.777,86
2014	ANGGARAN	736.333.281.968,64	786.419.402.746,50	(50.086.120.777,86)	58.238.620.777,86	8.152.500.000,00	50.086.120.777,86	-
	REALISASI	682.241.206.485,53	686.289.139.998,39	(4.047.933.512,86)	60.056.385.557,31	7.127.500.000,00	52.928.885.557,31	48.880.952.044,45
2015	ANGGARAN	801.964.950.367,29	849.211.190.192,00	(47.246.239.824,71)	50.748.739.824,71	3.502.500.000,00	47.246.239.824,71	-
	REALISASI	763.092.986.353,94	774.768.522.932,88	(11.675.536.578,94)	50.386.020.879,71	2.891.990.000,00	47.494.030.879,71	35.818.494.30,77

Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, Perhitungan APBD, Tahun 2016 (diolah)

Tabel 3.4. Pertumbuhan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2006-2015 (dalam persentase)

Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
Pendapatan	138,27	10,30	34,71	-3,40	-5,91	39,96	8,78	6,94	14,22	11,85	25,59
Belanja	146,64	31,96	11,53	19,75	-8,24	11,36	22,62	7,18	11,88	12,89	26,27
Penerimaan Pembiayaan	95,63	144,32	-2,78	34,62	-31,27	-44,82	88,95	-34,86	-11,19	-16,10	22,25
Pengeluaran Pembiayaan	297,93	-38,73	11,43	-36,35	59,05	91,61	14,94	-12,76	-23,83	-59,42	30,39

Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)



Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

Gambar 3.2. Pertumbuhan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007-2015

**Tabel 3.5. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Penerimaan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2006-2015**

URAIAN	2006		2007		2008		2009		2010	
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN	259.776.343.037,84	271.633.784.086,04	285.207.802.058,00	299.715.076.882,27	334.199.087.044,69	403.592.319.855,29	382.160.157.328,05	389.873.249.075,96	386.564.753.653,89	366.824.427.347,58
A PENDAPATAN ASLI DAERAH	15.489.429.037,84	17.155.764.599,10	17.208.858.199,00	22.327.546.146,39	22.277.500.000,00	26.687.545.513,76	21.595.314.876,00	27.192.452.744,96	26.390.902.500,00	27.393.656.182,71
1. PAJAK	10.290.579.000,00	8.885.495.069,25	2.020.500.000,00	2.002.940.871,26	3.287.000.000,00	3.649.571.941,00	2.277.000.000,00	5.007.402.070,00	2.841.000.000,00	3.663.766.527,00
- PAJAK HOTEL DAN RESTORAN	62.979.000,00	76.472.580,00	85.000.000,00	94.109.000,00	95.000.000,00	106.773.700,00	100.000.000,00	107.212.500,00	100.000.000,00	149.330.000,00
- PAJAK HIBURAN	20.000.000,00	25.000.000,00	27.000.000,00	41.050.000,00	27.000.000,00	22.100.000,00	27.000.000,00	17.750.000,00	27.000.000,00	34.107.500,00
- PAJAK REKLAME	85.000.000,00	84.750.607,00	93.500.000,00	116.706.635,00	150.000.000,00	134.710.125,00	100.000.000,00	129.610.815,00	100.000.000,00	146.883.541,00
- PAJAK PENERANGAN JALAN	500.000.000,00	588.753.921,00	600.000.000,00	720.617.847,00	700.000.000,00	1.007.025.954,00	700.000.000,00	949.687.315,00	900.000.000,00	1.169.250.586,00
- PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOL. C	850.000.000,00	347.637.316,25	900.000.000,00	701.158.789,26	2.000.000.000,00	2.046.941.402,00	1.000.000.000,00	3.456.766.940,00	1.364.000.000,00	1.665.973.900,00
- PAJAK SARANG BURUNG WALET	240.000.000,00	246.089.000,00	315.000.000,00	329.298.600,00	315.000.000,00	332.020.760,00	350.000.000,00	346.374.500,00	350.000.000,00	498.221.000,00
- PAJAK PERTAMBANGAN UMUM & MINERAL IKUTAN	7.932.600.000,00	6.842.474.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- PAJAK TANDAN BUAH SEGAR	600.000.000,00	674.317.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RETRIBUSI	2.478.850.000,00	1.958.756.406,50	2.339.116.000,00	5.044.243.941,00	5.715.500.000,00	5.482.121.944,04	3.997.314.876,00	4.363.098.803,00	6.074.902.500,00	7.351.218.736,00
3. LABA PEYERTAAN MODAL PADA BUMD	20.000.000,00	51.917.799,35	75.000.000,00	515.509.524,13	375.000.000,00	1.111.485.422,72	1.350.000.000,00	1.859.073.187,03	2.350.000.000,00	2.403.241.705,69
4. LAIN LAIN PAD YANG SAH	2.700.000.037,84	6.259.595.324,00	12.774.242.199,00	14.764.851.810,00	12.900.000.000,00	16.444.366.206,00	13.971.000.000,00	15.962.878.684,93	15.125.000.000,00	13.975.429.214,02
B DANA PERIMBANGAN	244.286.914.000,00	254.478.019.486,94	267.998.943.859,00	277.387.530.735,88	310.921.587.044,69	375.904.774.341,53	350.103.792.095,05	348.781.896.331,00	347.551.904.553,89	328.136.949.564,87
BAGI HASIL PAJAK PUSAT	9.640.539.000,00	15.422.383.740,00	13.377.927.859,00	19.121.957.514,00	5.917.266.044,69	23.573.129.047,00	21.281.461.532,00	31.271.276.925,00	29.403.918.533,89	32.144.946.963,00
BAGI HASI SDA	11.440.359.000,00	15.301.366.648,00	14.450.000.000,00	27.620.196.616,00	12.700.000.000,00	63.064.551.958,00	52.222.271.055,05	42.256.327.759,00	54.221.579.968,00	32.521.934.680,00
DAU	186.185.000.000,00	186.185.000.000,00	188.769.000.000,00	188.769.000.000,00	228.461.981.000,00	228.461.981.000,00	219.252.201.000,00	219.252.201.000,00	217.122.438.000,00	217.122.438.000,00
DAK	23.910.000.000,00	23.910.000.000,00	40.921.000.000,00	27.765.300.000,00	47.477.000.000,00	42.729.300.000,00	40.002.000.000,00	40.002.000.000,00	21.883.200.000,00	21.883.200.000,00
BAGI HASIL PAJAK PROVINSI	7.561.016.000,00	8.109.269.098,94	9.061.016.000,00	12.691.076.605,88	11.000.000.000,00	12.791.387.336,53	14.263.458.508,00	13.117.730.647,00	13.828.038.052,00	14.815.736.921,87
DABA DARI PROVINSI	5.550.000.000,00	5.550.000.000,00	1.420.000.000,00	1.420.000.000,00	5.365.340.000,00	5.284.425.000,00	3.082.400.000,00	2.882.360.000,00	11.092.730.000,00	9.648.693.000,00
C LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	10.461.050.357,00	13.898.900.000,00	12.621.946.600,00	11.293.821.600,00
BANTUAN DANA KONTIDJENSI / PENYEIMBANG DARI PEMERINTAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.461.050.357,00	13.898.900.000,00	12.621.946.600,00	11.293.821.600,00
BANTUAN DANA KONTIDJENSI / PENYEIMBANG DARI DAERAH INDUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN HIBAH					1.000.000.000,00	1.000.000.000,00				
SILPA	45.282.183.463,16	110.690.040.801,14	110.690.040.801,14	106.922.030.932,91	106.922.030.932,91	145.511.554.633,69	145.511.554.633,69	99.450.846.803,35	99.450.846.803,35	54.060.485.960,33

URAIAN	2011		2012		2013		2014		2015	
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN	491.494.276.031,74	513.419.561.941,63	564.298.686.453,97	558.518.086.278,90	646.797.032.235,28	597.297.348.701,66	736.333.281.968,64	682.241.206.485,53	801.964.950.367,29	763.092.986.353,94
A PENDAPATAN ASLI DAERAH	31.792.985.000,00	34.291.175.595,08	23.078.015.190,82	30.402.629.649,92	43.197.721.500,00	45.341.617.077,60	41.063.105.115,00	39.916.055.462,69	50.233.222.900,00	56.300.674.425,60
PAJAK	3.836.500.000,00	5.044.719.421,00	4.389.464.000,00	5.945.262.046,61	18.195.000.000,00	19.219.723.875,47	10.395.000.000,00	11.166.760.961,25	12.008.000.000,00	12.332.986.126,33
- PAJAK HOTEL DAN RESTORAN	160.000.000,00	220.071.560,00	190.000.000,00	236.098.500,00	633.000.000,00	929.317.225,00	900.000.000,00	1.105.193.820,00	1.220.000.000,00	1.165.475.063,00
- PAJAK HIBURAN	35.000.000,00	65.262.500,00	43.000.000,00	52.122.000,00	55.000.000,00	59.950.000,00	57.000.000,00	58.775.750,00	73.000.000,00	36.911.000,00
- PAJAK REKLAME	110.000.000,00	145.582.362,00	131.464.000,00	180.037.520,00	170.000.000,00	233.440.764,00	323.000.000,00	316.813.635,25	300.000.000,00	371.807.290,83
- PAJAK PENERANGAN JALAN	1.600.000.000,00	2.037.365.819,00	2.410.000.000,00	3.399.932.879,00	5.460.000.000,00	5.703.818.374,00	6.700.000.000,00	7.148.230.049,00	7.500.000.000,00	7.501.341.649,00
- PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOL. C	1.300.000.000,00	1.829.165.400,00	1.100.000.000,00	1.510.326.133,06	1.500.000.000,00	1.751.449.562,47	110.000.000,00	148.093.881,00	100.000.000,00	81.328.000,00
- PAJAK SARANG BURUNG WALET	500.000.000,00	603.511.000,00	349.000.000,00	326.720.000,00	350.000.000,00	407.127.050,00	375.000.000,00	347.158.700,00	475.000.000,00	165.231.580,00
- BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	130.000.000,00	138.672.780,00	150.000.000,00	218.935.990,55	10.000.000.000,00	10.101.845.804,00	700.000.000,00	796.619.330,00	300.000.000,00	1.438.945.204,50
- PBB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	1.213.191.718,00	2.000.000.000,00	1.557.795.215,00
- PAJAK AIR TANAH	1.500.000,00	5.088.000,00	16.000.000,00	21.089.024,00	27.000.000,00	32.775.096,00	30.000.000,00	32.684.078,00	40.000.000,00	14.151.124,00
RETRIBUSI	5.255.785.000,00	7.081.208.155,00	6.370.308.460,00	9.608.407.228,48	10.957.721.500,00	11.854.170.755,00	4.398.530.615,00	4.509.730.124,00	5.368.000.000,00	4.955.624.770,50
LABA PEYERTAAN MODAL PADA BUMD	3.100.000.000,00	3.357.647.084,21	3.900.000.000,00	3.930.202.749,13	4.675.000.000,00	2.642.750.353,29	4.430.000.000,00	883.348.362,26	4.500.000.000,00	3.254.925.758,26
LAIN LAIN PAD YANG SAH	19.600.700.000,00	18.807.600.934,87	8.418.242.730,82	10.918.757.625,70	9.370.000.000,00	11.624.972.093,84	21.839.574.500,00	23.356.216.015,18	28.357.222.900,00	35.757.137.770,51
B DANA PERIMBANGAN	423.192.380.071,74	442.619.475.386,55	511.826.514.263,15	506.234.428.855,98	563.988.423.891,28	513.329.375.445,06	642.078.400.108,64	604.197.596.522,84	686.871.292.467,29	652.842.293.428,34
BAGI HASIL PAJAK PUSAT	35.396.405.964,00	35.561.589.083,00	36.200.410.000,00	33.012.969.549,00	39.000.000.000,00	37.532.262.261,00	33.000.000.000,00	33.953.528.279,00	38.845.969.000,00	34.020.267.850,00
BAGI HASIL SDA	67.318.893.057,74	92.098.592.445,00	73.867.932.213,15	68.329.455.083,00	67.559.372.891,28	52.362.138.132,00	89.242.293.804,85	69.647.457.627,00	109.913.700.771,29	87.539.035.157,00
DAU	265.251.539.000,00	265.251.539.000,00	322.887.366.000,00	322.887.366.000,00	358.151.691.000,00	358.151.691.000,00	413.680.194.000,00	413.680.194.000,00	424.317.594.000,00	424.317.594.000,00
DAK	31.259.300.000,00	23.441.475.000,00	32.131.060.000,00	32.131.060.000,00	37.411.920.000,00	24.589.265.000,00	41.455.370.000,00	31.091.528.000,00	51.553.990.000,00	41.244.184.000,00
BAGI HASIL PAJAK PROVINSI	15.270.200.000,00	18.638.617.808,55	23.130.000.000,00	28.701.835.507,98	32.000.000.000,00	23.104.075.052,06	33.731.682.303,79	28.009.223.916,84	29.891.028.696,00	38.412.301.426,34
DABA DARI PROVINSI	8.696.042.050,00	7.627.662.050,00	23.609.746.050,00	21.171.742.716,00	29.865.440.000,00	17.589.944.000,00	30.968.860.000,00	27.815.664.700,00	32.349.010.000,00	27.308.910.995,00
C LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH	36.508.910.960,00	36.508.910.960,00	29.394.157.000,00	21.881.027.773,00	39.610.886.844,00	38.626.356.179,00	53.191.776.745,00	38.127.554.500,00	64.860.435.000,00	53.950.018.500,00
BANTUAN DANA KONTIENSI / PENYEIMBANG DARI PEMERINTAH	36.508.910.960,00	36.508.910.960,00	18.194.157.000,00	18.194.157.000,00	22.110.886.844,00	21.825.254.500,00	51.191.776.745,00	37.517.801.000,00	62.360.435.000,00	53.788.069.000,00
BANTUAN DANA KONTIENSI / PENYEIMBANG DARI DAERAH INDUK										
PENDAPATAN HIBAH	0,00	0,00	11.200.000.000,00	3.686.870.773,00	17.500.000.000,00	16.801.101.679,00	2.000.000.000,00	609.753.500,00	2.500.000.000,00	161.949.500,00
SILPA	54.060.485.960,33	102.820.941.817,81	102.820.941.817,81	65.571.291.440,71	65.571.291.440,71	56.238.620.777,86	56.238.620.777,86	48.880.952.044,45	48.880.952.044,45	35.818.494.300,77

Sumber :DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2015 (lihat **Tabel 3.6**), pertumbuhan tahunan dan rata-rata dari setiap jenis pendapatan Kabupaten Bangka Barat relatif baik. Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat dicermati bahwa pertumbuhan PAD Kabupaten Bangka Barat cukup baik yaitu rata-rata sebesar 18,58 persen setiap tahun. Pertumbuhan pajak daerah rata-rata sebesar 27,48 persen setiap tahun, sedangkan pertumbuhan retribusi sebesar 20,69 persen setiap tahun, kemudian pertumbuhan Lain-Lain PAD yang sah sebesar 48,21 persen setiap tahun dan pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan sebesar 117,27 persen setiap tahunnya.

Pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki pilihan lebih banyak dalam ekstensifikasi pajak maupun retribusi. Oleh karena itu diperlukan pemikiran pencarian alternatif pendanaan lain yang diharapkan dapat meningkatkan nilai pendapatan Kabupaten Bangka Barat guna mendanai kegiatan dan program pemerintah dalam kaitannya terhadap pelayanan publik. Berdasarkan tabel pertumbuhan tahunan dan rata-rata di atas dapat dilihat bahwa pada jenis pendapatan Lain-lain PAD yang Sah, sumber utamanya adalah dari bunga deposito dan jasa giro, dan sumber utama tersebut mengalami peningkatan cukup signifikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan PAD Kabupaten Bangka Barat ternyata juga disumbang oleh pendapatan bunga deposito dan jasa giro dalam porsi yang cukup besar. Sehingga pendapatan dari bunga deposito dan jasa giro dapat menjadi alternatif pendanaan lain.

Pertumbuhan rata-rata pendapatan jenis Dana Perimbangan yaitu sebesar 27,53 persen. Pertumbuhan rata-rata Dana Perimbangan ini lebih disumbang oleh pertumbuhan Bagi Hasil SDA yang mencapai rata-rata 36,43 persen. Nilai rata-rata tersebut di atas pertumbuhan total penerimaan yang hanya 26,11 persen. Pada tahun-tahun yang akan datang diperkirakan pertumbuhan Bagi Hasil SDA, yang sebagian besar terdiri dari royalti dan *landrent* ini, akan stabil dikisaran angka 10 persen. Angka pertumbuhan pendapatan DAU lebih stabil dan penerimaan DAU ini pun sangat tergantung kepada penerimaan negara dan kebijakan pemerintah pusat dalam pemekaran wilayah. Ketergantungan Kabupaten Bangka Barat terhadap kebijakan dan pendanaan pemerintah pusat masih tetap besar pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Untuk pertumbuhan bagi hasil pajak provinsi pun stabil pada angka rata-rata sebesar 29,14 persen dan juga bagi hasil pajak pusat yang mencapai rata-rata sebesar 11,19 persen.

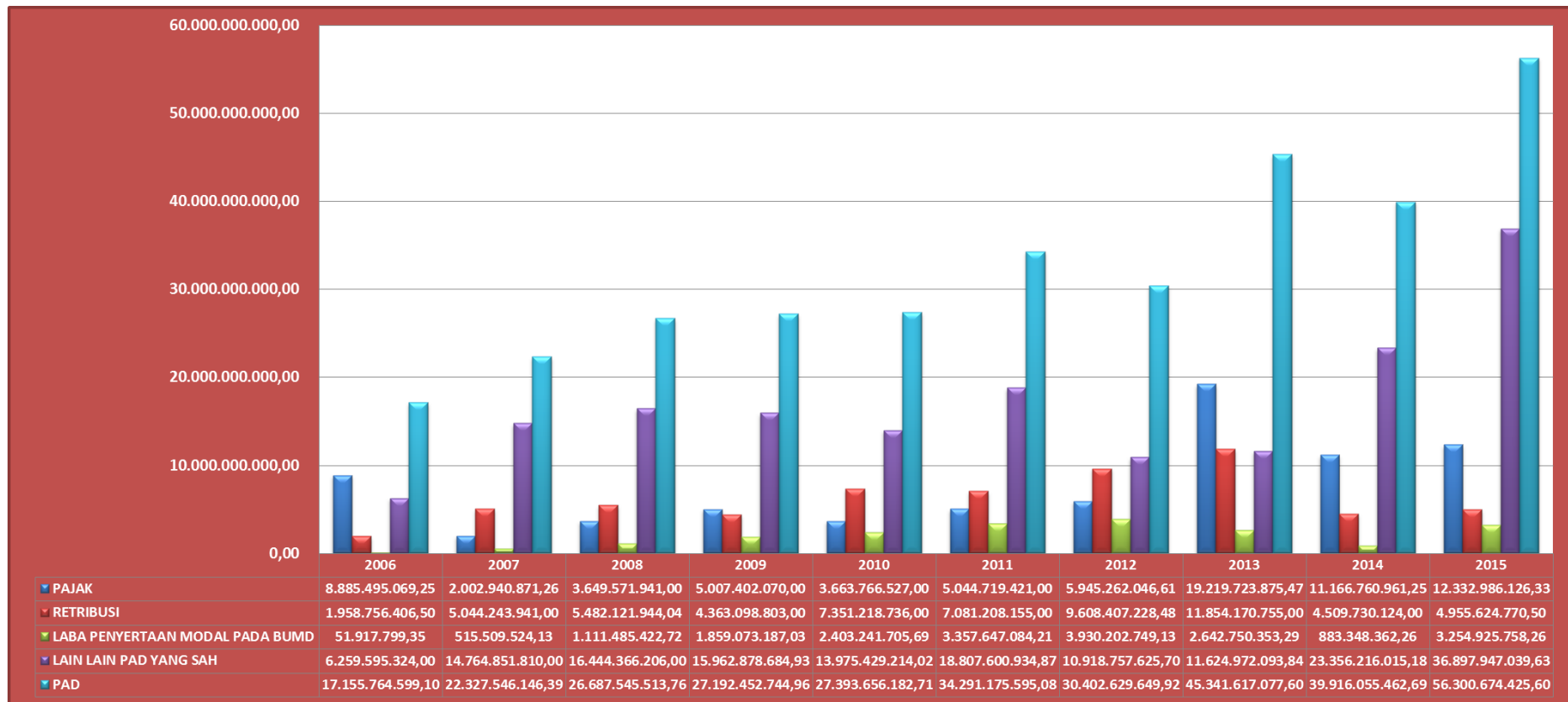
Tabel 3.6. Pertumbuhan Tahunan dan Rata-rata Penerimaan
Kabupaten Bangka Barat Periode Tahun 2005-2015 (dalam persentase)

JENIS PENERIMAAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
PAD	41,94	17,90	30,15	18,14	3,09	1,09	25,18	-11,34	49,14	-11,97	41,05	18,58
Pajak	55,75	-15,14	-77,46	82,21	37,21	-27,36	37,69	17,85	223,28	-41,90	10,10	27,48
Pajak Hotel & Restoran	111,60	45,26	23,06	13,46	0,41	39,28	47,37	7,28	293,61	18,93	5,5	55,06
Pajak Hiburan	92,46	74,83	64,20	-46,16	-19,68	92,15	91,34	-20,13	15,02	-1,96	-37,2	27,72
Pajak Reklame	58,92	29,66	37,71	15,43	-3,79	13,33	-0,89	23,67	29,66	35,71	17,4	23,34
PPJ	6,05	27,81	22,40	39,74	-5,69	20,19	74,25	66,88	67,76	25,32	4,9	31,79
Pajak Mineral Batuan Bukan Logam	-25,31	-18,09	101,69	191,94	68,87	-51,81	9,80	-17,43	15,96	-91,54	-45,1	12,64
Pajak Air Tanah	-	-	-	-	-	-	1,76	314,49	55,41	-0,28	-56,7	28,61
Pajak Sarang Walet	-7,99	61,77	33,81	0,83	4,32	44,29	50,88	-45,86	24,61	-14,73	-52,4	9,05
Pajak Pertambangan Umum	67,96	-21,00	-100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,82
Pajak TBS	96,93	5,32	-100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20
Retribusi	0,06	9,97	157,52	8,68	-20,41	68,49	-3,67	35,69	23,37	-61,96	9,9	20,69
Lain2 PAD Yang Sah	31,51	172,35	135,88	9,27	-1,06	29,27	34,58	-41,94	6,47	100,91	53,1	48,21
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	-	-	892,93	115,61	67,26	-11,69	39,71	17,05	-32,76	-66,57	268,5	117,27
DANA PERIMBANGAN	32,44	164,48	9,00	35,88	-7,46	-5,92	37,11	9,61	3,57	16,02	8,1	27,53
Bagi Hasil Pajak Pusat	23,35	6,59	23,99	23,28	32,66	5,39	10,63	-7,17	13,69	-9,54	0,2	11,19
Bagi Hasil SDA	59,58	-2,39	80,51	128,33	-33,00	-24,96	183,19	-25,81	-23,37	33,01	25,7	36,43
DAU	31,16	236,26	1,39	21,03	-4,03	-0,97	22,17	21,73	10,92	15,50	2,6	32,52
Bagi Hasil Pajak Provinsi	119,39	9,22	56,50	8,69	-4,90	12,94	25,80	53,99	-19,50	21,23	37,1	29,14
Dana Penyesuaian Pendidikan	-	-	-	-	-	-	223,26	-50,17	19,96	71,90	42,7	27,97
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	355,70	-96,37	-73,4	16,90
Total Pendapatan	34,37	138,27	10,34	34,60	-3,33	-5,89	39,96	8,78	6,94	14,22	8,90	26,11

Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

Analisa pendapatan daerah lebih detail untuk masing-masing komponen pendapatan daerah dalam kurun waktu 2011-2015 disajikan di **Tabel 3.7-3.10**. Berdasarkan data hasil olahan yang tertera di **Tabel 3.7**, dapat dilihat bahwa total realisasi pendapatan Kabupaten Bangka Barat selama periode 2011 sampai dengan 2015 adalah sebesar Rp 3.115.709.999.030,78 atau mencapai 96,14 persen di bawah total target sebesar Rp 3.240.888.227.056,92 (lihat **Tabel 3.6**). Hal ini terjadi karena

besarnya defisit pada Tahun Anggaran 2013-2015 yang sebagian besar disebabkan oleh pemangkasan DBH Minyak dan Gas (Migas) oleh pemerintah pusat. Hal ini tentunya berdampak pada pembangunan fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat.



Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

Gambar 3.3. Realisasi PAD per Jenis Pendapatan Kabupaten Bangka Barat Periode 2006-2015

Dilihat dari capaian PAD diatas, hanya pendapatan pada tahun 2011 yang berhasil mencapai target dengan nilai capaian 104,46 persen. Penganggaran komponen pendapatan daerah setelah perubahan APBD pada tahun berikutnya sebagian besar di atas realisasi tahun sebelumnya, yang berarti bahwa penganggaran terhadap pendapatan daerah sudah ideal, kecuali: (1) penganggaran komponen PAD pada tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp 23.078.015.190,82, sedangkan realisasi pada tahun anggaran tahun 2011 mencapai Rp 34.291.175.595,08.

Hal yang sama terjadi pada penganggaran komponen PAD pada tahun 2014 yang ditargetkan sebesar Rp 41.063.105.115,00, sedangkan realisasinya pada tahun 2013 telah mencapai Rp 45.341.617.077,60; dan (2) penganggaran pendapatan lain-lain daerah yang sah pada tahun 2012 yang ditargetkan sebesar Rp 29.394.157.000,00, sedangkan realisasinya pada tahun 2011 mencapai Rp 36.508.910.960,00. Hal ini terjadi karena adanya perubahan kebijakan pemerintahan pusat terkait dana Belanja Operasional sekolah, dimana pada tahun 2011 disalurkan ke Pemerintah Daerah melalui kas daerah, sedangkan pada tahun 2012 disalurkan ke Pemerintah Provinsi. Realisasi pendapatan pada Tahun 2015 mencapai Rp 764.233.795.623,06 atau 95,30 persen dari target pendapatan sebesar Rp 801.964.950.367,29.

Berdasarkan data yang tertera pada **Tabel 3.7**, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah hampir selalu mengalami pertumbuhan. Rata-rata pertumbuhan pendapatan tertinggi ada pada komponen Dana Perimbangan, yang tumbuh sebesar 27,53 persen, diikuti oleh komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 19,17 persen dan yang terakhir adalah komponen PAD yang tumbuh sebesar 18,58 persen.

Realisasi pendapatan tertinggi adalah tahun 2015, yaitu sebesar Rp 763.092.986.353,94 dari target sebesar Rp 801.964.950.367,29 atau mencapai 96,10 persen. Kondisi yang paling ideal terjadi pada Tahun 2011 dimana realisasi sebesar Rp 513.419.561.941,63 atau melebihi target mencapai 104,46 persen dari target sebesar Rp 491.494.276.031,74. Dana perimbangan merupakan sumber komponen pendapatan dengan kontribusi tertinggi secara signifikan, dengan rata-rata mencapai 87,31 persen.

Tabel 3.7. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2015

Tahun	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Kontribusi (%)
2011	1. Pendapatan Asli Daerah	31.792.985.000,00	34.291.175.595,08	107,86	-	2.498.190.595,08	6,68
	2. Dana Perimbangan	423.192.380.071,74	442.619.475.386,55	104,59	-	19.427.095.314,81	86,21
	3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	36.508.910.960,00	36.508.910.960,00	100,00	-	0,00	7,11
Jumlah Pendapatan Tahun 2011		491.494.276.031,74	513.419.561.941,63	104,46	-	21.925.285.909,89	100,00
2012	1. Pendapatan Asli Daerah	23.078.015.190,82	30.402.629.649,92	131,74	-11,34	7.324.614.459,10	5,44
	2. Dana Perimbangan	511.826.514.263,15	506.234.428.855,98	98,91	14,37	-5.592.085.407,17	90,64
	3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	29.394.157.000,00	21.881.027.773,00	74,44	-40,07	-7.513.129.227,00	3,92
Jumlah Pendapatan Tahun 2012		564.298.686.453,97	558.518.086.278,90	98,98	8,78	-5.780.600.175,07	100,00
2013	1. Pendapatan Asli Daerah	43.197.721.500,00	45.341.617.077,60	104,96	49,14	2.143.895.577,60	7,59
	2. Dana Perimbangan	563.988.423.891,28	513.329.375.445,06	91,02	1,40	-50.659.048.446,22	85,94
	3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	39.610.886.844,00	38.626.356.179,00	97,51	76,53	-984.530.665,00	6,47
Jumlah Pendapatan Tahun 2013		646.797.032.235,28	597.297.348.701,66	92,35	6,94	-499.683.533,62	100,00
2014	1. Pendapatan Asli Daerah	41.063.105.115,00	39.916.055.462,69	97,21	-11,97	-1.147.049.652,31	5,85
	2. Dana Perimbangan	642.078.400.108,64	604.197.596.522,84	94,10	17,70	-37.880.803.585,80	88,56
	3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	53.191.776.745,00	38.127.554.500,00	71,68	-1,29	-15.064.222.245,00	5,59
Jumlah Pendapatan Tahun 2014		736.333.281.968,64	682.241.206.485,53	92,65	14,22	-54.092.075.483,11	100,00
2015	1. Pendapatan Asli Daerah	50.233.222.900,00	57.441.483.694,72	114,35	43,91	7.208.260.794,72	7,52
	2. Dana Perimbangan	686.871.292.467,29	652.842.293.428,34	95,05	8,05	-34.028.999.038,95	85,4
	3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	64.860.435.000,00	53.950.018.500,00	83,18	41,50	-10.910.416.500,00	7,06
Jumlah Pendapatan Tahun 2015		801.964.950.367,29	763.092.986.353,94	95,15	11,85	-38.871.964.013,35	100,00
TOTAL		3.240.888.227.056,92	3.114.569.189.761,66	96,10	14,37	-126.319.037.295,26	-
Rata-rata Pertumbuhan (%)		PAD			18,58	Kontribusi	6,62
		Dana Perimbangan			27,53	Kontribusi	87,31
		Lain-lain Pendapatan yang Sah			19,17	Kontribusi	6,07

Sumber :DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

1. Pendapatan Asli Daerah

PAD sebagai salah satu sumber keuangan daerah memiliki peran vital dalam rangka desentralisasi fiskal mengingat keterbatasan keuangan negara dalam membantu membiayai pembangunan di daerah. Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya salah satunya dapat terlihat dalam perkembangan PAD. Besaran PAD dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (*self-supporting*). PAD memiliki posisi strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, karena digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap tahunnya.

PAD Kabupaten Bangka Barat bersumber dari: (1) Hasil Pajak Daerah; (2) Hasil Retribusi Daerah; (3) Laba penyertaan Modal pada BUMD yang dipisahkan; serta (4) Lain-lain PAD yang Sah. Secara lengkap rekapitulasi target dan realisasi PAD dapat dilihat pada **Tabel 3.8**.

Total target anggaran pendapatan Kabupaten Bangka Barat yang berasal dari bagian PAD tahun 2011 s.d. 2015 adalah sebesar Rp 189.365.049.705,82 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 206.252.152.210,89 atau mencapai 108,98 persen. Kontribusi PAD terbesar berasal dari Lain-lain PAD yang sah, yaitu mencapai 48,71 persen. Kontribusi terbesar kedua dari pajak daerah sebesar 26,04 persen. Kontribusi terbesar ketiga berasal dari Retribusi Daerah sebesar 18,43 persen, sedangkan kontribusi terendah berasal dari Laba penyertaan modal pada BUMD yaitu sebesar 6,82 persen.

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen utama PAD. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah ada 16 jenis, meliputi 5 jenis yang dapat dipungut oleh Provinsi dan 11 jenis yang dapat dipungut oleh Kabupaten/Kota.

Pajak daerah Kabupaten Bangka Barat terdiri atas pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak sarang burung walet, pajak pertambangan umum dan mineral ikutan, serta pajak tandan buah segar. Berdasarkan hasil olahan pada **Tabel 3.8**, dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 merupakan realisasi pajak daerah tertinggi, yaitu sebesar Rp 19.219.723.875,47 dari target sebesar Rp 18.195.000.000,00 atau mencapai 105,63 persen. Jika dilihat dari persentase capaian, tahun 2012 merupakan kondisi yang paling ideal dengan realisasi sebesar Rp 5.945.262.046,61 atau melebihi target mencapai 135,44 persen dari target sebesar Rp 4.389.464.000,00.

Tabel 3.8. Target dan Realisasi PAD
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 s.d. 2015

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Kontribusi (%)
1	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011	31.792.985.000,00	34.291.175.595,08	107,86	2.498.190.595,08	100,00
	Pajak Daerah	3.836.500.000,00	5.044.719.421,00	131,49	1.208.219.421,00	14,71
	Retribusi Daerah	5.255.785.000,00	7.081.208.155,00	134,73	1.825.423.155,00	20,65
	Laba Penyertaan Modal pada BUMD	3.100.000.000,00	3.357.647.084,21	108,31	257.647.084,21	9,79
	Lain-lain PAD yang Sah	19.600.700.000,00	18.807.600.934,87	95,95	-793.099.065,13	54,85
2	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012	23.078.015.190,82	30.402.629.649,92	131,74	7.324.614.459,10	100,00
	Pajak Daerah	4.389.464.000,00	5.945.262.046,61	135,44	1.555.798.046,61	19,56
	Retribusi Daerah	6.370.308.460,00	9.608.407.228,48	150,83	3.238.098.768,48	31,60
	Laba Penyertaan Modal pada BUMD	3.900.000.000,00	3.930.202.749,13	100,77	30.202.749,13	12,93
	Lain-lain PAD yang Sah	8.418.242.730,82	10.918.757.625,70	129,70	2.500.514.894,88	35,91
3	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013	43.197.721.500,00	45.341.617.077,60	104,96	2.143.895.577,60	100,00
	Pajak Daerah	18.195.000.000,00	19.219.723.875,47	105,63	1.024.723.875,47	42,39
	Retribusi Daerah	10.957.721.500,00	11.854.170.755,00	108,18	896.449.255,00	26,14
	Laba Penyertaan Modal pada BUMD	4.675.000.000,00	2.642.750.353,29	56,53	-2.032.249.646,71	5,83
	Lain-lain PAD yang Sah	9.370.000.000,00	11.624.972.093,84	124,07	2.254.972.093,84	25,64
4	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014	41.063.105.115,00	39.916.055.462,69	97,21	-1.147.049.652,31	100,00
	Pajak Daerah	10.395.000.000,00	11.166.760.961,25	107,42	771.760.961,25	27,98
	Retribusi Daerah	4.398.530.615,00	4.509.730.124,00	102,53	111.199.509,00	11,30
	Laba Penyertaan Modal pada BUMD	4.430.000.000,00	883.348.362,26	19,94	-3.546.651.637,74	2,21
	Lain-lain PAD yang Sah	21.839.574.500,00	23.356.216.015,18	106,94	1.516.641.515,18	58,51

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Kontribusi (%)
5	Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015	50.233.222.900,00	56.300.674.425,60	114,35	7.208.260.794,72	100,00
	Pajak Daerah	12.008.000.000,00	12.332.986.126,33	102,71	324.986.126,33	21,91
	Retribusi Daerah	5.368.000.000,00	4.955.624.770,50	92,32	-412.375.229,50	8,80
	Laba Penyertaan Modal pada BUMD	4.500.000.000,00	3.254.925.758,26	72,33	-1.245.074.241,74	5,78
	Lain-lain PAD yang Sah	28.357.222.900,00	35.757.137.770,51	126,10	8.540.724.139,63	63,51
	Jumlah	189.365.049.705,82	206.252.152.210,89	108,92	16.887.102.505,07	100,00
	Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2011 s.d. 2015					26,04
	Kontribusi Retribusi Daerah Tahun 2011 s.d. 2015					18,43
	Kontribusi Laba Penyertaan Modal pada BUMD Tahun 2011 s.d. 2015					6,82
	Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2011 s.d. 2015					48,71

Sumber :DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Ada tiga jenis retribusi daerah yang memberikan hasil yaitu: (1) retribusi jasa umum; (2) retribusi jasa usaha dan (3) retribusi perijinan tertentu.

Berdasarkan data hasil olahan seperti yang tertera pada **Tabel 3.8**, dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 merupakan realisasi retribusi daerah tertinggi, yaitu sebesar Rp 11.854.170.755,00 dari target sebesar Rp 10.957.721.500,00 atau mencapai 108,18 persen. Sedangkan berdasarkan persentase capaian, paling ideal terjadi pada tahun 2012, yaitu melebihi target mencapai 150,83 persen dengan realisasi sebesar Rp 9.608.407.228,48 dari target sebesar Rp 6.370.308.460,00.

c. Laba Penyertaan Modal pada BUMD

Labanya penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, dan lain-lain keuntungan dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Tujuan dibentuknya BUMD secara umum adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan Pemerintah Daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

PAD yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD ini merupakan sektor PAD dengan kontribusi terendah, yaitu sebesar 6,78 persen. Berdasarkan data hasil olahan pada **Tabel 3.8**, dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 merupakan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan daerah tertinggi, yaitu sebesar Rp 3.930.202.749,13 dari target sebesar Rp 3.900.000.000,00 atau mencapai 100,77 persen. Jumlah realisasi dari komponen PAD ini pada tahun 2012 tidak berbeda signifikan dengan tahun sebelumnya (tahun 2011) dan tahun-tahun sesudahnya (tahun 2013 dan 2015). Penurunan realisasi yang cukup signifikan terjadi

pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 883.348.362,26 dengan persentase capaian hanya 19,94 persen dari target Rp 4.430.000.000,00.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan PAD yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Komponen ini mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

Komponen pendapatan dari Lain-Lain PAD yang Sah terdiri atas: (1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; (2) Penerimaan Jasa Giro; (3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR); (4) Pendapatan Denda Pajak; (5) Pendapatan dan Pengembalian dari Perangkat Daerah; (6) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum; (7) Pendapatan dan Pemanfaatan Kekayaan Daerah; (8) Penerimaan Setoran dari Lembaga lain - PT. Taspen; (9) Pendapatan Lainnya, Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Lain- lain PAD yang sah merupakan satu-satunya komponen PAD yang terus menunjukkan kontribusi yang cukup strategis, hal ini dapat dilihat selama tahun 2012 s.d. 2015 realisasi lain- lain PAD yang sah selalu melebihi target yang ditetapkan, kecuali pada tahun 2011 realisasi lebih rendah dari target yang ditetapkan. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp 35.757.137.770,51 atau mencapai 126,10 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 28.357.222.900,00.

2. Dana Perimbangan

Berdasarkan amanat Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa penerimaan Pemerintah Pusat dibagihasilkan kepada daerah dalam bentuk Dana Perimbangan. Penerimaan ini merupakan kelompok sumber pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya merupakan transfer dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan merupakan satu kesatuan dalam Pendapatan Daerah yang termaktub dalam APBD.

Kebijakan perimbangan keuangan ditekankan pada empat tujuan utama, yaitu: (a) memberikan sumber dana bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggungjawabnya; (b) mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah, (c) meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan publik antar daerah; serta (d) meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah, khususnya sumber daya keuangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas DBH, DAU, dan DAK. Rincian dari anggaran pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan dapat dilihat pada **Tabel 3.9**.

Tabel 3.9. Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 s.d. 2015

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Kontribusi (%)
1	Dana Perimbangan Tahun 2011	423.192.380.071,74	442.619.475.386,55	104,59	19.427.095.314,81	100,00
	Bagi Hasil Pajak Pusat	35.396.405.964,00	35.561.589.083,00	100,47	165.183.119,00	8,03
	Bagi Hasil Sumberdaya Alam	67.318.893.057,74	92.098.592.445,00	136,81	24.779.699.387,26	20,81
	Dana Alokasi Umum	265.251.539.000,00	265.251.539.000,00	100,00	0,00	59,93
	Dana Alokasi Khusus	31.259.300.000,00	23.441.475.000,00	74,99	-7.817.825.000,00	5,30
	Bagi Hasil Pajak Provinsi	15.270.200.000,00	18.638.617.808,55	122,06	3.368.417.808,55	4,21
	Dana Bantuan dari Provinsi	8.696.042.050,00	7.627.662.050,00	87,71	-1.068.380.000,00	1,72
2	Dana Perimbangan Tahun 2012	511.826.514.263,15	506.234.428.855,98	98,91	-5.592.085.407,17	100,00
	Bagi Hasil Pajak Pusat	36.200.410.000,00	33.012.969.549,00	91,20	-3.187.440.451,00	6,52
	Bagi Hasil Sumberdaya Alam	73.867.932.213,15	68.329.455.083,00	92,50	-5.538.477.130,15	13,50
	Dana Alokasi Umum	322.887.366.000,00	322.887.366.000,00	100,00	0,00	63,78
	Dana Alokasi Khusus	32.131.060.000,00	32.131.060.000,00	100,00	0,00	6,35
	Bagi Hasil Pajak Provinsi	23.130.000.000,00	28.701.835.507,98	124,09	5.571.835.507,98	5,67
	Dana Bantuan dari Provinsi	23.609.746.050,00	21.171.742.716,00	89,67	-2.438.003.334,00	4,18
3	Dana Perimbangan Tahun 2013	563.988.423.891,28	513.329.375.445,06	91,02	-50.659.048.446,22	100,00
	Bagi Hasil Pajak Pusat	39.000.000.000,00	37.532.262.261,00	96,24	-1.467.737.739,00	7,31
	Bagi Hasil Sumberdaya Alam	67.559.372.891,28	52.362.138.132,00	77,51	-15.197.234.759,28	10,20
	Dana Alokasi Umum	358.151.691.000,00	358.151.691.000,00	100,00	0,00	69,77
	Dana Alokasi Khusus	37.411.920.000,00	24.589.265.000,00	65,73	-12.822.655.000,00	4,79
	Bagi Hasil Pajak Provinsi	32.000.000.000,00	23.104.075.052,06	72,20	-8.895.924.947,94	4,50
	Dana Bantuan dari Provinsi	29.865.440.000,00	17.589.944.000,00	58,90	-12.275.496.000,00	3,43

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Kontribusi (%)
4	Dana Perimbangan Tahun 2014	642.078.400.108,64	604.197.596.522,84	94,10	-37.880.803.585,80	100,00
	Bagi Hasil Pajak Pusat	33.000.000.000,00	33.953.528.279,00	102,89	953.528.279,00	5,62
	Bagi Hasil Sumberdaya Alam	89.242.293.804,85	69.647.457.627,00	78,04	-19.594.836.177,85	11,53
	Dana Alokasi Umum	413.680.194.000,00	413.680.194.000,00	100,00	0,00	68,47
	Dana Alokasi Khusus	41.455.370.000,00	31.091.528.000,00	75,00	-10.363.842.000,00	5,15
	Bagi Hasil Pajak Provinsi	33.731.682.303,79	28.009.223.916,84	83,04	-5.722.458.386,95	4,64
	Dana Bantuan dari Provinsi	30.968.860.000,00	27.815.664.700,00	89,82	-3.153.195.300,00	4,60
5	Dana Perimbangan Tahun 2015	686.871.292.467,29	652.842.293.428,34	95,05	-34.028.999.038,95	100,00
	Bagi Hasil Pajak Pusat	38.845.969.000,00	34.020.267.850,00	87,58	-4.825.701.150,00	5,21
	Bagi Hasil Sumberdaya Alam	109.913.700.771,29	87.539.035.157,00	79,64	-22.374.665.614,29	13,41
	Dana Alokasi Umum	424.317.594.000,00	424.317.594.000,00	100,00	0,00	65,00
	Dana Alokasi Khusus	51.553.990.000,00	41.244.184.000,00	80,00	-10.309.806.000,00	6,32
	Bagi Hasil Pajak Provinsi	29.891.028.696,00	38.412.301.426,34	128,51	8.521.272.730,34	5,88
	Dana Bantuan dari Provinsi	32.349.010.000,00	27.308.910.995,00	84,42	-5.040.099.005,00	4,18
Jumlah		2.827.957.010.802,10	2.719.223.169.638,77	96,73	-108.733.841.163,33	100,00
	Kontribusi Bagi Hasil Pajak Pusat Tahun 2011 s.d. 2015					6,40
	Kontribusi Bagi Hasil Sumberdaya Alam Tahun 2011 s.d. 2015					13,61
	Kontribusi Dana Alokasi Umum Tahun 2011 s.d. 2015					65,62
	Kontribusi Dana Alokasi Khusus Tahun 2011 s.d. 2015					5,61
	Kontribusi Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2011 s.d. 2015					5,03
	Kontribusi Dana Bantuan dari Provinsi Tahun 2011 s.d. 2015					3,73

Sumber :DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Meskipun demikian, pemerintah mengakui kebijakan transfer ke daerah dalam mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah melalui DBH dan meminimalkan kesenjangan fiskal antar daerah melalui DAU dan DAK, Pemerintah tentunya terus berupaya untuk melakukan reformulasi kebijakan dana perimbangan setiap tahun sehingga diharapkan dapat mendukung kebutuhan pendanaan pembangunan, terutama bagi daerah-daerah marginal. Jika kita melihat komposisi sumber pendapatan tiap daerah (kabupaten/kota), dana perimbangan ini mempunyai peran yang sangat vital.

Total target anggaran pendapatan Kabupaten Bangka Barat yang berasal dari dana perimbangan tahun 2011 s.d. 2015 adalah sebesar Rp 2.827.957.010.802,10 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 2.719.223.169.638,77 atau mencapai 96,73 persen. Dimana kontribusi tertinggi dana perimbangan berasal dari DAU, yaitu mencapai 65,62 persen. Kontribusi tertinggi kedua dari Bagi Hasil SDA sebesar 13,61 persen, sedangkan kontribusi terendah berasal dari Dana Bantuan dari Provinsi sebesar 3,73 persen.

a. Bagi Hasil Pajak Pusat

Penerimaan pajak yang diperoleh Pemerintah dalam APBN dibagikan kepada Daerah dengan proporsi yang telah ditetapkan berdasarkan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 yang ditujukan dalam rangka memperkecil kesenjangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Komponen penerimaan dari Bagi Hasil Pajak terdiri atas: (1) Bagi Hasil dari PBB; (2) Bagi Hasil dari BPHTB; (3) Bagi Hasil dari Upah Pungut PBB; dan (4) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29. Berdasarkan data hasil olahan yang tertera pada **Tabel 3.8** dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 merupakan realisasi Bagi Hasil Pajak Pusat tertinggi, yaitu sebesar Rp 37.532.262.261,00 dari target sebesar Rp 39.000.000.000,00 atau mencapai 96,24 persen. Sedangkan kondisi yang paling ideal terjadi pada Tahun 2011 dan 2014 dimana realisasi melebihi target mencapai 100,47 persen dan 102,89 persen dari jumlah target yang ditetapkan.

b. Bagi Hasil Sumberdaya Alam

Komponen penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri atas: (1) Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan; (2) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan; (3) Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi; (4) Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi; (5) Bagi Hasil dari Pertambangan Umum; dan (6) Bagi Hasil dari Gas Bumi.

Berdasarkan data hasil olahan yang tertera pada **Tabel 3.9** dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 merupakan realisasi Bagi Hasil Sumberdaya Alam (SDA) tertinggi dan paling ideal, yaitu sebesar Rp 92.098.592.445,00 dari target sebesar Rp 67.318.893.057,74 atau mencapai 136,81 persen. Sedangkan realisasi terendah terjadi pada Tahun 2013, dimana realisasi sebesar Rp 52.362.138.132,00 dari target sebesar Rp 67.559.372.891,28 atau dengan capaian sebesar 77,51 persen.

c. Dana Alokasi Umum

Desentralisasi fungsi atau pemberian kewenangan ke daerah-daerah harus diikuti oleh desentralisasi fiskal (keuangan) karena daerah membutuhkan sumber-sumber pendapatan baru dan perimbangan keuangan untuk menjalankan fungsi tersebut (*money follows programme proirity*). Salah satunya DAU yang menjadi bagian dana perimbangan. DAU sebenarnya bertujuan menjaga perimbangan atau pemerataan antar daerah yang dibagi berdasarkan kebutuhan daerah yang tercermin dari jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografis dan tingkat pendapatan masyarakat.

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Adapun perkembangan DAU Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada **Tabel 3.9**. berdasarkan data hasil olahan pada tabel tersebut, digambarkan bahwa pada Tahun 2011 s.d 2015, DAU terus meningkat secara signifikan dengan realisasi anggaran mencapai 100 persen selama kurun waktu lima tahun.

d. Dana Alokasi Khusus

DAK merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada Daerah tertentu untuk membiayai dana dalam APBN, yang dimaksud

sebagai daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Pasal 39 menyebutkan bahwa DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam APBN.

DAK digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau peningkatan prasarana dan sarana fisik secara ekonomis untuk jangka panjang. Dalam keadaan tertentu, DAK dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi tiga tahun.

Dari Tahun 2011 s.d 2015, realisasi DAK fluktuatif. Realisasi anggaran DAK tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp 41.244.184.000,00 mencapai 80,00 persen dari target Rp 51.553.990.000,00. Target capaian 100,00 persen terjadi pada tahun 2012 dengan target dan realisasi sebesar Rp 32.131.060.000,00.

e. Bagi Hasil Pajak Provinsi

Komponen dana perimbangan Kabupaten Bangka Barat lainnya berasal dari Bagi Hasil Pajak Provinsi. Berdasarkan data hasil olahan pada **Tabel 3.9**, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2011 s.d 2015 Bagi Hasil Pajak Provinsi terus meningkat, di mana realisasi yang ideal terjadi pada tahun 2011 dengan realisasi sebesar Rp 18.638.617.808,55 dari target sebesar Rp 15,270.200.000,00 atau mencapai 122,06 persen. Realisasi tertinggi dan paling ideal terjadi pada tahun 2015 dengan realisasi sebesar Rp 38.412.301.426,34 dari target sebesar Rp 29.891.028.696,00 atau mencapai 128,51 persen.

f. Dana Bantuan dari Provinsi

Komponen dana perimbangan lainnya adalah Dana Bantuan dari Provinsi. Berdasarkan data hasil olahan pada **Tabel 3.9**, dapat dilihat bahwa realisasi dana bantuan dari provinsi tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan realisasi sebesar Rp 27.815.664.700,00 dari target sebesar Rp 30.968.860.000,00 atau mencapai 89,82 persen. Persentase capaian dari target untuk dana bantuan dari provinsi dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2015 tidak ada yang mencapai 100 persen atau lebih.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Bangka Barat yang berasal dari Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Pemerintah, Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang Induk, dan Pendapatan Hibah. Adapun rincian dari anggaran Pendapatan Daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan yang Sah dapat dilihat pada **Tabel 3.10**.

Total realisasi penerimaan lain-lain pendapatan yang sah selama tahun 2011 s.d. tahun 2105 adalah Rp 189.093.867.912,00 atau mencapai 85,36 persen dari target penerimaan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 223.566.166.549,00. Walaupun salah satu komponen dari lain-lain pendapatan yang sah adalah bantuan dana kontijensi/penyeimbang dari induk, namun dalam kurun waktu tahun 2011 s.d. 2015 tidak ada penerimaan dari komponen tersebut. Pendapatan hibah di tahun 2011 juga tidak ada, hanya ada dalam kurun waktu 2012 s.d. 2015.

Realisasi bantuan dana kontijensi/penyeimbang dari pemerintah tertinggi terjadi di tahun 2015, yaitu sebesar Rp 53.788.069.000,00 dari target sebesar Rp 62.360.435.000,00 atau mencapai 85,36 persen. Realisasi terendah terjadi di tahun 2012 sebesar Rp 18.194.157.000,00 dari target sebesar Rp 18.194.157.000,00 atau mencapai 100,00 persen. Bantuan dana kontijensi/penyeimbang dari pemerintah ini memberikan kontribusi terbesar terhadap total lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Bangka Barat, yaitu sebesar 88,76 persen.

Terkait pendapatan hibah, dari tahun 2014 s.d. 2015 mengalami penurunan yang signifikan. Realisasi terendah terjadi di tahun 2015 sebesar Rp 161.949.500,00 dari target sebesar Rp 2.500.000.000,00 atau mencapai 6,48 persen saja. Sedangkan realisasi tertinggi terjadi di tahun 2013, yaitu sebesar Rp 16.801.101.679,00 dari target sebesar Rp 17.500.000.000,00 atau mencapai 96,01 persen.

Tabel 3.10. Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 s.d. 2015

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	Kontribusi (%)
1	Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2011	36.508.910.960,00	36.508.910.960,00	100,00	0,00	100,00
	Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Pemerintah	36.508.910.960,00	36.508.910.960,00	100,00	0,00	100,00
	Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Induk	-	-	-	-	-
	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	-	0,00	-
2	Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2012	29.394.157.000,00	21.881.027.773,00	74,44	-7.513.129.227,00	100,00
	Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Pemerintah	18.194.157.000,00	18.194.157.000,00	100,00	0,00	83,15
	Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Induk	-	-	-	-	-
	Pendapatan Hibah	11.200.000.000,00	3.686.870.773,00	32,92	-7.513.129.227,00	16,85
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2013	39.610.886.844,00	38.626.356.179,00	97,51	-984.530.665,00	100,00
	Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Pemerintah	22.110.886.844,00	21.825.254.500,00	98,71	-285.632.344,00	56,50
	Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Induk	-	-	-	-	-
	Pendapatan Hibah	17.500.000.000,00	16.801.101.679,00	96,01	-698.898.321,00	43,50
4	Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2014	53.191.776.745,00	38.127.554.500,00	71,68	-15.064.222.245,00	100,00
	Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Pemerintah	51.191.776.745,00	37.517.801.000,00	73,29	-13.673.975.745,00	98,40
	Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Induk	-	-	-	-	-
	Pendapatan Hibah	2.000.000.000,00	609.753.500,00	30,49	-1.390.246.500,00	1,60
5	Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2015	64.860.435.000,00	53.950.018.500,00	83,18	-10.910.416.500,00	100,00
	Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Pemerintah	62.360.435.000,00	53.788.069.000,00	86,25	-8.572.366.000,00	99,70
	Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Induk	-	-	-	-	-
	Pendapatan Hibah	2.500.000.000,00	161.949.500,00	6,48	-2.338.050.500,00	0,30
Jumlah		223.566.166.549,00	189.093.867.912,00	85,36	-34.472.298.637,00	100,00
	Kontribusi Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Pemerintah Tahun 2011 s.d. 2015					88,76
	Kontribusi Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Induk Tahun 2011 s.d. 2015					-
	Kontribusi Pendapatan Hibah Tahun 2011 s.d. 2015					11,24

Sumber :DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

3.1.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2007-2015 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan belanja dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Belanja daerah dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2015, sesuai APBD Kabupaten Bangka Barat, total anggaran belanja daerah sebesar Rp 4.133.300.346.750,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.491.276.731.000,00 atau sekitar 84,47 persen. Anggaran dan realisasi belanja daerah periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada **Tabel 3.11**.

Penyusunan penganggaran diarahkan secara maksimal berpedoman kepada ketentuan yang berlaku terkait pengelolaan keuangan yaitu penganggaran, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban, serta berpegang teguh kepada garis kebijaksanaan anggaran seperti yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta APBD Perubahan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, sebagai salah satu peraturan yang terkait pengelolaan keuangan, turut memberikan warna baru dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu sejak per tanggal 1 Januari 2015 pemerintah daerah telah diwajibkan menerapkan akuntansi dengan basis akrual. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa belanja terbagi atas belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.

Tabel 3.11. Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Bangka Barat Periode Tahun 2007-2015 (dalam ribu rupiah)

URAIAN	2007		2008		2009		2010		2011	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah	391.926.213	299.379.883	437.118.617	362.694.184	523.449.961	431.792.494	480.318.485	408.633.909	534.881.011	454.939.522
Belanja Operasi	201.253.279	146.347.549	244.449.572	183.203.923	290.446.396	223.602.103	313.574.098	263.458.230	349.199.638	306.049.737
Belanja Pegawai	102.053.672	78.950.356	128.570.447	99.315.806	168.440.113	127.896.822	194.450.570	164.118.460	209.016.498	193.818.043
Belanja Barang dan Jasa	67.971.266	42.584.267	73.629.351	53.285.486	81.432.272	61.536.151	98.193.654	81.586.390	129.215.653	102.095.447
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000	1.080.956	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	0,00	0,00	8.702.954	7.107.579	23.879.410	22.067.566	18.325.274	15.820.679	8.420.387	7.943.377
Belanja Bantuan Sosial	30.145.368	23.729.954	17.335.590	9.948.681	15.544.600	11.020.605	2.604.600	1.932.700	2.547.100	2.192.870
Belanja Bantuan Keuangan	1.082.971	1.082.970	16.211.230	13.546.369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	189.547.719	152.928.834	190.032.826	178.879.727	215.857.133	191.368.597	144.054.901	124.109.639	163.267.953	127.526.710
Belanja Tanah					4.913.072	71.500	1.920.000	808.121	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin					20.088.609	15.945.437	28.550.965	23.362.322	30.294.282	27.216.104
Belanja Gedung dan Bangunan					47.926.578	41.929.714	40.367.023	37.594.414	41.035.062	22.969.481
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan					141.837.176	132.782.821	66.094.840	62.162.029	87.167.299	72.921.034
Belanja Aset Tetap Lainnya					1.091.696	639.123	7.122.071	182.750	4.771.309	4.420.089
Belanja Aset Lainnya										
Belanja Tidak Terduga	1.125.214	103.500	2.025.685	0,00	324.668	0,00	2.208.187	584.750	1.000.000	40.000
Transfer Bagi Hasil Ke Desa	0,00	0,00	610.533	610.533	16.821.763	16.821.793	20.481.298	20.481.289	21.413.419	21.323.073
Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	143.828	143.828	143.828	143.828	227.000	226.999	505.616	505.615
Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	466.704	466.704	466.704	466.704	466.704	466.703	436.709	436.708
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	16.211.230	16.211.260	19.787.593	19.787.586	20.471.093	20.380.749

Lanjutan Tabel 3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Bangka Barat Periode Tahun 2007-2015 (dalam ribu rupiah)

URAIAN	2012		2013		2014		2015		Jumlah	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah	655.851.378	584.813.660	702.915.823	600.542.509	774.768.522	686.289.139	849.211.190	774.734.158	4.982.511.540	4.272.045.265
Belanja Operasi	396.808.404	363.238.298	455.661.939	403.943.903	599.937.026	504.641.176	651.276.871	599.902.662	3.478.030.365	2.994.421.950
Belanja Pegawai	236.605.292	222.918.326	264.017.491	247.952.599	311.294.650	275.526.765	340.710.422	315.259.005	1.955.159.160	1.725.756.185
Belanja Barang dan Jasa	139.200.323	119.474.177	169.723.808	144.045.587	190.656.863	165.012.320	196.834.296	174.652.360	1.146.857.489	944.306.553
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000	1.080.956
Belanja Hibah	20.520.538	20.371.421	18.129.920	8.441.748	41.010.407	32.386.372	34.271.072	30.940.998	173.259.963	145.079.743
Belanja Bantuan Sosial	482.250	474.373	3.790.720	3.503.968	4.363.982	3.717.294	3.346.200	2.993.834	80.160.411	59.514.281
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	28.034.260	27.998.424	76.114.879	76.056.464	121.443.341	118.684.229
Belanja Modal	226.860.676	190.334.420	218.465.883	167.900.913	205.298.939	176.518.286	195.134.318	172.927.338	1.368.939.805	1.150.685.907
Belanja Tanah	26.004.975	13.821.412	15.255.625	1.852.398	4.076.278	1.432.964	1.620.310	57.575	53.790.261	18.043.971
Belanja Peralatan dan Mesin	35.886.274	29.930.744	24.927.488	24.265.596	32.873.571	30.845.794	24.323.067	22.481.463	196.944.259	174.047.462
Belanja Gedung dan Bangunan	60.100.606	45.573.753	79.515.645	60.501.447	46.520.379	39.144.947	42.150.490	38.836.038	357.615.787	286.549.798
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	101.410.290	97.873.966	97.574.913	80.177.579	116.920.598	103.480.788	126.759.438	111.313.404	737.764.557	660.711.625
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.458.530	3.134.542	898.060	820.951	4.908.111	1.613.791	281.012	238.858	22.530.790	11.050.108
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	294.150	282.940	0,00	0,00	0,00	0,00	294.150	282.940
Belanja Tidak Terduga	3.145.171	2.242.323	900.000	899.339	3.550.000	2.919.382	1.000.000	104.159	15.278.927	6.893.453
Transfer Bagi Hasil Ke Desa	29.037.126	28.998.618	27.888.000	27.798.353	2.210.300	2.210.294	1.800.000	1.799.998	120.262.441	120.043.954
Bagi Hasil Pajak	504.471	504.471	609.526	609.526	983.300	983.299	1.210.000	1.209.999	4.327.571	4.327.568
Bagi Hasil Retribusi	708.120	708.117	684.473	684.471	1.227.000	1.226.995	590.000	589.999	5.046.418	5.046.405
Bagi Hasil Pend Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Ban Keu kepada Desa	27.824.533	27.786.029	26.594.000	26.504.354	0,00	0,00	0,00	0,00	110.888.450	110.669.981

Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016

Periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 anggaran dan realisasi per jenis belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 secara total adalah sebagai berikut: belanja operasi dianggarkan sebesar Rp 2.826.753.489.670,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 2.388.484.912.630,00 atau 84,50 persen. Penganggaran belanja modal sebesar Rp 1.173.805.490.080,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp 977.758.568.620,00 atau 83,30 persen. Belanja transfer dianggarkan sebesar Rp 118.462.440.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 118.243.955.750,00 atau 100,00%, serta belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp 14.278.927.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.789.294.000,00 atau 47,55%.

Sedangkan anggaran dan realisasi jenis belanja menurut Permendagri Nomor 13/2006 yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Total belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp 2.526.967.311.240,50 dengan realisasi sebesar Rp 1.327.867.338.264,00 atau 52,55 persen. Realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung tersebut disajikan berdasarkan realisasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disampaikan oleh setiap Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK Perangkat Daerah) masing-masing dan direkonsiliasi serta dikompilasi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). Pertumbuhan realisasi dan rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung pada periode tahun 2007 sampai tahun 2015 dapat dilihat pada **Tabel 3.12**.

Berdasarkan **Tabel 3.12** diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan belanja tidak langsung Kabupaten Bangka Barat pertahun cukup tinggi yaitu 32,66 persen, sehingga perlu diambil langkah-langkah antisipasi terutama untuk Belanja Pegawai yang rata-rata pertumbuhannya sebesar 14,48 persen. Untuk jenis belanja lain kurang bisa dilihat pertumbuhannya karena sangat dipengaruhi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang cenderung mengalami perubahan.

Total belanja langsung pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp 3.339.023.395.959,16 dengan realisasi sebesar Rp 2.817.125.177.704,62 atau 84,36 persen. Anggaran dan realisasi Belanja Langsung dapat dilihat pada **Tabel 3.13** dan **Gambar 3.4**.

Tabel 3.12 Realisasi dan Rata - Rata Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007-2015

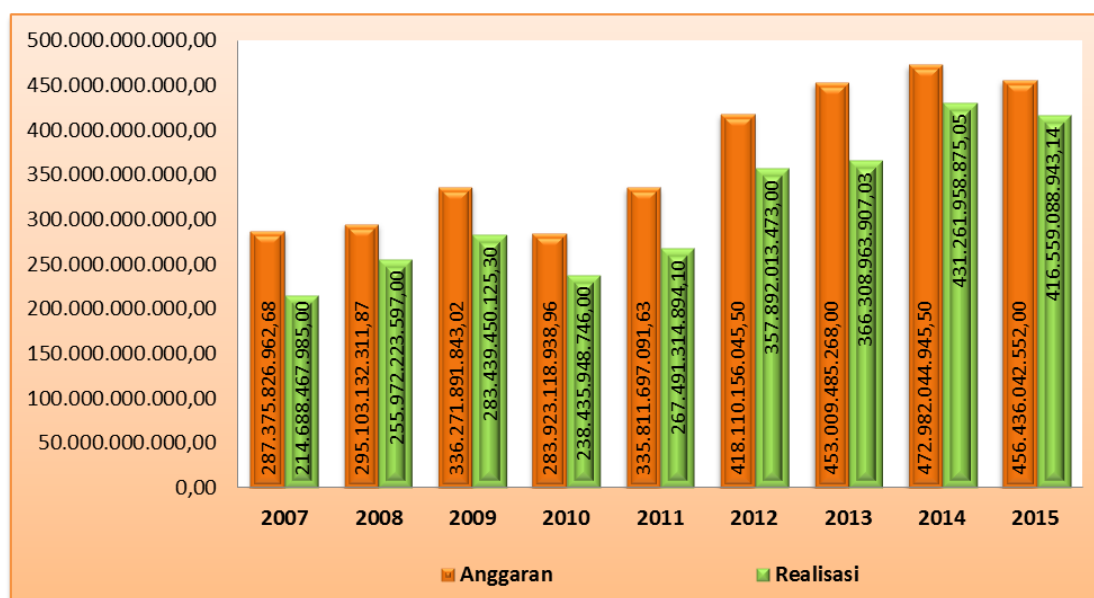
No.	URAIAN	2007 (Rp)	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	Belanja Pegawai	59.775.090.164	75.153.561.006	98.443.078.597	131.414.531.092	124.449.565.616	148.869.763.820	159.276.526.701	223.989.411.642	256.420.261.379	14,48
2.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Belanja Hibah	-	7.185.731.495	22.067.566.960	15.820.679.150	7.943.377.250,00	15.148.120.700	8.000.727.000	11.187.150.000	22.939.763.000	-29,17
5.	Belanja Bantuan Sosial	23.729.954.238	9.948.681.550	11.019.225.090	1.932.700.728	2.192.870.000,00	163.500.000	779.870.000	1.714.640.000	888.788.000	--76,09
6.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pempdes	-	610.551.138	610.533.101	693.702.775	942.323.984,00	1.212.588.900	1.293.998.350	2.210.294.745	1.799.998.550	-18,56
7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pempdes	1.082.970.995	13.546.351.826	16.211.260.318	19.787.586.674	20.380.749.803,00	27.786.029.703	26.504.354.778	27.998.424.352	76.056.464.061	171,65
8.	Belanja Tidak Terduga	103.500.000	-	-	584.750.000	40.000.000,00	2.242.323.023	899.339.000	2.919.382.000	104.159.000	-96,43
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	84.691.515.397	106.444.877.015	148.351.664.066	170.233.950.419	155.948.886.653	195.422.326.146	196.754.815.829	270.019.302.739	358.209.433.990	22,16

Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

Tabel 3.13. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Bangka Barat Periode 2007-2015

Tahun	Anggaran	Realisasi
2007	287.375.826.962,68	214.688.467.985,00
2008	295.103.132.311,87	255.972.223.597,00
2009	336.271.891.843,02	283.439.450.125,30
2010	283.923.118.938,96	238.435.948.746,00
2011	335.811.697.091,63	267.491.314.894,10
2012	418.110.156.045,50	357.892.013.473,00
2013	453.009.485.268,00	366.308.963.907,03
2014	472.982.044.945,50	431.261.958.875,05
2015	456.436.042.552,00	416.559.088.943,14
Total	3.339.023.395.959,16	2.832.049.430.545,62

Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)



Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

Gambar 3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Bangka Barat Periode 2007-2015

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Kabupaten Bangka Barat periode tahun 2007 sampai dengan periode tahun 2015 mengalami perkembangan yang sangat baik, seiring dengan perkembangan APBD Kabupaten Bangka Barat pada periode tersebut (lihat **Tabel 3.15**), terutama terkait dengan belanja Kabupaten Bangka Barat. Perkembangan ini

dapat dilihat terutama dari pertumbuhan aset tetap Kabupaten Bangka Barat rata-rata sebesar 11,83 persen setiap tahunnya. Selain itu dapat dilihat bahwa penambahan aset tetap Kabupaten Bangka Barat secara nominal rata-rata sebesar mencapai kurang lebih Rp 124 milyar yang artinya kira-kira sebesar 27 persen dari rata-rata penambahan total belanja, yang artinya setiap tahun kurang lebih 27 persen belanja dari APBD adalah belanja yang menambah aset Kabupaten Bangka Barat.

Berdasarkan nilai perkiraan pada neraca Kabupaten Bangka Barat periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2015, dapat dilakukan beberapa analisis rasio yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Terdapat beberapa macam rasio likuiditas, namun yang lazim dipakai adalah rasio lancar, termasuk untuk melihat neraca Kabupaten Bangka Barat dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Dikarenakan neraca pada pemerintah daerah ini, sedikit ada perbedaan dengan neraca pada perusahaan, maka perlu dilakukan penyesuaian terutama pada aset lancar. Pada neraca Kabupaten Bangka Barat tahun 2007 sampai dengan 2015 ini, yang dianggap kewajiban lancar adalah jaminan reklamasi.

Tabel 3.14 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007 s.d. 2015 (Juta Rupiah)

No.	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	ASET										
2	ASET LANCAR										
3	Kas di Kas Daerah	105.991,29	144.469,72	99.451,66	54.059,01	102.819,71	65.532,52	56.202,45	47.987,69	28.100,72	(6,81)
4	Kas di Bendahara JKN	-	-	-	-	-	-	-	346,31	1.417,18	38,65
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	862,56	311,87	4,51	1,48	153,92	360,39	107,48	64,37	261,10	1.304,36
6	Kas di Bendahara Penerimaan	75,01	80,29	-	82,47	91,65	122,67	494,78	1,49	12,13	31,96
7	Kas di Bendahara BOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kas Lainnya di Sekolah	-	-	-	-	-	-	-	-	2.712,27	-
9	Kas di Bendahara BLUD	-	-	-	-	-	-	-	496,51	6.608,12	153,86
10	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Piutang Pajak	8,92	49,08	126,99	322,06	295,96	495,97	307,44	5.207,44	5.428,21	297,73
12	Penyisihan Piutang Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.454,10)	-
13	Piutang Pajak Netto	-	-	-	-	-	-	-	-	1.974,12	-
14	Piutang Retribusi	2,97	31,29	68,28	75,61	190,95	335,50	446,47	327,04	256,06	162,30
15	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-	-	-	-	-	-	-	(244,26)	-
16	Piutang Retribusi Netto	-	-	-	-	-	-	-	-	11,80	-
17	Piutang Dana Bagi Hasil/ Bagi Hasil Pajak Provinsi	1.890,78	4.084,12	3.041,48	5.188,41	11.425,56	-	536,34	-	3.137,97	10,16
18	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil/ Bagi Hasil Pajak Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Piutang Dana Bagi Hasil/ Bagi Hasil Pajak Provinsi Netto	-	-	-	-	-	-	-	-	3.137,97	-
20	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	163,60	205,53	12,04	-	-	(21,06)
21	Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	3.014,03	1.665,76	(5,71)
22	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.665,76)	-
23	Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat Netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Piutang Lainnya	856,81	291,97	114,56	48,40	-	63,40	-	1.368,19	937,85	(39,49)
25	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,69)	-
26	Piutang Lainnya Netto	-	-	-	-	-	-	-	-	933,16	-
27	Persediaan	3.744,59	3.056,41	6.297,33	4.282,27	7.392,77	8.980,95	26.665,47	39.215,87	45.080,93	49,58
28	Jumlah Aset Lancar	113.432,94	152.374,75	109.104,81	64.059,72	122.534,11	76.096,93	84.772,46	98.028,95	90.249,50	3,78

No.	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
29	INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Investasi Non-Permanen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Investasi Dana Perkuatan Modal Masyarakat	1.607,15	2.114,01	2.844,12	3.293,67	9.510,76	12.121,58	10.906,59	4.899,79	5.166,70	29,80
36	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Jumlah Investasi Non Permanen (31 s.d. 37)	1.607,15	2.114,01	2.844,12	3.293,67	9.510,76	12.121,58	10.906,59	4.899,79	5.166,70	29,80
39	Investasi Permanen										
40	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.502,50	9.505,00	13.007,50	16.211,88	18.886,11	25.468,69	35.691,01	40.165,17	40.339,84	26,51
41	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Jumlah Investasi Permanen (40 s.d. 41)	6.502,50	9.505,00	13.007,50	16.211,88	18.886,11	25.468,69	35.691,01	40.165,17	40.339,84	26,51
43	Jumlah Investasi Jangka Panjang (38 +42)	8.109,65	11.619,01	15.851,62	19.505,56	28.396,87	37.590,27	46.597,61	45.064,96	45.506,53	25,30
44	ASET TETAP										
45	Tanah	7.604,17	8.593,42	8.664,92	38.206,20	38.330,87	35.534,44	24.323,98	26.569,81	27.518,31	41,13
46	Peralatan dan Mesin	70.616,18	85.970,26	103.021,11	127.536,39	148.996,44	161.511,64	181.039,72	197.314,43	222.536,14	15,56
47	Gedung dan Bangunan	111.044,50	177.016,93	219.183,73	293.740,18	306.139,32	340.413,67	380.601,73	428.431,54	484.971,79	21,28
48	Jalan, Irigasi dan Jaringan	302.811,13	414.201,54	546.956,32	636.656,09	709.967,23	790.256,19	869.189,79	967.769,67	1.063.188,24	17,41
49	Aset Tetap Lainnya	5.641,00	6.377,85	6.008,53	17.032,94	23.191,30	26.144,55	27.731,96	35.619,42	12.682,84	26,22
50	Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.670,47	384,43	937,19	9.297,98	12.991,86	19.702,79	33.990,71	9.704,87	3.825,35	121,35
51	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	(767.347,01)	
52	Jumlah Aset Tetap (45 s.d. 51)	510.387,46	692.544,43	884.771,80	1.122.469,79	1.239.617,03	1.373.563,27	1.516.877,89	1.665.409,73	1.047.375,66	11,83
53	DANA CADANGAN										
54	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Jumlah Dana Cadangan (54)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
56	ASET LAINNYA										
57	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	146,60	-	31,42	-	-	
58	Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
59	Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	592,59	1.196,35	3.663,08	3.634,00	3.583,09	37,52
62	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.981,23)	
63	Aset Lain-lain	1.257,10	1.948,85	-	15.838,34	13.051,57	33.383,96	33.575,34	65.060,72	72.088,86	36,80
64	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	(25.314,26)	
65	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	-	-	-	-	-	-	-	-	1.140,81	
66	Jumlah Aset Lainnya (57 s.d. 65)	1.257,10	1.948,85	-	15.838,34	13.790,76	34.580,31	37.269,83	68.694,73	48.517,27	31,32
67	JUMLAH ASET (28+43+52+55+66)	633.187,15	858.487,04	1.009.728,24	1.221.873,41	1.404.338,77	1.521.830,78	1.685.517,79	1.877.198,38	1.231.648,95	10,59
68	KEWAJIBAN										
69	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK										
70	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	131,81	-	152,68	321,62	71,30	13,84	72,10	46,65
71	Utang Belanja/Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	1.240,75	-	-	1.414,58	562,55	(8,93)
72	Utang Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
73	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
74	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
76	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	294,65	2.183,77	-	-	1,50	2.576,86	21.440,33
77	Kewajiban Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikannya	-	-	-	-	-	-	-	-	1.140,81	
78	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	-	-	-	9,28	
79	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (70 s.d. 78)	-	-	131,81	294,65	3.577,20	321,62	71,30	1.429,93	4.361,60	385,85

No.	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
80	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG										
81	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
82	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
83	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
84	Utang Kontijensi (Jaminan Reklamasi)	1.257,10	1.948,85	-	-	-	-	-	-	-	
85	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
86	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (81 s.d. 85)	1.257,10	1.948,85	-	-	-	-	-	-	-	
87	JUMLAH KEWAJIBAN (79 + 86)	1.257,10	1.948,85	131,81	294,65	3.577,20	321,62	71,30	1.429,93	4.361,60	381,07
88	EKUITAS DANA										
89	EKUITAS DANA LANCAR										
90	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	106.922,03	144.853,55	99.324,36	54.060,49	102.820,94	65.571,29	56.238,62	48.880,95	-	(1,86)
91	Pendapatan yang ditangguhkan	6,84	8,33	-	82,47	91,65	122,67	494,78	1,59	-	21,30
92	Cadangan Piutang	2.759,48	4.456,46	3.351,32	5.634,48	12.076,06	1.100,40	1.302,29	9.916,71	-	101,01
93	Cadangan Persediaan	3.744,59	3.056,41	6.297,33	4.282,27	7.392,77	8.980,95	26.665,47	39.215,87	-	49,22
94	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-	-	-	(294,65)	(3.424,52)	-	-	(1.416,08)	-	120,28
95	Jumlah Ekuitas Dana Lancar (90 s.d. 94)	113.432,94	152.374,75	108.973,00	63.765,07	118.956,90	75.775,31	84.701,16	96.599,03	-	5,06
96	EKUITAS DANA INVESTASI										
97	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	8.109,65	11.619,01	15.851,62	19.505,56	28.396,87	37.590,27	46.597,61	45.064,96	-	25,17
98	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	510.387,46	692.544,43	884.771,80	1.122.469,79	1.239.617,03	1.373.563,27	1.516.877,89	1.665.409,73	-	16,47
99	Diinvestasikan dalam Aset lainnya	-	-	-	15.838,34	13.790,76	34.580,31	37.269,83	68.694,73	-	28,74
100	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101	Jumlah Ekuitas Dana Investasi (97 s.d. 100)	518.497,10	704.163,44	900.623,42	1.157.813,69	1.281.804,66	1.445.733,85	1.600.745,33	1.779.169,42	-	17,20

No.	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
102	EKUITAS DANA CADANGAN										
103	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (103)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105	JUMLAH EKUITAS DANA (95+101+104)	631.930,05	856.538,19	1.009.596,43	1.221.578,76	1.400.761,56	1.521.509,16	1.685.446,49	1.875.768,45	-	14,97
106	JUMLAH EKUITAS (67-87)	1.263.860,09	1.713.076,38	2.019.192,86	2.443.157,51	2.801.523,12	3.043.018,32	3.370.892,97	3.751.536,91	1.227.287,35	6,53
107	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	633.187,15	858.487,04	1.009.728,24	1.221.873,41	1.404.338,77	1.521.830,78	1.685.517,79	1.877.198,38	1.231.648,95	10,59

Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016

Tabel 3.15 Rasio Lancar Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007-2015

Tahun	Aset Lancar (Rp)	Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Lancar
2007	113.432.943.167,09	1.257.100.132,00	90,23
2008	155.983.500.675,18	1.948.852.382,00	80,04
2009	109.104.814.903,41	131.810.265,00	827,74
2010	58.991.964.882,16	294.652.200,00	200,20
2011	122.534.108.315,80	3.577.204.361,00	34,25
2012	76.096.930.926,20	321.623.808,00	236,60
2013	84.772.461.224,45	71.304.700,00	1188,88
2014	98.028.954.817,02	1.429.925.071,00	68,56
2015	90.249.496.264,52	4.361.603.092,69	20,69

Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

Berdasarkan **Tabel 3.15**, dapat disimpulkan bahwa rasio lancar Kabupaten Bangka Barat sangat baik, yang artinya bahwa kewajiban lancar Kabupaten Bangka Barat sangat terjamin dengan aset lancar yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka Barat. Meskipun jika dibandingkan dari tahun 2007 terhadap tahun 2009, kemampuan pemenuhan kewajiban lancar tersebut menurun. Hal ini dikarenakan semakin rendahnya aset lancar terutama kas di kas daerah. Namun rasio lancar neraca Kabupaten Bangka Barat, masih tergolong sangat baik, artinya kewajiban Kabupaten Bangka Barat masih jauh lebih kecil dibandingkan aset lancar yang dimiliki, sehingga Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dapat dengan segera memenuhi kewajiban tersebut. Pada tahun 2013 jumlah aset lancar Kabupaten Bangka Barat mencapai 1.188,88 kali jumlah kewajiban lancar Kabupaten Bangka Barat. Pada tahun 2009, sesuai dengan Buletin Teknis PP Nomor 71 Tahun 2010 jaminan reklamasi tidak lagi tercantum dalam neraca, cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. Ratio Solvabilitas

Rasio ini disebut juga *Ratio Leverage* yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva entitas dibiayai oleh hutang, rasio ini menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman. Adapun rasio yang tergabung dalam rasio leverage adalah:

a. *Total Debt to Equity Ratio* (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang – hutang dan ekuitas dalam pendanaan suatu entitas dan menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Sebagaimana pada rasio lancar, pada tahun 2007 sampai dengan 2015 pada neraca Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, yang dianggap kewajiban adalah jaminan reklamasi. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu :

$$\text{Total Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Ekuitas}}$$

Tabel 3.16. Rasio Hutang Terhadap Ekuitas
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007-2015

Tahun	Kewajiban (Rp)	Ekuitas (Rp)	Total Debt to Equity Ratio
2007	1.257.100.132,00	631.930.045.017,09	0,00198933
2008	1.948.852.382,00	858.198.088.469,83	0,00227087
2009	2.080.662.647,00	1.009.596.427.888,06	0,00206089
2010	294.652.200,00	1.221.578.755.065,27	0,00024121
2011	3.577.204.361,00	1.400.761.562.332,46	0,00255376
2012	321.623.808,00	1.521.509.158.083,66	0,00021138
2013	71.304.700,00	1.685.446.486.189,81	0,00004231
2014	1.429.925.071,00	1.875.768.453.512,09	0,00076231
2015	4.361.603.092,69	1.227.287.351.876,60	0,00355385

Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

Berdasarkan tabel rasio hutang terhadap ekuitas tersebut di atas, diketahui bahwa pada periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 rasio hutang terhadap ekuitas Kabupaten Bangka Barat setiap tahun mengalami peningkatan meskipun tidak cukup signifikan. Pada tahun 2007 rasio hutang terhadap ekuitas sebesar 0,001989, sedangkan pada tahun 2015 sebesar 0,00355385. Hal ini berarti jumlah kewajiban (hutang) Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2015 sangat kecil yaitu hanya sebesar 0,0035 persen dari ekuitas (kekayaan) Kabupaten Bangka Barat, bahkan pada tahun 2013 hanya sebesar 0,00004231. Rasio ini masih dalam kategori sangat aman (sangat baik).

b. *Total Debt to Total Asset Ratio* (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu :

$$\text{Total Debt to Total Asset Ratio} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aktiva}}$$

Tabel 3.17 Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007-2015

Tahun	Kewajiban (Rp)	Aktiva (Rp)	Total Debt to Asset Ratio
2007	1.257.100.132,00	633.187.145.149,09	0,00198535
2008	1.948.852.382,00	860.146.940.851,83	0,00226572
2009	2.080.662.647,00	1.009.728.238.153,06	0,00206062
2010	294.652.200,00	1.217.477.488.836,56	0,00024202
2011	3.577.204.361,00	1.404.186.116.939,46	0,00254753
2012	321.623.808,00	1.521.830.781.891,66	0,00021134
2013	71.304.700,00	1.685.517.790.889,81	0,00004230
2014	1.429.925.071,00	1.877.198.378.583,09	0,00076173
2015	4.361.603.092,69	1.231.648.954.969,29	0,00354127

Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio hutang terhadap total aktiva tersebut, dapat diketahui bahwa rasio hutang Kabupaten Bangka Barat terhadap aktiva (aset) Kabupaten Bangka Barat diperoleh angka rasio yang semakin tahun semakin menurun, yaitu sebesar 0,001985 pada tahun 2007 menjadi 0,00354127 pada tahun 2015. Hal ini dapat menggambarkan adanya peningkatan kualitas kemandirian Kabupaten Bangka Barat dalam pendanaan aset. Rasio tersebut juga menggambarkan bahwa tidak lebih dari 0,0035 persen aset Kabupaten Bangka Barat yang dibiayai dari hutang, bahkan pada tahun 2013 hanya sebesar 0,00004230 dan rasio tersebut dalam kategori sangat aman (baik).

3. Rasio Aktivitas

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas entitas dalam menggunakan aktiva (aset) yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi (efektifitas) pemanfaatan sumber daya entitas. Adanya perbedaan antara laporan keuangan pemerintah dengan laporan keuangan perusahaan, menyebabkan rasio yang dapat dilihat berdasarkan laporan keuangan Kabupaten Bangka Barat adalah tingkat rasio pemanfaatan sumber daya entitas dalam menggali PAD. Terdapat 2 (dua) rasio yang digunakan dalam mengukur rasio aktivitas laporan keuangan Kabupaten Bangka Barat, yaitu:

1. Perputaran aktiva tetap (*fixed assets turn over*)

Perputaran aktiva tetap ini menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Perputaran Aktiva Tetap} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Aktiva Tetap}}$$

Tabel 3.18. Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007-2015

Tahun	PAD (Rp)	Aktiva Tetap (Rp)	Rasio Perputaran Aktiva Tetap
2007	106.922.030.932,91	510.387.455.151,00	0,04374627
2008	145.511.554.633,69	692.544.429.477,65	0,03808676
2009	99.450.846.803,35	884.771.801.249,65	0,03073386
2010	54.060.485.960,33	1.122.469.792.630,94	0,02448984
2011	102.820.941.817,81	1.239.521.653.170,33	0,02766485
2012	65.571.291.440,71	1.373.563.272.801,46	0,02213413
2013	56.238.620.777,86	1.516.877.889.087,96	0,02989141
2014	48.880.952.044,45	1.665.409.733.757,00	0,01806169
2015	56.300.674.425,60	1.047.375.659.426,65	0,05375404

Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio perputaran aktiva tetap tersebut, diketahui bahwa rasio PAD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terhadap aset tetap yang dimiliki semakin tahun semakin kecil. Terlihat bahwa pada tahun 2007 rasio perputaran aktiva tetap sebesar 4,37 persen, sedangkan pada tahun 2015 menjadi 5,38 persen. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan aset

tetap yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bangka Barat ternyata tidak signifikan mendorong semakin besarnya PAD yang diterima.

2. Perputaran total aktiva (*total assets turn over*)

Perputaran aktiva tetap ini menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Perputaran Total Aktiva} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Aktiva}}$$

Tabel 3.19. Rasio Perputaran Total Aktiva
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007-2015

Tahun	PAD (Rp)	Aktiva (Rp)	Rasio Perputaran Total Aktiva
2007	106.922.030.932,91	633.187.145.149,09	0,03526216
2008	145.511.554.633,69	860.146.940.851,83	0,03066543
2009	99.450.846.803,35	1.009.728.238.153,06	0,02693047
2010	54.060.485.960,33	1.217.477.488.836,56	0,02257874
2011	102.820.941.817,81	1.404.186.116.939,46	0,02442068
2012	65.571.291.440,71	1.521.830.781.891,66	0,01997767
2013	56.238.620.777,86	1.685.517.790.889,81	0,02690071
2014	48.880.952.044,45	1.877.198.378.583,09	0,01602394
2015	56.300.674.425,60	1.231.648.954.969,80	0,04571162

Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

Merujuk kepada hasil perhitungan rasio perputaran total aktiva tersebut diketahui bahwa, PAD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dibanding dengan seluruh nilai aset yang dimiliki semakin kecil, walaupun jumlah penurunan tidak signifikan yaitu dari 3,53 persen pada tahun 2007 menjadi 4,57 persen pada tahun 2015. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan total nilai aset yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak mendorong semakin besarnya PAD yang diterima.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Dalam kurun waktu tahun 2005-2010, setiap Perangkat Daerah merupakan satuan entitas akuntansi. Hal tersebut berarti bahwa Perangkat Daerah tersebut bertanggung jawab terhadap anggarannya masing-masing termasuk dalam pencatatan akuntansinya. Realisasi dari anggaran tersebut disusun dalam Laporan

Realisasi Anggaran yang harus dilaporkan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset (DPPKA) dan secara administratif harus dilaporkan kepada Perangkat Daerah, yaitu Pejabat Pengguna Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

Dari segi pengawasan dari rangkaian pengelolaan keuangan daerah, pada periode tahun 2005 sampai dengan 2010, laporan keuangan yang disusun oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset (DPPKA) sebagai entitas pelaporan, menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan pemerintah tersebut mewajibkan penerapan akuntansi dengan akrual basis sejak tanggal 1 Januari 2015. Laporan keuangan inilah yang kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengelolaan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh setiap Perangkat Daerah dan dikoordinir oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset (DPPKA) sebagai pengemban fungsi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan APBD, perubahan APBD, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca hingga catatan atas laporan keuangan disusun secara otonomi oleh Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh DPPKA sebagai entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat. Sedangkan Laporan Arus Kas disusun secara sentralistik oleh DPPKA.

Pengelolaan keuangan daerah tersebut tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Pengelolaan belanja daerah secara umum telah sesuai dengan ketentuan SAP. Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mulai melakukan penyisihan terhadap piutang dan penyusutan terhadap aset tetap sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan basis akuntansi akrual dalam penyusunan laporan keuangan sejak 1 Januari 2015 merupakan tantangan berat

pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 untuk tetap mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI.

Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan Kabupaten Bangka Barat dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil audit BPK yang memberikan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Barat. Perolehan opini terhadap laporan keuangan Kabupaten Bangka Barat tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada **Tabel 3.20**.

Target kedepan pada periode tahun 2016 sampai dengan 2021, Kabupaten Bangka Barat diharapkan dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan fokus dalam membenahi pengelolaan aset daerah yang selama ini menjadi titik lemah dalam Laporan Keuangan Daerah. Walaupun untuk mewujudkan itu diperlukan kerja keras karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 penyusunan laporan keuangan pemerintah telah menggunakan basis akrual. Tak hanya itu, untuk laporan keuangan tahun 2016, telah diwajibkan untuk melampirkan ikhtisar laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016.

Tabel 3.20. Opini BPK terhadap LKD Kabupaten Bangka Barat, 2006-2015

TAHUN	OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
2006	WAJAR DENGAN PENGECCUALIAN
2007	WAJAR DENGAN PENGECCUALIAN
2008	WAJAR DENGAN PENGECCUALIAN
2009	WAJAR DENGAN PENGECCUALIAN
2010	WAJAR DENGAN PENGECCUALIAN
2011	WAJAR DENGAN PENGECCUALIAN
2012	WAJAR DENGAN PENGECCUALIAN
2013	WAJAR TANPA PENGECCUALIAN
2014	WAJAR TANPA PENGECCUALIAN
2015	WAJAR DENGAN PENGECCUALIAN

Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Untuk proporsi penggunaan anggaran, pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 proporsi anggaran untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat dilihat pada **Tabel 3.22**. Berdasarkan tabel tersebut, bahwa secara keseluruhan dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 jumlah Belanja Langsung masih lebih besar dibandingkan jumlah belanja tidak langsung yaitu 37,44 persen dan untuk Belanja Langsung sebesar 62,56 persen. Hal ini menandakan bahwa semakin tahun proporsi belanja tidak langsung yang sebagian besar adalah belanja pegawai untuk gaji PNS semakin meningkat yang mengakibatkan belanja yang langsung menyentuh kepentingan publik secara proporsi menurun walaupun secara nominal sangat pesat perkembangannya. Untuk anggaran belanja per urusan terutama pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum dapat dilihat pada **Tabel 3.22**. Sedangkan pertumbuhan anggaran belanja Kabupaten Bangka Barat untuk urusan pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana masyarakat dapat dilihat pada **Tabel 3.23**, dan proporsi anggaran khusus untuk urusan pendidikan, kesehatan serta pekerjaan umum dapat dilihat pada **Tabel 3.24**.

Tabel 3.21. Proporsi Anggaran Belanja Kabupaten Bangka Barat, 2007-2015

TAHUN	BELANJA			
	Belanja Tidak Langsung (Rp)	%	Belanja Langsung (Rp)	%
2007	104.550.386.553,46	26,68	287.375.826.962,68	73,32
2008	142.015.485.665,73	32,49	295.103.132.311,87	67,51
2009	187.178.069.808,72	35,76	336.271.891.843,02	64,24
2010	196.395.366.885,28	40,89	283.923.118.938,96	59,11
2011	199.069.314.900,44	37,22	335.814.697.091,63	62,78
2012	237.741.222.226,28	36,25	418.110.156.045,50	63,75
2013	249.906.338.407,99	35,55	453.009.485.269,00	64,45
2014	304.087.357.801,00	39,12	473.241.844.945,50	60,88
2015	358.209.433.990,00	46,23	416.559.088.943,14	53,77
JUMLAH	1.998.718.689.888,90	37,50	3.339.286.195.960,16	62,50

Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016

Tabel 3.22. Anggaran Belanja Urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Barat, 2005-2015

Uraian	PENDIDIKAN (Rp)	KESEHATAN (Rp)	PEKERJAAN UMUM (Rp)
2005	32.191.620.300,00	6.903.467.650,00	21.376.744.050,00
2006	57.443.484.400,00	24.570.327.550,00	91.778.523.966,00
2007	74.792.612.631,00	40.321.750.669,00	123.947.035.484,48
2008	89.817.364.835,00	45.382.820.725,00	131.284.886.551,87
2009	110.783.645.344,00	53.371.931.468,00	170.579.474.999,02
2010	136.727.762.441,00	58.963.596.221,00	85.026.861.475,00
2011	162.091.768.014,00	65.169.751.388,00	93.361.023.181,03
2012	188.805.381.959,00	78.484.001.578,80	127.760.287.116,34
2013	212.994.804.345,99	89.917.045.046,00	110.851.677.566,34
2014	238.632.614.631,58	95.680.447.342,50	143.080.138.000,00
2015	242.862.918.129,00	113.751.894.859,00	142.233.937.000,00
JUMLAH	1.547.143.977.030,57	672.517.034.497,30	1.241.280.589.390,08

Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016

Tabel 3.23. Pertumbuhan Anggaran Belanja Urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Barat, 2006-2015 (dalam persentase)

Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata
PENDIDIKAN	78.44	30.20	20.09	23.34	23.42	18.55	16.48	12.81	12.04	1.77	23.71
KESEHATAN	255.91	64.11	12.55	17.60	10.48	10.53	20.43	14.57	6.41	18.89	43.15
PEKERJAAN UMUM	329.34	35.05	5.92	29.93	-50.15	9.80	36.85	-13.23	29.07	-0.59	41.20

Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016

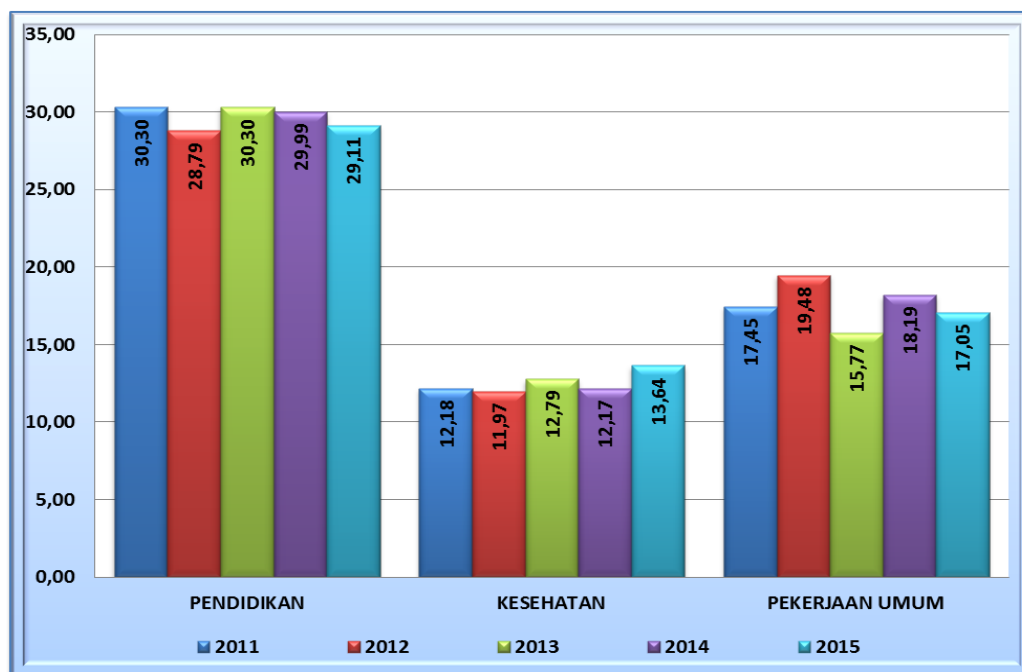
Tabel 3.24. Proporsi Anggaran Belanja Urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Barat, 2005-2015 (dalam persentase)

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata
PENDIDIKAN	26,73	19,34	19,08	20,55	21,16	28,47	30,30	28,79	30,30	29,99	29,11	25,80
KESEHATAN	5,73	8,27	10,29	10,38	10,20	12,28	12,18	11,97	12,79	12,17	13,64	10,90
PEKERJAAN UMUM	17,75	30,90	31,63	30,03	32,59	17,70	17,45	19,48	15,77	18,19	17,05	22,59

Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016

Catatan : Persentase Menghitung Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Berdasarkan **Tabel 3.24** diatas dapat diketahui bahwa untuk bidang pendidikan pada periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 telah memenuhi amanat undang-undang yaitu sebesar 25,80 persen, bahkan pada periode tahun 2010 s.d 2015 berkisar pada angka 30 persen. Begitu juga dengan Bidang Kesehatan, secara rata-rata telah mencapai diatas 10 persen sesuai dengan amanat undang-undang, bahkan untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 pada kisaran angka 12 persen. Untuk pekerjaan umum merupakan alokasi yang dominan setelah bidang pendidikan yaitu rata-rata mencapai angka 22,59 persen, pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 pada kisaran angka 31 persen, yang menandakan bahwa sebagian besar APBD pada tahun tersebut dipergunakan untuk membiayai infrastruktur.



Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

Gambar 3.5 Proporsi Anggaran Belanja Urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Barat, 2011-2015(dalam persentase)

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pencapaian prinsip efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah tercermin dari SiLPA pertahunnya. SiLPA per tahun diharapkan menurun baik secara nominal maupun persentasenya, dikarenakan kurang baik untuk perekonomian makro Kabupaten Bangka Barat, yang menggambarkan belanja pemerintah kurang

diberdayakan dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga belanja pemerintah tidak dapat secara optimal menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan SiLPA pertahun dapat dilihat pada **Tabel 3.25**. Sedangkan perkembangan persentase SiLPA yang digunakan untuk membiayai belanja Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada **Tabel 3.26**.

Tabel 3.25. Realisasi SiLPA Kabupaten Bangka Barat, 2005-2015

Tahun	SiLPA (Rp)
2005	45.305.433.463,16
2006	110.690.040.801,14
2007	106.922.030.932,91
2008	145.511.554.633,69
2009	99.450.846.803,35
2010	54.060.485.960,33
2011	102.820.941.817,81
2012	65.571.291.440,71
2013	56.238.620.777,86
2014	48.880.952.044,45
2015	35.818.494.300,77

Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

Tabel 3.26. Persentase Anggaran SiLPA Kabupaten Bangka Barat untuk Pendanaan APBD, 2005-2015

Tahun	SiLPA (Rp)	Pengeluaran APBD	%
2005	23.158.640.145,00	122.445.700.595,00	18,91
2006	45.282.183.463,16	305.058.526.501,00	14,84
2007	110.690.040.801,14	396.864.201.646,06	27,89
2008	106.922.030.932,91	442.621.117.977,60	24,16
2009	145.511.554.633,69	526.952.461.651,74	27,61
2010	99.450.846.803,35	485.889.110.824,24	20,47
2011	54.060.485.960,33	545.554.761.992,07	9,91
2012	65.571.291.440,71	668.119.628.271,78	9,81
2013	56.238.620.777,86	713.618.323.675,99	7,88
2014	48.384.439.324,71	794.571.902.746,50	6,09
2015	35.940.073.244,63	774.768.522.932,88	4,64

Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, APBD, Tahun 2016 (diolah)

Berdasarkan **Tabel 3.26** dapat diketahui bahwa pada kurun tahun 2011 sampai dengan 2015, SiLPA bukan lagi menjadi harapan pendanaan APBD, yang

menunjukkan bahwa dana APBD telah terserap dengan baik hingga akhir tahun, yaitu dengan tingkat serapan belanja tidak langsung mencapai 94,82 persen dan serapan belanja langsung mencapai 91,26 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa APBD Kabupaten Bangka Barat dapat diharapkan sebagai salah satu penunjang pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bangka Barat.

Besaran serapan tersebut juga memberi sinyal bahwa APBD dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dalam menggerakkan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bangka Barat. Namun, pemanfaatan APBD dapat lebih optimal jika diikuti oleh kebijakan-kebijakan lain yang menunjang terwujudnya usaha optimalisasi tersebut. Sehingga diharapkan setiap pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan diterapkan di Kabupaten Bangka Barat merupakan keputusan dan kebijakan yang ditujukan guna mendukung optimalisasi pemanfaatan APBD.

SiLPA tersebut dapat disebabkan karena beberapa hal antara lain sebagai berikut:

- a. kelebihan/*over* target dari pendapatan;
- b. penghematan dari belanja;
- c. adanya kegiatan-kegiatan yang memang belum dapat direalisasikan karena pengaruh iklim ekonomi secara global ataupun hal lainnya; dan
- d. sistem perencanaan program dan kegiatan yang belum efektif.

Pada periode tahun 2016 sampai dengan 2021 diharapkan SiLPA Kabupaten Bangka Barat tidak lebih dari 6 persen jumlah APBD Kabupaten Bangka Barat atau dengan kata lain persentase SiLPA yang digunakan untuk pendanaan APBD Kabupaten Bangka Barat yang ideal tidak lebih dari 6 persen.

3.3. Kerangka Pendanaan

Pendanaan program kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 ini sangatlah penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2015, maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Berdasarkan potensi pendanaan, Kabupaten Bangka Barat mempunyai potensi pendanaan dari PAD yang besar dan juga didukung oleh Dana Perimbangan yang menjanjikan.

3.3.1. Proyeksi Data Masa Lalu

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Salah satu indikator keuangan daerah tersebut adalah daya pajak (*tax effort*). Daya pajak merupakan perbandingan PAD terhadap kapasitas PAD. Kapasitas PAD sama dengan potensi PAD yaitu pendapatan yang diterima apabila seluruh potensi digunakan secara optimal, dalam hal ini PDRB. Perkembangan daya pajak (*tax effort*) Kabupaten Bangka Barat periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada **Tabel 3.27**.

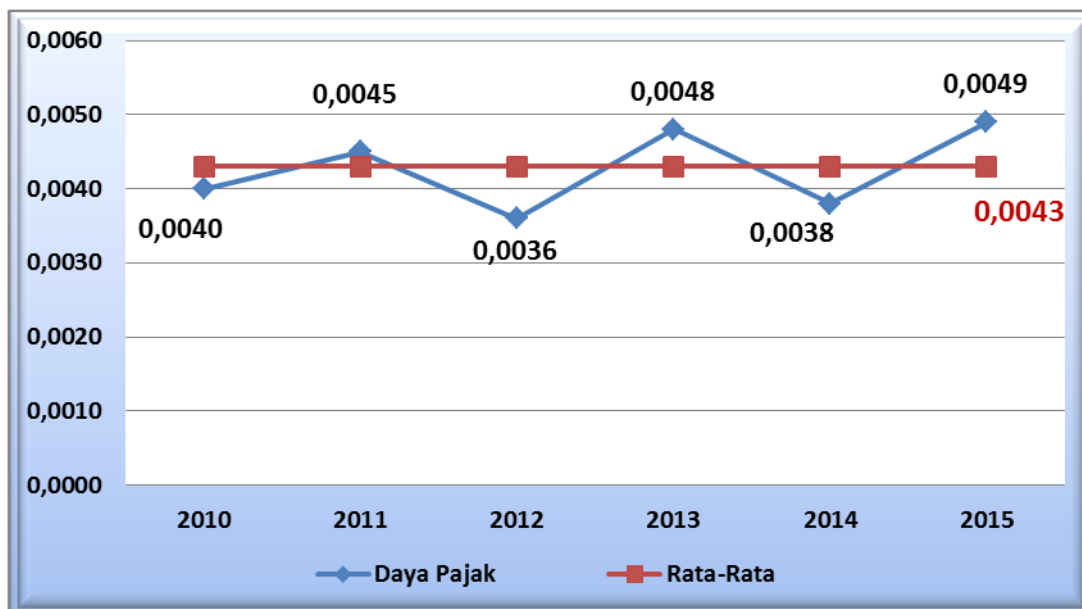
Tabel 3.27 menunjukkan bahwa daya pajak (*tax effort*) Kabupaten Bangka Barat periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 secara rata-rata adalah sebesar 0,0043. Angka tersebut menunjukkan bahwa daya pajak (*tax effort*) Kabupaten Bangka Barat masih sangat rendah, karena daya pajak tersebut masih jauh dari nilai 1 (satu).

Tabel 3.27. Daya Pajak (*Tax Effort*) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015

Tahun	PAD (dalam ribu rupiah)	PDRB atas harga berlaku (dalam juta rupiah)	Daya Pajak
2010	27.393.656,18	6.816.096,00	0.0040
2011	34.291.175,60	7.639.800,90	0.0045
2012	30.402.629,65	8.524.963,30	0.0036
2013	45.341.617,08	9.520.980,40	0.0048
2014	39.916.055,46	10.566.785,20	0.0038
2015	56.300.674,43	11.468.482,00	0.0049
Rata-rata	38.940.968,07	9.089.517,97	0.0043

Sumber: BPS Kab. Bangka Barat, DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

Sedangkan gambaran kecenderungan daya pajak Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada **Gambar 3.5**. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa meskipun daya pajak Kabupaten Bangka Barat masih sangat rendah, namun perkembangannya menunjukkan kecenderungan yang stabil, yaitu pada tahun 2010 mencapai angka 0,0040 sedangkan pada tahun 2015 sebesar 0,0049, dengan rata-rata sebesar 0,0043.



Sumber: BPS Kab. Bangka Barat, DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

Gambar 3.6 Daya Pajak (*Tax Effort*) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015

Perkembangan PAD per kapita, pajak per kapita dan PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada **Tabel 3.28**. Tabel tersebut menggambarkan bahwa PAD per kapita maupun pajak per kapita Kabupaten Bangka Barat masih sangat kecil dibandingkan dengan PDRB per kapita pada periode 2010-2015, PDRB per kapita rata-rata mencapai Rp 4.770.924.432,05 namun PAD per kapita rata-rata hanya sebesar Rp 20.434.649,17 atau 0,43 persen dari PDRB per kapita, sedangkan pajak per kapita hanya rata-rata sebesar Rp 5.008.690,73 atau 0,10 persen dari PDRB per kapita, menyiratkan bahwa, masih banyak potensi yang dapat digali oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk meningkatkan PAD terkait dengan *ability to pay*.

Cara lain untuk menganalisis posisi fiskal suatu daerah adalah dengan menghitung elastisitas pajak daerah tersebut terhadap PDRB. Desentralisasi dapat membawa efek yang positif dan potensial pada pertumbuhan ekonomi dan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan aktivitas ekonomi tersebut akan pula dapat mendorong dan meningkatkan hasil pajak daerah terkait dengan *ability to pay* yang akan meningkat. Elastisitas pajak daerah terhadap PDRB merupakan cara untuk mendeteksi struktur pajak disuatu daerah. Semakin elastis pajak suatu daerah maka struktur pajak di daerah tersebut semakin baik.

Tabel 3.28. PAD Per kapita, Pajak Per kapita dan PDRB Per kapita
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015

Tahun	PAD Per kapita (Rp)	Persentase PAD per kapita terhadap PDRB per kapita	Pajak Per kapita (Rp)	Persentase Pajak per kapita terhadap PDRB per kapita	PDRB Per kapita (Rp)
2010	15,640,112.00	0.40	2,091,788.00	0.05	3,891,576,363.00
2011	18,092,838.00	0.45	2,661,713.73	0.07	4,030,940,331.03
2012	15,407,389.00	0.36	3,012,819.77	0.07	4,320,265,197.01
2013	24,083,166.00	0.48	10,208,542.00	0.20	5,057,061,576.13
2014	20,746,930.00	0.38	5,804,080.65	0.11	5,492,234,829.39
2015	28,637,460.00	0.49	6,273,200.20	0.11	5,833,468,295.71
Rata-rata	20,434,649.17	0.43	5,008,690.73	0.10	4,770,924,432.05

Sumber: BPS Kab. Bangka Barat, DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

Kriteria yang digunakan, jika nilai indeks lebih besar dari satu secara absolut, maka dapat dikatakan elastis, sedangkan bila lebih kecil dari satu secara absolut maka dapat dikatakan inelastis. Elastisitas penerimaan di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada **Tabel 3.29**.

Berdasarkan **Tabel 3.29** dapat diketahui bahwa elastisitas PAD kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 tidak stabil, yaitu pada tahun 2011 mencapai 1,87, namun pada tahun 2015 menjadi 3,70. Hal ini lebih disebabkan terjadinya perubahan kebijakan yang berdampak pada naik turunnya PAD. Kebijakan tersebut seperti dilimpahkannya wewenang PBB dan BPHTB Perkotaan/Perdesaan serta sumbangan pihak ketiga yang dialihkan dari PAD menjadi pendapatan hibah. Namun, secara rata-rata elastisitas PAD berada pada angka 1,22 yang artinya elastis karena berada di atas 1. Jika elastisitas yang bernilai negatif diabaikan, maka rata-rata mencapai 2,91, yang artinya sangat elastis. Nilai elastisitas tersebut menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan 1 persen atas PDRB, maka akan berdampak terhadap peningkatan pajak sebesar 2,91 persen. Gambaran yang dapat diberikan adalah bahwa dengan elastisitas 1,22 tersebut maka jika setiap kenaikan 1 persen PDRB akan berdampak kepada kenaikan PAD sebesar 1,22 persen.

Tabel 3.29. Elastisitas PAD dan Pajak Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015

Tahun	PDRB (harga berlaku dlm juta rupiah)	PAD	PAJAK	Elastisitas PAD	Elastisitas Pajak
2010	6.816.096,00	27.393.656,18	3.663.766.527	-	-
2011	7.639.800,90	34.291.175,60	5.044.719.421	1,87	2,54
2012	8.524.963,30	30.402.629,65	5.945.262.047	(1,23)	1,46
2013	9.520.980,40	45.341.617,08	19.219.723.875	3,15	6,60
2014	10.566.785,20	39.916.055,46	11.166.760.961	(1,37)	(7,29)
2015	11.468.482,00	56.300.674,43	12.332.986.126	3,70	1,20
Rata-rata				1,22	0,90

Sumber : BPS Bangka Barat, DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

Nilai elastisitas pajak Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2011 sebesar 2,54, dimana nilai tersebut berarti elastis, sebab elastisitas tersebut berada diatas 1 (satu). Pada tahun 2015 nilai elastisitas pajak sebesar 1,20, yang lebih disebabkan oleh adanya hal yang bersifat insidental, yaitu melonjaknya pendapatan BPHTB yang mencapai angka 11 milyar pada tahun 2013, namun hal ini tidak terjadi lagi di tahun berikutnya. Secara rata-rata elastisitas pajak sebesar 0,90 yang artinya tidak elastis, namun bila diabaikan elastisitas yang bernilai negatif maka rata-rata mencapai 2,95, yang artinya sangat elastis. Nilai elastisitas tersebut menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan 1 persen atas PDRB, maka akan berdampak terhadap peningkatan pajak sebesar 2,95 persen.

Merujuk kepada hasil perolehan tersebut, kemampuan ini diprediksi dapat menjadi modal besar bagi Kabupaten Bangka Barat dalam meningkatkan PADnya pada periode tahun 2016-2021, karena perubahan pada PDRB akan cukup berpengaruh terhadap peningkatan PAD. Selain itu dapat dilihat pula bahwa elastisitas tersebut mempunyai trend yang positif dan meningkat setiap tahunnya. Namun hal yang perlu mendapat perhatian adalah apa dan bagaimana upaya mengoptimalkan potensi yang ada tersebut demi peningkatan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka Barat.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

a. Kerangka Penerimaan

Sesuai dengan analisis-analisis diatas dapat diestimasi kerangka pendanaan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Pendanaan tersebut terbagi kedalam jenis-jenis pendapatan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Penentuan kerangka pendanaan dari masing-masing jenis pendapatan tidak terlepas dari asumsi-asumsi. Adapun asumsi yang dipakai adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 adalah 4,1 persen, sehingga untuk pajak daerah dengan tingkat elastisitas 2,95 sehingga dapat meningkatkan kurang lebih 12,10 persen pajak tiap tahunnya. Untuk jenis PAD lainnya dengan tingkat elastisitas 1,22 sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan jenis PAD selain pajak kurang lebih 11,93 persen tiap tahunnya.

Sedangkan untuk dana perimbangan, Bagi Hasil Pajak dan DAU diasumsikan akan meningkat kurang lebih 5 persen tiap tahunnya, untuk Bagi Hasil SDA diasumsikan akan meningkat kurang lebih 3 persen tiap tahunnya dan DAK diestimasi naik kurang lebih 10 persen tiap tahunnya. Estimasi dana perimbangan ini tidak terlepas dari kondisi keuangan negara dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jika ada kenaikan DAU tidak lebih adalah dikarenakan adanya kenaikan jumlah pegawai, gaji pegawai dan naiknya jumlah penduduk ataupun kenaikan indeks kemahalan akibat inflasi.

Lain-lain Pendapatan Yang Sah, diasumsikan Kabupaten Bangka Barat hanya mendapatkan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dengan peningkatan sebesar 5 persen tiap tahunnya. SiLPA Tahun sebelumnya di estimasikan tidak lebih dari 6 persen dari total dana tersedia tahun sebelumnya sehingga didapatlah angka seperti pada **Tabel 3.30.**

Tabel 3.30. Estimasi Penerimaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 (dalam rupiah)

Jenis Penerimaan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PAD	51.456.966.705,86	64.812.646.440,00	74.053.084.266,56	84.478.436.159,07	96.255.834.318,12	109.576.089.964,48
Pajak	14.129.000.000,00	15.960.850.000,00	18.354.977.500,00	21.108.224.125,00	24.274.457.743,75	27.915.626.405,31
Retribusi	5.824.735.000,00	6.465.455.850,00	7.176.655.993,50	7.966.088.152,79	8.842.357.849,59	9.815.017.213,05
Pengelolaan Kekayaan yg dipisahkan	3.850.000.000,00	4.245.375.000,00	5.040.750.000,00	5.836.125.000,00	6.631.500.000,00	7.426.875.000,00
Lain2 PAD Yang Sah	27.653.231.705,86	38.140.965.590,40	43.480.700.773,06	49.567.998.881,28	56.507.518.724,66	64.418.571.346,12
Dana Perimbangan	713.352.355.389,00	740.136.541.316,00	783.001.028.355,10	828.685.326.993,49	877.401.265.279,61	929.378.457.667,20
Bagi Hasil Pajak Pusat	36.000.000.000,00	37.800.000.000,00	39.690.000.000,00	41.674.500.000,00	43.758.225.000,00	45.946.136.250,00
Bagi Hasil SDA	34.744.003.389,00	93.150.000.000,00	96.410.250.000,00	99.784.608.750,00	103.277.070.056,25	106.891.767.508,22
DAU	441.988.897.000,00	464.088.341.850,00	487.292.758.942,50	511.657.396.889,63	537.240.266.734,11	564.102.280.070,81
DAK	200.619.455.000,00	145.098.199.466,00	159.608.019.412,60	175.568.821.353,86	193.125.703.489,25	212.438.273.838,17
Lain2 Pendapatan Yang Sah	138.225.496.830,37	137.167.460.646,80	145.514.809.894,14	156.578.424.225,35	167.419.006.656,77	179.102.784.331,77
Bagi Hasil Pajak Provinsi	52.778.883.830,37	45.185.811.346,80	47.445.101.914,14	49.817.357.009,85	52.308.224.860,34	54.923.636.103,35
Bantuan Provinsi	40.192.500.000,00	42.202.125.000,00	44.312.231.250,00	46.527.842.812,50	48.854.234.953,13	51.296.946.700,78
Dana Penyesuaian	5.000.000.000,00	5.500.000.000,00	6.050.000.000,00	6.655.000.000,00	7.320.500.000,00	8.052.550.000,00
Hibah	40.254.113.000,00	44.279.524.300,00	48.707.476.730,00	53.578.224.403,00	58.936.046.843,30	64.829.651.527,63
Total Penerimaan	903.034.818.925,23	942.116.648.403,20	1.003.568.992.515,79	1.069.742.187.377,90	1.141.076.106.254,37	1.218.057.331.963,44
SiLPA	36.064.675.255,77	53.123.267.547,87	56.526.998.904,19	60.214.135.350,95	62.184.531.242,67	68.464.566.375,26
Penerimaan Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Total Dana Tersedia	941.099.494.181,00	997.239.915.951,07	1.062.095.921.419,99	1.131.956.322.728,85	1.207.260.637.497,04	1.288.521.898.338,70

Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

Berdasarkan kerangka pendanaan pada **Tabel 3.30** di atas dapat diambil kesimpulan bahwa APBD Kabupaten Bangka Barat pada kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2021 berkisar kurang lebih antara 941 miliar rupiah sampai dengan 1,28 triliun rupiah.

b. Kerangka Belanja

Untuk menentukan kerangka belanja ini, yang perlu dicermati terlebih dahulu adalah realisasi belanja pegawai yaitu gaji dari PNS/CPNS Kabupaten Bangka Barat. Perkembangan belanja gaji Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.31. Belanja Pegawai Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007-2015

Tahun	Belanja Pegawai BTL	Gaji	Tambahan Penghasilan
2007	59.775.090.163,00	42.440.314.015,73	17.334.776.147,27
2008	75.464.335.041,00	53.579.677.879,11	21.884.657.161,89
2009	97.362.121.605,00	69.127.106.339,55	28.235.015.265,45
2010	115.658.095.037,00	82.611.506.287,00	33.046.588.750,00
2011	155.948.886.653,05	105.352.271.183,96	50.596.615.469,09
2012	179.489.084.857,00	117.320.769.606,91	62.168.315.250,09
2013	196.755.256.829,48	128.976.608.594,22	67.778.648.235,26
2014	223.989.411.641,58	147.751.203.444,00	76.238.208.197,58
2015	256.420.261.379,00	164.722.629.850,00	91.697.631.529,00

Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2007 jumlah realisasi belanja gaji pegawai mencapai Rp 59,7 miliar dengan jumlah pegawai kurang lebih sekitar 1.600 PNS, namun pada tahun 2010 telah mencapai Rp 115,6 miliar atau hampir naik 100 dibanding tahun 2007 dengan jumlah PNS sebesar 2.875 pegawai, semakin meningkat pada tahun 2015 dimana mencapai Rp 256,4 miliar atau naik lebih dari 100 dibanding tahun 2010 dengan jumlah pegawai kurang lebih 3.100 PNS. Pertumbuhan jumlah belanja gaji dan tabel perkiraan jumlah PNS dan PHL, dapat dilihat pada **Tabel 3.32-3.33**.

Tabel 3.32. Pertumbuhan Belanja Pegawai Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008-2015

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
Belanja Pegawai BTL	26,25	29,02	18,79	34,84	15,09	9,62	13,84	14,48	16,96
Gaji	26,25	29,02	19,51	27,53	11,36	14,56	14,56	11,49	16,00
Tambahan Penghasilan PNS	26,25	29,02	17,04	53,11	22,87	12,48	12,48	20,28	20,91

Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

Tabel 3.33. Perkiraan Jumlah Pegawai Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PNS	3.300	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
PHL	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
JUMLAH	4.700	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300

Sumber : BKPPD Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

Berdasarkan data-data diatas, dapat dilakukan perhitungan, bahwa perkiraan belanja gaji untuk PNS dan PHL Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.34. Perkiraan Belanja Pegawai Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Prediksi Gaji	292.001.736.456,10	308.000.000.000	325.800.000.000	358.380.000.000	394.218.000.000	433.639.800.000
Prediksi Gaji PHL	26.400.000.000	29.280.000.000	32.160.000.000	35.040.000.000	37.920.000.000	40.800.000.000
JUMLAH	318.401.736.456,10	337.280.000.000	357.960.000.000	393.420.000.000	432.138.000.000	474.439.800.000

Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

Penghitungan prediksi belanja gaji PNS dan PHL tersebut tidak lepas dari asumsi kebijakan pemerintah pusat, yaitu kenaikan gaji PNS setiap tahun diasumsikan naik sebesar 10 persen, begitu juga kenaikan gaji PHL diasumsikan naik setiap tahun sebesar Rp 200.000,00. Selain itu diasumsikan pula setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengangkat 200 sampai dengan 300 PNS baru serta dicadangkan pula *accres* sebesar 10 persen untukantisipasi kenaikan berkala ataupun golongan PNS tersebut yang berpengaruh pada kenaikan gaji PNS secara perorangan.

Selain untuk penyediaan gaji, pemerintah Kabupaten Bangka Barat harus menyediakan dana yang disediakan untuk program yang bersifat rutin yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Perkembangan anggaran yang tersedia dan realisasi untuk program dimaksud dapat dilihat pada **Tabel 3.35** berikut:

Tabel 3.35. Anggaran dan Realisasi Program Yang Bersifat Rutin Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007-2014

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anggaran	54.049.551.265	69.595.143.617	70.339.839.459	75.313.445.548	61.993.197.684	80.745.331.053	77.395.180.450	76.542.244.131
Realisasi	35.242.960.475	48.832.798.237	55.447.590.642	61.491.364.990	78.529.930.219	69.902.414.220	68.841.185.048	70.863.385.567

Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

Berdasarkan data pada **Tabel 3.35**, terutama untuk realisasi program yang bersifat rutin, dengan diasumsikan pertumbuhan rata-rata realisasi sebesar 5 persen, maka dapat diprediksi pengeluaran ataupun dana yang harus disediakan untuk pendanaan program-program yang bersifat rutin seperti dalam **Tabel 3.36**.

Tabel 3.36. Perkiraan Kebutuhan Pendanaan untuk Program Yang Bersifat Rutin Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

Uraian	Kebutuhan Dana
2016	84.387.824.154,00
2017	85.807.215.362,00
2018	90.737.576.130,00
2019	95.889.454.937,00
2020	101.073.927.684,00
2021	107.702.624.068,00

Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

Berdasarkan perkiraan belanja gaji dan pendanaan program bersifat rutin tersebut dapat diketahui kapasitas riil dari keuangan daerah Kabupaten Bangka Barat, dimana dana yang tersedia setelah dikurangi belanja gaji, dana transfer 10

persen dana perimbangan kecuali DAK ke desa dan program yang bersifat rutin tersebut itulah yang dapat digunakan dalam belanja lainnya. Adapun tabel berikut menunjukkan kapasitas riil ataupun dana yang tersedia setiap tahunnya pada Kabupaten Bangka Barat untuk pendanaan lainnya.

Tabel 3.37. Perkiraan Kapasitas Riil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total Penerimaan (Dana Tersedia)	941.099.494.181,00	997.239,915,951.07	1,062,095,921,419.99	1,131,956,322,728.85	1,207,260,637,497.04	1,288,521,898,338.70
Jumlah Belanja Gaji PNS	292.001.736.456,10	308,000,000,000.00	325,800,000,000.00	358,380,000,000.00	394,218,000,000.00	433,639,800,000.00
Pendanaan Program Rutin	84,387,824,154.00	85,807,215,362.00	90,737,576,130.00	95,889,454,937.00	101,073,927,684.00	107,702,624,068.00
Transfer Dana Desa	51,273.290.038,90	59,818,765,508.77	62,623,963,459.41	65,563,849,097.84	68,644,989,642.16	71,874,275,656.37
Kapasitas Riil	513.436.643.532,00	543,613,935,080.30	582,934,381,830.58	612,123,018,694.01	643,323,720,170.88	675,305,198,614.33

Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, kapasitas riil Kabupaten Bangka Barat lebih kurang berkisar antara Rp 513 milyar sampai Rp 675 milyar. Peningkatan ataupun penurunan kapasitas riil ini sangat tergantung dengan kenaikan DAU yang diterima oleh Kabupaten Bangka Barat. Total penerimaan (dana tersedia) pada **Tabel 3.30** merupakan total dana yang tersedia belum dikurangi dengan estimasi untuk pengeluaran pembiayaan sebesar 5 milyar sampai dengan 12,5 milyar berupa penyertaan modal dan dana bergulir.

Tabel 3.38. Estimasi Belanja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Operasi	696.332.628.693,00	724.814.336.999,59	754.463.591.780,60	786.279.829.835,04	818.448.135.426,19	851.935.443.298,89
Belanja Pegawai	355.541.210.656,10	369.762.859.082,34	384.553.373.445,64	400.886.970.807,10	416.922.449.639,39	433.599.347.624,96
Belanja Barang dan Jasa	215.110.786.262,00	223.715.217.712,48	232.663.826.420,98	241.970.379.477,82	251.649.194.656,93	261.715.162.443,21
Belanja Bunga & Subsidi	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	26.817.799.400,00	28.024.600.373,00	29.285.707.389,79	30.603.564.222,33	31.980.724.612,33	33.419.857.219,88
Belanja Bantuan Sosial	685.389.000,00	716.231.505,00	748.461.922,73	782.142.709,25	817.339.131,16	854.119.392,07
Belanja Bantuan Keuangan	98.177.443.374,90	102.595.428.326,77	107.212.222.601,48	112.036.772.618,54	117.078.427.386,38	122.346.956.618,76
Belanja Modal	239.825.311.033,00	269.230.668.101,48	304.217.927.704,39	342.020.650.765,31	384.891.075.729,51	432.372.886.064,33
Belanja Tidak Terduga	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Transfer Bagi Hasil Ke Desa	1.995.373.500,00	2.194.910.850,00	2.414.401.935,00	2.655.842.128,50	2.921.426.341,35	3.213.568.975,49
Belanja Daerah	939.353.313.226,00	997.239.915.951,07	1.062.095.921.419,99	1.131.956.322.728,85	1.207.260.637.497,05	1.288.521.898.338,70

Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat (diolah)

Tabel 3.38 menggambarkan estimasi belanja Kabupaten Bangka Barat tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Berdasarkan dana yang tersedia, dapat diambil pendekatan penggunaan dana yang tersedia dengan pendekatan prioritas penggunaan dana, dimana ada 3 (tiga) prioritas penggunaan dana yaitu :

1. Prioritas I digunakan untuk alokasi pembangunan yang terkait dengan visi misi kepala daerah.
2. Prioritas II digunakan untuk alokasi pembangunan yang terkait dengan urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah lainnya.
3. Prioritas III digunakan untuk alokasi Belanja Tidak Langsung diluar gaji dan transfer dana Desa, seperti hibah dan bantuan sosial daerah.

Dengan pembagian persentase penggunaan dana yang tersedia yaitu rata-rata ± 73 persen untuk prioritas I, rata-rata ± 22 persen untuk Prioritas II dan rata-rata ± 5 persen untuk Prioritas III didapatkan pendanaan masing-masing prioritas seperti yang tertera pada **Tabel 3.39**.

Tabel 3.39. Pendanaan Prioritas Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Prioritas I (Visi Misi)	317.516.900.000,00	369.582.957.000,00	440.272.817.000,00	466.856.787.000,00	493.932.817.000,00	523.887.377.000,00
Prioritas II (Urusan lainnya)	170.247.911.355,40	146.990.280.000,00	113.629.842.000,00	114.750.080.700,00	117.299.712.290,00	117.652.561.519,00
Prioritas III (BTL Selain Gaji dan Transfer Desa)	25.671.832.176,60	27.040.698.080,30	29.031.722.830,58	30.516.150.994,01	32.091.190.880,88	33.765.260.095,33
JUMLAH	513.436.643.532,00	543,613,935,080.30	582,934,381,830.58	612,123,018,694.01	643,323,720,170.88	675,305,198,614.33

Sumber : Tim RPJMD Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

Hal yang perlu diperhatikan terkait penggunaan dana tersebut, bahwa sesuai amanat peraturan perundang-undangan, alokasi belanja untuk bidang pendidikan adalah minimal 20% dan alokasi untuk bidang kesehatan adalah minimal 10%, sehingga didapatkan alokasi dana untuk kedua bidang tersebut seperti yang tertera pada **Tabel 3.40**.

Tabel 3.40. Alokasi Bidang Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bidang Pendidikan	102.687.328.706,40	108.722.787.016,06	116.586.876.366,12	122.424.603.738,80	128.664.744.034,18	135.061.039.722,87
Bidang Kesehatan	51.343.664.353,20	54.361.393.508,03	58.293.438.183,06	61.212.301.869,40	64.332.372.017,09	67.530.519.861,43
JUMLAH	154.030.993.059,60	163.084.180.524,09	174.880.314.549,17	183.636.905.608,20	192.997.116.051,27	202.591.559.584,30

Sumber : Tim RPJMD Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

Selain menggunakan perhitungan kerangka pendanaan diatas, masih ada sumber dana yang dapat digali yaitu hibah dari pemerintah pusat ataupun pinjaman, yang dapat digunakan untuk pendanaan berdasarkan skala prioritas di Kabupaten Bangka Barat.

c. Pembiayaan Pendanaan

Kerangka pendanaan masih terbuka dengan melakukan pinjaman guna membantu pembiayaan pembangunan Kabupaten Bangka Barat, bila dana yang tersedia dianggap kurang. Dengan analisis Batas Maksimum Pinjaman (BMP) ≤ 75 dari penerimaan umum (kecuali DAK, Bantuan Provinsi dan Dana Penyesuaian Pendidikan) dan analisis DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*) $\geq 2,5$ bahwa dapat dianalisis Kabupaten Bangka Barat dapat melakukan pinjaman dengan besaran Batas Maksimum Pinjaman (BMP) seperti yang tertera pada **Tabel 3.41**.

Tabel 3.41. Batas Maksimum Pinjaman Kabupaten Bangka Barat

Tahun	BMP
2016	Rp 488.293.979.210,85
2017	Rp 514.343.567.055,90
2018	Rp 541.943.399.671,30
2019	Rp 571.208.812.903,47
2020	Rp 602.266.037.885,33
2021	Rp 611.574.580.920,97

Sumber : DPPKA, Tahun 2016 (diolah)

Penentuan BMP pada **Tabel 3.41** diatas diasumsikan dari penerimaan pada **Tabel 3.30** dan BMP tersebut adalah bila Kabupaten Bangka Barat melakukan pinjaman satu kali pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Bila Kabupaten Bangka Barat melakukan pinjaman pada tahun 2016 maka BMP tahun

berikutnya tentu tidak sebesar pada **Tabel 3.41**, tergantung pada besaran pinjaman tahun 2016 dan DSCR nya. Untuk analisis DSCR dilakukan bila Kabupaten Bangka Barat telah melakukan pinjaman dan akan melakukan pinjaman lagi. Bila DSCR nya $\geq 2,5$ maka, Kabupaten Bangka Barat dapat melakukan pinjaman lagi.

Sebagai gambaran, bila Kabupaten Bangka Barat melakukan pinjaman Rp.200.000.000.000,00 pada tahun 2016 selama 10 tahun dengan pengembalian per tahun beserta bunga sebesar Rp 25.000.000.000,00 dan dengan asumsi Belanja Wajib Rp 250.000.000.000,00, asumsi penerimaan sesuai **Tabel 3.32** dan BMP sesuai dengan **Tabel 3.41**, maka DSCR pada tahun 2017 sebesar 10,56, sehingga pada tahun 2017 Kabupaten Bangka Barat masih boleh meminjam maksimal kurang lebih sebesar Rp 289.000.000.000,00 (Rp 514.000.000.000,00 – Rp 200.000.000.000,00 – Rp.25.000.000.000,00).

Perhitungan DSCR sebagai berikut :

$$DSCR = \frac{\text{Penerimaan Umum} - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran Pokok} + \text{Bunga} + \text{Biaya lain jatuh tempo}}$$

$$\begin{aligned} DSCR &= \frac{514.000.000.000,00 - 250.000.000.000,00}{20.000.000.000,00 + 5.000.000.000,00} \\ &= \frac{264000.000.000,00}{25.000.000.000,00} \\ &= 10,56 \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis BMP dan DSCR serta gambaran diatas, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Bangka Barat masih sangat dimungkinkan melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang mendesak dan sangat vital ketika terjadi ketersediaan dana yang terbatas pada kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2021. Namun meskipun demikian, akan lebih baik jika sebagian besar pinjaman yang dilakukan adalah diinvestasikan pada pembangunan-pembangunan yang berdampak secara langsung terhadap peningkatan pertumbuhan perekonomian dan pendapatan Kabupaten Bangka Barat.

Merujuk kepada gambaran menyeluruh terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Kabupaten Bangka Barat yang diungkapkan secara ringkas sebelumnya, serta berdasarkan beberapa analisis prediksi yang dilakukan terhadap periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 diatas, maka deskripsi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bangka Barat pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun

2021 diharapkan dapat diimplementasikan seperti yang digambarkan dalam **Tabel 3.42.**

Tabel 3.42. Target Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

Indikator	Target 2016-2021
APBD	± Rp 941 milyar s.d Rp 1,288 triliun
DOFD	Rata-rata 7,37 %
Indeks Kinerja Keuangan	21,5
SiLPA Kabupaten Bangka Barat	± Rp 36 s.d 68 miliar
SiLPA untuk Pendanaan APBD	5 %
Opini BPK terhadap LKD	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Sumber : DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2016 (diolah)

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan dalam bab ini disarikan analisa Bab II terkait gambaran umum kondisi daerah dan diperkuat menggunakan hasil diskusi pada *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang diselenggarakan di enam kecamatan di Kabupaten Bangka Barat. Selain itu dengan melihat perkembangan maupun tren pencapaian pembangunan daerah hingga saat ini yang dirasa masih belum ideal atau sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, baik oleh lembaga dunia seperti *Millenium Development Goals* (MDGs), pemerintah pusat seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Bangka Barat sendiri lewat target pemenuhan indikator pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pada periode sebelumnya.

4.1.1. Permasalahan Bidang Ekonomi

4.1.1.1. Semakin Menurunnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap Perekonomian Daerah

Sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian merupakan dua sektor utama pembentuk PDRB Kabupaten Bangka Barat selama ini. Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor utama pembentuk PDRB, yang ditopang dengan adanya keberadaan Pusat Metalurgi milik PT. Timah, Tbk. di Kecamatan Muntok. Sektor pertambangan dan penggalian juga bertumpu pada pertambangan bijih logam, khususnya timah. Meskipun sampai saat ini sektor industri dan sektor pertambangan dan penggalian memberi kontribusi yang dominan dibandingkan sektor-sektor lain, kontribusinya mengalami penurunan secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir.

Jika mengamati kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB (ADHB), sektor industri pengolahan dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan dari 49,94 persen di tahun 2011 menjadi 43,64 persen di tahun 2015. Pada sektor tersebut, kontribusi terbesar adalah dari industri logam dasar, khususnya timah, yang mengalami penurunan cukup signifikan dari 41,91 persen di tahun 2011 menjadi 34,08 persen di tahun 2015. Sementara itu, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian juga

mengalami penurunan dari 14,83 persen di tahun 2011 menjadi 11,81 persen di tahun 2015, dimana kontribusi subsektor pertambangan bijih logam turun dari 13,50 persen menjadi 10,34 persen dalam kurun waktu yang sama.

Dominasi sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalan di Kabupaten Bangka Barat setidaknya menggambarkan dua hal. Pertama, tingkat produksi dan harga komoditas timah di tingkat global sangat mempengaruhi sektor pertambangan lokal. Semakin berkurangnya lahan pertambangan dan semakin ketatnya regulasi di bidang pertambangan serta harga komoditi mineral timah yang jatuh di pasar dunia bisa dipastikan akan berdampak besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka Barat. Kedua, secara legal dan normatif sektor pertambangan di pulau Bangka dikuasai oleh PT. Timah, Tbk. baik dari sisi eksplorasi, pengolahan serta perdagangan komoditi tersebut. Artinya, produksi komoditi timah yang mendominasi kontribusi PDRB tidak menggambarkan tingkat produktivitas yang dimiliki masyarakat lokal di Kabupaten Bangka Barat. Wajar apabila distribusi pendapatan menjadi timpang, karena tingginya produksi sektor industri pengolahan timah hanya menjadi keuntungan bagi tenaga kerja yang bergerak di sektor tersebut yang besarnya tidak lebih dari 2,5%. Ketimpangan pendapatan yang diukur dari indeks gini di Kabupaten Bangka Barat dalam 3 Tahun terakhir selalu mengalami peningkatan dari 0,252 di tahun 2013 menjadi 0,283 di tahun 2015.

4.1.1.2. Terkendalanya Perkembangan Sektor Pertanian dalam Arti Luas sebagai Sektor Unggulan di Masa Datang

Kabupaten Bangka Barat memiliki beragam potensi keunggulan daerah, khususnya hasil perkebunan dan perikanan. Hasil perkebunan seperti lada adalah komoditi yang telah melegenda sejak masa pendudukan Belanda di nusantara. Dari data yang ada, tiga komoditi unggulan perkebunan yaitu kelapa sawit, lada dan karet mengalami penurunan di tiga tahun terakhir yang disebabkan selain oleh penurunan produksi karena faktor iklim dan harga komoditi perkebunan tersebut sangat bergantung dengan harga pasar dunia. Demikian pula dengan komoditas pertanian lainnya, dimana tidak terlihat peningkatan jumlah produksi atau luas area panen yang signifikan selama lima tahun terakhir, kecuali untuk komoditas padi.

Produk unggulan Kabupaten Bangka Barat dari sektor pertanian yang telah dikembangkan diantaranya *Crude Palm Oil* (CPO) kelapa sawit, karet, lada, serta produk hasil perikanan. Produk-produk tersebut juga merupakan komoditas untuk perdagangan luar negeri walaupun dari nilai produksi masih jauh dibandingkan dengan nilai produksi timah. Produk-

produk tersebut relatif tidak memiliki keunggulan di level wilayah karena juga dimiliki oleh hampir seluruh kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penurunan produksi serta harga komoditi yang turun pada beberapa tahun terakhir sangat berimbas signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dari tahun 2010-2014 dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat sangat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas 5,10 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 5,51 persen dan pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 4,73 persen. Terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir memang diakibatkan oleh banyak hal seperti perkembangan ekonomi dunia, namun keterbatasan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan baru juga menjadi permasalahan dalam upaya pertumbuhan ekonomi di daerah.

Laju pertumbuhan PDRB (ADHK) pada sektor pertanian dalam lima tahun terakhir berfluktuatif, dimana pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 6,42%. Lebih detail dapat dijelaskan bahwa subsektor pertanian yang mengalami pertumbuhan yang turun ada pada tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan.

Permasalahan pengembangan sektor pertanian dalam arti luas di Kabupaten Bangka Barat ditemui pada FGD yang dilaksanakan di enam kecamatan di Kabupaten Bangka Barat. Permasalahan pengembangan sektor pertanian tersebut ditemui di segala aspek, dari mulai hulu hingga hilir, meliputi sulitnya akses modal usaha, minimnya pengetahuan terkait pemilihan benih/bibit unggul, terkendalanya produksi akibat hama penyakit, tidak lancarnya irigasi dan drainase lahan, kurangnya pembinaan/penyuluhan, hingga sulitnya akses pemasaran hasil pertanian.

Mayoritas masyarakat di Kabupaten Bangka Barat berrmatapencarian utama sebagai petani yang telah dijalani secara turun temurun. Dari data yang ada, penyerapan tenaga kerja terbesar berada pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan di tahun 2015 sebesar 36,66%. Akan tetapi, kualitas produk pertanian dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan signifikan. SDM petani dan nelayan masih sangat rendah, ditambah dengan terbatasnya sumber daya penyuluh pertanian dalam upaya peningkatan SDM petani. Mengubah kebiasaan lama yang kurang baik terkait pengolahan perkebunan yang sudah mengakar di masyarakat menjadi salah satu tantangan para penyuluh di lapangan. Selain terkait SDM petani, permasalahan kualitas bibit serta saprodi juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh petani lokal, baik dari sisi kualitas

bibit (antara bibit lokal dan bibit unggul), kesuburan tanah, ketersediaan pupuk subsidi sampai dengan belum terintegrasinya irigasi primer, irigasi sekunder dan irigasi tersier yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Dari jumlah kelompok tani (poktan) yang ada di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 975 poktan, hanya 44 poktan (4,5%) berstatus lanjutan, sedangkan sisanya masih pada poktan berstatus pemula.

Kawasan peruntukan tanaman pangan yang telah tercantum pada pola ruang RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 tersebar di setiap kecamatan, dengan luasan \pm 15.812 Ha, dengan rincian 4.713 Ha berada di APL dan 11.099 Ha berada di Kawasan Hutan. Cetak sawah juga telah gencar dilakukan pada pembangunan periode tahun 2011-2015 yang berasal dari dana pemerintah pusat, sehingga luasan lahan untuk peruntukan tanaman pangan di kawasan APL telah banyak yang terpakai dan untuk ke depannya akan sulit untuk dilakukan pengembangan tanaman pangan di Kabupaten Bangka Barat.

Pengembangan perkebunan di Kabupaten Bangka Barat juga terkendala keterbatasan lahan. Perkebunan besar di Kabupaten Bangka Barat sampai dengan saat ini semuanya merupakan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh tujuh perusahaan dengan luasan \pm 45.352,23 Ha tersebar di lima kecamatan. Dengan telah ditetapkannya RTRW Kabupaten Bangka Barat tahun 2014-2034 pada tahun 2014, pola ruang juga telah ditetapkan, termasuk untuk peruntukan perkebunan besar. Kawasan peruntukan perkebunan besar seluas \pm 41.860 Ha dan tersebar di Kecamatan Muntok, Simpangteritip, Jebus, Kelapa dan Tempilang (seluruh kecamatan kecuali kecamatan Parittiga). Dari data yang dijabarkan, sudah tidak memungkinkan untuk dikembangkan perkebunan besar di tahun mendatang mengingat lahan untuk peruntukan perkebunan besar sudah tidak tersedia.

Di sisi lain, perkebunan merupakan salah satu sub sektor yang banyak digeluti oleh masyarakat sebagai mata pencaharian utama di Kabupaten Bangka Barat. Berdasarkan pola ruang yang terdapat dalam RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, kawasan peruntukan perkebunan rakyat tersebar di semua kecamatan dengan luasan \pm 79.785 Ha. Masyarakat di Kabupaten Bangka Barat masih terbiasa dengan penanaman kepemilikan sendiri, mulai dari penanaman sampai dengan panen dilakukan secara mandiri, belum terbiasa cara berkebun dengan pola kelompok. Dalam pola ruang kawasan peruntukan perkebunan rakyat, tidak dilakukan pengklasteran terhadap jenis perkebunan untuk mempermudah pengelolaan. Pembentukan poktan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan terhadap quota pupuk bersubsidi serta untuk kemudahan dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah, bukan benar-benar memanfaatkan poktan untuk pengelolaan perkebunan. Cara

pengelolaan perkebunan secara sendiri dengan tidak mengenal pengklasteran terhadap jenis perkebunan membuat peruntukan terhadap kawasan perkebunan rakyat dirasa belum optimal, baik dari sisi pembinaan, pembibitan tanaman, pemeliharaan tanaman, sampai panen dan pemasaran terhadap hasil panen.

Pencapaian dalam 5 tahun terakhir pada urusan pertanian terjadi *gap* antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang ada. Dari target produktifitas padi di tahun 2015 sebesar 3,16 Ton/Ha, baru terealisasi sebesar 2,28 Ton/Ha. Dari target produktifitas lada di tahun 2015 sebesar 1,5 Ton/Ha, baru terealisasi sebesar 1,39 Ton/Ha. Dari target produktifitas karet di tahun 2015 sebesar 4,2 Ton/Ha, baru terealisasi sebesar 1,2 Ton/Ha. Dari target produktifitas kelapa sawit di tahun 2015 sebesar 17 Ton/Ha, baru terealisasi sebesar 10,74 Ton/Ha.

Di subsektor perikanan, sebagian besar masyarakat di desa pesisir bermata pencaharian sebagai nelayan, namun profesi nelayan tersebut dijalankan jika usaha pertambangan masyarakat sedang lesu. Tentunya hasil yang didapat dengan profesi sebagai nelayan tradisional membuat masyarakat menjadikan profesi nelayan hanya sebagai profesi sampingan. Tingginya biaya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, tidak stabilnya harga jual terhadap hasil tangkapan nelayan, serta makin rendahnya kualitas laut di beberapa titik membuat semakin rendahnya minat masyarakat desa pesisir untuk memposisikan diri sebagai nelayan tetap.

4.1.1.3. Belum Berkembangnya Sektor Pariwisata Daerah

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial dikembangkan Kabupaten Bangka Barat di masa yang akan datang. Kabupaten Bangka Barat mempunyai potensi wisata alam dan wisata pertanian (agrowisata) yang tersebar di enam kecamatan. Selain itu, potensi wisata sejarah terdapat di Kecamatan Muntok.

Meskipun demikian, objek wisata yang telah dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan baik masih sangat minim dan masih terpusat di Kecamatan Muntok sebagai ibukota Kabupaten Bangka Barat. Objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan mempunyai penjaga hanya satu, yaitu Objek Wisata Wisma Menumbing. Objek wisata lainnya yang dikelola dengan baik beberapa diantaranya merupakan kepemilikan dari BUMN, yayasan, serta pribadi, akan tetapi objek wisata tersebut belum di sinergiskan dengan objek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Kabupaten Bangka Barat merupakan daerah pesisir terpanjang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari 60 desa yang ada di Kabupaten Bangka Barat, 34 desa termasuk

dalam kategori pada desa pesisir. Sebagian dari masyarakat di kawasan desa pesisir masih menggantungkan hidupnya sebagai nelayan dan pengolah produk perikanan walaupun masih secara tradisional. Pemberdayaan yang belum optimal oleh pemerintah daerah membuat perekonomian di kawasan pesisir terlihat stagnan. Potensi wilayah pesisir yang ada belum dipadukan dengan pengembangan destinasi wisata. Konsep desa wisata pesisir dengan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat sekitar belum dikembangkan. Belum adanya ketertarikan dari masyarakat serta belum optimalnya peran pemerintah daerah untuk mengembangkan konsep desa wisata pesisir sampai dengan saat ini menyebabkan potensi yang ada masih terbengkalai.

Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki banyak cagar budaya baik berupa benda, situs, maupun kawasan. Muntok yang merupakan Ibukota dari Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu kota pusaka (*heritage city*) tipe B di Indonesia dan termasuk anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI). Akan tetapi dari 54 cagar budaya (benda, situs, kawasan) yang ada di Kabupaten Bangka Barat, hanya lima cagar budaya yang merupakan kepemilikan Pemerintah Daerah, sehingga dalam perawatan dan pelestarian cagar budaya lainnya sulit untuk dikontrol, khususnya yang dimiliki oleh yayasan, umum, maupun individu (pribadi). Hanya beberapa kecil saja pelestarian cagar budaya yang sudah dirawat dan telah dipadukan dengan konsep pariwisata, sehingga terjadi kekhawatiran bahwa pelestarian cagar budaya lainnya akan terbengkalai. Belum adanya tim penilai benda cagar budaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga menjadi salah satu catatan tersendiri dimana hal tersebut akan menjadi kendala dalam pengimplementasian segala macam yang berhubungan dengan cagar budaya. Peraturan terkait benda, situs, serta kawasan cagar budaya, sampai dengan saat ini belum dimiliki oleh Kabupaten Bangka Barat.

Terlepas dari permasalahan-permasalahan pengelolaan pariwisata di atas, jumlah kunjungan wisatawan mengalami kecenderungan meningkat meski tidak stabil dan bersifat fluktuatif. Pengembangan destinasi wisata dan pengelolaan pariwisata merupakan hal yang mutlak diperhatikan dalam peningkatan kepariwisataan daerah.

4.1.1.4. Rendahnya Kualitas Infrastruktur

Infrastruktur berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dari hasil FGD di enam kecamatan, infrastruktur air bersih, jalan, penerangan jalan umum dan drainase dirasa masih kurang oleh masyarakat.

Cakupan pelayanan air bersih mengalami peningkatan dari sekitar 70,86 persen pada tahun 2010 menjadi 77,58 persen di tahun 2014. Meskipun demikian, jangkauan pelayanan PDAM baru terbatas di Kecamatan Muntok saja. Di kecamatan-kecamatan lainnya pernah ada proyek jaringan air bersih dari pemerintah pusat, namun hingga kini hanya sekedar saluran yang tidak mengalirkan air ke penduduk. Penduduk mengandalkan sumur-sumur pribadi yang mengering jika musim kemarau tiba. Pelayanan sumber air bersih leding/perpipaan (PDAM/BPSPAM) malah mengalami penurunan dari 3.087 KK pada tahun 2010 menjadi 2.213 KK pada tahun 2014.

Aksesibilitas merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh setiap daerah untuk mempermudah pergerakan baik manusia maupun barang. Semakin baik aksesibilitas suatu daerah maka dipastikan perekonomian pada daerah tersebut akan berjalan dengan baik, dan sebaliknya. Peningkatan aksesibilitas suatu daerah dapat diupayakan melalui peningkatan infrastruktur perhubungan. Di Kabupaten Bangka Barat yang baru berumur dua belas tahun, infrastruktur perhubungan yang ada dirasa masih belum memadai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah mendukung terciptanya kenyamanan, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Layanan bidang perhubungan yang baik juga mempunyai daya dorong dalam pembangunan kepariwisataan.

Walaupun cakupan jalan dengan kriteria baik di Kabupaten Bangka Barat terus mengalami peningkatan, tetapi masih terdapat infrastruktur jalan dengan kondisi yang rusak maupun rusak berat. Data terkait kondisi jalan di Kabupaten Bangka Barat, kriteria dengan kondisi rusak berat mengalami peningkatan 100 persen di tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Di sisi lain, ketersediaan jumlah pelabuhan laut dan terminal bis sebagai fasilitas bagi pergerakan barang dan orang masih terbilang sedikit dan kurang memadai. Hal ini setidaknya menggambarkan kondisi daerah yang kurang kondusif dalam penyediaan infrastruktur berinvestasi dan daya saing daerah. Sebagai pintu gerbang penghubung antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan koridor Sumatera merupakan suatu kekuatan tersendiri yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka Barat. Infrastruktur angkutan umum laut merupakan suatu hal yang sangat vital yang harus dimiliki. Akan tetapi sampai dengan saat ini, tipe pelabuhan laut yang ada di Kabupaten Bangka Barat masih rendah dan infrastruktur penunjangnya masih tergolong minim. Kapal-kapal besar masih belum bisa beroperasi di pelabuhan yang ada di Kabupaten Bangka Barat, sehingga arus pergerakan baik orang maupun barang masih sangat terbatas. Dengan semakin

berkembangnya perekonomian dan terjadi meningkatnya kebutuhan akan pasokan barang dari luar Pulau Bangka, membuat ketergantungan akan fasilitas angkutan umum pelabuhan di Kabupaten Bangka Barat semakin tinggi.

Saat ini, Kabupaten Bangka Barat memiliki 3 (tiga) pelabuhan laut, yaitu Pelabuhan Muntok, Pelabuhan Unit Metalurgi dan Pelabuhan Tanjung Kelian. Pelabuhan Muntok diperuntukkan sebagai pelabuhan bongkar muat barang dan ikan. Kondisi pelabuhan Muntok semakin kritis dikarenakan terjadinya sedimentasi/pengendapan tanah di daerah pesisir pelabuhan. Hal ini berdampak pada sulitnya kapal untuk mendekati ke daerah pantai. Kapal harus berhenti sekitar 50-100 meter dari pantai. Sedangkan untuk Pelabuhan Unit Metalurgi dikhususkan untuk keperluan bongkar muat PT Timah, Tbk saja. Pelabuhan Tanjung Kelian merupakan pelabuhan penumpang sekaligus pelabuhan barang karena sebagian besar barang masuk atau keluar dari Kabupaten Bangka Barat ke Pulau Sumatera melalui pelabuhan ini dengan menggunakan fasilitas kapal feri.

Untuk melayani transportasi antarkota dan di dalam kota, Kabupaten Bangka Barat memiliki tiga buah terminal, yang terletak di kecamatan Muntok, kecamatan Kelapa dan kecamatan Parittiga. Tipe terminal tertinggi yang dimiliki saat ini adalah tipe C yang terletak di Kecamatan Muntok. Rute bis via terminal yang ada saat ini belum melingkupi hingga ke seluruh pelosok daerah yang ada di Kabupaten Bangka Barat.

4.1.1.5. Belum Kondusifnya Iklim Investasi Daerah

Masuknya investasi merupakan harapan dari setiap pemerintah daerah guna meningkatkan perekonomian di daerah tersebut yang akan berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Walaupun Kabupaten Bangka Barat telah ditetapkan sebagai salah satu daerah Kawasan Perhatian Investasi (KPI), akan tetapi masih terdapat beberapa kendala yang harus segera di tanggulangi khususnya terkait infrastruktur penunjang seperti ketersediaan listrik dan pemenuhan air untuk kebutuhan industri serta terkait pelayanan perizinan tertentu yang belum memiliki kejelasan prosedur dikarenakan belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti izin lokasi, izin pemanfaatan ruang, dan izin prinsip penanaman modal.

Dari 15 investasi yang masuk ke Bangka Barat dari tahun 2009 sampai dengan 2014, hanya 13 PMA/PMDN yang dapat direalisasikan yang terdiri dari 2 PMA dan 11 PMDN yang sebagian besar bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.

Regulasi daerah merupakan sebuah kunci apakah suatu daerah sangat membuka diri terhadap investasi atau tidak. Pada regulasi daerah inilah dapat dilihat apakah pemerintah daerah memberikan kemudahan atau sebaliknya kepada para investor untuk berinvestasi di suatu wilayah. Sampai dengan saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat belum mempunyai peta potensi investasi tingkat Kabupaten untuk dipromosikan kepada para pelaku usaha untuk berinvestasi di Kabupaten Bangka Barat. Hal ini merupakan salah satu kendala sulitnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk berpromosi terkait potensi investasi pada level nasional maupun internasional. Penetapan regulasi daerah terkait pemberian fasilitas atau insentif di bidang penanaman modal sampai saat ini juga belum dimiliki, sehingga daya tawar Pemerintah Daerah kepada para pelaku usaha masih sangat rendah.

4.1.1.6. Belum Berkembangnya Kewirausahaan Mikro Daerah

Perkembangan usaha, khususnya pada usaha mikro di Kabupaten Bangka Barat cukup baik. Akan tetapi usaha yang dilakukan oleh masyarakat sampai dengan saat ini masih sebagai pekerjaan sampingan sehingga usaha yang dijalankan tidak optimal. Menurut hasil FGD di kecamatan, minat masyarakat, khususnya ibu rumah tangga untuk berwiraswasta cukup tinggi, namun menemui kendala akses permodalan, pembinaan dan pemasaran produk.

Hasil produk usaha sampai dengan saat ini masih beredar di lingkungan Kabupaten Bangka Barat saja atau beberapa kecamatan saja, sehingga konsumen dari produk tersebut sangat terbatas. Belum optimalnya pembinaan oleh pemerintah daerah merupakan salah satu penyebab sulitnya usaha mikro untuk berkembang. Hal tersebut terjadi karena masyarakat masih belum yakin jika menjadikan usaha mikro sebagai mata pencaharian utama dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Jumlah penduduk yang berkecimpung pada usaha mikro di Tahun 2015 sebanyak 22.006 jiwa atau 10% dari total penduduk Kabupaten Bangka Barat. Dari 9 (Sembilan) golongan pokok terkait usaha mikro, Kabupaten Bangka Barat memilikinya, namun ragam usaha yang paling banyak dilakukan oleh usaha mikro yaitu pada golongan pokok perkebunan dan perdagangan. Dari 22.006 jumlah penduduk yang berkecimpung pada usaha mikro baru 86 ragam usaha yang digeluti. Dilihat dari potensi dan keperluan yang ada, jumlah ragam usaha ini dianggap masih sangat minim dan akan ditingkatkan jumlah ragam usaha pada pelaksanaan pembangunan kedepan. Jika diukur nilai UMKM dan IKM terhadap PDRB di Kabupaten Bangka Barat tahun 2015 baru berkontribusi sebesar 8,88%, dan pencapaian ini dianggap masih rendah.

4.1.2. Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup dalam beberapa dekade ini selalu menjadi sorotan dunia karena kualitas lingkungan hidup setiap tahun dirasa semakin menurun, tidak terkecuali di Kabupaten Bangka Barat. Banyaknya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi secara berlebihan dan tidak menerapkan konsep pembangunan secara berkelanjutan serta minimnya pengawasan oleh pihak terkait merupakan penyebab semakin menurunnya kualitas lingkungan.

4.1.2.1. Ancaman Kerusakan Lingkungan pada Lahan Eks Tambang, Hutan dan Daerah Aliran Sungai

Lebih dari 40 persen luas daratan di Kabupaten Bangka Barat adalah kawasan hutan, yang terdiri dari hutan produksi, hutan lindung, serta hutan konservasi. Akan tetapi kecenderungan terhadap kerusakan hutan semakin meningkat setiap tahunnya baik kerusakan yang disebabkan secara alami maupun ulah manusia seperti kerusakan karena aktifitas pertambangan ilegal (*illegal mining*), perambahan hutan (*illegal logging*) serta pembukaan lahan dengan cara dibakar yang menyebabkan kebakaran hutan yang tidak terkontrol. Data di tahun 2013 dari BPDAS Cerucuk, kerusakan hutan di Kabupaten Bangka Barat diklasifikasi dengan klasifikasi potensial kritis sebesar 61,44 persen, klasifikasi agak kritis sebesar 29,87 persen, klasifikasi kritis sebesar 4,9 persen, serta klasifikasi sangat kritis sebesar 3,79 persen. Akan tetapi dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kehutanan tidak lagi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (kecuali pengelolaan Taman Hutan Rakyat) melainkan menjadi tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Kabupaten Bangka Barat memiliki 470 sungai dengan 87 Daerah Aliran Sungai (DAS). Meningkatkan daya dukung DAS dan mempertahankan kecukupan hutan minimal 30 persen dari luas DAS dengan sebaran secara proporsional merupakan ciri DAS dengan kriteria "SEHAT". Dalam pengelolaan DAS di Kabupaten Bangka Barat, sering kali tidak memperhatikan kelestarian ekosistem DAS sehingga pengaturan tata guna lahan DAS untuk berbagai aktifitas tidak berjalan secara berkelanjutan (*sustainable development*). Kekeliruan dalam pengelolaan DAS di Kabupaten Bangka Barat menyebabkan kualitas lingkungan DAS semakin memburuk seperti dengan menurunnya kualitas air serta debit air yang semakin berkurang.

4.1.2.2. Belum Optimalnya Pelayanan di Bidang Lingkungan Hidup

Salah satu tugas besar dari pelaksanaan urusan lingkungan hidup yang langsung berhubungan dengan masyarakat adalah terkait penanganan persampahan, yang sampai saat ini masih fokus pada Kecamatan Muntok sebagai Ibukota Kabupaten Bangka Barat. Kemampuan daerah untuk menangani persampahan belum maksimal karena keterbatasan sarana dan prasarana serta personil yang ada.

Pada tahun 2015, produksi sampah di Kecamatan Muntok sebesar 1.882.423,63 m³ dan volume sampah yang diangkut hanya 9.351 m³ saja, atau sekitar 4 persen. Hanya ada 1 unit Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Aktif dan 18 unit Tempat pembuangan sampah (TPS), didukung 144 orang personil pasukan kuning. Penambahan sarana prasarana oleh pemerintah daerah belum mengimbangi penambahan jumlah penduduk yang berimbas pada penambahan produksi sampah. Untuk fasilitas umum seperti pasar dan terminal di kecamatan-kecamatan lain sampai saat ini masih dikelola oleh pihak kecamatan, seperti di Kecamatan Kelapa, Kecamatan Jebus dan Kecamatan Parittiga.

Dari data diatas, dapat terlihat penanganan sampah yang ada di Kecamatan Muntok sebagai ibukota Kabupaten Bangka Barat masih sangat kecil, dengan pencapaian masih dibawah 4 persen dari estimasi produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.

Penanggulangan bencana, termasuk kebakaran, merupakan salah satu tugas dan fungsi pemerintah daerah. Akan tetapi sampai dengan saat ini pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat belum memiliki fasilitas pendukung penanggulangan kebakaran seperti pemadam kebakaran. Dalam penanganan penanggulangan kebakaran, saat ini pemerintah daerah bekerja sama dengan BUMN yang memiliki fasilitas pemadam kebakaran.

4.1.3. Permasalahan Bidang Sosial

4.1.3.1. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat, Khususnya di Bidang Pendidikan

Kualitas SDM berhubungan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang ada (permintaan pasar tenaga kerja). Kualitas tenaga kerja di suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk di suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Rata-rata dalam enam tahun terakhir, jumlah penduduk berdasarkan pendidikan tiga terbesar adalah penduduk tamatan SD (31,94 persen), tidak/belum sekolah (24,69 persen) dan tidak tamat SD (13,92 persen). Terlihat sangat jelas bahwa tingkat pendidikan

sebagian besar penduduk di Kabupaten Bangka Barat masih sangat minim. Sementara lulusan yang dianggap tinggi yaitu pada pendidikan Diploma I/II/III hanya sebesar 1,54 persen dan penduduk lulusan S1/S2/S3 hanya sebesar 1,57 persen. Hal ini diduga menjadi salah satu penyebab lemahnya daya saing daerah, tidak saja dari sisi permintaan tenaga kerja yang handal tetapi juga penerapan teknologi bagi peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, industri kecil, perdagangan dan jasa bahkan juga mempengaruhi lambannya upaya peningkatan kualitas/kesadaran kesehatan masyarakat.

Partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan SD di Kabupaten Bangka Barat tinggi, namun semakin tinggi jenjang pendidikan, angka partisipasi sekolah semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena siswa masih banyak yang lebih memilih untuk melanjutkan sekolah ke kota/daerah lain dan juga disebabkan karena kesadaran ataupun kemauan masyarakat untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi masih kurang. Secara rata-rata dalam lima tahun terakhir, rata-rata nilai APK untuk jenjang SD adalah 110,56 persen, rata-rata nilai APM jenjang SD adalah 93,50 persen, rata-rata nilai APK jenjang SMP adalah 84,48 persen, rata-rata nilai APM jenjang SMP adalah 62,86 persen, rata-rata nilai APK jenjang SMA adalah 66,78 persen dan rata-rata nilai APM jenjang SMA adalah 41 persen. Terjadi *gap* dan dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan di Kabupaten Bangka Barat semakin rendah minat anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu modal yang sangat penting untuk meningkatkan derajat hidup suatu masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan di suatu daerah menandakan tingginya derajat hidup masyarakat di daerah tersebut. Kebijakan untuk meluncurkan program pendidikan gratis pada tingkat dasar dan menengah dilakukan untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat. Perlengkapan sarana dan prasarana serta peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pengajar juga telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah Kabupaten Bangka Barat di tahun 2015 sebesar 7,43 tahun, dimana pencapaian ini masih dibawah rata-rata provinsi yaitu 7,79 tahun. Terdapat peningkatan terkait rata-rata lama sekolah masyarakat dalam lima tahun terakhir, akan tetapi peningkatannya belum terlalu signifikan. Apalagi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat menduduki peringkat ke-5 dari tujuh kabupaten/kota.

Untuk pencapaian angka harapan lama sekolah Kabupaten Bangka Barat di tahun 2015 sebesar 11,48 Tahun, dan pencapaian ini juga masih dibawah rata-rata provinsi yaitu

11,60 Tahun. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat peringkat ke-4 dari tujuh kabupaten/kota.

4.1.3.2. Rendahnya Kualitas Layanan Pendidikan

Rendahnya kualitas layanan pendidikan ditandai dengan minimnya sarana prasarana pendidikan dan minimnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik. Capaian dari beberapa indikator menunjukkan bahwa pemenuhan pelayanan umum bidang pendidikan belum optimal. Bangunan sekolah di Kabupaten Bangka Barat masih banyak yang dalam kondisi tidak baik. Data menunjukkan ruang kelas SD rusak ringan sebanyak 88,54 persen, rusak sedang sebanyak 3,8 persen, rusak berat sebanyak 5,13 persen. Secara keseluruhan, bangunan SD dengan kondisi baik hanya mencapai 2,53 persen.

Rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SD tahun 2015 adalah 1 : 19. Angka ini berarti seorang guru SD mengajar murid sebanyak 19 orang. Selama kurun waktu tahun 2011-2015 rasio ketersediaan guru di Kabupaten Bangka Barat untuk seluruh jenjang pendidikan dari SD, SMP, dan SMA cenderung tidak berubah signifikan. Hal tersebut dapat dipastikan karena penambahan jumlah guru juga berimbang dengan peningkatan jumlah murid pada jenjang tersebut.

4.1.3.3. Rendahnya Layanan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu modal yang sangat penting untuk meningkatkan derajat hidup suatu masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesehatan di suatu daerah menandakan baiknya derajat hidup masyarakat di daerah tersebut. Jumlah tenaga kesehatan dan non kesehatan dirasa masih kurang oleh masyarakat. Hal tersebut berpengaruh terhadap rendahnya layanan kesehatan di beberapa unit layanan kesehatan, dan tercermin dalam kualitas kesehatan masyarakat yang masih rendah. Masih terdapat kekurangan terkait fasilitas pendukung pada setiap tingkatan fasilitas kesehatan, mulai dari tingkat desa (Polindes dan Poskesdes), tingkat kecamatan (Puskesmas pembantu dan Puskesmas), maupun di tingkat kabupaten (Rumah Sakit) baik sarana prasarana kesehatan maupun tenaga medis dan non medis yang tersedia. Jarak yang jauh dari kecamatan ke rumah sakit yang berada di ibukota kabupaten menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan rumah sakit.

Jumlah kematian bayi usia 0-1 tahun di Kabupaten Bangka Barat berfluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2011 jumlah kematian bayi sebanyak 41 jiwa, sedangkan pada tahun 2012 meningkat menjadi 42 jiwa. Kondisi ini terus membaik dengan penurunan signifikan di tahun 2013 sebanyak 34 jiwa dan di tahun 2014 sebanyak 23 jiwa. Pada

tahun 2015 terjadi peningkatan kematian bayi dengan jumlah sebanyak 29 jiwa. Diantara beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat AKB adalah pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya. Hal ini disebabkan karena AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Faktor lainnya adalah perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang berkontribusi terhadap perbaikan gizi sehingga berdampak positif pada daya tahan bayi terhadap penyakit. Di sisi lain, terdapat faktor negatif yang juga mempengaruhi AKB, antara lain masih adanya persalinan yang ditangani oleh dukun beranak/dukun bayi, infeksi pada ibu hamil, gizi ibu dan bayi yang kurang baik, kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang kehamilan dan bayi baru lahir, serta sarana prasarana yang belum memadai khususnya alat kesehatan PONED.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk menjamin kesehatan seluruh lapisan masyarakat lewat program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESRA) telah dilaksanakan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan layanan kesehatan secara baik dan gratis. Dengan adanya program JAMKESRA diharapkan jumlah masyarakat yang sakit di Kabupaten Bangka Barat semakin menurun, dan secara luas akan berdampak pada meningkatnya angka harapan hidup masyarakat.

Variabel makro yang umum digunakan dalam melihat keberhasilan layanan kesehatan adalah angka harapan hidup. Dalam pencapaian angka harapan hidup masyarakat di Kabupaten Bangka Barat dalam 5 tahun terakhir terjadi *gap*, dari target yang ditetapkan di tahun 2015 sebesar 72 tahun, hanya terealisasi sebesar 69,47 tahun.

4.1.3.4. Ancaman Degradasi Moral, Termasuk Meningkatnya Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Salah satu permasalahan yang muncul dalam diskusi pada FGD di enam kecamatan di Kabupaten Bangka Barat adalah tentang ancaman degradasi moral yang perlu diantisipasi, diantaranya maraknya penggunaan narkoba, meningkatnya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pergaulan bebas di kalangan generasi muda yang menjadi salah satu penyebab kehamilan di luar nikah, pernikahan dini dan angka putus sekolah.

Perempuan dan anak sebagai kaum yang rentan sangat diprioritaskan untuk dilindungi oleh pemerintah. Berbagai lembaga khusus dibentuk sebagai pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Berbagai kegiatan berupa sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Meskipun demikian, dari data yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka Barat menunjukkan peningkatan kasus terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari data tiga tahun terakhir, dari 23 kasus yang terjadi di tahun 2012 terkait tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkat menjadi 45 kasus di tahun 2014. Kenaikan kasus yang hampir 100 persen ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat, dimana Kabupaten Bangka Barat menargetkan untuk menjadi Kabupaten Layak Anak yang akan memenuhi hak dan perlindungan anak.

4.1.3.5. Intervensi Program Pemerintah Daerah terkait Penanggulangan Kemiskinan yang Tidak Tepat Sasaran

Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Untuk mempermudah pengendalian terkait penanggulangan kemiskinan, provinsi serta kabupaten/kota diwajibkan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang diketuai langsung oleh Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diamanatkan melalui Perpres No. 15 tahun 2010. Tim ini merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku-pemangku kepentingan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di masing-masing tingkat daerah yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan pembangunan sangat minim program yang langsung difokuskan pada penanggulangan kemiskinan. Hanya Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial yang memfokuskan programnya untuk penanggulangan kemiskinan yang sebagian besar hanya melakukan penanggulangan kemiskinan untuk klaster pertama (pemenuhan kebutuhan dasar) yang secara teknis tidak dapat langsung mengeluarkan masyarakat dari kondisi kemiskinan yang dialami. Perangkat Daerah teknis lain yang berhubungan dengan perekonomian masyarakat yang sebagian besar merupakan urusan pilihan yang diemban pemerintah daerah sampai dengan saat ini seharusnya menerapkan program yang bersifat membina produktivitas masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.1.3.6. Masih Minimnya Kesadaran Masyarakat dalam Menciptakan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan Secara Swadaya

Secara kultur, masyarakat di Kabupaten Bangka Barat secara umum masih kurang dalam keswadayaan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di wilayahnya. Tidak semua pos keamanan lingkungan di lingkungan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat memiliki keaktifan yang solid. Hal ini tidak saja menjadi gambaran tentang kesadaran dan kebersamaan masyarakat yang rendah, tetapi juga sistem pengawasan yang rendah dari masyarakat terhadap ketertiban dan ketentraman juga memicu terjadinya tindak

kriminalitas. Beberapa kasus pencurian dan perampokan yang terjadi di Kecamatan Muntok misalnya, menunjukkan kekurangpedulian masyarakat akan pengamanan dan pengawasan ketertiban ketentraman masyarakat di lingkungan masing-masing, sehingga tidak saja menimbulkan rasa tidak aman bagi warga tetapi juga memunculkan stigma buruk bagi sebuah daerah.

4.1.3.7. Belum Optimalnya Pembinaan Kesenian dan Olah Raga

Kesenian sebagai bagian dari kebudayaan secara utuh harus dipandang sebagai sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Selain mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia, kesenian juga mempunyai fungsi lain, misalnya mitos berfungsi menentukan norma untuk perilaku yang teratur serta meneruskan adat dan nilai-nilai kebudayaan. Secara umum, kesenian dapat mempererat ikatan solidaritas suatu masyarakat.

Kabupaten Bangka Barat memiliki kekayaan keragaman seni budaya baik adat dan nilai-nilai kebudayaan maupun aktivitas kesenian yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Sejauh ini pengembangan seni dan budaya baru menyentuh fasilitasi bantuan kepada kelompok seni seperti sanggar tari, grup rudat, dan rebana serta fasilitasi perlombaan untuk mendorong motivasi pelaku seni semakin aktif dalam berkesenian. Masih perlu dilakukan penggalian serta perlindungan terkait seni dan budaya masyarakat untuk lebih dapat maksimal lagi. Kecenderungan seni budaya tradisi yang semakin termarginalkan dan kalah dari pola kreasi moderen, serta lemahnya minat generasi muda untuk terlibat dalam aktivitas seni budaya daerah harus dipandang sebagai permasalahan dalam aspek kesenian di daerah, sehingga seni dan budaya dapat tampil sebagai bentuk ekspresi rasa keindahan dari dalam jiwa bagi masyarakat Bangka Barat apalagi sebagai alat yang berfungsi sebagai norma untuk perilaku yang teratur, serta meneruskan adat dan nilai-nilai kebudayaan.

Aspek prestasi olahraga pun senada dengan aspek seni budaya. Olahraga seharusnya dipandang sebagai salah satu aktifitas masyarakat dalam perilaku hidup yang sehat. Perlombaan dan kompetisi yang difasilitasi oleh pemerintah harusnya hadir sebagai potret dari kebutuhan dan gaya hidup masyarakat. Prestasi olahraga daerah yang masih rendah seharusnya menjadi parameter bagi pemerintah bahwa pembangunan masyarakat dibidang olahraga juga menjadi bagian dari upaya pembangunan daerah ke depan.

4.1.4. Permasalahan Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Permasalahan di bidang tata kelola pemerintahan masih menjadi permasalahan yang krusial di Kabupaten Bangka Barat. Hal ini tergambar dalam beberapa potret pengelolaan pemerintahan yang belum baik, misalnya pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), perencanaan pembangunan daerah, keluhan masyarakat akan pelayanan umum, kualitas aparatur dan kemampuan keuangan daerah yang masih belum optimal.

4.1.4.1. Belum Memadainya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah

Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Idealnya semakin besar kuantitas maupun kualitas ASN yang dimiliki maka semakin besar pula pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Pegawai ASN terdiri dari: (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan (2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. PPPK merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan undang-undang yang berlaku. Manajemen ASN meliputi manajemen PNS dan manajemen PPPK.

Kewajiban dan peran pegawai ASN telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor. 5 tahun 2014, tidak ada perbedaan kewajiban dan peran antara pegawai yang berstatus PNS dengan PPPK. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, ada perbedaan dari sisi hak antara pegawai ASN berstatus PNS dengan PPPK. Hak PNS, meliputi: (1) gaji, tunjangan, dan fasilitas; (2) cuti; (3) jaminan pensiun dan jaminan hari tua; (4) perlindungan; dan (5) pengembangan kompetensi. Hak PPPK, meliputi: (1) gaji dan tunjangan; (2) cuti; (3) perlindungan; dan (4) pengembangan kompetensi.

Selama kurun lima tahun terakhir, jumlah ASN Bangka Barat cenderung meningkat baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Tercatat pada tahun 2015, jumlah ASN Bangka Barat adalah 3.196 orang, dengan komposisi 1.395 laki-laki dan 1.801 perempuan. Dari sisi kualitas, 48,37 persen dengan kualifikasi pendidikan diatas Diploma (S1 dan S2). Jumlah

diatas, pun dirasakan masih belum mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Secara ideal, kebutuhan ASN Kabupaten Bangka Barat berjumlah 5.100 orang, serta masih membutuhkan peningkatan kompetensi baik secara basis keilmuan dan pembekalan teknis aparatur. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bangka Barat dalam Angka tahun 2015, jumlah pegawai ASN yang berstatus PNS dan CPNS adalah 3.137 orang, sedangkan data jumlah pegawai ASN yang berstatus PPPK tidak tersedia karena hingga saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat belum menerapkan rekrutmen pegawai ASN berstatus PPPK. Aparatur pemerintah non PNS yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bangka Barat saat ini berstatus Pekerja Harian Lepas (PHL) atau sebelumnya dinamakan pegawai honorer. Belum siapnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam menerapkan proses rekrutmen PPPK sesuai UU No. 5 tahun 2014 dikarenakan belum fahamnya aparatur mengenai konsep PPPK (lemahnya kapasitas aparatur).

Seringnya terjadi perubahan peraturan yang berdampak juga pada perubahan sistem terkait pelaksanaan kinerja pemerintah daerah menjadikan peningkatan kapasitas aparatur di lingkungan pemerintah daerah, baik PNS maupun PPPK, merupakan hal yang sangat penting. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparatur sampai dengan saat ini masih sangat minim, baik dari sisi jenis maupun kapasitas jika dibandingkan dengan jumlah aparatur. Untuk pemenuhan kompetensi, sering kali aparatur mencari pendidikan dan pelatihan di luar lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat karena keterbatasan jenis pendidikan dan pelatihan yang diadakan di setiap tahunnya. Hal tersebut berdampak seringkali pemerintah daerah terlambat merespon terhadap perubahan yang terjadi, sehingga berdampak pada kinerja pemerintah daerah.

4.1.4.2. Kurangnya Kemampuan Administrasi Pelayanan Umum Pemerintah Daerah

Pada tahun 2015, penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Bangka Barat tahun 2014 mendapat predikat CC (cukup/memadai) dengan nilai 57,58. Nilai tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil penilaian SAKIP tahun 2013 dengan nilai 55,89. Perbaikan dan peningkatan kinerja terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir setidaknya terdapat 15 SPM yang seharusnya dilaksanakan di daerah. Dari hasil evaluasi pelaksanaan SPM di Kabupaten Bangka Barat sampai dengan tahun 2015, masih banyak target SPM yang belum bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan. Permasalahan dan kendala dalam penerapan pelaksanaan SPM ini

umumnya disebabkan oleh keterbatasan kemampuan daerah baik dari sisi pendanaan dan sumber daya aparatur misalnya di pemenuhan SPM bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, kesenian, dan lain-lainnya.

4.1.4.3. Kurang Matangnya Perencanaan Program Pemerintah Daerah

Sebuah proses perencanaan pembangunan idealnya memiliki dukungan data statistik daerah yang handal untuk mendukung perencanaan yang handal dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi daerah. Sampai dengan tahun 2015, sumber data perencanaan daerah di Kabupaten Bangka Barat masih bersumber dari data statistik yang di publish oleh BPS Bangka Barat serta Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dikelola oleh Bappeda Bangka Barat. SIPD sebagai sumber data utama di Bappeda hanya mampu menyajikan 1.050 data dari 2.124 slot data yang ada atau hanya 49,44 persen. Hal ini menyiratkan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah tidak meletakkan diri kepada dukungan data valid dan akurat dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan.

Beberapa contoh kurang matangnya perencanaan program pemerintah daerah yang ditemui diantaranya adalah penyiapan lokasi program cetak sawah yang kurang perencanaan irigrasi dan drainase, sehingga petani sempat mengalami gagal panen karena padi kekeringan di musim kemarau dan terendam di musim hujan; sistem ternak sapi yang mengadopsi sistem peternakan di Jawa yang dilakukan secara berkelompok, sementara kultur masyarakat di Kabupaten Bangka Barat berbeda; kegiatan seperti Karang Taruna, PKK dan KB dibentuk di lingkungan kelurahan/kecamatan namun kurang mendapatkan pembinaan dari dinas/badan terkait; pengadaan obat dan alat kesehatan yang dilakukan tanpa meminta pertimbangan tenaga kesehatan di masing-masing unit kesehatan; bantuan peralatan pendukung UKM/IKM yang kurang sesuai spesifikasi yang diperlukan dan bantuan bibit/benih atau pupuk yang tidak disertai dengan pendampingan lebih lanjut.

4.1.4.4. Tumpang Tindihnya Pemanfaatan Lahan Kabupaten

Tumpang tindih pemanfaatan lahan terjadi pada kawasan hutan yang memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan usaha pertambangan rakyat. Secara sudut pandang hukum, usaha masyarakat ini ilegal, namun kepala desa di beberapa kecamatan mengusulkan agar pemerintah daerah dapat mengakomodasi usaha rakyat menjadi "legal" ini dengan cara mengusulkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Tumpang tindih batas pemanfaatan lahan juga terjadi di perbatasan Kabupaten Bangka Barat secara langsung dengan Kabupaten Bangka, yang merupakan kabupaten induknya sebelum pemekaran. Sampai dengan saat ini, masih terjadi permasalahan terkait batas wilayah antara Kabupaten Bangka Barat dengan Kabupaten Bangka seperti pada perbatasan wilayah Desa Buyan Kelumbi dengan Desa Kota Waringin. Jika tidak segera mendapat perhatian serius dari berbagai pihak yang berkompeten di bidangnya, tidak menutup kemungkinan permasalahan perbatasan ini menjadi hal serius yang dapat menciptakan keresahan bagi masyarakat.

Permasalahan pemanfaatan lahan di wilayah perbatasan tidak saja terfokus kepada penggunaan lahan eksisting saja, tetapi seharusnya juga memperhatikan konsep pengembangan wilayah di daerah yang berbatasan dengan kabupaten lain. Setidaknya terdapat tiga wilayah yang harus mendapat perhatian serius terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan antar daerah. Pertama, wilayah Teluk Kelabat. Wilayah ini merupakan daerah yang strategis untuk dikembangkan sebagai daerah pengembangan objek wisata dan potensi perikanan baik tangkap maupun budidaya. Sesuai dengan rencana pengembangan Kabupaten Bangka, wilayah Teluk Kelabat akan dikembangkan menjadi daerah industri bahari dengan fokus pada pengembangan Pelabuhan Tanjung Gudang. Isu ini seharusnya menjadi hal yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan sinergisitas yang saling menguntungkan bagi Kabupaten Bangka Barat. Kedua adalah wilayah perbatasan antara Kecamatan Tempilang dengan Kota Waringin dan Kota Kapur. Konsep pengembangan Kabupaten Bangka lebih menitikberatkan pada minapolitan untuk wilayah pesisir dan laut sedangkan wilayah darat akan difokuskan kepada pengembangan perkebunan. Ketiga; wilayah laut Kabupaten Bangka Barat dengan Sumatera, khususnya laut sebelah barat pulau Bangka dengan Kabupaten Banyuasin. Letak strategis ini memungkinkan dibangun sebuah kerjasama terkait dengan hubungan perdagangan serta pembangunan industri lintas kawasan yang saling menguntungkan.

4.1.4.5. Dibatasinya Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Daerah sebagai Konsekuensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) membagi kewenangan bidang urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sejumlah kewenangan yang semula dimiliki pemerintah daerah kini ditarik ke pemerintah pusat atau pemerintah provinsi sejak Undang-Undang tersebut diberlakukan, diantaranya kewenangan ketenagalistrikan, pendidikan menengah, kehutanan kecuali tanaman hutan rakyat (tahura), kelautan, dan sebagainya. Ditariknya

kewenangan-kewenangan pengelolaan tersebut membatasi pemerintah daerah untuk membangun daerahnya secara leluasa, terlepas dari pemerintah daerahlah yang paling memahami kondisi di lapangan dan daerahlah yang paling terkena dampak negatif maupun positifnya.

4.1.4.6. Keterbatasan Kemampuan Keuangan Daerah

Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dengan mengukur kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Perkembangan DOFD Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2007-2015 memiliki rata-rata 5,91 persen. Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan keuangan daerah masih sangat rendah untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan masih sangat bergantung kepada transfer dana pusat.

Keterbatasan kemampuan keuangan daerah tersebut jelas berpengaruh kepada kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan bagi masyarakat. Di tengah kebutuhan masyarakat akan pelayanan di berbagai bidang, seharusnya juga menjadi perhatian pemerintah daerah untuk semakin meningkatkan kemampuan keuangan daerah dengan upaya peningkatan PAD dengan melihat potensi-potensi pendapatan di berbagai sektor.

Dalam pelaksanaan 5 tahun terakhir belanja pemerintah Kabupaten Bangka Barat 70 persen digunakan untuk belanja operasi yang didominasi pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial, 27 persen untuk belanja modal, 2,6 persen untuk belanja transfer, serta 0,3 persen untuk belanja tidak terduga. Proporsi ini dilihat kurang memperhatikan kualitas dari belanja daerah dan dapat diperhatikan lebih lanjut untuk perencanaan penganggaran pada pelaksanaan pembangunan kedepan.

4.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah:

- 1) Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kabupaten Bangka Barat.

- 2) Isu strategis dari Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya yang mempengaruhi Kabupaten Bangka Barat
- 3) Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri dari :
 - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Barat 2005-2025.
 - Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, ekonomi, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini, serta kemungkinan kondisinya di masa datang.
 - Sasaran-sasaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi pada masa RPJMD sebelumnya.

Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam RPJMD ini ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria berikut ini:

- 1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
- 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- 3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
- 4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
- 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
- 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

4.2.1 Isu Strategis Internasional

a. Sustainability Development Goals

Sustainability Development Goals (SDGs) merupakan sebuah usaha bersama dalam rangka pencapaian cita-cita pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Program ini merupakan kelanjutan dan perbaikan dari program sebelumnya yaitu Milenium Development Goals (MDGs) dengan penyesuaian yang selaras dengan dinamika yang terjadi. SDGs mencakup skala universal dengan kerangka kerja (*framework*) yang utuh dalam membantu negara-negara di dunia menuju pembangunan berkelanjutan, melalui tiga pendekatan, yakni pembangunan ekonomi (*economic development*), pembangunan manusia (*human development*), serta keberlangsungan lingkungan hidup (*environment development*).

Agenda SDGs bisa diterima dan diaplikasikan (*applicable*) oleh setiap bangsa, dengan tetap memperhitungkan keunikan masing-masing wilayah, misalnya kondisi riil, kapasitas dan tingkat pembangunan bangsa tersebut, serta skala prioritas dan kondisi

politik didalamnya. SDGs dibuat berdasarkan moment dan keberhasilan MGDs, yang masa berlakunya dari tahun 2015 - 2030. SDGs berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang telah disepakati oleh lebih dari 190 negara. Uraian dari 17 tujuan SDGs dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan;
- 3) Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia;
- 4) Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
- 5) Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan;
- 6) Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;
- 7) Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang;
- 8) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;
- 9) Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi;
- 10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara;
- 11) Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan;
- 12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- 13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, memperbaiki, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;

- 16) Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan;
- 17) Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

17 tujuan dengan 169 sasaran pembangunan dari SDGs diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan), dan negara-negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi, dan ketersediaan air minum).

Keberhasilan SDGs tidak dapat dilepaskan dari peranan penting pemerintah daerah, karena merupakan tingkat pemerintahan yang berada lebih dekat dengan masyarakat; memiliki wewenang dan anggaran; dapat melakukan berbagai inovasi; serta ujung tombak penyedia layanan publik dan berbagai kebijakan serta program pemerintah.

Prinsip penjabaran konkrit pelaksanaan SDGs yaitu: (1) SDGs tidak melemahkan komitmen internasional terhadap pencapaian MDGs, namun lebih pada memperbarui dan melanjutkan komitmen MDGs yang masih belum selesai, dengan penyesuaian selaras dengan dinamika yang terjadi; (2) SDGs akan dilaksanakan berdasarkan Agenda 21, *Johannesburg Plan of Implementation* dan *Rio Principles*, serta mempertimbangkan perbedaan kondisi, kapasitas dan prioritas nasional; (3) SDGs akan difokuskan pada pencapaian tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi pembangunan manusia (*human development*), dimensi ekonomi (*economic development*) dan dimensi lingkungan (*environment development*).

b. Masyarakat Ekonomi Asean

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi regional yang bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang mana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. Keterlibatan semua pihak di seluruh negara anggota ASEAN mutlak diperlukan agar dapat mewujudkan ASEAN sebagai kawasan yang kompetitif bagi kegiatan investasi dan perdagangan bebas yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat bagi seluruh negara ASEAN.

Munculnya MEA bermula dari langkah menuju integrasi yang lebih dalam terkait Visi ASEAN 2020 yang merencanakan untuk mewujudkan masyarakat ASEAN. Pelaksanaan MEA yang semula ditargetkan ditahun 2020 disepakati untuk dipercepat pelaksanaannya ditahun 2015.

MEA merupakan inisiatif negara negara ASEAN untuk mewujudkan ASEAN menjadi kawasan perekonomian yang solid dan diperhitungkan dalam percaturan perekonomian internasional. Para pemimpin ASEAN telah sepakat untuk mewujudkan MEA tahun 2015 dengan 4 (empat) pilar, yaitu (1) pasar tunggal dan berbasis produksi, (2) kawasan ekonomi berdaya siang tinggi, (3) kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara, dan (4) kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

Sebagai salah satu negara ASEAN yang memiliki pasar yang sangat luas, tentu Indonesia menempati posisi strategis bagi para produsen. Di samping itu, Indonesia juga masih mengandalkan *resource abundant* dan ketergantungan pada sumber daya alam, serta pada sektor industri, Indonesia masih sangat tergantung pada *labour intensive*.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

a. RPJMN Tahun 2014-2019

Dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 memperhatikan RPJMN Tahun 2014-2019 dimana dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Visi yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2014-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong", dengan misi pembangunan :

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;

- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa;
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sembilan Agenda Prioritas yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat menjadi arahan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 sesuai dengan karakteristik dan kemampuan daerah untuk pembangunan lima tahun ke depan.

Dalam pelaksanaan kegiatan strategis yang termuat dalam Buku III RPJMN Tahun 2014 – 2019 yang berlokasi di Pulau Bangka yang dapat dijadikan sebagai peluang dalam pembangunan ke depan, antara lain :

- 1) Pengembangan Bandara Depati Amir, Pengembangan Pelabuhan Samudera Tj. Berikat - Bangka Tengah, **Pengembangan Pelabuhan Muntok - Pelabuhan Tanjung Berikat**, Pengembangan Pelabuhan Tanjung Gudang, Pengembangan Pelabuhan Pangkal Sadai, Pengembangan Pelabuhan Balam, **Pengembangan**

Pelabuhan Tanjung Ular, Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian.

- 2) Pengembangan jalan nasional antara lain **Pembangunan Jalan Tanjung Gudang – Paritiga – Jebus - Ibul, Pembangunan Jembatan Teluk Belinyu, Pembangunan Jalan Tanjung Kelian – Petaling – Pangkalpinang,** Pembangunan Jalan Petaling - Namang – Toboali, dan Pembangunan Jalan Koba - Lubuk Besar - Tanjung Berikat.
- 3) Pengembangan ASDP antara lain Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Lepar, **Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tanjung Ru,** Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Liat.
- 4) Terkait ketenagalistrikan yaitu PLTG/MG Bangka Peaker 100 MW serta PLTG/MG Mobile PP Bangka (Air Anyir) 50 MW, serta akan dilakukan pembangunan serat optik untuk memperlancar pertelekomunikasian.
- 5) Terkait penelitian dan pengembangan, akan dilakukan **Pengembangan Institusi Riset yang fokus pada Pengelolaan Logam Tanah Jarang,** Pengembangan Technopark berbasis Lada di Air Gegas, Bangka Selatan serta **Pengembangan Technopark berbasis Bahan Tambang di Muntok, Bangka Barat.**

b. Pelaksanaan Peraturan Perundangan

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Regulasi yang mengatur tentang pemerintahan daerah ini merubah persepsi tentang pemerintahan daerah yang lama (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Secara signifikan, perubahan kewenangan daerah seperti kewenangan di bidang energi dan mineral, pengawasan ketenagakerjaan, kehutanan, dan pendidikan menengah, menjadi perhatian daerah dalam melaksanakan kewenangan di daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengatur terkait Standar pelayanan Minimal untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat yang diletakkan pada urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar. Ketika Daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai Urusan Pemerintahan dan khususnya Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai. Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan

rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Desa memasuki era baru sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan turunannya. Fokus dan peran pembangunan skala desa setidaknya menumbuhkan harapan bagi kemajuan desa dari sisi penyediaan infrastruktur, pemberdayaan serta percepatan pertumbuhan ekonomi di desa. Sinergisitas pembangunan pada tiap tingkatan kewenangan menjadi penting, khususnya pada tingkat desa dan kabupaten untuk kemandirian perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan ditetapkan pengaturannya desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu:

- Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI;
- Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
- Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisiensi dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 merupakan jawaban bagi kedudukan dan pola kinerja pegawai birokrasi baik yang berada pada Pemerintah Pusat hingga di daerah. Penerapan ASN diharapkan dapat menjadikan birokrasi yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih, dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintah, dan tugas pembangunan tertentu, pegawai ASN harus memiliki profesi dan manajemen ASN yang berdasarkan pada sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

4.2.3 Isu Strategis Regional

Arah Pengembangan Wilayah Sumatera

Perekonomian wilayah sumatera ditopang oleh beberapa sektor utama, yaitu pertanian, perkebunan, pertambangan dan penggalian, serta industri pengolahan. Berdasarkan potensi dan keunggulan wilayah sumatera, maka tema besar pembangunan wilayah sumatera adalah sebagai :

- Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional;
- Lumbung energi nasional termasuk pengembangan energi terbarukan biomas;
- Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara;
- Industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin;
- Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan.

Kebijakan pembangunan kawasan strategis bidang ekonomi di wilayah sumatera diarahkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi

dengan orientasi daya saing nasional dan internasional berbasis produksi dan pengolahan hasil bumi serta menjadi lumbung energi nasional.

Persebaran kawasan strategis berada di beberapa provinsi, meliputi : Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri Sei Mangkei, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, Kawasan Industri Langsa, rencana pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara, Kawasan Industri Tanggamus di Provinsi Lampung, pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

4.2.4 Isu Strategis Tingkat Provinsi

Isu strategis tingkat provinsi yang dirasa akan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan Potensi Ekonomi Daerah Dan Sumber Daya Alam Yang Belum Optimal

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut diatas adalah kawasan strategis dan cepat tumbuh (*growth zone*) belum berkembang, '*development disparity among regions*' masih ada, belum optimalnya perkembangan ekonomi kerakyatan, pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal, tingkat inflasi daerah yang masih tinggi, terhambatnya optimalisasi sektor pariwisata, rendahnya tingkat ketahanan pangan dan pengembangan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil belum optimal.

b. Kualitas Lingkungan Hidup Yang Masih Rendah

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis ini adalah kegiatan reklamasi, rehabilitasi dan pemanfaatan lahan bekas tambang yang belum optimal, tingkat kerusakan lingkungan darat maupun laut yang masih tinggi dan pemanfaatan ruang yang belum mantap.

c. Belum Memadainya Ketersediaan Sarana Dan Prasarana

Isu strategis ini dipengaruhi oleh rendahnya pelayanan ketersediaan air minum, masih rendahnya sanitasi dan penyehatan lingkungan, belum optimalnya konektivitas inter dan intra wilayah, rasio elektrifikasi yang masih rendah dan masih terbatasnya ketersediaan perumahan rakyat.

d. Belum Mantapnya Kualitas SDM Dan Kependudukan

Adapun faktor yang mempengaruhi adalah laju pertumbuhan IPM masih lamban, tingkat migrasi penduduk yang masih tinggi, desa masih menempati peringkat teratas penyumbang kemiskinan, pengangguran masih ada, peran serta pemuda dalam pembangunan masih rendah, peningkatan jumlah pengidap HIV/AIDS, gender dalam pelaksanaan pembangunan belum responsif dan belum optimalnya pengelolaan kawasan transmigrasi.

e. Belum Mantapnya Kondisi Pemerintahan dan Politik

Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah kompetensi aparatur masih rendah, pelayanan publik belum optimal, rendahnya kapasitas keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan, peran Gubernur selaku wakil pemerintah pusat belum optimal dan tumpang tindih kepemilikan lahan masih sering terjadi.

f. Sosial Budaya

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masih ada, tingkat kriminalitas menunjukkan tren yang semakin meningkat, belum optimalnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular; pengembangan seni budaya lokal belum optimal dan penanggulangan bencana yang belum optimal.

4.2.5 Isu Strategis Kabupaten Sekitar

a. RPJMD Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018

Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu kabupaten yang berdekatan dengan Kabupaten Bangka Barat yang dipisahkan oleh Selat Bangka. Kabupaten Banyuasin memiliki beberapa rencana pengembangan kawasan strategis bagi pertumbuhan ekonomi, antara lain :

- 1) Kawasan pendukung Perkotaan Metropolitan Palembang, yang meliputi Kota Terpadu Mandiri (KTM) Telang, Kawasan Perdagangan Betung, Kawasan Pusat pemerintahan Pangkalan Balai, serta kawasan pusat permukiman perkotaan;
- 2) Kawasan Strategi Pertanian, yang meliputi Kawasan Argopolitan, Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan, serta kawasan Sentra Produksi Beras Pertanian Pasang Surut;
- 3) Kawasan Sentra Pertambangan dan Migas;

- 4) Kawasan Strategi Ekonomi Khusus Tanjung Api – Api;
- 5) Kawasan Strategi Industri; serta
- 6) Kawasan Minapolitan.

Dari beberapa kawasan strategi yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuasin, beberapa target pembangunan yang akan dilakukan antara lain :

- i. Pengembangan Kawasan Industri Gasing (5.000 Ha);
- ii. Pengembangan Pusat Docking – Gudang Mariana (200 Ha);
- iii. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api – Api (600 Ha);
- iv. Optimalisasi KTM Telang – Tanjung Lago (90.000 Ha);
- v. Industri Hilir Padi dan Jagung.

Dalam perencanaan yang dibuat oleh Kabupaten Banyuasin, masih banyak pembangunan-pembangunan yang akan dilaksanakan dalam rentang waktu 2014 – 2018 guna meningkatkan perekonomian diwilayahnya.

b. RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2014-2018

Kabupaten Bangka berbatasan dengan wilayah Timur Kabupaten Bangka Barat. Dari dimensi perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatian bagi perencanaan pembangunan lima tahun kedepan terkait wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bangka yakni: (1) pengembangan wilayah Teluk Kelabat. Kabupaten Bangka menetapkan wilayah Teluk Kelabat sebagai wilayah industri berbasis maritim dimana Pelabuhan Tanjung Gudang sebagai pelabuhan utama bagi pemasaran produk industrinya. Secara makro, bahkan pemerintah pusat juga sudah merencanakan dibangun jembatan yang menghubungkan antara Tanjung Gudang dengan Tanjung Ru (Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat) sebagai konektivitas antar wilayah; (2) masalah wilayah perbatasan yang belum selesai antara Desa Sangku Kabupaten Bangka Barat dengan Desa Kota Waringin Kabupaten Bangka yang seharusnya mampu ditengahi oleh Pemerintah Provinsi sehingga tidak berlarut-larut dan menimbulkan konflik di masyarakat; (3) konsep pengembangan minapolitan di Kota Kapur Kabupaten Bangka dan pengembangan pariwisata dan perikanan di kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat.

4.2.6 Isu Strategis Kabupaten Bangka Barat

Berdasarkan hasil analisis terkait permasalahan pembangunan yang belum terselesaikan, serta dengan mempertimbangkan isu strategis pada tingkatan internasional, nasional, regional (sumatera), provinsi, serta kabupaten sekitar, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kabupaten Bangka Barat. Isu strategis Kabupaten Bangka Barat yang sangat terkait dengan visi, misi dan program pembangunan Kabupaten Bangka Barat diuraikan sebagai berikut :

a. Optimalisasi Pembangunan Daerah pada Kewenangan yang Dimiliki

Beberapa peraturan perundangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah ke depan, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN. Ketiga perundangan tersebut memiliki intervensi dan memberikan peluang bagi Kabupaten Bangka Barat untuk semakin meningkatkan kinerja birokrasi dalam membangun daerah.

Perbaikan tata kelola dan perbaikan kualitas pelayanan pemerintahan perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kompetensi ASN, serta sinergi pembangunan antar wilayah. Hanya saja sampai saat ini masih terkendala dengan peraturan teknis yang mengatur tentang pelaksanaan regulasi diatas. Ketiga regulasi diatas mengharuskan pemerintah daerah segera tanggap untuk menyesuaikan diri dengan pola yang diatur oleh regulasi tersebut baik terkait dengan pengaturan baru tentang pemerintahan daerah, cara mengelola desa dan tatanan birokrasi.

b. Peningkatan Kontribusi Sektor Ekonomi di Luar Hasil Tambang dan Olahannya

Sektor industri pengolahan (logam timah) dan sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB (ADHB) secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir. Sektor industri pengolahan mengalami penurunan kontribusi dari 51,26 persen pada tahun 2010 menjadi 44,71 persen pada tahun 2014, sementara Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan kontribusi dari 15,42 persen pada tahun 2010 menjadi 12,59 persen pada tahun 2014. Penurunan kontribusi ini diantaranya disebabkan cadangan yang semakin menipis di alam dan harga komoditas yang turun di level internasional.

Hasil tambang dan pengolahannya, termasuk industri pengolahan logam berat khususnya timah, telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan dan perekonomian masyarakat di Bangka Barat. Bangka Tin Winning Bedrijft (BTW), cikal bakal PT. Timah Tbk, sudah berdiri sejak zaman kolonial. Disadari penuh bahwa perekonomian Kabupaten Bangka Barat tidak mungkin selamanya mengandalkan aktivitas pertambangan yang merupakan *unrenewable resources*.

Dampak-dampak yang muncul dari penurunan aktivitas pertambangan ini patut diantisipasi. Dampak yang berpeluang muncul bersifat multi dimensi. Secara ekonomi, masyarakat yang selama ini bergelut di bidang pertambangan yang jumlahnya tidak sedikit akan kehilangan sumber pendapatannya. Hal ini berpeluang membuat efek domino pada kurangnya kesejahteraan masyarakat yang dapat berimbas pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok, akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan, merubah struktur sosial masyarakat, dan lain-lain, bahkan dapat memicu tindak kriminalitas. Secara lingkungan, pemerintah daerah akan dihadapkan pada urgensi mereklamasi kawasan eks tambang agar dapat memberikan manfaat dan menghindarkan dari bahaya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Penting untuk mengeksplorasi sektor-sektor lain yang dapat menjadi unggulan di masa mendatang. Sektor ekonomi yang memiliki tren peningkatan kontribusi cukup tinggi selama lima tahun terakhir adalah: sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor konstruksi.

Kebijakan Kabupaten Bangka Barat lima tahun ke depan perlu mengakomodasi isu strategis ini agar ekonomi, sosial dan lingkungan hidup daerah dapat relatif stabil pasca tambang.

c. Pengembangan Komoditas Unggulan yang Sesuai dengan Potensi Sumber Daya Alam Daerah

Mengamati pertumbuhan kontribusi sektor perekonomian terhadap PDRB (ADHB) dalam lima tahun terakhir, terlihat bahwa salah satu sektor yang mengalami kenaikan kontribusi adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dari 11,85 persen pada tahun 2010 menjadi 14,05 persen pada tahun 2014. Di samping itu, diantara sektor industri pengolahan, subsektor yang tumbuh adalah subsektor industri makanan dan minuman. Kedua hal ini sejalan. Perlu dikembangkan komoditas unggulan yang sesuai potensi sumber daya alam, sekaligus berpeluang

untuk industri pengolahan, termasuk industri makanan dan minuman lewat pengembangan UKM/IKM daerah. Komoditas pertanian, peternakan atau perikanan yang berpotensi menjadi komoditas unggulan diantaranya karet, lada, kelapa sawit.

d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat

Manusia adalah aset utama suatu daerah. Dengan kondisi kualitas masyarakat sekarang yang masih rendah dari sisi kualitas kesehatan maupun pendidikan. Kabupaten Bangka Barat akan sulit sejahtera dan bersaing dengan daerah lain. Pendidikan dan kesehatan merupakan dua modal yang sangat penting untuk meningkatkan derajat hidup suatu masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan kesehatan di suatu daerah, maka menandakan tingginya derajat hidup masyarakat di daerah tersebut.

e. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Kerusakan kualitas lingkungan hidup, terutama di lahan eks tambang, kawasan hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) perlu diantisipasi. Disamping itu, isu perubahan iklim dunia sudah menjadi pemahaman global untuk juga disikapi secara bijak oleh pemerintah daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, pengaruh perubahan iklim sudah dirasakan pengaruhnya di daerah. Pemanasan global secara signifikan berpengaruh kepada sumber air baku, produktivitas pertanian dan perkebunan, dan dalam dua tahun terakhir ini pencemaran udara yang diakibatkan oleh kebakaran hutan baik yang terjadi di wilayah pulau Bangka maupun yang terjadi di pulau Sumatera mengakibatkan permasalahan serius dalam hal kesehatan masyarakat maupun sisi kehidupan lainnya.

4.3 Isu Strategis terkait Kewilayahan

Isu-isu strategis kewilayahan di Bangka Barat terkait dengan arah pengembangan kawasan, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kawasan strategis Provinsi :

- 1) Kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular (Kec. Muntok).
- 2) Kepentingan sosial budaya yaitu Kawasan Konservasi Budaya "Muntok Lama" Kecamatan Muntok.
- 3) Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan yaitu Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Gunung Menumbing dan Jering

Mendukung. Seiring dengan kepentingan pengembangan ekowisata (pariwisata) di Bangka Barat, dan kewenangan di bidang kehutanan hanya pada Taman Hutan Raya (TAHURA), maka dipandang perlu untuk mengalihfungsikan KSA/KPA Gunung Menumbing ini menjadi TAHURA Gunung Menumbing.

b. Kawasan strategis Kabupaten:

1) Kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu :

- Kawasan Perkotaan Muntok di Kecamatan Muntok terdiri atas; "Muntok Lama" dan "Muntok Baru".
- Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular di Kecamatan Muntok
- Kawasan Tanjung Kalian dan sekitarnya, terdiri atas Pelabuhan Penyeberangan, Kawasan wisata, dan Kawasan Industri.
- Kawasan Kecamatan Muntok akan direvitalisasi sebagai *Water Front City*.

2) Kawasan pengembangan budidaya.

- Kawasan dengan basis budidaya perkebunan, yaitu Kecamatan Jebus, Parittiga, Kelapa, Simpangteritip, dan Tempilang. Alokasi lahan untuk perkebunan besar mencapai 41.860 ha, yang sebagian besar berada di Kecamatan Tempilang, Kelapa dan Simpangteritip. Perkebunan besar ini sudah terealisasi, sehingga tidak dapat lagi diperluas. Perkebunan rakyat yang dialokasi seluas 79.785 ha, tersebar di seluruh kecamatan dengan alokasi terbesar di empat kecamatan, dan sebagian kecil di Kecamatan Muntok.
- Kawasan pengembangan peternakan yaitu di Kecamatan Muntok, Jebus dan Kelapa.
- Kawasan pengembangan perikanan, meliputi perikanan tangkap yang tersebar di seluruh kecamatan, perikanan budidaya air tawar dan payau juga tersebar di seluruh kecamatan dengan luas 11.899 ha. Pengolahan hasil perikanan berpusat di Kecamatan Muntok, Tempilang dan Simpangteritip. Infrastruktur pengembangan perikanan ini meliputi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Muntok, serta Balai Benih Ikan Lokal di Kecamatan Kelapa. Kawasan lindung dan budidaya ekosistem laut tersebar di beberapa perairan laut dengan luas 119.107 ha.

3) Kepentingan pariwisata, sosial dan budaya

Kawasan untuk kepentingan pengembangan pariwisata tersebar di semua kecamatan. Kawasan pariwisata ini terdiri atas : kawasan pariwisata alam dan pariwisata budaya.

- Kawasan strategis pariwisata budaya, yang ditetapkan adalah kawasan konservasi budaya Muntok Lama di Kecamatan Muntok yang akan dikembangkan dan ditata untuk pemanfaatan wisata budaya dan ilmu pengetahuan. Pariwisata budaya ini dikelompokkan atas Satuan Kawasan Wisata (SKW) I meliputi kecamatan Muntok dan Simpangteritip. SKW II meliputi Kecamatan Jebus dan Parittiga, serta SKW III meliputi Kecamatan Tempilang.
- Kawasan pariwisata alam, dikelompokkan atas SKW, yaitu SKW I terdapat di Kecamatan Muntok dan Simpangteritip, SWK II terdapat di Kecamatan Jebus dan Parittiga, dan SKW III terdapat di Kecamatan Tempilang dan Kelapa.

4) Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan yaitu kawasan kritis di sekitar "Kolong" tersebar di Kecamatan Muntok, Jebus, Parittiga danTempilang.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi amatlah penting dalam suatu kebijakan pembangunan mengingat visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah, guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi diantaranya (i) sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan, (ii) sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan, (iii) sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan, dan (iv) sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Visi pembangunan dapat menjadi pranata yang berfungsi sebagai pedoman perilaku pembangunan, sebagai alat pemersatu masyarakat dalam pembangunan, dan sebagai sarana pengendali sosial dalam pembangunan. Penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas.

Visi Kabupaten Bangka Barat 2021 merupakan visi dan misi dari kepala daerah terpilih yang merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan ingin diwujudkan di Kabupaten Bangka Barat dalam kurun waktu 2016-2021. Pencapaian cita-cita ini akan selalu diwarnai berbagai peluang dan tantangan masa depan yang perlu diantisipasi. Misi-misi pembangunan Kabupaten Bangka Barat 2016-2021 adalah tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai visi Kabupaten Bangka Barat 2021. Selanjutnya, visi dan misi diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

5.1. Visi

Visi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 adalah:

"Menuju Kabupaten Bangka Barat Hebat 2021 "

Pernyataan visi tersebut mengandung makna yaitu: "Kabupaten Bangka Barat yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, daya saing daerah yang tinggi, masyarakat yang berkualitas dan pembangunan yang berkesinambungan dengan lingkungan hidup yang lestari".

Visi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 secara hirarki memperhatikan pada Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019 yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong" serta Visi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 yaitu "Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan". Keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 5.1 Keterkaitan Visi RPJMN Tahun 2014-2019, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 dan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 merupakan perencanaan pembangunan tahapan ke III dari dokumen RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025. Visi Jangka Menengah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 tersebut berpedoman pada Visi Jangka Panjang Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 yaitu "Bangka Barat Bersih, Mandiri, dan Makmur 2025". Keterkaitan visi RPJMD dan RPJPD Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 5.2 Keterkaitan Visi RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

5.2. Misi

Perwujudan dari visi tersebut ditempuh melalui empat misi yang merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi kepala daerah.

Misi-misi pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 adalah :

- 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas;
- 2) Membangun Perekonomian yang Berbasis Sumber Daya Lokal dan Berdaya Saing Tinggi;
- 3) Membangun Masyarakat yang Maju dan Berkualitas; dan
- 4) Mewujudkan Kelestarian Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan.

Penjelasan masing-masing misi di atas adalah:

1) Misi 1

Misi 1 adalah upaya mencapai pengelolaan aspek pemerintahan (*Good Governance*) secara optimal. Unsur-unsur seperti akuntabilitas, transparansi, efektifitas, efisiensi, responsif, ketaatan hukum, serta berorientasi kepada pelayanan publik menjadi semangat dalam pengelolaan tata pemerintahan di Kabupaten Bangka Barat.

Penerapan manajerial birokrasi yang mengarah kepada profesionalitas ASN menjadi kunci bagi perubahan cara pandang tata kelola pemerintahan. Manajerial birokrasi tersebut dibuktikan oleh aparatur yang kuat dan memiliki mental melayani didukung oleh parameter pelaksanaan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat.

2) Misi 2

Misi 2 merupakan upaya membangun perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi. Kabupaten Bangka Barat sudah tidak bisa lagi mengantungkan harapan kepada penambangan dan industri pengolahan timah yang sudah terjadi sekian lama di kabupaten ini. Beberapa permasalahan krusial di aspek perekonomian daerah seperti komoditi unggulan non tambang yang kurang berdaya saing, konektivitas antar wilayah sekitar dan infrastruktur daerah yang kurang memadai, harus segera terpecahkan dan diantisipasi dengan strategi yang tepat. Pembentukan kawasan ekonomi cepat tumbuh, peningkatan infrastruktur, konektivitas antar wilayah, penguatan sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan dengan pelibatan tenaga kerja yang masif serta pemberdayaan, pembinaan di sektor ekonomi kreatif seperti pariwisata, kerajinan, kuliner bagi UKM/IKM dan kelompok masyarakat memiliki ekspektasi tinggi untuk dikembangkan.

Hal yang tidak kalah penting adalah kehandalan melihat peluang bagi pasar produk unggulan daerah yang ada. Permasalahan kewirausahaan yang rendah, pemasaran dan promosi yang tidak efektif, nilai jual produk yang tidak memiliki nilai tambah (bahan mentah/tidak diolah) dan penerapan teknologi yang minim di sisi produksi harus segera teratasi.

Kebutuhan akan resolusi atas perekonomian pasca timah sebenarnya sudah terlihat dari ketimpangan antar wilayah dan distribusi pendapatan. Isu pembangunan yang bersifat inklusif (*pro poor* dan *pro job*) hanya bisa diterapkan jika konsentrasi pembangunan di daerah dilaksanakan secara merata di desa-desa yang ada dengan melakukan pemetaan yang tepat sesuai kondisi dan potensi desa masing-masing.

3) Misi 3

Misi 3 terkait dengan manusia yang berperan sebagai pelaku sekaligus sasaran dalam pembangunan dijadikan faktor utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Peningkatan kualitas masyarakat dari aspek kesehatan dan pendidikan menjadi strategi untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas. Masyarakat yang berkualitas juga tercermin dari sikap yang toleran terhadap sesama, kemampuan mengekspresikan

diri dalam berkesenian dan kebudayaan sehingga tercipta lingkungan kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

Peningkatan kualitas masyarakat dapat dilihat dari peningkatan indeks pembangunan manusia. Perwujudan masyarakat yang sehat dan cerdas, untuk meningkatkan kualitas masyarakat menjadi sumber daya manusia yang siap bersaing dalam menghadapi tantangan global. Dengan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi maka kegiatan pembangunan akan dapat mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera dan tenteram.

4) Misi 4

Misi 4 terkait dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang merupakan konsep pembangunan yang berorientasi pada keseimbangan kehidupan, dimana pembangunan yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia diiringi dengan penjagaan lingkungan hidup yang baik. Aspek lingkungan yang menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan menjadi faktor pemacu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bangka Barat dimana pemanfaatan sumber daya lokal dalam kegiatan ekonomi tidak boleh mengorbankan aspek lingkungan hidup.

Peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup tercermin dengan terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihan lingkungan dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara sinergis dan seimbang. Selain penjagaan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan, perlu dilakukan pula mitigasi bencana untuk mengurangi resiko bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Bangka Barat. Pembangunan dapat diarahkan untuk pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas masyarakat agar resiko bencana yang terjadi dapat diantisipasi.

Dalam penyusunan misi RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 juga memperhatikan misi perencanaan jangka menengah pada tingkat nasional dan propinsi, sehingga tercipta hubungan yang saling bersinergi yang tergambarkan pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Keselarasan Misi Antara RPJMN Tahun 2014-2019, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 dan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

NO	MISI RPJMN TAHUN 2014-2019	MISI RPJMD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2017	MISI RPJMD KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016-2021
1	Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Membangun Masyarakat yang Maju dan Berkualitas
2	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Membangun Perekonomian yang Berbasis Sumber Daya Lokal dan Berdaya Saing Tinggi;
3	Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Membangun Masyarakat yang Maju dan Berkualitas
4	Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Membangun Masyarakat yang Maju dan Berkualitas
5	Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan	Mengembangkan ekonomi kerakyatan	Membangun Perekonomian yang Berbasis Sumber Daya Lokal dan Berdaya Saing Tinggi;
6	Mewujudkan Indonesia asri dan lestari	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang	Mewujudkan Kelestarian Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan
7	Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional	Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Membangun Perekonomian yang Berbasis Sumber Daya Lokal dan Berdaya Saing Tinggi
8	Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional	Mewujudkan <i>good governance</i> dalam rangka mencapai <i>clean government</i>	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas;

Dalam penetapan misi RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 juga mengacu pada misi RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025, sehingga memiliki keterkaitan yang kuat antara dokumen perencanaan jangka panjang dan dokumen perencanaan jangka menengah. Keterkaitan antara misi RPJPD dan misi RPJMD disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.2 Kesesuaian Misi RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

MISI RPJPD KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2005-2025	MISI RPJMD KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016-2021
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas
Mengoptimalkan seluruh potensi Kabupaten Bangka Barat dan mewujudkan ekonomi Bangka Barat yang berdaya saing tinggi	Membangun Perekonomian yang Berbasis Sumber Daya Lokal dan Berdaya Saing Tinggi
Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas	Membangun Masyarakat yang Maju dan Berkualitas
Mendorong pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada keseimbangan alam dan lingkungan	Mewujudkan Kelestarian Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan yang mencakup strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, program prioritas.

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam lima tahun perencanaan pembangunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan

visi dan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan. Tujuan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan Nasional dan Provinsi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Bangka Barat dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Indikator kinerja sasaran adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama lima tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bangka Barat dapat dirumuskan melalui gambaran yang lebih jelas dengan keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3. Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel untuk pelayanan publik yang berkualitas	1. Memperkuat sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif	1. Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan
		2. Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah
		3. Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel
		4. Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif
		5. Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik
2. Membangun perekonomian yang berbasis sumber daya lokal dan berdaya saing tinggi	1. Mengembangkan agribisnis/agroindustri	1. Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan
		2. Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat
		3. Meningkatnya nilai produksi perikanan
		4. Meningkatnya nilai produksi peternakan
		5. Berkembangnya sistem agribisnis/ agroindustri

MISI	TUJUAN	SASARAN
	2. Meningkatkan iklim investasi dan usaha yang kondusif sebagai bagian Kawasan Perhatian Investasi	1. Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah
	3. Mengembangkan Usaha mikro, industri kecil, dan menengah yang mandiri	1. Berkembangnya jumlah unit dan kapasitas Umi, Industri kecil dan menengah yang mandiri
		2. Berkembangnya ragam usaha dan produk Umi, Industri kecil dan menengah yang berdaya saing
	4. Mengembangkan pariwisata berkelanjutan untuk menopang pertumbuhan ekonomi	1. Berkembangnya destinasi wisata
		2. Terjaganya kelestarian warisan budaya sebagai aset wisata
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi	1. Meningkatnya konektivitas daerah 2. Tersedianya air baku untuk usaha budidaya komoditas pertanian	
3. Membangun masyarakat yang maju dan berkualitas	1. Meningkatkan Pembangunan Manusia	1. Meningkatnya kualitas pendidikan 2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan 3. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak 4. Meningkatnya minat dan wadah pengembangan olah raga
4. Mewujudkan kelestarian lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	1. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan	1. Terwujudnya masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang berbudaya/ berwawasan lingkungan
		2. Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan
		3. Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan permukiman
		4. Terkendalinya bencana banjir
		5. Terwujudnya pemulihan lahan kritis
		6. Terwujudnya konservasi sumber air

MISI	TUJUAN	SASARAN
	2. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap produk hukum penataan ruang dalam mendukung perlindungan lingkungan hidup	1. Menjaga dan meningkatkan perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang 2. Meningkatnya luasan kawasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan

Tujuan-tujuan yang tertera dalam **Tabel 5.3** merupakan kristalisasi dari apa yang ingin diwujudkan secara nyata oleh visi dan misi untuk periode yang akan berakhir pada tahun 2021. Secara teknokratik, gambaran nyata dari cita-cita pembangunan di atas akan dicapai secara bertahap, berkesinambungan dan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan APBD. Berikut dijabarkan indikator beserta target dari tujuan pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021.

Tabel 5.4. Keterkaitan Misi dan Tujuan Pembangunan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

MISI	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
MISI I Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas	Menguatkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	45	50	55	60	65	70
MISI II Membangun Perekonomian yang Berbasis Sumber Daya Lokal dan Berdaya Saing Tinggi	Mengembangkan agribisnis/agroindustri	Persentase peningkatan jumlah usaha dalam rantai agribisnis (hulu hingga hilir)	0,50%	0,60%	0,64%	0,74%	0,98%	1,45%
	Meningkatkan iklim investasi dan usaha yang kondusif sebagai bagian Kawasan Perhatian Investasi	Peningkatan Jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN)	100 M	100 M	100 M	100 M	100 M	100 M
	Mengembangkan Usaha mikro, industri kecil, dan menengah	Kontribusi Umi, industri kecil dan menengah terhadap PDRB	9.06%	9.23%	9.38%	9.53%	9.66%	9.78%

MISI	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Mengembangkan pariwisata berkelanjutan untuk menopang pertumbuhan ekonomi	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1.21%	1.31%	1.42%	1.54%	1.66%	1.80%
		Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	2 %	2 %	10 %	10 %	20 %	20 %
		Persentase benda, situs, benda, kawasan cagar budaya, seni dan kebudayaan daerah yang dilestarikan yang terintegrasi dengan program pariwisata	25%	28%	34%	37%	39%	42%
	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi	Indeks konektivitas kabupaten	1	1	1.02	1.03	1.05	1.06
MISI III Membangun Masyarakat yang Maju dan Berkualitas	Meningkatkan Pembangunan Manusia	Indeks pembangunan Manusia	68,15	68,94	69,75	70,55	71,32	72,23
MISI IV Mewujudkan Kelestarian Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	61	63	66	68	70

MISI	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
yang Berkelanjutan	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap produk hukum penataan ruang dalam mendukung perlindungan lingkungan hidup	Persentase pengajuan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator capaian diterjemahkan ke dalam sasaran yang akan dicapai dari tahun ke tahun selama masa lima tahun jangka pembangunan menengah. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan indikator dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan seperti yang dijabarkan dalam uraian berikut ini.

Secara lebih rinci, keterkaitan misi, tujuan dan sasaran beserta indikator sasaran dan target lima tahun diuraikan dalam tabel 5.5. dibawah ini.

Tabel 5.5.

Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran beserta Indikator dan Target
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

MISI 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel untuk pelayanan publik yang berkualitas

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Definisi/ Penjelasan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kondisi akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1. Memperkuat sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif	1. Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Sudah jelas	Sudah jelas	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	2. Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD)	PAD [dibagi] Total Pendapatan [dikali] 100	Sudah jelas	7,38%	6,44%	6,88%	7,38%	7,90%	8,44%	9,00%	9,00%
	3. Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP Daerah	Sudah jelas	Nilai SAKIP adalah nilai hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemda oleh pihak Kemenpan RB/ instansi lain yang berwenang.	57	59	61	63	65	67	70	70
	4. Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	Indeks Profesionalitas ASN	Sudah jelas	Sudah jelas	N/A	68,73	72,98	75,98	77,73	80,73	82,73	82,73

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Definisi/ Penjelasan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kondisi akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	5. Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	SPM Pelayanan Dasar yang Terpenuhi [dibagi] nilai SPM yang seharusnya dilaksanakan [dikali] 100	SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemda yg berhak diperoleh setiap warga	N/A	-	60%	65%	70%	75%	80%	80%
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas pelayanan publik	Jumlah nilai SKM seluruh Perangkat Daerah [dibagi] jumlah Perangkat Daerah [dikali] 100	SKM adalah tingkat kepuasan yg diperoleh dari hasil survey pendapat masyarakat terkait pelayanan publik. Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Perangkat Daerah yang melakukan Pelayanan Publik.	78	79	80	81	82	83	85	85

Misi 2. Membangun perekonomian yang berbasis sumber daya lokal dan berdaya saing tinggi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Definisi/ Penjelasan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kondisi akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1. Mengembangkan agribisnis/ agroindustri	1. Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	Rata-rata pendapatan bersih petani per bulan	Rata-rata pendapatan bersih petani perbulan (dalam juta)	Pendapatan petani menggambarkan tingkat kesejahteraan petani dan peningkatan produktivitas pertanian	1,1	1,2	1,3	1,5	1,6	1,8	2	2
	2. Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat	nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	Jumlah produksi dikalikan harga	Nilai produksi dinyatakan dalam milyar rupiah. Komoditas unggulan tanaman perkebunan adalah Lada, karet, dan kelapa sawit.	1,362.76	1,635.32	1,962.38	2,354.86	2,825.83	3,391.00	4,069.20	4,069.20
	3. Meningkatnya nilai produksi perikanan	nilai produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi dikalikan harga	Nilai produksi dinyatakan dalam juta rupiah	287.000,29	441.226,56	486.112,83	517.402,22	518.317,09	563.254,42	633.268,73	633.268,73
		Nilai produksi perikanan budidaya air tawar	Jumlah produksi dikalikan harga	Nilai produksi dinyatakan dalam juta rupiah	3.164,53	5.024,66	5.612,57	6.042,18	6.462,77	6.365,20	7.520,05	7.520,05
		Nilai produksi perikanan budidaya air laut	Jumlah produksi dikalikan harga	Nilai produksi dinyatakan dalam juta rupiah	3.042,50	3,419.10	3,944.64	4,654.00	5,478.70	6,493.00	7,982.00	7,982.00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Definisi/ Penjelasan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kondisi akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	4. Meningkatnya nilai produksi peternakan	Nilai produksi ternak ruminansia	Jumlah produksi daging ruminansi dikalikan harga	Nilai produksi dinyatakan dalam juta rupiah	26.509	27.835	29.227	30.688	32.222	33.833	35.525	35.525
		Nilai produksi ternak unggas	Jumlah produksi daging unggas dikalikan harga	Nilai produksi dinyatakan dalam juta rupiah	21.930	22.369	22.481	22.593	22.706	22.820	22.934	22.934
	5. Berkembangnya sistem agribisnis/ agroindustri	Persentase peningkatan jumlah usaha dalam rantai agribisnis (hulu hingga hilir)	Untuk setiap sub-sistem: jumlah unit usaha tahun ke-t dikurangi tahun ke t-1 [dibagi] jumlah unit usaha tahun ke t-1 [dikali] 100.	Usaha dalam rantai agribisnis mencakup kegiatan usaha pada sub sistem (1) penyediaan input dan sarana produksi, (2) sistem usaha tani/ usaha produksi, (3) penanganan pasca panen dan pengolahan, dan (4) distribusi dan pemasaran.	20.000 unit usaha	0,50%	0,60%	0,64%	0,74%	0,98%	1,45%	21.000 unit usaha
		Persentase peningkatan nilai tambah komoditas pertanian	nilai tambah komoditas pertanian tahun t dikurangi t-	nilai tambah adalah selisih antara nilai jual komoditas atau produk dengan	918,697	1.90%	2.00%	2.25%	2.50%	4.00%	4.50%	1,087,636

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Definisi/ Penjelasan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kondisi akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		dalam arti luas	1 [dibagi] nilai tambah komoditas pertanian t-1 [dikali] 100	biaya untuk menghasilkan komoditas atau produk								
2. Meningkatkan iklim investasi dan usaha yang kondusif sebagai bagian Kawasan Perhatian Investasi	1. Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah	Peningkatan Jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN)	Jumlah investasi tahun t dikurangi t-1	Pertambahan nilai investasi dalam satu tahun	82 M	100M	100M	100M	100M	100M	100M	600M
3. Mengembangkan Usaha mikro, industri kecil, dan menengah yang mandiri	1. Berkembangnya jumlah unit dan kapasitas Umi, Industri kecil dan menengah yang mandiri.	Persentase peningkatan unit usaha UMi (%)	Jumlah UMi tahun ini [dikurangi] jumlah UMi tahun sebelumnya [dibagi] jumlah Umi tahun awal [dikali] 100	(sudah Jelas)	22.006	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	24.782
		Persentase peningkatan unit industri kecil dan menengah	Jumlah industri kecil dan menengah tahun ini [dikurangi] jumlah industri kecil dan menengah	Perbandingan antara jumlah industri kecil dan menengah tahun ini dengan tahun sebelumnya	2.028	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	2.718

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Definisi/ Penjelasan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kondisi akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			menengah tahun sebelumnya dibagi jumlah industri kecil dan menengah tahun sebelumnya [dikali] 100									
		Peningkatan Skala usaha Umi	Jumlah UMI yang meningkat [dibagi] dengan jumlah UMI secara keseluruhan [dikali] 100	Skala usaha Umi menggambarkan omset/nilai yang dijual dalam satuan waktu tertentu (bulan). UMI yang meningkat adalah meningkatnya modal/omset usaha lebih besar 25% dari tahun sebelumnya	1.32%	1.32%	1.50%	1.50%	2%	2%	2.50%	2.50%
		Kapasitas Usaha Industri Kecil Dan Menengah Unggulan	Jumlah produksi industri kecil dan menengah unggulan per tahun menurut jenis produk (industri makanan	Kapasitas usaha menggambarkan kemampuan produksi industri unggulan	3127,18 Ton/Thn	3127,18 Ton/Thn	3132,18 Ton/Thn	3137,18 Ton/Thn	3142,18 Ton/Thn	3147,18 Ton/Thn	3152,18 Ton/Thn	3152,18 Ton/Thn

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Definisi/ Penjelasan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kondisi akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			olahan/ kuliner)									
			Jumlah produksi industri kecil dan menengah unggulan per tahun menurut jenis produk (industri kerajinan)	Kapasitas usaha menggambarkan kemampuan produksi industri unggulan	162.492 Unit/Thn	162.492 Unit/Thn	172.492 Unit/Thn	182.492 Unit/Thn	197.492 Unit/Thn	212.492 Unt/Thn	222.492 Unit/Thn	222.492 Unit/Thn
	2. Berkembangnya ragam usaha dan produk Umi, Industri kecil dan menengah yang berdaya saing	Jumlah ragam usaha Umi	Jumlah ragam usaha dalam satu tahun	Ragam usaha menurut klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (BPS).	86	86	100	120	130	140	150	150
		Jumlah ragam usaha Industri kecil dan menengah	Jumlah ragam usaha industri kecil dan menengah dalam satu tahun	Ragam usaha menurut klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia BPS	44	44	46	48	50	52	54	54
		Jangkauan pasar produk Umi	Jumlah UMI yg memiliki jangkauan pemasaran tertentu [dibagi]	Jangkauan pemasaran adalah pemasaran produk dalam kabupaten (DK), antar kabupaten	DK=100%	DK=100%	DK=100%	DK=99,5% AK=0,5%	DK=99 % AK=1 %	DK=99% AK=0,65% AP =0,35%	DK=98,5% AK=1,0% AP = 0,5%	DK=98,5% AK=1,0% AP = 0,5%

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Definisi/ Penjelasan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kondisi akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			Jumlah UMi. [Dikali] 100%	(AK) dan antar provinsi (AP).								
		Jangkauan pasar produk unggulan industri kecil dan menengah	Jumlah IKM Unggulan yang memiliki jangkauan pemasaran tertentu dibagi Jumlah IKM Unggulan dikali 100%	jangkauan pemasaran adalah pemasaran produk dalam kabupaten (DK), antar kabupaten (AK) dan antar propinsi (AP).	DK=100%	DK=100%	DK=100%	DK=99% AK=1%	DK=98,5% AK=1% AP=0,5%	DK=98% AK=1,25% AP =0,75%	DK=98% AK=1% AP = 1%	DK=98% AK=1% AP = 1%
		Kontribusi Umi, industri kecil dan menengah terhadap PDRB	Nilai PDRB yang bersumber dari Umi, industri kecil dan menengah [dibagi] nilai PDRB [dikali] 100	Nilai PDRB diambil dari 7 Subsektor PDRB terkait Umi dan IKM yaitu Industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kayu, barang dari kayu dan gabus, dan barang anyaman dari bambu, rotan sejenisnya, industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media	8.88%	9.06%	9.23%	9.38%	9.53%	9.66%	9.78%	9.78%

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Definisi/ Penjelasan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kondisi akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				rekaman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, industri furniture, industri pengolahan lainnya; jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan								
4. Mengembangkan pariwisata berkelanjutan untuk menopang pertumbuhan ekonomi	1. Berkembangnya destinasi wisata	Kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisata setiap tahun	kunjungan wisata diukur dari jumlah kunjungan di objek wisata, hunian hotel/ penginapan	44,222	48,000	52,000	59,000	69,000	84,000	104,000	104,000
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata [dibagi] jumlah PDRB [dikali] 100	Nilai PDRB diambil dari 2 Subsektor PDRB terkait pariwisata yaitu penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	1.11%	1.21%	1.31%	1.42%	1.54%	1.66%	1.80%	1.80%
		Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	Kontribusi PAD sektor pariwisata tahunan dikurangi kontribusi PAD sektor	(sudah jelas)	1,2 M	2 %	2 %	10 %	10 %	20 %	20 %	2,1M

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Definisi/ Penjelasan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kondisi akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			pariwisata tahun n-1 [dibagi] kontribusi sektor pariwisata pada tahun n-1 [dikali] 100									
	2. Terjaganya kelestarian warisan budaya sebagai aset wisata	Persentase benda, situs, benda, kawasan cagar budaya, seni dan kebudayaan daerah yang dilestarikan yang terintergrasi dengan program pariwisata	Jumlah benda, situs, kawasan cagar budaya, seni dan kebudayaan daerah yang dilestarikan yang terintegrasi dengan program pariwisata [dibagi] jumlah seluruh benda, situs, kawasan cagar budaya, seni dan	(sudah jelas)	25%	25%	28%	34%	37%	39%	42%	42%

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Definisi/ Penjelasan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kondisi akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			kebudayaan daerah [dikali] 100									
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi	1. Meningkatkan konektivitas daerah	Indeks konektivitas kabupaten	jumlah jaringan jalan [dibagi] jumlah desa/kelurahan	Membandingkan jumlah desa yang memiliki banyak rute jalan sebagai sarana penghubung. Semakin tinggi nilai indeks, semakin banyak jaringan jalan yang menghubungkan antar kecamatan	1	1	1	1.02	1.03	1.05	1.06	1.06
	2. Tersedianya air baku untuk usaha budidaya komoditas pertanian	Persentase luas areal pertanian yang beririgasi teknis	Luas areal yang memiliki jaringan irigasi teknis [dibagi] luas areal pertanian [dikali] 100	Luas jaringan irigasi teknis adalah jaringan irigasi sekunder	0.00 Ha	18.43%	27.56%	57.27%	77.12%	94.76%	94.76%	2.386 Ha

Misi 3. Membangun masyarakat yang maju dan berkualitas

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Definisi/ Penjelasan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kondisi akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1. Meningkatkan Pembangunan Manusia	1. Meningkatnya kualitas pendidikan	Peringkat ujian Nasional se-provinsi Bangka Belitung	Posisi Bangka Barat menurut deret hitung dari peringkat kelulusan kabupaten/ kota di provinsi Bangka Belitung	(sudah jelas)	SD 3 SMP 6	SD 7 SMP 6	SD 3 SMP 5	SD 2 SMP 4	SD 2 SMP 3	SD 2 SMP 2	SD 1 SMP 1	SD 1 SMP 1
		Angka Harapan Lama Sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	(sudah jelas)	11,48	11,70	12,03	12,38	12,72	13,05	13,35	13,35
		Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	(sudah jelas)	7,43	7,50	7,60	7,83	7,93	8,07	8,26	8,26
	2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	Angka Harapan hidup	(sudah jelas)	(sudah jelas)	69,47	69,51	69,53	69,55	69,57	69,59	69,61	69,61

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Definisi/ Penjelasan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kondisi akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	3. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	2 kali capaian [dikurang] baseline [dibagi] capaian [dikali] 100	(sudah jelas)	38 kasus	100%	97,73 %	94,44%	91,43%	88,23%	84,85%	33 kasus
	4. Meningkatnya minat dan wadah pengembangan olah raga	Prestasi olah raga pendidikan di tingkat Provinsi	(sudah jelas)	Prestasi yang dimaksud diukur dengan peringkat olah raga pelajar di tingkat Provinsi melalui popda dan kejurda	Peringkat 7	Popda 7	Kejurda 6	Popda 5	Kejurda 4	Popda 3	Kejurda 3	Kejurda 3
		Peringkat olahraga prestasi di tingkat provinsi	(sudah jelas)	Peringkat yang dimaksud adalah peringkat olahraga prestasi di tingkat provinsi adalah peringkat dalam poprov	Peringkat 6	-	-	Peringkat ke 4	-	-	-	Peringkat ke 4

Misi 4. Mewujudkan Kelestarian Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Definisi/ Penjelasan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kondisi akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1. Meningkatkan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan	1. Terwujudnya masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang berbudaya/berwawasan lingkungan	Persentase desa/ kelurahan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat desa/ kelurahan	Jumlah desa & kelurahan yang melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup [dibagi] jumlah seluruh desa & kelurahan [dikali] 100	Desa/kelurahan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup adalah desa yang memiliki budaya lingkungan hidup antara lain mereduksi sampah/ sistem penanganan sampah swadaya/ melakukan penataan tanaman di RTH (jalan,taman)/ dan pekarangan rumah/ pengaturan buangan limbah rumah tangga dilakukan secara sistem/ kelembagaan di desa/kelurahan, maupun dibangun oleh komunitas	N/A	-	2%	3%	5%	8%	11%	11%

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Definisi/ Penjelasan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kondisi akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		Jumlah organisasi masyarakat sipil (LSM), komunitas (Civil Society Organization/ CSO) yang bergerak dibidang lingkungan hidup secara aktif	Jumlah LSM/CSO yang bergerak di bidang lingkungan hidup yang terdaftar/ berdomisili di Bangka Barat dan berperan aktif	LSM/CSO yang bergerak dibidang lingkungan hidup, secara aktif berkontribusi pada pemecahan masalah lingkungan hidup a.l pembinaan/ pendampingan kepada masyarakat melalui program mandiri oleh LSM/CSO, maupun program kerjasama dengan Pemda.	7	7	8	9	10	11	12	12
		Persentase usaha dan atau kegiatan yang melakukan pengelolaan & pemantauan lingkungan secara baik	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan [dibagi] jumlah	Usaha dan atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dan secara periodik menyampaikan laporan kepada pemerintah cq Perangkat Daerah pengelola	30%	30%	35%	40%	50%	60%	70%	70%

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Definisi/ Penjelasan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kondisi akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			seluruh usaha dan atau kegiatan yang wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan [dikali] 100	lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hasil pengelolaan dapat dilihat pada laporan hasil pemantauan lingkungan setiap pelaku usaha dan/ atau kegiatan. pelaku usaha dan/ atau kegiatan. tergolong baik jika seluruh indikator lingkungan yang dikelola memenuhi baku mutu lingkungan								
	2. Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan	Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu	Jumlah desa/kelurahan mendapat layanan pengelolaan sampah [dibagi] jumlah	Pelayanan pengelolaan sampah mencakup sub sistem pengumpulan, sub sistem pengangkutan dan sub sistem	9%	9%	9%	13%	14%	16%	19%	19%

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Definisi/ Penjelasan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kondisi akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			seluruh desa/kelurahan kabupaten Bangka Barat [dikali] 100	penanganan akhir di TPA								
	3. Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan permukiman	Persentase penduduk yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak	Jumlah penduduk yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak di suatu wilayah pada periode tertentu dibagi jumlah penduduk di wilayah dan dalam periode yang sama	Sanitasi yang layak adalah Fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa, tanki septik/Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)	78.75%	80%	82%	85%	87%	90%	95%	95%
	4. Terkendalinya bencana banjir	Persentase desa/kelurahan/titik banjir yang dimitigasi thd banjir/genang	Jumlah desa/kelurahan/titik banjir kumulatif yang	Pengertian banjir ini mencakup banjir/ meluapnya air sungai dan juga terjadinya genangan akibat	N/A	-	20%	40%	60%	80%	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Definisi/ Penjelasan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kondisi akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		an air	dimitigasi thd banjir [dibagi] dengan jumlah /desa/kelurahan/titik banjir yang perlu dimitigasi thd banjir kondisi tahun awal (2015) [dikali] 100	terhambatnya aliran air di atas permukaan lahan/tanah. Komulatif bermakna capaian jangka waktu tertentu, sehingga jika pada akhir periode tercapai 100% maka selama periode waktu pembangunan dapat menyelesaikan masalah banjir								
	5. Terwujudnya pemulihan lahan kritis	Persentase luas lahan kritis yang berhasil dipulihkan menjadi produktif	Luas lahan kritis (diluar kawasan hutan dan bukan lahan izin usaha perusahaan) yang dipulihkan menjadi produktif [dibagi] luas lahan kritis kondisi awal yang	Lahan kritis yang dimaksud adalah lahan yang telah ditetapkan yaitu yang berada diluar kawasan hutan dan bukan lahan izin usaha perusahaan. Lahan berhasil direvegetasi menjadi produktif dan memperbaiki kualitas lingkungan.	N/A	-	-	0.50%	1%	1.5%	2%	2%

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Definisi/ Penjelasan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kondisi akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			ditetapkan [dikali] 100	rehabilitasi lahan kritis ini diluar areal izin usaha perusahaan dan di luar kawasan hutan, sehingga perlu kelembagaan secara partisipatif para pihak.								
	6. Terwujudnya konservasi sumber air	Persentase sumber air yang telah di konservasi	Jumlah sumber air yang telah dikonservasi [dibagi] jumlah seluruh sumber [dikali] 100	Sumber air adalah wadah air yang berada di atas dan dibawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini adalah akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk/ kolong dan muara	26%	26%	26%	27%	27%	28%	28%	28%
2. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap produk hukum penataan ruang dalam mendukung	1. Menjaga dan meningkatkan perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	Persentase pengajuan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	Total jumlah izin yang dikeluarkan sesuai dengan produk hukum penataan ruang [dibagi]	Perizinan yang diajukan adalah seluruh perizinan terkait pemanfaatan ruang	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Definisi/ Penjelasan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kondisi akhir RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
perlindungan lingkungan hidup			jumlah total pengajuan perizinan pemanfaatan ruang [dikali] 100									
	2. Meningkatnya luasan kawasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	Persentase ruang terbuka hijau	Luas ruang terbuka hijau [dibagi] luas kawasan perkotaan [dikali] 100	Luas kawasan perkotaan adalah luas kawasan perkotaan yang telah ditetapkan berdasarkan rencana umum tata ruang, namun jika data rinci telah tersedia maka digunakan rencana rinci yang telah ditetapkan	2%	2,25%	2,25%	2,50%	2,60%	2,75%	2,90%	2,90%

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung layanan masyarakat dapat terlaksana dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bangka Barat tahun 2016-2021 dirumuskan melalui metode *brainstorming* dengan memperhitungkan SWOT daerah, yakni kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) daerah yang dihadapi pada saat ini, serta peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) pembangunan daerah yang akan datang.

RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 akan dilaksanakan dalam setiap tahun perencanaan dengan pentahapan arahan prioritas tema pembangunan tahunan. Pentahapan arahan prioritas tema pembangunan ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan tema dalam setiap tahunnya selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tema pembangunan setiap tahun selama periode RPJMD Kabupaten Bangka Barat tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tema Pembangunan Tahun 2016

Membangun Kabupaten Bangka Barat secara berkelanjutan dengan menerapkan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dan upaya perkuatan daya saing daerah yang kompetitif.

Tema Pembangunan Tahun 2017

Percepatan pembangunan kawasan cepat tumbuh, peningkatan daya saing dan kualitas masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Tema Pembangunan Tahun 2018

Pembangunan ekonomi masyarakat wilayah perdesaan dengan pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan produksi produk unggulan pertanian dalam arti luas dan pariwisata.

Tema Pembangunan Tahun 2019

Penguatan daya saing ekonomi daerah dengan pengembangan sistem agribisnis/agroindustri produk-produk unggulan daerah disertai penyempurnaan infrastruktur pendukungnya.

Tema Pembangunan Tahun 2020

Peningkatan efektivitas dan efisiensi rantai nilai seluruh sistem agribisnis/agroindustri dengan peningkatan nilai tambah menopang pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan.

Tema Pembangunan Tahun 2021

Penguatan struktur ekonomi daerah yang optimal, berkelanjutan dan berkeadilan (*green economy*).

6.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Penting bagi masing-masing strategi untuk dapat menjamin transformasi menuju pengelolaan pembangunan daerah yang lebih baik, transparan dan akuntabel. Strategi harus dapat dikendalikan dan dievaluasi.

Strategi-strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka Barat dalam rangka pencapaian sasaran tahun 2016–2021 dijabarkan dalam uraian berikut.

MISI 1.

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL UNTUK PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS

TUJUAN 1. Menguatkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif

SASARAN	STRATEGI
1. Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	1. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
	2. Optimalisasi pengelolaan aset daerah
	3. Penguatan pengawasan internal
	4. Penguatan kelembagaan Pemerintahan desa
2. Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PAD
3. Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	1. Penerapan perencanaan pembangunan yang berkualitas
	2. Optimalisasi Pengendalian dan Evaluasi pada perencanaan tingkat daerah
4. Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	1. Peningkatan kualitas Manajemen SDM aparatur pemerintah daerah
	2. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah daerah
	3. Penguatan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
	4. Peningkatan pengelolaan kearsipan
5. Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	1. Melakukan pendataan capaian SPM pada pelayanan dasar sebagai <i>baseline</i>
	2. Optimalisasi pelayanan dasar pemerintah daerah menggunakan berbagai sumber pendanaan
	3. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi terkait pelayanan publik
	4. Perbaikan Sistem Pelayanan Publik
	5. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan
	6. Peningkatan kinerja Kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan

MISI 2.

MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DAN BERDAYA SAING TINGGI

TUJUAN 1. Mengembangkan agribisnis/agroindustri

SASARAN	STRATEGI
1. Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	1. Penerapan intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas unggulan tanaman pangan secara konsisten guna mencapai produksi yang optimal
	2. Peningkatan kapabilitas manajemen usaha dan teknologi SDM petani sebagai wirausaha melalui penyuluhan, pelatihan, pendampingan
	3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh yang memahami masalah pada sub-sub sistem agribisnis tanaman pangan
2. Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat	1. Penerapan intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas unggulan tanaman perkebunan rakyat secara konsisten guna mencapai produksi yang optimal dan mutu yang lebih baik
	2. Peningkatan kapabilitas manajemen usaha dan teknologi SDM petani sebagai wirausaha melalui penyuluhan, pelatihan, pendampingan
	3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh yang memahami masalah pada sub-sub sistem agribisnis tanaman perkebunan rakyat
3. Meningkatnya nilai produksi perikanan	1. Peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan dalam usaha perikanan tangkap
	2. Peningkatan kemampuan dan kapasitas pembudidaya sebagai wirausaha dalam usaha budidaya perikanan air tawar
	3. Peningkatan kemampuan dan kapasitas pembudidaya sebagai wirausaha dalam usaha budidaya perikanan air laut
	4. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM yang memahami masalah pada sub-sub sistem agribisnis Perikanan
4. Meningkatnya nilai produksi peternakan	1. Penerapan sistem peternakan dan perkebunan terpadu
	2. Peningkatan teknologi produksi budidaya peternakan
	3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh yang memahami masalah pada sub-sub sistem agribisnis Peternakan

SASARAN	STRATEGI
	4. Meningkatkan pemasaran hasil produksi ternak ruminansia dan unggas
	5. Pengembangan usaha peternakan yang terintegrasi dengan pengembangan usaha peternakan rakyat
5. Berkembangnya sistem agribisnis/ agroindustri	1. Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan
	2. Menumbuh-kembangkan usaha peningkatan mutu, penanganan lepas panen dan usaha pengolahan produk yang berbasis komoditas hasil pertanian dalam arti luas.

TUJUAN 2. Meningkatkan Iklim Investasi dan Usaha yang Kondusif sebagai Bagian Kawasan Perhatian Investasi

SASARAN	STRATEGI
1. Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah	1. Pengembangan regulasi dan deregulasi serta promosi yang mengundang dan mendorong investasi
	2. Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha

TUJUAN 3. Mengembangkan Usaha mikro, industri kecil, dan menengah yang mandiri

SASARAN	STRATEGI
1. Berkembangnya jumlah unit dan kapasitas Umi, Industri kecil dan menengah yang mandiri.	1. Peningkatan kualitas SDM (kewirausahaan dan keterampilan usaha) bagi pelaku UMi dan IKM.
	2. Peningkatan akses permodalan bank dan non bank
2. Berkembangnya ragam usaha dan produk Umi, Industri kecil dan menengah yang berdaya saing	Peningkatan kualitas kelembagaan UMi dan IKM

TUJUAN 4. Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan untuk Menopang Pertumbuhan Ekonomi

SASARAN	STRATEGI
1. Berkembangnya destinasi wisata	Pengembangan industri pariwisata secara komprehensif seluruh sistem kepariwisataan

SASARAN	STRATEGI
2. Terjaganya kelestarian warisan budaya sebagai aset wisata	Penguatan upaya pelestarian warisan budaya

TUJUAN 5. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Mendukung Kegiatan Ekonomi

SASARAN	STRATEGI
1. Meningkatnya konektivitas daerah	1. Peningkatan peran aktif Pemda dalam mendukung program nasional pembangunan pelabuhan Muntok dan Jembatan Teluk Kelabat menghubungkan Kecamatan Parittiga (Tj Ru) dan Belinyu (Tj Gudang)
	2. Peningkatan sarana prasarana perhubungan darat
2. Tersedianya air baku untuk usaha budidaya komoditas pertanian	Pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian dan perkebunan

MISI 3.

MEMBANGUN MASYARAKAT YANG MAJU DAN BERKUALITAS

TUJUAN 1. Meningkatkan Pembangunan Manusia

SASARAN	STRATEGI
1. Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Dasar
	2. Peningkatan kemampuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
	3. Pengembangan keahlian masyarakat melalui pendidikan kejuruan sesuai potensi daerah
2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	1. Perluasan cakupan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat miskin oleh Pemda
	2. Pengembangan sarana prasarana pelayanan kesehatan
	3. Peningkatan akses pelayanan dan perluasan layanan kesehatan puskesmas kepada masyarakat
3. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga
4. Meningkatnya minat dan wadah pengembangan olah raga	Pembinaan olah raga daerah

MISI 4.

MEWUJUDKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN UNTUK Mendukung PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

TUJUAN 1. Meningkatkan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan

SASARAN	STRATEGI
1. Terwujudnya masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang berbudaya/ berwawasan lingkungan	1. Peningkatan kesadaran dan budaya tentang lingkungan hidup
	2. Peningkatan peran aktif komunitas masyarakat/ LSM dalam pembinaan dan kontrol kualitas lingkungan hidup
	3. Peningkatan kontrol dan pembinaan pengelolaan lingkungan pelaku usaha dan atau kegiatan
2. Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan	Pembangunan sistem pengelolaan persampahan yang berkelanjutan
3. Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan permukiman	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang sanitasi lingkungan dan peningkatan fasilitas sanitasi masyarakat
4. Terkendalinya bencana banjir	Pembangunan sistem dan melakukan pengendalian banjir
5. Terwujudnya pemulihan lahan kritis	Membangun sistem dan melakukan pemulihan/ revegetasi lahan kritis (diluar kawasan hutan dan bukan lahan izin usaha perusahaan) berbasis masyarakat secara kolaboratif
6. Terwujudnya konservasi sumber air	Peningkatan koordinasi dan konservasi air diantara para pihak dan pelaksana konservasi

TUJUAN 2. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap produk hukum penataan ruang dalam mendukung perlindungan lingkungan hidup

SASARAN	STRATEGI
1. Menjaga dan meningkatkan perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang
	2. Updating data spasial dan meningkatkan koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan produk hukum penataan ruang
2. Meningkatnya luasan kawasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	Melakukan penetapan, penataan dan pengembangan serta pemeliharaan RTH

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama periode RPJMD. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan Kabupaten Bangka Barat tahun 2016-2021 dijabarkan sebagai berikut :

MISI 1.

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL UNTUK PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun Arah Kebijakan					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah	V	V	V	V	V	V
	Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Meningkatkan sistem penatausahaan pengelolaan aset daerah	V	V	V	V	V	V
	Penguatan pengawasan internal	optimalisasi pembinaan serta pengawasan internal secara berkala	V	V	V	V	V	V
		Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		V	V	V	V	V
	Penguatan kelembagaan Pemerintahan desa	Optimalisasi Kinerja Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V
Peningkatan sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Desa		V	V	V	V	V	V	
Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PAD	Penyempurnaan pengelolaan PAD serta penyesuaian tarif pajak dan retribusi	V	V	V	V	V	V
Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Penerapan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Meningkatkan ketersediaan dokumen pendukung perencanaan pembangunan daerah yang lengkap, akurat dan aktual, termasuk data statistik, hasil studi/penelitian dan kerjasama pembangunan	V	V	V	V	V	V
		Mengembangkan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		V	V	V	V	V
	Optimalisasi Pengendalian dan	pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan secara berkala	V	V	V	V	V	V

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun Arah Kebijakan						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Evaluasi pada perencanaan tingkat daerah								
Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Mengembangkan sistem rekrutmen SDM Aparatur pemerintah daerah (PNS & P3K)		V	V	V	V	V	V
		Mengembangkan sistem karir dan remunerasi SDM Aparatur pemerintah daerah		V	V	V	V	V	V
	Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah daerah	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur pemerintah daerah melalui pendidikan dan pelatihan	V	V	V	V	V	V	V
		Meningkatkan disiplin aparatur pemerintah daerah	V	V	V	V	V	V	V
		Meningkatkan kesejahteraan ASN		V	V	V	V	V	V
	Penguatan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.	Melakukan Penguatan Kelembagaan disesuaikan dengan tugas dan fungsi	V	V	V	V	V	V	V
		Penguatan ketatalaksanaan lembaga	V	V	V	V	V	V	V
	Peningkatan pengelolaan kearsipan	Meningkatkan pembinaan dan ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan	V	V	V	V	V	V	V
	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Melakukan pendataan capaian SPM pada pelayanan dasar sebagai baseline	Penyusunan basis data terkait pelayanan dasar	V	V				

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun Arah Kebijakan					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Optimalisasi pelayanan dasar pemerintah daerah menggunakan berbagai sumber pendanaan	Pencapaian target SPM secara optimal	V	V	V	V	V	V
		Monitoring dan evaluasi pencapaian SPM pada pelayanan dasar secara berkala	V	V	V	V	V	V
	Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi terkait pelayanan publik	Meningkatkan kerjasama dengan media masa (lokal, nasional) dan lembaga lainnya	V	V	V	V	V	V
		Mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyebaran informasi pelayanan publik (e-gov)	V	V	V	V	V	V
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SMS Center)			V	V	V	V
	Perbaikan Sistem Pelayanan Publik	Monitoring sistem pelayanan publik secara berkala	V	V	V	V	V	V
	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	V	V	V	V	V	V
	Peningkatan kinerja Kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan	Optimalisasi kinerja Kecamatan dalam penyelenggaraan tugas umum Kecamatan		V	V	V	V	V
		Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku		V	V	V	V	V

MISI 2.

MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DAN BERDAYA SAING TINGGI

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun Arah Kebijakan					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	Penerapan intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas unggulan tanaman pangan secara konsisten guna mencapai produksi yang optimal	Meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas unggulan tanaman pangan	v	v	v	v	v	V
		Menyediakan benih bermutu, sarana dan prasarana produksi dan pengendalian hama penyakit	v	v	v	v	v	V
		Menyediakan saluran irigasi usaha tani		v	v	v	v	
	Peningkatan kapabilitas manajemen usaha dan teknologi SDM petani sebagai wirausaha melalui penyuluhan, pelatihan, pendampingan	Meningkatkan kemampuan petani di dalam menerapkan teknologi tepat guna	v	v	v	v	v	V
		Meningkatkan peran kelembagaan kelompok tani	v	v	v	v	v	V
	Peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh yang memahami masalah pada sub-sub sistem agribisnis tanaman pangan	Peningkatan kualitas SDM penyuluh lapangan tanaman pangan	v	v	v	v	v	V
		Memfasilitasi dan meningkatkan intensitas kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan terhadap petani tanaman pangan	v	v	v	v	v	V
	Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat	Penerapan intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas unggulan tanaman perkebunan rakyat secara konsisten guna mencapai produksi yang optimal dan mutu yang lebih baik	Meningkatkan produksi dan mutu komoditas unggulan perkebunan rakyat, menyediakan benih bermutu, sarana dan prasarana produksi dan pengendalian hama penyakit	v	v	v	v	v
Peningkatan kapabilitas manajemen usaha dan teknologi SDM petani sebagai			v	v	v	v	v	v

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun Arah Kebijakan					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	wirausaha melalui penyuluhan, pelatihan, pendampingan	produktivitas dan mutu						
	Peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh yang memahami masalah pada sub-sub sistem agribisnis tanaman perkebunan rakyat	Menambah jumlah penyuluh dan meningkatkan kompetensinya dalam memahami masalah pada sub-sistem agribisnis komoditas unggulan perkebunan rakyat dan solusinya	v	v	v	v	v	v
Meningkatnya nilai produksi perikanan	Peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan dalam usaha perikanan tangkap	Memperluas jangkauan penangkapan di laut	v	v	v	v	v	v
	Peningkatan kemampuan dan kapasitas pembudidaya sebagai wirausaha dalam usaha budidaya Perikanan Air Tawar	Meningkatkan kualitas SDM usaha budidaya perikanan air tawar.	v	v	v	v	v	v
	Peningkatan kemampuan dan kapasitas pembudidaya sebagai wirausaha dalam usaha budidaya Perikanan Air Laut	Meningkatkan kualitas SDM usaha budidaya perikanan air laut	v	v	v	v	v	v
	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM yang memahami masalah pada sub-sub sistem agribisnis perikanan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kelautan dan perikanan	v	v	v	v	v	v
Meningkatnya nilai produksi peternakan	Penerapan sistem peternakan dan perkebunan terpadu	Melakukan pemetaan wilayah perkebunan dan desa untuk mengimplementasikan sistem peternakan terpadu	v	v				
	Peningkatan teknologi produksi budidaya peternakan	Meningkatkan produksi hasil peternakan	v	v	v	v	v	v

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun Arah Kebijakan					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Mencegah dan Menanggulangi penyakit ternak ruminansia dan unggas	v	v	v	v	v	v
	Peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh yang memahami masalah pada sub-sub sistem agribisnis peternakan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluh peternakan	v	v	v	v	v	v
	Meningkatkan pemasaran hasil produksi ternak ruminansia dan unggas	Menyediakan rumah potong hewan	v	v	v	v	v	v
	Pengembangan usaha peternakan yang terintegrasi dengan pengembangan usaha peternakan rakyat	Mengembangkan kelembagaan/model usaha kolaboratif antara investor dan peternak rakyat	v	v	v	v	v	v
		Membangun kerjasama rantai pasok dan pemasaran produksi peternakan		v	v	v	v	v
Berkembangnya sistem agribisnis/ agroindustri	Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan	Mempersiapkan sistem rantai nilai dan rantai pasok yang terintegrasi antar sub-sub sistem agribisnis komoditas unggulan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan hasil perikanan/kelautan	v	v	v	v	v	v
		Mengimplementasikan sistem rantai nilai terintegrasi agribisnis komoditas unggulan hasil pertanian, perkebunan, peternakan	v	v	v	v	v	v
	Menumbuh-kembangkan usaha peningkatan mutu, penanganan lepas panen dan usaha pengolahan produk yang berbasis komoditas hasil	Meningkatkan akses pasar bagi petani dan pelaku usaha agroindustri pertanian, perkebunan, peternakan	v	v	v	v	v	v

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun Arah Kebijakan					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	pertanian dalam arti luas							
Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah	Pengembangan regulasi dan deregulasi serta promosi yang mengundang dan mendorong investasi	Menyediakan Rencana rinci tata ruang untuk kepastian perizinan lokasi usaha dan investasi	v	V	v	V		
		Memfasilitasi kepastian areal lokasi usaha	v	V				
		Menyederhanakan prosedur perizinan investasi dan pengembangan usaha terutama untuk industri pengolahan berbasis sumberdaya alam yang terbarukan serta sektor jasa	v	V				
	Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha	Melaksanakan tatakelola pelayanan yang memberikan pelayanan prima.	v	V	v	v	v	v
Berkembangnya jumlah unit dan kapasitas Umi, Industri kecil dan menengah yang mandiri	Peningkatan kualitas SDM (kewirausahaan dan keterampilan usaha) bagi pelaku UMi dan IKM	Memberikan penyuluhan, pelatihan, bantuan teknis dan pendampingan bagi UMi dan IKM	v	V	v	v	v	v
	Peningkatan akses permodalan bank dan non bank	Mengembangkan kemitraan dengan bank dan non bank untuk permodalan UMi dan IKM.	v	V	v	v	v	v
		Memudahkan UMi dan IKM untuk memperoleh permodalan untuk mengembangkan usahanya, melalui dukungan legalitas usaha, jaminan usaha dan administrasi usaha	v	V	v	v	v	v
Berkembangnya ragam usaha dan produk Umi, Industri	Peningkatan kualitas kelembagaan UMi dan IKM	Mempersiapkan kelembagaan kolaboratif para pihak usaha UMi dan IKM	v	V				

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun Arah Kebijakan					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
kecil dan menengah yang berdaya saing		Meningkatkan kapasitas kelembagaan kolaboratif para pihak usaha UMi dan IKM melalui pendampingan usaha/pemasaran		V	v	v	v	v
		Memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan usaha atau industri pengolahan untuk meningkatkan daya saing UMi dan IKM		V	v	v	v	v
		Memfasilitasi sistem dan sarana prasarana pemasaran untuk meningkatkan daya saing usaha /produk UMi dan IKM		V	v	v	v	v
Berkembangnya destinasi wisata	Pengembangan industri pariwisata secara komprehensif seluruh sistem kepariwisataan	Memetakan potensi dan rencana pengembangan pariwisata (<i>roadmap</i>)		V	v			
		Mempersiapkan dan mengimplementasikan kelembagaan kolaboratif para pihak industri pariwisata		V	v	v		
		Memfasilitasi tumbuhnya budaya pelayanan pariwisata terutama masyarakat pelaku jasa pariwisata		V	v	v	v	v
		Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap kelestarian objek pariwisata		V	v	v	v	v
		Mengembangkan fasilitas kepariwisataan dan sarana prasarana pendukung, penguatan sumberdaya manusia pelaku wisata, pengembangan jasa dan produk penunjang pariwisata, untuk meningkatkan pelayanan pada rantai		V	v	v	v	v

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun Arah Kebijakan					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
		pasok dan nilai tambah pariwisata berdasarkan <i>roadmap</i>						
		Mengembangkan paket wisata yang mengoptimalkan potensi alam, cagar budaya dan seni budaya serta penguatan pemasaran wisata	V	v	v	v	v	V
		memfasilitasi dan membina komunitas-komunitas berbagai bidang minat, yang memiliki jaringan nasional dan berpotensi menggerakkan pariwisata daerah	V	v	v	v	v	V
		mendayagunakan obyek wisata dalam event/kegiatan Pemda	V	v	v	v	v	V
Terjaganya kelestarian warisan budaya sebagai aset wisata	Penguatan upaya pelestarian warisan budaya	pembuatan regulasi pengelolaan dan pelestarian warisan budaya		V	v			
		Mengembangkan kemitraan antarpihak dalam pelestarian cagar dan seni budaya serta sarana dan prasarana pendukung khususnya di kawasan cagar budaya		V	v	v	v	v
		Melakukan pembinaan dan fasilitasi kegiatan seni budaya		V	v	v	v	v
Meningkatnya konektivitas daerah	Peningkatan peran aktif Pemda dalam mendukung program nasional pembangunan pelabuhan Muntok dan Jembatan Teluk Kelabat menghubungkan Kecamatan Parittiga (Tj Ru) dan Belinyu (Tj Gudang)	Menyediakan lahan untuk pengembangan pelabuhan di kawasan industri dan pelabuhan terpadu Tanjung Ular di Kec. Muntok dan pengembangan jembatan teluk kelabat	v	V	v	v		
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung perhubungan				v	v	v

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun Arah Kebijakan					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Peningkatan sarana prasarana perhubungan darat	Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan pedesaan dan kecamatan		v	v	v	v	v
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan terutama dikawasan pusat pertumbuhan (Industri, perdagangan dan destinasi wisata)			v	v	v	
		Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan darat (terminal, rambu-rambu, trayek)		v	v	v	v	v
Tersedianya air baku untuk usaha budidaya komoditas pertanian	Pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian dan perkebunan	Menyusun rencana kebutuhan air baku untuk pertanian dan perkebunan		v				

MISI 3.**MEMBANGUN MASYARAKAT YANG MAJU DAN BERKUALITAS**

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun Arah Kebijakan					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kualitas pendidikan	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Dasar	Meningkatkan kompetensi guru			v	v	v	v
		Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana terutama bagi sekolah garis depan, sekolah inklusi, sekolah rujukan dan sekolah Pembina		v	v	v	v	v
		Menerapkan dan memenuhi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) SD/MI dan SMP/MTs			v	v	v	v
	Peningkatan kemampuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Mendorong akreditasi PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan		v	v	v	v	v
	Pengembangan keahlian masyarakat melalui pendidikan kejuruan sesuai potensi daerah	Mendorong pemerintah pusat dan provinsi dalam ketersediaan sekolah kejuruan yang relevan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah yaitu mendukung pembangunan bidang pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif		v	v	v	v	v
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	Perluasan cakupan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat miskin oleh Pemda	Meningkatkan sosialisasi terkait program BPJS kesehatan dan bantuan Pemda	v	v	v	v	v	v
	Pengembangan sarana prasarana pelayanan kesehatan	Mengembangkan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas yang merata, terjangkau dan sesuai standar (rawat inap/perawatan)	v	v	v	v	v	v
		Mengembangkan sarana prasarana	v	v	v	v	v	v

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun Arah Kebijakan					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
		elayanan kesehatan dasar pada RSUD						
	Peningkatan akses pelayanan dan perluasan layanan kesehatan puskesmas kepada masyarakat	Mengembangkan inovasi pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif melalui pelayanan kesehatan bergerak, pelayanan primer dan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat	v	v	v	v	v	v
		Mengembangkan upaya preventif dan promotif pelayanan kesehatan serta pemberdayaan masyarakat	v	v	v	v	v	v
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan perlindungan perempuan dan anak thd tindakan kekerasan dalam rumah tangga	Memberikan perlindungan dan penanganan terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan		v	v	v	v	V
Meningkatnya minat dan wadah pengembangan olah raga	Pembinaan olah raga daerah	Melakukan pendataan fasilitas, gedung, lapangan prasarana olah raga yang ada per desa berikut kondisinya	v	v				
		Mengembangkan fasilitas, gedung, lapangan prasarana olah raga di tingkat kecamatan		v	v	v	v	V
		Mendata kelompok olah raga yang aktif per desa	v	v				
		Menyelenggarakan event olahraga tahunan kabupaten		v	v	v	v	V
		Mempersiapkan spras yang dibutuhkan untuk Kab Bangka Barat sbg tuan rumah Pekan Olah Raga Provinsi. Kep. Babel		v	v	v	v	V

MISI 4.

MEWUJUDKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN UNTUK Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun Arah Kebijakan					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Terwujudnya masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang berbudaya/berwawasan lingkungan	Peningkatan kesadaran dan budaya tentang lingkungan hidup	Melakukan edukasi dan promosi tentang lingkungan hidup berbasis desa/kelurahan melalui berbagai metode/media		V	V	V	V	V
		Menyusun regulasi terkait desa yang berbasis lingkungan		V				
		Menetapkan Surat Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi		V	V	V	V	V
		Mengembangkan desa/ kelurahan model pengelolaan lingkungan hidup		V	V	V	V	V
		Mengembangkan keteladanan perlindungan/pemeliharaan lingkungan (keindahan, sanitasi/ sampah) dimulai dari implementasi di lingkungan instansi pemerintah		V	V	V	V	V
		Mengembangkan kurikulum pendidikan terkait lingkungan hidup	V	V	V	V	V	V
	Peningkatan peran aktif komunitas masyarakat/ LSM dalam pembinaan dan kontrol kualitas lingkungan hidup	Menginisiasi pembentukan dan meningkatkan peranan komunitas masyarakat sipil (LSM/CSO) dalam pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup		V	V	V	V	V
	Peningkatan kontrol dan pembinaan pengelolaan lingkungan pelaku usaha dan atau kegiatan	Menyusun kebijakan daerah tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	V	V	V	V	V	
		Peningkatan kapasitas SDM dalam pengawasan pengelolaan lingkungan	V	V	V	V	V	V

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun Arah Kebijakan					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Melakukan penegakan aturan dan meningkatkan pengawasan pengelolaan lingkungan terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan	V	V	V	V	V	V
Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan	Pembangunan sistem pengelolaan persampahan yang berkelanjutan	Menyusun kebijakan daerah tentang pengelolaan persampahan yang berkelanjutan	V	V	V	V		
		Meningkatkan sistem, kapasitas (prosedur, sarpras, SDM); sarana dan prasarana pelayanan persampahan	V	V	V	V	V	V
		mengembangkan pengelolaan persampahan berkelanjutan dan membangun model pengelolaan persampahan berkelanjutan	V	V	V	V	V	V
Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan permukiman	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang sanitasi lingkungan dan peningkatan fasilitas sanitasi masyarakat	Memberikan edukasi, penyuluhan, sosialisasi dan memberikan fasilitasi pengembangan sanitasi lingkungan	V	V	V	V	V	V
Terkendalinya bencana banjir	Pembangunan sistem & melakukan pengendalian banjir	menyusun dan Mengembangkan data identifikasi, monitoring dan evaluasi lokasi/daerah rawan banjir		V	V			
		Mengkaji dan memperbaiki sistem drainase dan sungai di daerah rawan banjir			V	V	V	V
Terwujudnya pemulihan lahan kritis	Membangun sistem dan melakukan pemulihan/ revegetasi lahan kritis (diluar kawasan hutan dan bukan lahan izin usaha dan bukan lahan izin perusahaan)	Melakukan pemetaan dan membangun kelembagaan untuk melakukan pemulihan/ revegetasi lahan kritis (diluar kawasan hutan dan bukan lahan izin usaha perusahaan)		V	V	V		

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun Arah Kebijakan					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	usaha perusahaan) berbasis masyarakat secara kolaboratif	Membuat rencana dan pelaksanaan pemulihan produktivitas lahan kritis (diluar kawasan hutan dan bukan lahan izin usaha perusahaan)			V	V	V	V
Terwujudnya konservasi sumber air	Peningkatan koordinasi dan konservasi air diantara para pihak dan pelaksana konservasi	Melakukan pemetaan sumber-sumber air, koordinasi perencanaan dan implementasi konservasi air para pihak (Perangkat Daerah/swasta/ masyarakat)		V	V	V	V	V
		Penetapan Peraturan tentang kawasan/lokais sumber air			V			
		Melakukan konservasi (perlindungan, rehabilitasi, reklamasi) sumber air/kolong eks tambang/mata air			V	V	V	V
Menjaga dan meningkatkan perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang	Sosialisasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan ruang melalui berbagai kegiatan dan media sosialisasi	V	V	V	V	V	V
	Updating data spasial dan meningkatkan koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	Meningkatkan akurasi data spasial dan koordinasi antar pihak terkait pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang	V	V	V	V	V	V

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun Arah Kebijakan					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya luasan kawasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	Melakukan penetapan, penataan dan pengembangan serta pemeliharaan RTH	Penetapan kawasan RTH serta melakukan penataan, pengembangan serta pemeliharaan RTH	V	V	V	V	V	V

BAB VII

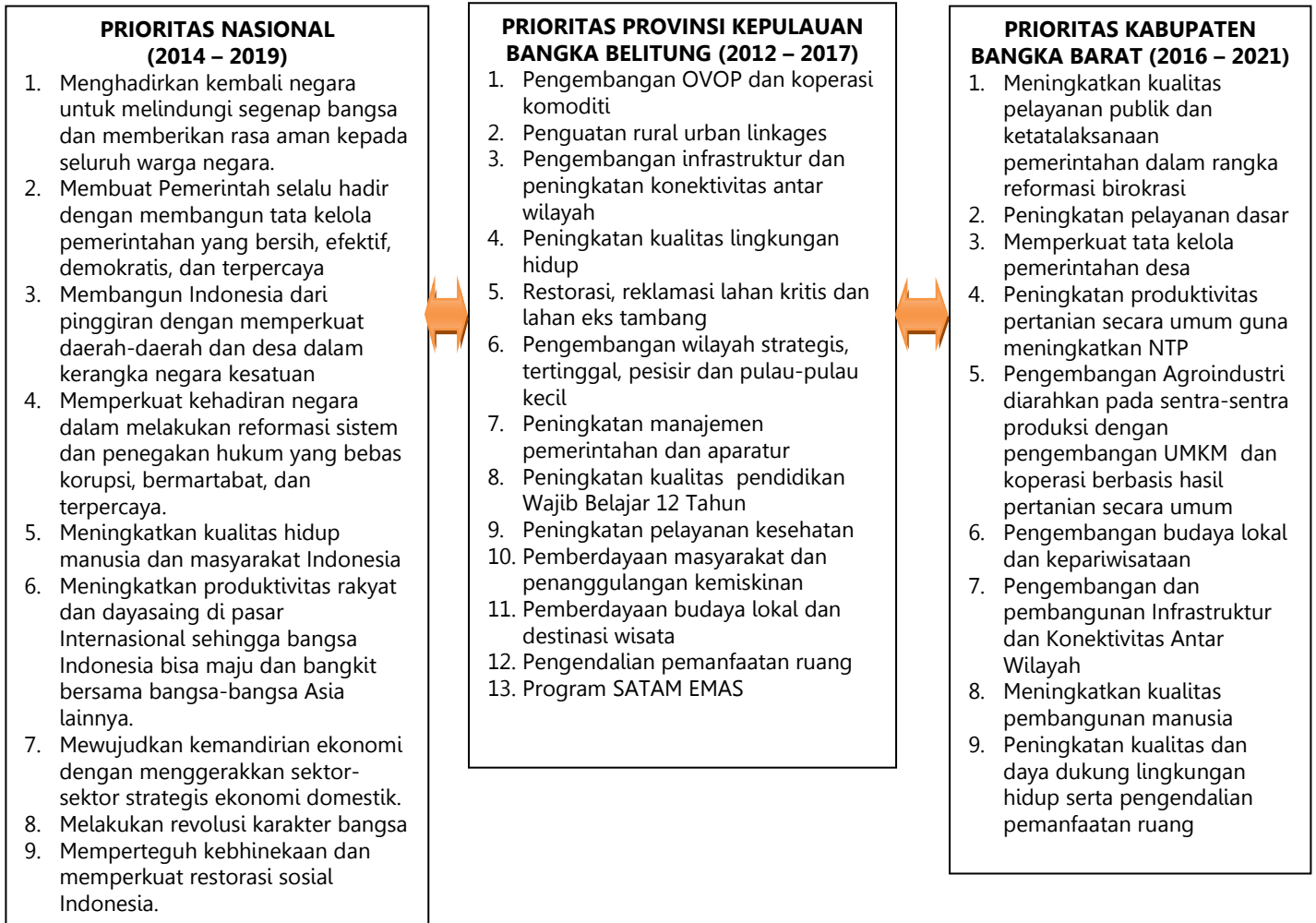
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Prioritas Pembangunan

Untuk mencapai target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah, maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program prioritas. Program-program prioritas di masing-masing strategi disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaiannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan visi dan misi serta sasaran pembangunan baik di tingkat nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dirumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 serta keterkaitannya dengan prioritas Nasional (RPJMN Tahun 2014-2019) dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (RPJMD Tahun 2012-2017).

Gambar 7.1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Barat dengan Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Prioritas Nasional



7.2. Kebijakan Umum

Kebijakan umum memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai pendanaan jangka menengah daerah, dan menjadi pedoman setiap Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan strategi yang dipilih untuk mencapai indikator kinerja sasaran, yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bangka Barat, dirumuskan berbagai kebijakan umum dan program pembangunan pada RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021. Kebijakan umum pembangunan daerah ini memberikan arah pembangunan daerah selama jangka 2016-2021, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di semua bidang, dengan dukungan pengembangan dan penyempurnaan organisasi sesuai kebutuhan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi, serta profesionalitas aparatur pemerintah daerah. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik (*good governance*) merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum, dan menciptakan pemerintahan yang bersih, serta bebas korupsi. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dalam rangka mendukung program pembangunan, maka kualitas perencanaan pembangunan ditingkatkan dengan dukungan sistem informasi manajemen, yang memiliki *data base* (pangkalan data) yang memadai tentang kondisi dan perkembangan daerah. Sistem informasi yang dikembangkan dengan pendataan yang akurat dimaksudkan untuk mendukung perencanaan, implementasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
2. Menyediakan landasan berbagai pelayanan melalui berbagai peraturan daerah yang dibutuhkan, meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah, serta infrastruktur pendukungnya. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, memiliki integritas dengan akhlak yang baik, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik. Di samping itu, pembenahan dan penataan manajemen kepegawaian juga perlu dilakukan, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas

pelayanan publik, antara lain dengan meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) bagi Perangkat Daerah pelayanan.

3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pemerintah desa, guna memberikan pelayanan yang lebih baik secara langsung kepada masyarakat desa, serta mendorong pembangunan sosial ekonomi di perdesaan. Dalam rangka menguatkan ekonomi rakyat di perdesaan, sangatlah perlu koordinasi dan sinergi program-program pembangunan setiap Perangkat Daerah diarahkan untuk menguatkan kemandirian ekonomi dan menguatkan kapasitas sosial masyarakat desa. Hal ini harus menjadi satu kesatuan dengan pendayagunaan "dana desa" yang lebih berfokus pada infrastruktur desa dan pengembangan usaha ekonomi, antara lain melalui pengembangan BUMDes.
4. Memfokuskan dan memprioritaskan pengembangan ekonomi masyarakat atau daerah kepada sumber daya lokal yang potensial dan berkelanjutan (*renewable*) untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik ekonomi daerah secara optimal. Potensi sumber daya lokal yang penting adalah sumber daya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata. Pendayagunaan potensi sumberdaya lokal menjadi basis pembangunan ekonomi daerah melalui penguatan ekonomi kerakyatan dengan membangun dan mengembangkan UMi dan IKM yang kuat dan mandiri. Kegiatan ekonomi pertambangan dan pengolahan industri logam yang selama ini menjadi penggerak ekonomi daerah dan sumber keuangan daerah pertumbuhannya cenderung menurun. Untuk itu diperlukan langkah antisipasi yang tepat dan cepat, untuk mencapai perubahan struktur ekonomi daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah. Peningkatan konektivitas diperlukan untuk memperlancar arus barang dan orang dalam kegiatan ekonomi dan sosial budaya. Posisi pelabuhan seperti pelabuhan Muntok memegang peranan penting khususnya sebagai pintu konektivitas ke pulau Sumatera. Iklim investasi dibangun dengan mengedepankan potensi wilayah dan meningkatkan efisiensi pelayanan, menghilangkan hal-hal yang dapat menimbulkan *high cost economy*.
5. Meningkatkan pemberdayaan, partisipasi dan peran masyarakat di dalam pembangunan, di samping diperlukan di dalam upaya mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, juga merupakan perubahan pendekatan (*paradigm*) pembangunan yang meletakkan masyarakat sebagai subyek pembangunan itu sendiri.

Oleh karena itu pengembangan kelembagaan para pihak di dalam berbagai aspek pembangunan yang meletakkan masyarakat sebagai unsur penting, menjadi sebuah "inovasi kelembagaan" di samping ditopang oleh "adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi" di dalam kegiatan ekonomi produktif berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan (*green economy*). Pengembangan kelembagaan masyarakat ini harus mempunyai landasan yang kuat sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat, sehingga keberadaan organisasi ekonomi masyarakat seperti kelompok tani ataupun gapoktan bukan lagi hanya sekedar memenuhi administratif implementasi program pembangunan. Kelembagaan masyarakat ditumbuhkan dan dikembangkan agar menjamin keberlanjutan program pembangunan, dan tumbuhnya kelembagaan sosial ekonomi masyarakat yang dinamis dan berkelanjutan.

6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Bangka Barat merupakan prasyarat di dalam mewujudkan pembangunan masyarakat dan daerah. Memberikan penekanan yang cukup signifikan pada aspek pendidikan formal, non formal seperti pelatihan, sekolah lapang pertanian-perkebunan-peternakan maupun pendidikan informal seperti edukasi melalui media penyuluhan, promosi, kegiatan dakwah, pengajian dan lain lain, harus dioptimalkan. Tujuan dari peningkatan kualitas SDM ini adalah selain meningkatkan kapasitas dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi, juga membangun karakter masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai moral berlandaskan nilai-nilai agama (akhlak). Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai/cukup dan kualitas tenaga pendidik disertai kemampuan manajemen pendidikan. Selain itu dari sisi kepemudaan dan olah raga lebih menekankan kepada peningkatan prestasi olahraga melalui pembinaan olah raga dan mengembangkan fasilitas olah raga di daerah. Akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan dilakukan antara lain dengan memberikan bantuan dana pendidikan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan guna memberikan keadilan pencapaian kualitas SDM. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dari tingkat kabupaten sampai ke desa secara berhirarki pada setiap unit layanan kesehatan. Pelayanan terhadap kesehatan ibu dan anak serta penanganan penyakit menular perlu mendapat perhatian di setiap wilayah Bangka Barat.

7. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Melindungi hak setiap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan maupun kejahatan manusia untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang telah terjadi atas korban serta dampak yang diderita oleh korban, maka korban tersebut berhak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum. Maksud dari perlindungan terhadap korban adalah berkaitan dengan hak-hak asasi korban seperti hak mendapatkan bantuan fisik, hak mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan, hak mendapatkan kembali haknya, hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, hak memperoleh perlindungan dari ancaman dan hak memperoleh ganti kerugian (restitusi/kompensasi) dari pelaku maupun Negara.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup sejalan dengan perbaikan dan perlindungan sumber daya alam khususnya lahan dan hutan yang terkait dengan konservasi sumber-sumber air. Lahan kritis akibat penambangan dilahan rakyat oleh rakyat memerlukan upaya serius di dalam memulihkan fungsinya sehingga produktif. Kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup harus ditegakkan kepada para pelaku usaha, dan setiap pengelolaan lingkungan yang dilakukan harus mencapai standar mutu lingkungan. Meningkatkan kualitas lingkungan dan perlindungan sumber daya alam ini sejalan dengan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal, yang menopang pada pembangunan berkelanjutan (*green economy*).

Penjabaran kebijakan umum pembangunan yang dituangkan ke dalam program pembangunan daerah disajikan pada tabel di bawah ini.

MISI 1.**MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL UNTUK PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1. Menguatkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif	1. Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penunjang	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Optimalisasi pengelolaan aset daerah				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penunjang	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Penguatan pengawasan internal				Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat	Inspektorat Daerah
		Penguatan kelembagaan Pemerintahan desa				Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Inspektorat	Inspektorat Daerah
						Program Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan
						Program Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	2. Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PAD	Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD)	7,38%	9%	Program Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Penunjang	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
						Program Optimalisasi PBB & BPHTB	Penunjang	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
	3. Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Penerapan perencanaan pembangunan yang berkualitas Optimalisasi Pengendalian dan Evaluasi pada perencanaan tingkat daerah	Nilai SAKIP Daerah	57	70	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penunjang	Badan Perencanaan Pembangunan & Litbang Daerah
						Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Penunjang	Badan Perencanaan Pembangunan & Litbang Daerah
						Perencanaan Sosial Budaya	Penunjang	Badan Perencanaan Pembangunan & Litbang Daerah
						Program Perencanaan Pengembangan Bidang Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Penunjang	Badan Perencanaan Pembangunan & Litbang Daerah
						Program perencanaan Pengembangan Wilayah Setrategis Cepat Tumbuh	Penunjang	Badan Perencanaan Pembangunan & Litbang Daerah
						Program Pengembangan Statistik Daerah	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Penunjang	Badan Perencanaan Pembangunan & Litbang Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	4. Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	Peningkatan kualitas Manajemen SDM aparatur pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas ASN	n/a	82,73	Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur	Penunjang	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
						Program Peningkatan Kompetensi ASN	Penunjang	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah daerah				Penunjang	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		Penguatan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.				Penunjang	Sekretariat Daerah	
						Penunjang	Sekretariat Daerah	
						Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	5. Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Melakukan pendataan capaian SPM pada pelayanan dasar sebagai baseline	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	n/a	80%	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Kesehatan	Dinkes
						Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Kesehatan	Dinkes
						Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	Dinkes
						Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dikpora

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		dasar pemerintah daerah menggunakan berbagai sumber pendanaan				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dikpora
						Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	PU dan Tata Ruang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
						Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial	Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
						Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Ketentraman , Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
						Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Ketentraman , Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
						Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Ketentraman , Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
						Program Bantuan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisia khir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi terkait pelayanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas pelayanan publik	78	85	Program kerjasama informasi dengan massmedia	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Perbaikan Sistem Pelayanan Publik				Program pengembangan komunikasi, informatika dan media massa	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan				Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Penunjang	Sekretariat Daerah
		Peningkatan kinerja Kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan				Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Penunjang	Sekretariat Daerah
						Program Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah	Penunjang	Kecamatan
						Program Penyelenggaraan tugas pelimpahan kewenangan Kepala Daerah	Penunjang	Kecamatan

MISI 2.

MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DAN BERDAYA SAING TINGGI

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1. Mengembangkan agribisnis/agro industri	1. Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	Penerapan intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas unggulan tanaman pangan secara konsisten guna mencapai produksi yang optimal	Rata-rata pendapatan bersih petani per bulan (dalam juta)	1,1	2	Program peningkatan produksi pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi tingkat usaha tani (jaringan tersier)				Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan	
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian				Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan	
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian				Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan	
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian)				Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	
		Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan				Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	2. Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat	Penerapan intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas unggulan tanaman perkebunan rakyat secara konsisten guna mencapai produksi yang optimal dan mutu yang lebih baik	Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	1.362,76	4.069,20	Program peningkatan produksi perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
		Peningkatan kapabilitas manajemen usaha dan teknologi SDM petani sebagai wirausaha melalui penyuluhan, pelatihan, pendampingan				Program peningkatan penerapan teknologi perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
		Peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh yang memahami masalah pada sub-sub sistem agribisnis tanaman perkebunan rakyat				Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
						Program pemberdayaan penyuluh perkebunan lapangan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
	3. Meningkatnya nilai produksi perikanan	Peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan	Nilai produksi perikanan tangkap	287.000,29	633.268,73	Program pengembangan perikanan tangkap	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		dalam usaha perikanan tangkap						
		Peningkatan kemampuan dan kapasitas pembudidaya sebagai wirausaha dalam usaha budidaya perikanan AIR TAWAR	Nilai produksi perikanan budidaya AIR TAWAR	3.164,53	7.520,05	Program pengembangan budidaya perikanan air tawar	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Peningkatan kemampuan dan kapasitas pembudidaya sebagai wirausaha dalam usaha budidaya perikanan AIR LAUT	Nilai produksi perikanan budidaya AIR LAUT	3.042,50	7.982,00	Program pengembangan budidaya perikanan air laut	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM yang memahami masalah pada sub-sub sistem agribisnis PERIKANAN				Program pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
	4. Meningkatnya nilai produksi peternakan	Penerapan sistem peternakan dan perkebunan terpadu	Nilai produksi ternak ruminansia	26.509	35.525	Program pengembangan Peternakan terpadu	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
		Peningkatan teknologi produksi budidaya peternakan	Nilai produksi ternak unggas	21.930	22.934	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
						Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
		Peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh yang memahami masalah pada sub-sub sistem agribisnis PETERNAKAN				Program pemberdayaan penyuluh peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
		Meningkatkan pemasaran hasil produksi ternak ruminansia dan unggas				Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengembangan usaha peternakan yang terintegrasi dengan pengembangan usaha peternakan rakyat.				Program Pengembangan Usaha Peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
	5. Berkembangnya sistem agribisnis/ agroindustri	Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan	Persentase peningkatan jumlah usaha dalam rantai agribisnis (hulu hingga hilir)	20.000 unit usaha	21.000 unit usaha	Program Studi pengembangan Kawasan Ekonomi Agropolitan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
					Program Studi pengembangan Kawasan Ekonomi Minapolitan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Program pengembangan sentra-sentra industri potensial agropolitan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
						Program pengembangan sentra-sentra industri potensial minapolitan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Program optimalisasi pemasaran produksi pertanian, perkebunan, peternakan	Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
		Menumbuh-kembangkan usaha peningkatan mutu, penanganan lepas panen dan usaha pengolahan produk yang berbasis komoditas hasil pertanian dalam arti luas.	Persentase peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dalam arti luas	918,697	1.087,636	Program optimalisasi pengolahan produksi pertanian, perkebunan, peternakan	Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
2. Meningkatkan iklim investasi dan usaha yang kondusif sebagai bagian	1. Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah	Pengembangan regulasi dan deregulasi serta promosi yang mengundang dan mendorong	Peningkatan Jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN)	82 M	100 M	Program Perencanaan Tata Ruang	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Program Pemanfaatan Ruang	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Kawasan Perhatian Investasi		investasi				Program peningkatan & pengembangan pengelolaan perizinan	Penanaman modal	Dinas PM, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi
		Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perijinan bagi investor dan pengusaha				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman modal	Dinas PM, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi
						Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Kawasan Perdesaan	Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
3. Mengembangkan Usaha mikro, industri kecil, dan menengah yang mandiri	1. Berkembangnya jumlah unit dan kapasitas Umi, Industri kecil dan menengah yang mandiri.	Peningkatan kualitas SDM (kewirausahaan dan keterampilan usaha) bagi pelaku UMi dan Industri Kecil.	Persentase peningkatan unit usaha UMi (%)	22.006	24.782	Program pengembangan kewirausahaan usaha mikro	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
						Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi usaha mikro	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
		Peningkatan akses permodalan bank dan non bank	Persentase peningkatan unit industri kecil dan menengah	2.028	2.718	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Industri Kecil dan menengah	Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
						Program pengembangan kewirausahaan industri kecil dan menengah	Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Peningkatan Skala usaha UMi	1,32%	2,50%	Program Pengembangan permodalan Usaha Bagikoperasi dan usaha mikro	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
			Peningkatankapasitas usaha industri kecil dan menengah unggulan	3.127,18 Ton/Thn 162,492 Unit/Thn	3.152,18 Ton/Thn 222,492 Unit/Thn			
	2. Berkembangnya ragam usaha dan produk Umi, Industri kecil dan menengah yang berdaya saing	Peningkatan kualitas kelembagaan UMi dan IKM	Jumlah ragam usaha UMi	86	150	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
			Jumlah ragam usaha Industri kecil dan menengah	44	54	Program Penataan Struktur Industri	Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
			Jangkauan pasar produk UMi	DK =100%	DK=98,5 %; AK=1,0 %; AP = 0,5 %	Program Pengembangan sarana dan prasarana UMi	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
			Jangkauan pasar produk unggulan industri kecil dan menengah	DK =100%	DK=98,0 %; AK=1,0 %; AP = 1,0 %	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
						program pembinaan perdagangan kaki lima dan asongan	Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
			Kontribusi Umi, industri kecil dan menengah terhadap PDRB		8,88%	9,78%	Program Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Mikro dan Industri Kecil	Koperasi dan UKM

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	
4. Mengembangkan pariwisata berkelanjutan untuk menopang pertumbuhan ekonomi	1. Berkembangnya destinasi wisata	Pengembangan industri pariwisata secara komprehensif seluruh sistem kepariwisataan	Kunjungan wisata	44.222	104.000	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,11%	1,80%	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	1,2 M	20% 2,1 M	Program Pengembangan Kemitraan	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	2. Terjaganya kelestarian warisan budaya sebagai aset wisata	Penguatan upaya pelestarian warisan budaya	Persentase benda, situs, benda, kawasan cagar budaya, seni dan kebudayaan daerah yang dilestarikan dengan program pariwisata		25%	42%	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
							Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
							Program pengembangn kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
							Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang	1. Meningkatnya konektivitas daerah	Peningkatan peran aktif Pemda dalam mendukung program nasional pembangunan	Indeks konektivitas kabupaten	1	1,06	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
mendukung kegiatan ekonomi		pelabuhan Muntok dan Jembatan Teluk Kelabat menghubungkan Kecamatan Parittiga (Tj Ru) dan Belinyu (Tj Gudang)				Program pembangunan dan Peningkatan jalan dan jembatan	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
						Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
						Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Peningkatan sarana prasarana perhubungan darat						Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
								Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
								Program peningkatan pelayanan angkutan	Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
										Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Program Pembangunan jalan inspeksi irigasi	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**MISI 3.
MEMBANGUN MASYARAKAT YANG MAJU DAN BERKUALITAS**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1. Meningkatkan Pembangunan Manusia	1. Meningkatnya kualitas pendidikan	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Dasar	Peringkat ujian Nasional se-provinsi Bangka Belitung	SD 3, SMP 6	SD 1, SMP 1	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Angka Harapan Lama Sekolah	11,48	13,35	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Wajib Belajar 9 Tahun	Pendidikan	
		Peningkatan kemampuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten	7,43	8,26	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	
				Pengembangan keahlian masyarakat melalui pendidikan kejuruan sesuai potensi daerah	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan		
	2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan	Perluasan cakupan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat miskin oleh Pemda	Angka Harapan Hidup	69,46	69,61	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	
				Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Kesehatan	Dinkes		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	kesehatan	Pengembangan sarana prasarana pelayanan kesehatan				Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Dinkes
						Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Kesehatan	Dinkes
						Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Kesehatan	Dinkes
						Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Dinkes
						Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinkes
	3. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	38 Kasus	84,85% 33 Kasus	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Dinas Dalduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Dinas Dalduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
						Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Dinas Dalduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
						Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Dinas Dalduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
	4. Meningkatnya minat dan wadah pengembangan olahraga	Pembinaan olahraga daerah	Prestasi olahraga pendidikan di tingkat Provinsi	Peringkat 7	Kejurda 3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Peringkat olahraga prestasi di tingkat provinsi			Peringkat ke 6	Peringkat ke 4	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga			
					Program Penyelenggaraan olahraga daerah			

MISI 4.**MEWUJUDKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1. Meningkatkan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan	Terwujudnya masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang berbudaya/ berwawasan lingkungan	Peningkatan kesadaran dan budaya tentang lingkungan hidup	Persentase desa/kelurahan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat desa/kelurahan (%)	N/A	11%	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Peningkatan peran aktif komunitas masyarakat/ LSM dalam pembinaan dan kontrol kualitas lingkungan hidup	Jumlah organisasi masyarakat sipil (LSM), komunitas (Civil Society Organization/ CSO) yang bergerak dibidang lingkungan hidup secara aktif	7	12			
		Peningkatan kontrol dan pembinaan pengelolaan lingkungan pelaku usaha dan atau kegiatan	Persentase usaha dan atau kegiatan yang melakukan pengelolaan & pemantauan lingkungan secara baik (%)	30%	70%	Program Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	1. Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan	Pembangunan sistem pengelolaan persampahan yang berkelanjutan	Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu	9%	19%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	2. Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan permukiman	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang sanitasi lingkungan dan peningkatan fasilitas sanitasi masyarakat	Persentase penduduk yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak	78,75%	95%	Program pengembangan lingkungan sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	3. Terkendalinya bencana banjir	Pembangunan sistem & melakukan pengendalian banjir	Persentase desa/kelurahan/ titik banjir yang dimitigasi thd banjir/genangan air	N/A	100%	Program pengendalian banjir	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong						PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1. Terwujudnya pemulihan lahan kritis	Membangun sistem dan melakukan pemulihan/ revegetasi lahan kritis (diluar kawasan hutan dan bukan lahan izin usaha perusahaan) berbasis masyarakat secara kolaboratif	Persentase luas lahan kritis yang berhasil dipulihkan menjadi produktif	N/A	2%	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi akhir RPJMD 2021	Program	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	2. Terwujudnya konservasi sumber air	Peningkatan koordinasi dan konservasi air diantara para pihak dan pelaksana konservasi	Persentase sumber air yang telah di konservasi	26%	28%	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
2. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap produk hukum penataan ruang dalam mendukung perlindungan lingkungan hidup	Menjagadamen ingkatnya perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang	Persentase pengajuan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	N/A	100%	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Updating data spasial dan meningkatkan koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan produk hukum penataan ruang						
	Meningkatnya luasan kawasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	Melakukan penetapan, penataan dan pengembangan serta pemeliharaan RTH	Persentase ruang terbuka hijau	2%	2,90%	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Program-program yang dijabarkan pada Bab VII merupakan program-program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Program-program tersebut merupakan program-program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) kepala daerah dan amanat/kebijakan nasional definitif yang harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk prioritas bidang pendidikan minimal 20 persen. Program-program tersebut berhubungan langsung dengan kepentingan publik, memiliki kepentingan dan nilai manfaat tinggi, serta memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit tinggi pada capaian visi/misi daerah. Program-program unggulan menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan. Suatu urusan dapat menjadi prioritas tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya.

Membaca kondisi umum daerah, permasalahan dan isu strategis yang ada, tantangan utama dalam perencanaan pembangunan daerah jangka menengah di Kabupaten Bangka Barat di tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 berada pada empat tantangan utama, yakni :

1) Tata kelola pemerintahan yang lebih baik

Regulasi terkait Pemerintahan Daerah, Aparatur Sipil Negara, Desa, dan lainnya yang bersifat mendorong pemerintah daerah untuk lebih handal dalam tata kelola pemerintahan, serta tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap profesionalitas birokrasi sebagai unsur pelayanan masyarakat menjadi salah satu tantangan Kabupaten Bangka Barat dalam lima tahun ke depan. Gambaran keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik seperti opini atas laporan keuangan daerah, pengukuran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan lainnya harus menjadi prioritas daerah sebagai ukuran menjawab tantangan pembangunan daerah lima tahun ke depan.

2) Peningkatan daya saing daerah ditengah ancaman globalisasi

Daya saing Kabupaten Bangka Barat secara statistik masih bertumpu kepada sektor industri pengolahan logam timah. Padahal secara *trend series* sektor ini mengalami penurunan pertumbuhan secara signifikan dari tahun ke tahun. Sektor ini pun menjadi salah satu penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan secara makro. Diperlukan sebuah cara pandang baru untuk memutar arah daya saing daerah ke sektor potensial lain misalnya sektor perikanan, pertanian, pariwisata, perdagangan dan industri melalui upaya-upaya pengungkit dan strategis dalam lima tahun kedepan di tengah ancaman globalisasi seperti Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) dan pola perdagangan bebas dunia yang sudah terjadi di lingkup nasional.

3) Peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat

Pembangunan kualitas kesejahteraan masyarakat umumnya diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari indikator pengukuran IPM, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat di daerah masih menunjukkan kualitas kesejahteraan masyarakat yang belum baik. Masih diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat ditengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap aspek pelayanan oleh pemerintah di bidang pelayanan umum pendidikan, kesehatan, kemudahan berusaha dan lainnya.

4) Keselarasan lingkungan dengan pembangunan

Salah satu aspek penting yang juga menjadi tantangan utama daerah dalam perencanaan jangka menengah adalah aspek lingkungan. Konsekuensi daerah pertambangan membuat Kabupaten Bangka Barat juga mengalami kerusakan lingkungan parah di darat maupun laut. Belum lagi jika dikaitkan dengan ancaman pemanasan global yang juga berpengaruh kepada produktivitas ekonomi masyarakat, keselarasan pembangunan dengan kebutuhan lingkungan asri menjadi keharusan bagi pemerintah dalam upaya mewujudkan *sustainable development* yang berhasil.

Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan di dalamnya menjadi strategis, maka perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding program yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, program unggulan harus diprioritaskan terlebih dahulu. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan prioritas ini, maka dimungkinkan untuk program-program tertentu dilaksanakan dengan skema pembiayaan tahun

jamak (*multi year*). Skema tahun jamak ini diperuntukkan bagi program-program yang membutuhkan pembiayaan besar atau skala pengerjaan yang luas sehingga tidak memungkinkan diselesaikan pada satu tahun anggaran.

Indikasi program prioritas berikut kerangka pendanaannya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 8.1.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Bangka Barat

PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir (2021)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021				
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
SELURUH PERANGKAT DAERAH																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	47.803,00	100%	48.000,00	100%	50.000,00	100%	52.389,45	100%	55.273,93	100%	57.902,62	100%	Program rutin	Seluruh Perangkat Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Status capaian kinerja keuangan	100%	100%	600,00	100%	784,00	100%	800,00	100%	800,00	100%	800,00	100%	800,00	100%	Program rutin	Seluruh Perangkat Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	29.484,82	100%	30.047,00	100%	32.437,58	100%	34.500,00	100%	36.500,00	100%	40.000,00	100%	Program rutin	Seluruh Perangkat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Sumber Daya Aparatur dalam bekerja	100%	100%	4.500,00	100%	4.976,22	100%	5.500,00	100%	6.200,00	100%	6.500,00	100%	7.000,00	100%	Program rutin	Seluruh Perangkat Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalnya disiplin aparatur	100%	100%	2.000,00	100%	2.000,00	100%	2.000,00	100%	2.000,00	100%	2.000,00	100%	2.000,00	100%	Program rutin	Seluruh Perangkat Daerah
TOTAL PROGRAM RUTIN				84.387,82		85.807,22		90.737,58		95.889,45		101.073,93		107.702,62			
URUSAN WAJIB																	
PENDIDIKAN																	
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase anak usia dini yang mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai standar nasional pendidikan	32%	34%	8.480,00	58%	7.200,00	60%	7.500,00	62%	8.500,00	64%	9.000,00	65%	10.000,00	65%	Pendidikan	Disdikpora
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pendidikan anak usia pendidikan dasar sesuai standar nasional pendidikan			8.898,00		30.191,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		Pendidikan	Disdikpora
		- SD	99,88	99,88	99,88	99,88	99,88	99,88	99,94	99,95	99,95						
		- SMP	82,21	84	84	84	84	88	89	89							
Program Pendidikan Menengah	APK	67,96%	68%	7.816,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		Pendidikan	Disdikpora
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Akreditasi sekolah SD dan SMP minimal B	SD 65,22%, SMP 37,21%	SD 69,22%, SMP 43,21%	693,00	SD 72,22%, SMP 50,21%	750,00	SD 75,72%, SMP 65,21%	500,00	SD 79,22%, SMP 74,71%	500,00	SD 82,42%, SMP 82,21%	350,00	SD 85%, SMP 90%	350,00	SD 85%, SMP 90%	Pendidikan	Disdikpora
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Rata-rata Nilai UKG	60,18	65	11.010,00	70	1.690,00	75	1.750,00	80	1.835,00	85	1.925,00	90	2.000,00	90	Pendidikan	Disdikpora
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Wajib Belajar 9 Tahun	Sekolah SD/dan SMP yang memenuhi SNP bidang Sarana dan Prasarana	0	0	1.963,00	SD 6, SMP 1	10.056,00	SD 8, SMP 2	7.500,00	SD 12, SMP 4	8.250,00	SD 14, SMP 5	9.725,00	SD 16, SMP 6	10.100,00	SD 16, SMP 6	Pendidikan	Disdikpora
Program Pendidikan Non Formal	Jumlah lembaga PKBM yang diakreditasi	0	1	139,00	2	6.000,00	3	6.000,00	4	6.000,00	5	6.000,00	6	6.000,00	6	Pendidikan	Disdikpora
Pendidikan Luar Biasa	Akreditasi Sekolah Luar Biasa (SLB) tingkat SDLB, - Tuna Rungtu/- Tuna Grahita	n/a	B	468,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		Pendidikan	Disdikpora
Program Penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana APBN dan Block Grant	Persentase serapan Dana Alokasi Khusus (DAK)	94,31%	100%	2.265,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		Pendidikan	Disdikpora

PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir (2021)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021				
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
JUMLAH				41.732,00		55.887,00		53.250,00		55.085,00		57.000,00		58.450,00			
KESEHATAN																	
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	63,89%	65%	4.307,00	70%	4.580,00	75%	4.420,00	80%	4.332,00	85%	4.245,00	90%	4.160,00	90%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Perorangan	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas yang berkunjung ke Puskesmas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	n/a	-		65%	450,00	70%	450,00	75%	481,00	80%	496,00	85%	650,00	85%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang berkunjung ke Puskesmas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	n/a	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun yang berkunjung ke Puskesmas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	n/a	-		75%		80%		85%		90%		95%		95%		
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang melaksanakan BOK	100%	100%	15.327,00	100%	1.707,00	100%	1.707,00	100%	1.707,00	100%	1.707,00	100%	1.707,00	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	81,57%	81%	22,00	82%	67,00	83%	108,00	84%	117,00	85%	125,00	86%	135,00	86%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
Program pengawasan dan pengendalian Obat dan kesehatan makanan	Persentase penduduk terhadap akses air minum	n/a			85%	112,79	85,50%	150,00	86%	150,00	86,50%	150,00	87%	150,00	87%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Persentase TPM dan TTU yang memenuhi syarat kesehatan	n/a			90%		91%		91%		92%		93%		93%		
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga yang ber PHBS	40%	41%	641,00	42%	1.075,00	43%	1.614,00	44%	1.595,00	45%	1.765,00	50%	1.943,00	50%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi Kekurangan Gizi (Under Weight) pada Balita	16,9%	16,9%	57,00	15,9%	165,00	14,9%	140,00	13,9%	147,00	12,9%	158,00	11,9%	168,00	11,9%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase rumah sehat	75,38%	77%	161,40	78%	360,78	80%	370,00	82%	375,00	84%	400,00	86%	425,00	90%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Persentase puskesmas yang melaporkan dan melakukan tata laksana penyakit menular	100%	100%	965,00	100%	910,00	100%	1.118,00	100%	1.192,00	100%	1.160,00	100%	1.160,00	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	n/a	100%	1.066,00	100%	1.250,00	100%	1.300,00	100%	1.400,00	100%	1.600,00	100%	1.600,00	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	n/a	50%		50%		50%		60%		70%		70%		70%		
	Persentase orang di satuan pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan higiene sanitasi pangan sesuai standar	n/a	-		5,49%		15%		25%		35%		45%		45%		
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	n/a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir (2021)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2016		2017		2018		2019		2020		2021					
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target				Rp (Juta)	
	Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	n/a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	n/a	10%		10%		10%		20%		20%		20%		20%			
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin yang terjamin pelayanan kesehatan	100%	100%	21.316,00	80%	11.900,00	85%	12.000,00	90%	13.500,00	95%	14.000,00	100%	12.000,00	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya yang sesuai standar	0%	5%	9.739,00	3,13%	6.000,00	8,33%	6.500,00	13,54%	7.000,00	18,75%	7.500,00	23,96%	8.000,00	23,96%	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Meningkatnya sarana dan prasarana Rumah Sakit	55%	58%	2.659,81	60%	5.669,82	62%	5.969,82	65%	6.169,82	67%	6.369,82	79%	6.719,82	79%	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan	100%	100%	748,99	100%	950,00	100%	1.000,00	100%	1.000,00	100%	1.000,00	100%	1.000,00	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	12 Dokter Spesialis, 7 dokter umum dan 39 Tenaga kesehatan	13 Dokter Spesialis, 6 dokter umum dan 47 Tenaga kesehatan	4.136,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase Posyandu lansia aktif	100%	100%	28,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
Program Penyakit Tidak Menular	Persentase puskesmas yang melaporkan dan melakukan tatalaksana penyakit tidak menular	100%	100%	31,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
Program Penyakit Menular	Persentase puskesmas yang melaporkan dan melakukan tatalaksana penyakit menular	100%	100%	1.066,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Cakupan capaian kinerja program Perangkat Daerah kesehatan	n/a	80%	155,00	85%	180,00	90%	200,00	95%	218,00	100%	240,00	100%	264,00	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
Program Kebijakan Manajemen Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan primer dan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat	100%	100%	263,00	100%	10.246,00	100%	10.246,00	100%	10.246,00	100%	10.246,00	100%	10.246,00	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM aparatur kesehatan sesuai kompetensi	80%	80%	2.528,89	85%	3.240,00	85%	3.450,00	90%	3.615,00	90%	3.850,00	95%	4.000,00	95%	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan (UKMP)	n/a	100%	583,00	100%	155,00	100%	239,00	90%	263,00	95%	289,00	100%	318,00	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
Program Kesehatan komunitas dan kesehatan kerja	Cakupan penjurangan kesehatan siswa SD dan setingkat	n/a	-	100%	338,70	100%	400,00	100%	420,00	100%	425,00	100%	450,00	100%	450,00	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Usaha	n/a	-	75%	-	80%	-	80%	-	85%	-	90%	-	90%	-	90%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya perilaku masyarakat untuk beraktifitas fisik	n/a	-	50%	-	55%	-	55%	-	60%	-	65%	-	65%	-	65%	Kesehatan	Dinas Kesehatan

PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir (2021)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021				
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tercapainya akreditasi Rumah sakit	-	-	421,64	Terakreditasi	4.284,00	Terakreditasi	5.000,00	Terakreditasi	5.000,00	Terakreditasi	5.000,00	Terakreditasi	5.000,00		Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Predikat strata Akreditasi Puskesmas	-	Dasar (2 puskesmas)	343,00	Dasar (4 puskesmas)	840,00	Dasar (6 puskesmas)	974,00	Dasar (6 puskesmas), madya (2 puskesmas)	1.121,00	Dasar (4 puskesmas), Madya (4 puskesmas)	1.284,00	Dasar 2, Madya 6	550,00	Dasar 2 puskesmas), Madya (6 puskesmas)	Kesehatan	Dinas Kesehatan
Program pelayanan kegawatdaruratan	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten	100%			100%	3.041,20	100%	3.000,00	100%	3.000,00	100%	3.000,00	100%	3.000,00	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan (UKMP)	0	100%	39,00	100%	125,00	100%	50,00	90%	55,00	95%	60,00	100%	66,00	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase balita yang berkunjung ke puskesmas dan jaringannya mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	n/a	50%	1.136,93	55%	1.370,00	60%	1.400,00	65%	1.400,00	70%	1.500,00	75%	1.500,00	75%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Persentase ibu hamil yang berkunjung ke puskesmas dan jaringannya mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	94,17%	95%		96%		97%		98%		99%		100%		100%		
	Persentase ibu bersalin yang berkunjung ke puskesmas dan jaringannya mendapat pelayanan persalinan sesuai standar	n/a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase bayi baru lahir yang berkunjung ke puskesmas dan jaringannya mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	n/a	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Program Peningkatan Mutu Layanan Kepada Masyarakat (BLUD)	Meningkatnya Mutu Pelayanan dan pendukung pelayanan medis yang didanai dari BLUD	n/a	100%	18.500,00	100%	15.000,00	100%	15.000,00	100%	15.000,00	100%	17.000,00	100%	17.000,00	100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
JUMLAH				86.242,80		74.017,29		76.805,82		79.503,82		83.569,82		82.211,82			
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
Program pembangunan dan Peningkatan jalan dan jembatan	Panjang jalan dan jembatan yang dibangun	898,01 KM dan 1036 M	902,01 KM dan 1068 M	105.180,77	902,01 KM dan 1068 M	43.640,00	902,01 KM dan 1068 M	47.250,00	902,01 KM dan 1068 M	50.850,00	902,01 KM dan 1068 M	54.450,00	902,01 KM dan 1068 M	57.900,00	902,01 KM dan 1068 M	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan struktur dan kondisi jalan dan jembatan	650,54 KM dan 833,5 M	670,54 KM dan 935,5 M		693,54 KM dan 950,5 M		718,54 KM dan 965,5 M		745,54 KM dan 980,5 M		774,54 KM dan 995,5 M		805,54 KM dan 1010,5 M		805,54 KM dan 1010,5 M		
Program Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Berkembangnya Kawasan Strategis Kabupaten	-	-	890,00	100%	1.000,00	100%	1.000,00	100%	1.000,00	100%	1.000,00	100%	1.000,00	100%	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan dan jembatan dengan kondisi baik	72,26	72,98	53.467,00	73,71	85.385,98	74,45	65.000,00	75,19	85.000,00	75,95	100.000,00	76,71	100.000,00	76,71	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Persentase temuan hasil inspeksi kondisi jalan dan jembatan yang ditindaklanjuti	N/A	-	-	-	-	100%	400,00	100%	400,00	100%	400,00	100%	400,00	100%	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Persentase titik/lokasi/ kawasan rawan banjir yang memiliki sistem drainase yang baik	N/A	-	150,00	20,00%	600,00	40,00%	600,00	60,00%	600,00	80,00%	600,00	100%	600,00	100%	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir (2021)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021				
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
Pembangunan turap/talud/ brojong	Terkendalinya dampak kerusakan pantai	N/A	100%	200,00	100%	1.555,00	100%	1.500,00	100%	1.500,00	100%	1.500,00	100%	1.500,00	100%	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemeliharaan jalan dalam kabupaten	Cakupan jalan dalam kabupaten yang terpelihara	N/A	100%	2.000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Terfasilitasinya kegiatan kebinarmargaan	-	-	-	100%	1.350,00	100%	1.500,00	100%	1.500,00	100%	1.500,00	100%	1.500,00	100%	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah daerah jaringan irigasi yang dibangun	-	18,43	23.076,00	27,56	27.600,00	57,27	53.856,00	77,12	44.460,00	94,76	44.598,00	94,76	21.630,00	94,76	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Jumlah daerah jaringan irigasi yang dikelola	-	-	-	-	-	-	-	19,30	-	28,87	-	59,98	-	59,98		
Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	-	-	-	100%	600,00	100%	1.000,00	100%	1.000,00	100%	1.000,00	100%	1.000,00	100%	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengendalian Banjir	data identifikasi, monitoring dan evaluasi rawan banjir/ genangan, panjang sungai yang menyebabkan rawan banjir yang dinormalisasi	-	-	7.499,00	Ada	18.245,00	ada	18.500,00	ada	18.750,00	ada	19.000,00	ada	19.500,00	ada	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase panjang sungai yang dinormalisasi/panjang sungai yang rawan banjir	-	20%	-	30%	-	40%	-	50%	-	60%	-	70%	-	70%		
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih sesuai standar	n/a	84,15%	-	85%	2.000,00	85%	2.200,00	87%	2.500,00	90%	3.000,00	100%	3.000,00	100%	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase rumah tangga mendapat pengelolaan air limbah rumah tangga sesuai standar	n/a	75%	-	75%	-	75%	-	80%	-	90%	-	100%	-	100%		
Program Pembangunan jalan inspeksi irigasi	Panjang jalan inspeksi irigasi yang dibangun	-	-	-	3,5 KM	2.030,00	11,5 KM	4.640,00	18,5 KM	4.060,00	28 KM	4.930,00	28 KM	0,00	28 KM	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	-	-	-	100%	260,00	100%	300,00	100%	300,00	100%	300,00	100%	300,00	100%	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah kebijakan tata ruang yang ditetapkan	N/A	-	602,00	4	2.200,00	6	2.000,00	7	2.000,00	8	2.000,00	10	2.000,00	10	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pemanfaatan Ruang	Persentase jumlah badan usaha yang penggunaan lahan ushanya sesuai RTRWK	N/A	-	-	-	-	50%	500,00	60%	500,00	70%	500,00	80%	500,00	80%	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pengajuan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang bermasalah	N/A	15%	-	12%	-	10%	2.500,00	8%	400,00	6%	450,00	4%	500,00	4%	PU dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
JUMLAH				193.064,77		186.465,98		202.746,00		214.820,00		235.228,00		211.330,00			
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase penduduk yang mendapatkan sanitasi yang memadai dan akses aman air	-	100%	4.566,00	100%	2.000,00	100%	3.000,00	100%	3.000,00	100%	3.000,00	100%	3.000,00	100%	Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Berhubungan
Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Terkelolanya areal pemakaman	-	100%	2.669,74	100%	1.600,00	100%	1.600,00	100%	1.600,00	100%	1.600,00	100%	1.600,00	100%	Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Berhubungan
Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Persentase desa dengan infrastruktur dasar yang memadai	N/A	-	29.739,00	-	16.892,50	50%	15.000,00	65%	15.000,00	75%	15.000,00	85%	15.000,00	90%	PU dan Tata Ruang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir (2021)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021				
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial	Persentase rumah korban bencana yang mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah sesuai standar rumah layak huni	n/a	-	-	100%	3.000,00	100%	3.000,00	100%	3.000,00	100%	3.000,00	100%	3.000,00	100%	Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Program peningkatan kualitas permukiman kumuh	persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan			-	20%	200,00	20%	400,00	20%	400,00	20%	400,00	20%	400,00	100%	Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
JUMLAH			36.974,74		23.692,50		23.000,00		23.000,00		23.000,00		23.000,00				
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan akibat gangguan trantibum	n/a	100%	1.640,63	100%	1.755,00	100%	1.800,00	100%	2.300,00	100%	2.000,00	100%	3.500,00	100%	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan trantibum dalam semua aktifitas	30 kali/kecamatan/tahun	30	30	30	36	36	36	48	48	48	48	48				
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat laporan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang disusun		100%	591,32	100%	190,00	100%	300,00	100%	300,00	100%	300,00	100%	300,00	100%	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya kegiatan lintas agama dan lintas golongan		100%	753,75	100%	805,00	100%	800,00	100%	800,00	100%	800,00	100%	800,00	100%	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah Terkait
Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya seminar, talk show, diskusi, pentas, festival dan lomba peningkatan wawasan kebangsaan		100%	349,00	100%	348,33	100%	350,00	100%	350,00	100%	350,00	100%	350,00	100%	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah Terkait
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Persentase warga negara yang menjadi korban dan terdampak bencana yang menerima layanan sesuai standar	n/a	100%	281,46	100%	471,96	100%	800,00	100%	800,00	100%	1.000,00	100%	1.000,00	100%	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase warga negara yang menjadi korban bencana yang bantuan kebutuhan dasar	n/a	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran yang menerima layanan sesuai standar	100,00%	100%	2.000,00	100%	1.000,00	100%	1.000,00	100%	1.000,00	100%	1.000,00	100%	1.000,00	100%	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja/ Dinas PU dan Penataan Ruang
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat partisipasi dalam Pemiluakada (%)	-		167,76	74	189,75		100,00	74	200,00		250,00	74	250,00		Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah Terkait
Program pendataan dan pemantauan aktifitas orang asing, organisasi non pemerintah dan lembaga asing	persentase pelanggaran administrasi sesuai peraturan perundang-undangan	-	-	-	0%	71,00	0%	75,00	0%	80,00	0%	80,00	0%	80,00	0%	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah Terkait
JUMLAH			5.783,92		4.831,04		5.225,00		5.830,00		5.780,00		7.280,00				
SOSIAL																	

PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir (2021)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2016		2017		2018		2019		2020		2021					
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	82,33	80%	2.107,11	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase anak penyandang disabilitas dalam panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial sesuai standar	n/a	0%	2.316,00	0%	639,60	0%	800,00	0%	800,00	100%	800,00	100%	800,00	100%	800,00	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase penyandang disabilitas dalam panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial sesuai standar	n/a	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Cakupan Penyandang penyakit sosial yang mengalami kemajuan peningkatan perubahan sikap mental	-	80%	25,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang mendapat bantuan dalam usaha menyelenggarakan kesejahteraan sosial	-	50%	60,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Bantuan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase korban bencana yang berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial sesuai standar	n/a	100%	-	100%	4.078,00	100%	5.000,00	100%	5.000,00	100%	6.000,00	100%	6.000,00	100%	6.000,00	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase orang lanjut usia dalam panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial sesuai standar	0,00%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase orang tuna sosial dalam panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial sesuai standar	0,00%	0%	-	0%	-	0%	-	10%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan lembaga sosial yang aktif	-	-	-	100%	388,00	100%	400,00	100%	400,00	100%	400,00	100%	400,00	100%	400,00	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Cakupan keberhasilan pemberdayaan keluarga/kelompok miskin	-	-	-	50%	-	50%	-	50%	-	50%	-	50%	-	50%	-	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Sosial penanganan bencana	Cakupan penanganan cepat tanggap darurat dan kejadian luar biasa	-	100%	-	100%	470,00	100%	500,00	100%	500,00	100%	500,00	100%	500,00	100%	500,00	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
JUMLAH				4.508,11		5.575,60		6.700,00		6.700,00		7.700,00		7.700,00				
KETENAGAKERJAAN																		
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	n/a	60%	591,00	65%	1.005,00	65%	1.000,00	70%	1.000,00	70%	1.000,00	75%	1.000,00	75%	1.000,00	Ketenagakerjaan	Dinas PM, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi
Peningkatan Kesempatan Kerja	Cakupan tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	n/a	50%	144,30	50%	144,33	50%	200,00	50%	200,00	50%	200,00	50%	200,00	50%	200,00	Ketenagakerjaan	Dinas PM, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Cakupan penyelesaian kasus ketenagakerjaan	n/a	100%	191,61	100%	395,00	100%	400,00	100%	400,00	100%	400,00	100%	400,00	100%	400,00	Ketenagakerjaan	Dinas PM, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi

PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir (2021)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021				
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
JUMLAH			926,91		1.544,33		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00				
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
Program Peningkatan Kualitas dan Tumbuh Kembang Anak	Kegiatan Pemerintah Daerah yang memiliki dukungan dalam peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak	-	3 kegiatan	218,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP & PA
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase pemenuhan hak anak	n/a	60%	787,00	65%	400,00	70%	450,00	75%	500,00	80%	550,00	80%	550,00	80%	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP & PA
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	1.500,00	100%	1.500,00	100%	2.600,00	100%	1.500,00	100%	1.500,00	100%	1.500,00	100%	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP & PA
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan PUG	3,13%	6,25%	86,00	15,63%	400,00	25,00%	450,00	37,50%	500,00	56,25%	550,00	62,50%	600,00	62,50%	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP & PA
Program Peningkatan kualitas hidup Perempuan	Jumlah desa sayang ibu			272,00	9 desa/4 kec.	790,61										Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP & PA
Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	51 kasus	-	55 kasus	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP & PA
	Penanganan kasus terhadap perlindungan perempuan dan anak	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP & PA
Program Pemenuhan hak anak	Persentase Pemenuhan Hak Anak	-	-	70%	270,00	75%	300,00	75%	300,00	80%	300,00	80%	300,00	80%	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP & PA	
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah desa lokasi Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	24 desa	4 desa	850,00	4 desa	850,00	4 desa	850,00	4 desa	850,00	4 desa	850,00	4 desa	850,00	24 desa	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP & PA
JUMLAH			3.713,50		4.440,61		4.900,00		3.900,00		4.000,00		4.050,00				
KETAHANAN PANGAN																	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Tingkat penguatan cadangan pangan kabupaten	-	50%	716,00	50%	3.250,00										Ketahanan pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian)	Ketercapaian swasembada pangan daerah	18,36%	18,36%	-	22%	-	25%	500,00	27%	500,00	30%	500,00	32%	500,00	32%	Ketahanan pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
Program Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	Tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88,67	469,00	90,93	309,45	93,2	300,00	95,47	300,00	97,73	300,00	100	300,00	100	Ketahanan pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	
Program Penyediaan Informasi Ketahanan Pangan Daerah	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses serta ketersediaan pangan daerah	80%	64,00	85%	140,00	90%	100,00	90%	100,00	90%	100,00	90%	100,00	90%	Ketahanan pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	
Program Pengembangan Kelembagaan Petani	Persentase poktan dengan klasifikasi lanjut	25%	190,00	35%	190,00	45%	200,00	55%	200,00	60%	200,00	65%	200,00	65%	Ketahanan pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	
Program Pengembangan Penyuluhan	Peningkatan dan Pengelolaan Laporan Penyuluh		45,00	70%	45,00	100%	100,00	100%	100,00	100%	100,00	100%	100,00	100%	Ketahanan pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Persentase penyuluh pertanian yang dibina/diberdayakan	-	85%	1.673,00	88%	5.910,71	90%	3.100,00	92%	3.100,00	95%	3.200,00	100%	3.300,00	100%	Ketahanan pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
JUMLAH			3.157,00		9.845,16		4.300,00		4.300,00		4.400,00		4.500,00				
PERTANAHAN																	

PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir (2021)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021				
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Luasan ketersediaan lahan yang disiapkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah daerah	33%	100%	471,00	100%	378,45	100%	1.000,00	100%	1.000,00	100%	1.000,00	100%	1.000,00	100%	Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Perangkat Daerah terkait
Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase konflik lahan yang diselesaikan	-	100%	-	100%	-	100%	50,00	100%	50,00	100%	50,00	100%	50,00	100%	Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Perangkat Daerah terkait
JUMLAH				471,00		378,45		1.050,00		1.050,00		1.050,00		1.050,00			
LINGKUNGAN HIDUP																	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah kebijakan daerah tentang pengelolaan persampahan	2	0	6.063,00	0	7.529,93	1	8.000,00	2	8.250,00	0	8.500,00	0	8.750,00	5	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah model pendayagunaan sampah yang ekonomis secara berkelanjutan	1	1		2		3		4		5		6		6		
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah kelembagaan konservasi sumber air	0	26%	537,60	26%	1.105,80	27%	1.200,00	27%	1.000,00	28%	1.250,00	28%	1.300,00	28%	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase sumber air yang terjamin kelestariannya	N/A	0		5%		10%		15%		20%		25%		25%		
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Jumlah kelembagaan yang terbentuk untuk melakukan pemulihan lahan kritis (Di luar kawasan hutan dan di luar izin usaha perusahaan)	0		-		-	1	1.000,00	3	1.500,00	5	1.750,00	7	2.000,00	Ada	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase luas lahan kritis (Di luar kawasan hutan dan di luar izin usaha perusahaan) yang dilakukan pemulihan	N/A	-		-		0,5%		1%		1,5%		2%		2%		
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola/ dikembangkan	0,50%	1%	1.076,00	1,5%	1.062,00	2%	1.250,00	2,5%	1.300,00	3%	1.500,00	3,5%	1.750,00	3,5%	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kebijakan terkait Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	N/A	2,00	20,00	4,00	57,16	6,00	60,00	8,00	65,00	10,00	70,00	12,00	80,00	12 kebijakan	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase SDM aparatur yang memahami aturan terkait pengelolaan lingkungan	N/A	40%		50%		75%		90%		100%		100%		100%		
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah desa/kelurahan yang mendapat edukasi dan promosi lingkungan hidup secara efektif dan direspon positif oleh masyarakat	N/A	0	231,30	2%	423,00	3%	600,00	5%	650,00	8%	700,00	11%	800,00	11%	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem pengelolaan lingkungan di perkantoran	N/A	0		20%		40%		60%		80%		100%		100%	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan lingkungan kepada anak didik di lingkungan sekolah/luar sekolah	N/A	5%		10%		20%		30%		40%		50%		50%	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah komunitas (CSO)/ LSM yang ada atau terbentuk dan berperan aktif	7	7		8		9		10		11		12		12	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir (2021)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021				
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha yang memiliki dokumen UKL/UPL; Amdal (Andal, RKL/RPL)	N/A	30%	1.183,00	35%	1.891,44	40%	2.150,00	50%	2.200,00	60%	2.250,00	70%	2.300,00	70%	Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang taat dalam mengelola lingkungan	N/A	30%		35%		40%		50%		60%		70%	70%			
JUMLAH				9.110,90		12.069,33		14.260,00		14.965,00		16.020,00		16.980,00			
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	B	B	494,00	B	339,50	B	500,00	B	500,00	B	500,00	B	500,00	B	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil
Program Layanan Pencatatan Sipil	Cakupan bayi berakte kelahiran	59,20%	60%	-	60%	180,10	68%	200,00	75%	200,00	83%	200,00	85%	200,00	85%	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil
	Akta kematian yang diterbitkan	30,18%	40%	-	40%		50%		60%		70%		75%	75%			
Program Pemanfaatan Sistem Informasi untuk Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Cakupan pelaksanaan dan pelayanan kependudukan dengan sistem informasi kependudukan	38%	38%	-	38%	60,00	63%	100,00	88%	100,00	100%	100,00	100%	100,00	100%	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil
JUMLAH				494,00		579,60		800,00		800,00		800,00		800,00			
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
Program Perencanaan pembangunan desa	Persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban pemerintah desa tepat waktu	-	80%	85,00	-		0,00		0,00		0,00		0,00			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan desa dengan akuntabilitas baik	n/a	20%	-	20%	133,91	25%	150,00	33%	150,00	42%	150,00	50%	150,00	50%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase pelaporan keuangan desa tertib administrasi dan tepat waktu	n/a	50%	-	50%	553,58	58%	575,00	67%	575,00	75%	600,00	100%	600,00	100%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Wilayah dan Kelembagaan	Fasilitasi Penetapan kelembagaan desa/kelurahan	-	55%	510,65	-		0,00		0,00		0,00		0,00			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Desa Mandiri	Desa mandiri yang memenuhi kriteria	-	10 desa	80,00	-		0,00		0,00		0,00		0,00			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Nasional Pembangunan Masyarakat	Persentase program pembangunan desa yang memiliki manfaat bagi masyarakat	-	75%	105,00	-		0,00		0,00		0,00		0,00			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya kerjasama antara Desa dan Kecamatan	3 kerjasama	0	6.049,00		357,00		400,00		400,00		400,00		400,00		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	keterlibatan unsur Masyarakat Dalam Membangun Desa	35%	50%		70%		70%		75%		80%		85%				
Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan	Persentase desa yang menyusun APB Desa tepat waktu	n/a	100%	-	100%	1.164,90	100%	1.200,00	100%	1.200,00	100%	1.300,00	100%	1.300,00	100%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	KECAMATAN
Program Fasilitasi pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat	Pemberdayaan masyarakat, adat dan sosial budaya	-	20%	134,50	-		0,00		0,00		0,00		0,00			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir (2021)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021				
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Tersedianya wadah pengembangan perempuan di pedesaan	-	70%	150,00	75%	275,00	100%	150,00	100%	150,00	100%	150,00	100%	150,00	100%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Yang Dibina/Diberdayakan Pemerintah Daerah	2 Posyantek	2 Posyantek	45,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Cakupan Desa yang Diadakan Pelatihan Keterampilan Manajemen BUMDes	0	14 desa	58,08	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Program Penataan Desa	Persentase Desa Swakarya	-	-	-	-	5%	100,00	5%	100,00	5%	100,00	5%	100,00	5%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Program Pendayagunaan TTG dan SDA	TTG yang dimanfaatkan	-	-	2 jenis	237,76	2 jenis	250,00	2 jenis	250,00	2 jenis	250,00	2 jenis	250,00	10 jenis	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Desa yang memanfaatkan TTG	-	-	2 desa	-	2 desa	-	2 desa	-	2 desa	-	2 desa	-	10 desa			
Program Pengembangan Perekonomian Masyarakat Desa	Meningkatnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	11 BUMDes	-	-	6 BUMDes	134,40	10 BUMDes	150,00	10 BUMDes	150,00	10 BUMDes	150,00	10 BUMDes	150,00	57 BUMDes	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur desa memenuhi standar kompetensi jabatan	-	17%	105,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Peningkatan kapasitas kelembagaan desa	Lembaga Desa yang aktif	2 lembaga desa (PKK dan LPM) di setian desa	-	30%	574,59	35%	600,00	40%	600,00	45%	600,00	50%	600,00	50%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Program Pendataan desa Kab Bangka Barat	Ketersediaan data profil dan potensi desa	-	100%	116,70	-	1 dokumen	10,00	-	1 dokumen	10,00	-	1 dokumen	10,00	-	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
JUMLAH				7.438,93		3.431,14		3.585,00		3.575,00		3.710,00		3.700,00			
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
Program Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS 15-49 tahun	2,74	508,43	2,7	335,92	2,65	369,40	2,6	406,46	2,55	447,11	2,52	491,82	2,52	Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP & PA	
	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	17%	-	0,11	-	10,48%	-	10,26%	-	0,10	-	9,91%	-	9,91%			
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Angka Kelahiran pada Remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)	66 per 1000 kelahiran	39,90	46 per 1000 kelahiran	101,42	44 per 1000 kelahiran	111,44	42 per 1000 kelahiran	122,72	40 per 1000 kelahiran	134,99	50 per 1000 kelahiran	148,49	50 per 1000 kelahiran	Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP & PA	
Program pelayanan kontrasepsi	Angka Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR) suatu cara (all methods) mendapatkan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon)	58,76%	129,70	65,2 (all methods)	360,25	65,4 (all methods)	390,00	65,6 (all methods)	435,90	65,8 (all methods)	479,49	66 (all methods)	527,44	66 (all methods)	Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP & PA	
	Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS 15-49 tahun	11,59%	-	11,33%	-	11,04%	-	10,55%	-	9,50%	-	8,70%	-	8,70%		Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP & PA	
Program Pembinaan Peran Serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Jumlah fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	-	64 PPKBD dan 160 SUB PPKBD	140,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP & PA	
Program Advokasi dan pergerakan institusi masyarakat	Cakupan peserta KB baru	-	-	80%	257,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP & PA	

PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir (2021)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021				
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
Program Penyerasian Kebijakan Pembangunan Kependudukan	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,26%	2,25%	1.112,60	2,23%	145,00	2,20%	150,00	2,18%	150,00	2,12%	150,00	2,08%	150,00	2,08%	Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP & PA
Program Pemberdayaan Ekonomi keluarga	Cakupan PUS Peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera yang ber KB	-	87%	27,57												Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP & PA
Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Cakupan keluarga sejahtera ≥ tingkat III	51,41 (Pendataan Keluarga tahun 2014)	-	-	87%	60,24	88%	400,00	89%	440,00	90%	484,00	91%	532,40	91%	Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP & PA
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Jumlah sekolah yang melaksanakan PIK Remaja di Kabupaten	-	19 sekolah	33,00												Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP & PA
Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	-	70%	29,80												Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP & PA
Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan (PLKB) yang mendapat sarana dan prasarana	Persentase Tenaga Lini Lapangan (PLKB) yang mendapat sarana dan prasarana	-	6 UPT	194,00												Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP & PA
Program Advokasi, KIE dan Penggerakan Masyarakat	Cakupan keluarga sejahtera ≥ tingkat III	51,41%	-	-	87%	100,00	88%	110,00	89%	121,00	90%	133,12	91%	146,41	91%	Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP & PA
Program Pengendalian Penduduk	Pertumbuhan Penduduk	-	2%	78,60	2%	145,00										Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP & PA
Program Peningkatan Sarana Kerja bagi PPLKB/PKB/PLKB	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana UPT	-	100%	276,00												Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP & PA
JUMLAH				2.570,40		1.504,87		1.530,84		1.676,08		1.828,71		1.996,56			
PERHUBUNGAN																	
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Tersedianya prasarana perhubungan	20,75	20,75	2.339,00	20,75	2.270,00	26,42	3.595,00	30,19	2.286,97	33,96	1.280,00	39,62	2.235,00	39,62	Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan
Program peningkatan pelayanan angkutan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah kabupaten yang telah tersedia	33,33	33,33	511,00	33,33	2.970,00	57,14	570,00	57,14	300,00	57,14	200,00	57,14	100,00	57,14	Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan
Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Cakupan fasilitas perlengkapan jalan yang terpelihara	100%	100%	149,00	100%	135,00									100%	Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Terpenuhi standar keselamatan transportasi	n/a	35%	39,25	40%	2.088,24									40%	Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah kasus kecelakaan	48 kasus	46 kasus	800,00	44 kasus	1.731,90	42 kasus	2.965,00	40 kasus	1.600,00	38 kasus	2.470,00	36 kasus	1.956,77	36 kasus	Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan
JUMLAH				3.838,25		9.195,14		7.130,00		4.186,97		3.950,00		4.291,77			
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
Program pengembangan komunikasi, informatika dan media massa	Peningkatan masyarakat yang memanfaatkan informasi melalui media online	1.863	5%	1.051,00	5%	2.000,00	5%	2.000,00	5%	2.000,00	5%	2.000,00	5%	2.000,00	2.497	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo/ Sekretariat Daerah

PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir (2021)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021				
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah kegiatan pelatihan SDM aparatur Pemerintah Daerah dalam bidang komunikasi dan informasi	1	1	37,98	1	100,00	2	100,00	2	100,00	2	100,00	2	100,00	2	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi	Cakupan Perangkat Daerah yang menggunakan media sosial sebagai sarana interaksi pemerintah dan masyarakat	47%	47%	115,00	78%	113,00	100%	400,00	100%	400,00	100%	400,00	100%	400,00	100%	Komunikasi dan Informatika	Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah terkait
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya media dan sarana informasi	n/a	-	-	30%	550,00	30%	200,00	30%	200,00	30%	200,00	30%	200,00	30%	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Tersebar nya informasi publik secara efektif	23,08%	40,00%	536,00	50%	1.850,00	60%	2.000,00	70%	2.000,00	80%	2.000,00	90%	2.000,00	90%	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
JUMLAH				1.739,98		4.613,00		4.700,00		4.700,00		4.700,00		4.700,00			
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																	
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Jumlah UMKM yang produktif	60	100	273,30	200	492,75	200	500,00	200	500,00	200	500,00	200	500,00	200	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Persentase pelatihan kewirausahaan dan Umi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah	3,31	3,97	206,00	5	60,00	5,29	200,00	5,95	200,00	6,61	200,00	7,27	200,00	7,27	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru	n/a	50	206,00	50	206,00										Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Lembaga Keuangan yang menyediakan permodalan UMK dan Koperasi	n/a	1 lembaga	26,79												Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	88,46%	89,09%	457,75	89,66%	775,00	90,16%	1.000,00	90,63%	1.000,00	91,04%	1.000,00	91,43%	1.000,00	91,43%	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang memiliki akses terhadap pendamping, dan Inkubator bisnis bagi usaha mikro	0,09	0,11	100,00	0,13	150,00	0,15	200,00	0,16	200,00	0,18	200,00	0,20	200,00	0,20	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
Program pengembangan kewirausahaan usaha mikro	Persentase Usaha Mikro yang mendapat penyuluhan, pelatihan, bantuan teknis dan pendampingan	0,68	1,36	206,00	2,04	60,00	2,73	300,00	3,41	300,00	4,09	300,00	4,77	300,00	4,77	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
Program Pengembangan permodalan Usaha Bagi koperasi dan usaha mikro	Jumlah koperasi dan usaha mikro yang memperoleh fasilitas kredit mikro	0,68	2,73	100,00	4,54	150,00	18,18	200,00	27,27	200,00	36,35	200,00	45,44	200,00	45,44	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
Program Pengembangan sarana dan prasarana Umi	Jumlah Usaha Mikro yang memperoleh sarana/prasarana usaha	17	17	100,00	17	100,00	15	100,00	15	100,00	15	100,00	15	100,00	101	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
Program Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Mikro dan Industri Kecil	Jumlah prasarana pemasaran dan promosi produk Usaha Mikro dan Industri Kecil	6	8	500,00	10	500,00	12	500,00	14	1.000,00	16	1.000,00	18	1.000,00	18	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
JUMLAH				2.175,84		2.493,75		3.000,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00			
PENANAMAN MODAL DAERAH																	
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah investasi terkait perizinan	724 M	50 M	100,00	30 M	120,00	35 M	200,00	40 M	200,00	50 M	200,00	50 M	200,00	50 M	Penanaman modal	Dinas PM, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja & Transmigrasi
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah kerjasama dengan investor	N/A	3 kerjasama	691,26	3 kerjasama	729,77	4 kerjasama	700,00	5 kerjasama	700,00	6 kerjasama	700,00	7 kerjasama	700,00	7 kerjasama	Penanaman modal	Dinas PM, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja & Transmigrasi

PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir (2021)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021				
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
Program peningkatan & pengembangan pengelolaan perizinan	Lama waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan izin usaha tertentu atau jenis izin tertentu	rata-rata 14 hari	rata-rata 14 hari	197,00	rata-rata 14 hari	375,00	rata-rata 14 hari	450,00	rata-rata 7 hari	450,00	rata-rata 7 hari	450,00	rata-rata 7 hari	450,00	rata-rata 7 hari	Penanaman modal	Dinas PM, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja & Transmigrasi
Program pembinaan & peningkatan kesadaran masyarakat	Cakupan Masyarakat berSIG	70%	71%	48,80	73%	50,00	75%	80,00	77%	80,00	80%	80,00	85%	80,00	85%	Penanaman modal	Dinas PM, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja & Transmigrasi
JUMLAH				1.037,06	1.274,77	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00				
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																	
Program Peningkatan Peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	n/a	2	881,35	10	1.321,00	15	1.400,00	15	1.400,00	15	1.400,00	15	1.400,00	15	Kepemudaan dan Olahraga	Disdikpora
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Jumlah organisasi olah raga yang bermanajemen baik	n/a	-	-	-	-	10	150,00	15	150,00	20	150,00	25	150,00	25	Kepemudaan dan Olahraga	Disdikpora
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Jumlah klub olah raga yang aktif	n/a	50	828,63	100	1.395,50	150	1.000,00	200	1.000,00	250	1.000,00	300	1.000,00	300	Kepemudaan dan Olahraga	Disdikpora
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase fasilitas sarana dan prasarana sport center yang dibangun	0	-	468,00	-	2.836,00	35%	16.500,00	35%	20.000,00	20%	15.000,00	10%	10.000,00	100%	Kepemudaan dan Olahraga	Disdikpora
Program Penyelenggaraan olahraga daerah	Jumlah event olahraga yang dilaksanakan	n/a	-	-	sepakbola 7, volley 7, bulu tangkis 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik 1	1.500,00	sepakbola 7, volley 7, bulu tangkis 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik 1	1.500,00	sepakbola 7, volley 7, bulu tangkis 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik 1	1.500,00	sepakbola 7, volley 7, bulu tangkis 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik 1	1.500,00	sepakbola 7, volley 7, bulu tangkis 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik 1	2.000,00	sepakbola 7, volley 7, bulu tangkis 7, basket 1, tenis meja 1, karate 1, atletik 1	Kepemudaan dan Olahraga	Disdikpora
JUMLAH				2.177,98	7.052,50	20.550,00	24.050,00	19.050,00	14.550,00								
STATISTIK																	
Program Pengembangan Statistik Daerah	Persentase ketersediaan dan validitas data/informasi untuk perencanaan	49%	52%	-	52%	-	55%	800,00	58%	800,00	60%	1.000,00	65%	1.000,00	65%	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Data / Informasi	Cakupan Perangkat Daerah yang memiliki keakuratan data dan informasi	100%	100%	358,00	100%	540,41	100%	600,00	100%	600,00	100%	600,00	100%	600,00	100%	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Perangkat Daerah terkait
JUMLAH				358,00	540,41	1.400,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
PERSANDIAN																	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	Persentase Pengguna Layanan Informasi Melalui Peralatan dan Jaringan Telekomunikasi terlayani dan terlindungi keamanannya	N/A	-	-	90%	100,00	90%	120,00	90%	150,00	90%	160,00	90%	180,00	90%	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Perangkat Daerah terkait
JUMLAH				-	100,00	120,00	150,00	160,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00		
KEBUDAYAAN																	
Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah kebijakan tentang budaya lokal daerah yang ditetapkan	2	2	-	2	-	4	400,00	5	400,00	6	400,00	7	400,00	7	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah kekayaan budaya lokal daerah yang dilestarikan	21	21	1.160,00	24	1.703,39	29	1.800,00	33	1.800,00	35	1.800,00	37	1.800,00	37	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	4	1.052,59	4	1.391,77	5	1.400,00	6	1.400,00	6	1.400,00	7	1.400,00	7	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir (2021)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021				
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah kerjasama pemerintah daerah terkait pengelolaan kekayaan budaya	2	2	282,69	4	670,53	5	700,00	6	700,00	7	700,00	8	700,00	8	Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
JUMLAH			2.495,28		3.765,69		4.300,00		4.300,00		4.300,00		4.300,00				
PERPUSTAKAAN																	
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan	Jumlah pengunjung perpustakaan umum dan keliling	28000	33600	3.414,00	40000	719,46	45000	800,00	50000	800,00	100000	800,00	150000	800,00	150000	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
JUMLAH			3.414,00		719,46		800,00		800,00		800,00		800,00				
KEARSIPAN																	
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase perangkat daerah/desa yang melakukan Pengelolaan arsip secara baku	44,34%	54,72%	389,64	59,43%	351,23	64,15%	400,00	68,87%	400,00	73,58%	400,00	78,30%	400,00	78,30%	Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Dokumen/arsip daerah yang disimpan di Record Center	10%	15%	279,00	20%	58,00	35%	100,00	50%	100,00	65%	100,00	80%	100,00	80%	Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
JUMLAH			668,64		409,23		500,00		500,00		500,00		500,00				
TOTAL URUSAN WAJIB			414.094,01		414.426,85		443.682,66		461.821,87		485.676,53		460.500,15				
URUSAN PILIHAN																	
KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Rata-rata pendapatan bersih nelayan per bulan	2 juta	2 juta	215,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya	877,19 Ton	1004,45 Ton	955,00	1150,27 Ton	4.939,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program pengembangan budidaya perikanan air tawar	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya air tawar (%)	- 52,56% (144,19 ton)	12%	-	12%	-	15%	5.000,00	17%	5.000,00	18%	5.000,00	20%	5.000,00	20%	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program pengembangan budidaya perikanan air laut	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya air laut (%)	64,67% (733 ton)	15%	-	15%	-	16%	5.000,00	17%	5.000,00	18%	5.000,00	20%	5.000,00	20%	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program pengembangan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	11,55% (14.113 ton)	12%	1.272,00	12%	3.608,08	12%	4.000,00	12%	4.000,00	12%	4.000,00	12%	4.000,00	12%	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Persentase KUB nelayan dan Poldakan yang dibina/diberdayakan	52,2	53,7	-	55,3	500,00	57,5	500,00	59,4	500,00	61,2	500,00	72,8	500,00	72,8	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Studi pengembangan Kawasan Ekonomi Minapolitan	Tersedianya dokumen rencana pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi minapolitan	0	0	-	1	600,00	7	1.500,00	7	0,00	7	-	7	-	7	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial minapolitan	Cakupan fasilitas/infrastruktur pengembangan sentra industri minapolitan	0	0	-	-	-	-	0,00	10%	5.000,00	20%	5.000,00	40%	10.000,00	40%	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	Jumlah Konsumsi Ikan Perkapita dan Nilai Tukar Pengolah	43.60 Kg/Tahun	43.60 Kg/Tahun	-	44 Kg/Tahun	2.130,24	45 Kg/Tahun	2.200,00	46 Kg/Tahun	2.200,00	47 Kg/Tahun	2.200,00	48 Kg/Tahun	2.200,00	48 Kg/Tahun	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah Cold Storage	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
Program peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan	Cakupan sarana penunjang yang memenuhi standar	20%	30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Peningkatan jumlah rumah tangga produksi pengolah hasil perikanan	12%	15%	68,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
JUMLAH			2.510,00		11.777,43		18.200,00		21.700,00		21.700,00		26.700,00				
PARIWISATA																	

PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir (2021)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021				
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Destinasi wisata yang dikelola dan dikemas dengan baik	0	0	1.135,00	0	1.866,28	0	5.000,00	0	5.000,00	1	5.000,00	2	5.000,00	2	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah paket wisata yang dipasarkan	-	-	497,00	10	3.195,00	15	500,00	20	500,00	25	500,00	30	500,00	30	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah kemitraan Pemerintah daerah terkait pengembangan dan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	-	1	49,00	2	430,68	4	500,00	10	500,00	15	500,00	20	500,00	20	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
JUMLAH				1.681,00		5.491,96		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00			
PERTANIAN																	
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase petani yang memiliki akses permodalan dan kemitraan	n/a	50%	287,06	50%	280,00	55%	300,00	60%	300,00	65%	300,00	70%	300,00	70%	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah kemitraan kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian	0	1 kerjasama	782,00	1 kerjasama	8.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	Jumlah kemitraan dalam pemasaran hasil produksi pertanian	-	-	-	1	-	1	100,00	1	100,00	1	100,00	1	100,00	5	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan	Jumlah kemitraan dalam pemasaran hasil produksi perkebunan	-	-	-	1	-	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	5	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Jumlah desa mandiri pangan	1 desa	2 desa	619,95	3 desa	289,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian	Kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian secara efektif	-	-	-	150	-	200	100,00	250	130,00	350	130,00	450	130,00	450	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
Program peningkatan penerapan teknologi perkebunan	Jumlah produksi lada dengan mutu baik	212,15 ton	212,15 ton	-	450 ton	-	570 ton	100,00	750 ton	130,00	787,5 ton	130,00	825 ton	130,00	825 ton	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
	Jumlah produksi karet dengan mutu baik	11.584 ton	11.584 ton	-	13.950 ton	-	14.100 ton	-	14.250 ton	-	15.600 ton	-	16.975 ton	-	16.975 ton		
	Persentase kelompok tani yang menerapkan teknologi perkebunan secara efektif	5%	5%	-	10%	-	15%	-	20%	-	25%	-	30%	-	30%		
Program peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	2,28 Ton	2,3 Ton	3.057,00	2,4 Ton	5.300,00										Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
Program Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi tingkat usaha tani (jaringan tersier)	Luas areal yang sudah teririgasi jaringan tersier	-	-	-	350	3.500,00	309	3.090,00	444	4.440,00	736	7.386,00	0	0,00	1.839	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian	Luas irigasi dalam kondisi baik	-	500 Ha	2.740,50	1.000 Ha	4.320,00										Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
Program peningkatan produksi pertanian	Produktivitas padi (ton/ha/thn) dan persentase peningkatan produksi padi (ton) setiap tahun	2,28 ton per Ha	2,5 ton per Ha	-	2,6 ton per Ha	-	2,7 ton per Ha	300,00	2,8 ton per Ha	300,00	2,9 ton per Ha	300,00	3 ton per Ha	300,00	3 ton per ha	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
		6.159 ton	7.000 ton	-	7.500 ton	-	8.500 ton	-	9.000 ton	-	10.000 ton	-	11.000 ton	-	11.000 ton		
	Produktivitas ubi kayu (ton/ha/thn) dan persentase peningkatan produksi ubi kayu (ton) setiap tahun	14,43 ton per Ha	14,5 ton per Ha	-	14,6 ton per Ha	-	14,7 ton per Ha	-	14,8 ton per Ha	-	14,9 ton per Ha	-	15 ton per Ha	-	15 ton per Ha		
		7.242 ton	7.500 ton	-	8.000 ton	-	8.500 ton	-	9.000 ton	-	9.500 ton	-	10.000 ton	-	10.000 ton		
	Produksi Sayuran	4.061 kwintal	4.142 kwintal	-	4.224 kwintal	-	4.307 kwintal	-	4.391 kwintal	-	4.476 kwintal	-	4.562 kwintal	-	4.562 kwintal		
Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan	Persentase penyuluh pertanian yang dibina/diberdayakan	92,59	92,59	-	100,00	-	100,00	700,00	100,00	700,00	100,00	700,00	100,00	700,00	100,00	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan

PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir (2021)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021				
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
Program peningkatan produksi perkebunan	Produktivitas lada, (ton/ha/thn)	1,39 ton per ha	1,47 ton per ha	-	1,5 ton per ha	-	1,6 ton per ha	5.000,00	1,7 ton per ha	5.000,00	1,8 ton per ha	5.000,00	2 ton per ha	55.719,79	2 ton per ha	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
	Produksi lada (ton) setiap tahun	4.412,71 ton	4.660 ton	-	4.755 ton	-	5.072 ton	-	5.389 ton	-	5.706 ton	-	6.340 ton	-	6.340 ton	-	-
	Jumlah produktivitas karet (ton/ha/thn)	1,20 ton per ha	1,85 ton per ha	-	1,9 ton per ha	-	1,95 ton per ha	-	2 ton per ha	-	2 ton per ha	-	2 ton per ha	-	2 ton per ha	-	-
	Produksi karet (ton) setiap tahun	13.982,90 ton	23.167 ton	-	23.250 ton	-	23.500 ton	-	23.750 ton	-	24.000 ton	-	24.250 ton	-	24.250 ton	-	-
	Produktivitas kelapa sawit non plasma (ton/ha/thn)	10,74 ton per ha	12,38 ton per ha	-	13,16 ton per ha	-	13,94 ton per ha	-	14,72 ton per ha	-	15,5 ton per ha	-	16,25 ton per ha	-	16,25 ton per ha	-	-
	Produksi kelapa sawit non plasma (ton) setiap tahun	139.209,22 ton	168.556 ton	-	188.134 ton	-	209.250 ton	-	232.006 ton	-	256.515 ton	-	282.373 ton	-	282.373 ton	-	-
Program pemberdayaan penyuluh perkebunan lapangan	Persentase penyuluh perkebunan yang dibina/diberdayakan	0	0	-	100	-	100	650,00	100	650,00	100	650,00	100	650,00	100	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
Program pengembangan Peternakan terpadu	Dokumen pengembangan sistem peternakan terpadu	0	0	-	1	200,00	1	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
Program peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase peningkatan hasil produksi ternak ruminansia	27	5%	462,97	10%	236,19	15%	500,00	20%	500,00	25%	500,00	33%	500,00	33%	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
	Persentase peningkatan hasil produksi ternak unggas	-41	2%	-	2,5%	-	3%	-	3,5%	-	4%	-	5%	-	5%	-	-
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Persentase peternak yang menerapkan teknologi peternakan tepat guna	57,14	57,14	396,00	71,43	609,24	78,57	150,00	85,71	150,00	92,86	150,00	100,00	150,00	100,00	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase kasus penyakit ternak yang ditangani	100	100	207,50	100	1.440,99	100	300,00	100	300,00	100	300,00	100	300,00	100	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
Program pemberdayaan penyuluh peternakan	Persentase penyuluh peternakan yang dibina/diberdayakan	-	-	-	-	-	100	650,00	100	650,00	100	650,00	100	650,00	100	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Tersedia RPH dan Pasar Ternak	-	-	-	-	150,00	-	300,00	1	400,00	2	400,00	2	150,00	2	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
Program Pengembangan Usaha Peternakan	Jumlah kemitraan produksi dan pemasaran hasil peternakan dengan investor	-	-	-	-	-	1	100,00	1	100,00	1	100,00	1	100,00	4	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
Program Studi pengembangan Kawasan Ekonomi Agropolitan	Tersedianya dokumen rencana pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi agropolitan	-	-	-	2	600,00	7	1.500,00	7	0,00	7	-	7	-	7	pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial agropolitan	Cakupan fasilitas/infrastruktur pengembangan sentra industri agropolitan	-	-	-	-	-	-	0,00	10%	5.000,00	20%	5.000,00	40%	10.000,00	40%	Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
JUMLAH			8.552,98	25.426,26	19.040,00	23.850,00	26.796,00	74.879,79									
KEHUTANAN																	
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Terlindungnya kawasan hutan	100%	100%	49,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup
Program Perencanaan dan Pengembangan Tahura	Terlaksananya perencanaan dan pengembangan hutan	-	3.333,19 ha	-	3.333,19 ha	300,00	3.333,19 ha	300,00	3.333,19 ha	300,00	3.333,19 ha	300,00	3.333,19 ha	300,00	3.333,19 ha	Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup
Program Perencanaan dan Pengembangan hutan	Terpenuhinya syarat pembentukan tahura	100%	100%	170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup
JUMLAH			219,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00				
ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL																	
Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Tersedianya data sumberdaya listrik	1 Jenis	1 Jenis	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ESDM	Dinas ESDM

PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir (2021)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			2016		2017		2018		2019		2020		2021						
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Terinventarisasinya hasil produk pertambangan	100%	100%	29,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ESDM	Dinas ESDM	
JUMLAH				59,54															
PERDAGANGAN																			
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Pasar Tertib Ukur	-	-	1.047,00	20%	1.054,55	20%	1.000,00	40%	1.000,00	40%	1.000,00	60%	1.000,00	60%	1.000,00	60%	Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
	Jumlah konsumen berdaya beli rendah yang terbantu	7800	8000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Cakupan produk UKM yang dipromosikan	4 UKM	6UKM	188,56	5 UKM	188,70	5 UKM	200,00	5 UKM	200,00	5 UKM	200,00	5 UKM	200,00	31 UKM	Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian		
Program pembinaan perdagangan kaki lima dan asongan	Kawasan perdagangan kakilima dan asongan yang tertata dan tertib	16,67%	16,67%	142,38	16,67%	145,00	25%	150,00	33%	150,00	42%	150,00	50%	150,00	50%	Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian		
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah nilai perdagangan barang/jasa (dalam juta rupiah)	1.087.845	1.100.000	1.759,00	1.135.184	1.883,43	1.200.000	2.000,00	1.250.000	2.000,00	1.300.000	2.000,00	1.400.000	2.000,00	1.400.000	Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian		
Program optimalisasi pemasaran produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Jumlah Umi dan IKM pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	100	200,00	100	200,00	200	Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian			
JUMLAH				3.136,94		3.271,68		3.350,00		3.350,00		3.550,00		3.550,00					
PERINDUSTRIAN																			
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jenis industri kecil yang dibina	-	3 jenis	493,00	3 jenis	805,00											Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian	
Program pengembangan kewirausahaan industri kecil dan menengah	Jumlah IKM yang mendapat penyuluhan, pelatihan, bantuan teknis dan pendampingan	1,48%	2,96%	-	4,44%	60,00	5,92%	300,00	7,40%	300,00	8,88%	300,00	10,36%	300,00	10,36%	Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian		
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Sentra industri potensial yang berkembang	-	-	71,70	-	-										Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian		
Program Penataan Struktur Industri	Jumlah IKM yang memiliki kerjasama dalam jaringan pemasaran produk usaha	14 IKM	2	34,95	3	50,00	3	50,00	3	50,00	3	50,00	3	50,00	31 IKM	Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian		
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Penerapan teknologi terhadap peningkatan produk usaha IKM	15 jenis (untuk kerajinan rotan dan	4	39,99	4	50,00	4	200,00	4	200,00	4	200,00	4	200,00	39 jenis	Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian		
Program optimalisasi pengolahan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Jumlah produksi pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	2.405,76 ton	500,00	2.405,76 ton	500,00	2.405,76 ton	Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian			
Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Kawasan Perdesaan	Jumlah klaster bisnis yang dikembangkan	1	2	50,00	3	100,00	4	100,00	5	100,00	6	100,00	7	100,00	7	Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian		
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Industri Kecil dan menengah	Jumlah industri kecil dan menengah yang memiliki akses terhadap pendamping dan Inkubator bisnis, bagi industri kecil dan menengah	0,59%	0,59%	100,00	0,69%	150,00	0,79%	200,00	0,89%	200,00	0,99%	200,00	1,08%	200,00	1,08%	Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian		
JUMLAH				789,64		1.215,00		850,00		850,00		1.350,00		1.350,00					
KETRANSMIGRASIAN																			

PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir (2021)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021				
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Persentase KK transmigran yang mandiri	-	-	431,27	7%	460,00	15%	500,00	22%	500,00	29%	500,00	37%	500,00	37%	Ketransmigrasian	Dinas PM, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi
JUMLAH				431,27		460,00		500,00		500,00		500,00		500,00			
TOTAL URUSAN PILIHAN				17.380,76		47.942,33		48.240,00		56.550,00		60.196,00		113.279,79			
FUNGSI PENUNJANG																	
Program Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan secara elektronik	Pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien dan transparan	n/a	100%	2.079,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penunjang (Sekretariat Daerah)	Sekretariat Daerah
Program Layanan Pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan	n/a	-	-	100%	1.800,00	100%	1.800,00	100%	1.800,00	100%	1.800,00	100%	1.800,00	100%	Penunjang (Sekretariat Daerah)	Sekretariat Daerah
Program peningkatan/perkuatan hubungan dan layanan masyarakat oleh KDH/WKDH	Terfasilitasinya layanan masyarakat oleh KDH/WKDH	n/a	100%	1.107,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penunjang (Sekretariat Daerah)	Sekretariat Daerah
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang ditindaklanjuti	n/a	50%	2.974,29	50%	3.700,00	50%	4.000,00	60%	4.100,00	65%	4.500,00	75%	4.500,00	75%	Penunjang (Sekretariat Daerah)	Sekretariat Daerah
Program sarana informasi pembangunan daerah	Terciptanya dokumentasi pembangunan daerah sebagai sarana informasi	49%	49%	173,60	51%	205,96	53%	200,00	55%	200,00	57%	200,00	59%	200,00	59%	Penunjang (Sekretariat Daerah)	Sekretariat Daerah
Program pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan fasilitasi pembinaan masyarakat	n/a	100%	1.599,00	100%	1.456,00	100%	1.400,00	100%	1.400,00	100%	1.400,00	100%	1.400,00	100%	Penunjang (Sekretariat Daerah)	Sekretariat Daerah
Program pembinaan dan pengembangan Aparatur	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur	n/a	100%	168,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penunjang (Sekretariat Daerah)	Sekretariat Daerah
Program penetapan dan penegasan batas wilayah	Terciptanya tertib batas antar desa/kelurahan di Kab. Bangka Barat	n/a	100%	472,57	100%	480,00	100%	500,00	100%	500,00	100%	500,00	100%	500,00	100%	Penunjang (Sekretariat Daerah)	Sekretariat Daerah
Program penataan wilayah dan kelembagaan	Terfasilitasinya penataan lembaga desa/kelurahan	n/a	55%	834,50	100%	90,00	100%	100,00	100%	100,00	100%	100,00	100%	100,00	100%	Penunjang (Sekretariat Daerah)	Sekretariat Daerah
Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi	n/a	-	-	16%	-	31%	400,00	47%	425,00	63%	500,00	78%	600,00	78%	Penunjang (Sekretariat Daerah)	Sekretariat Daerah
Program Penataan dan Penguatan Ketatalaksanaan	Persentase Perangkat Daerah yang ketatalaksanaanya dengan kriteria "BAIK"	10,3%	25%	-	37,5%	-	47%	150,00	53%	150,00	59,4%	200,00	65,6%	250,00	65,6%	Penunjang (Sekretariat Daerah)	Sekretariat Daerah
Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Nilai Sistem Pelayanan Publik	79	80	-	81	-	82	300,00	83	350,00	84	400,00	85	400,00	85	Penunjang (Sekretariat Daerah)	Sekretariat Daerah
Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan	n/a	100%	102,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penunjang (Sekretariat Daerah)	Sekretariat Daerah
Program Penguatan dan Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Integritas Pelayanan Publik	n/a	-	-	6,5	420,00	6,5	420,00	6,5	420,00	7	420,00	7	420,00	7	Penunjang (Sekretariat Daerah)	Sekretariat Daerah
Program pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peringkat LPPD tingkat nasional	n/a	100%	286,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penunjang (Sekretariat Daerah)	Sekretariat Daerah
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Cakupan pelayanan informasi yang makin meningkat	n/a	100%	181,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penunjang (Sekretariat Daerah)	Sekretariat Daerah

PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir (2021)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021				
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
Program pengembangan kebijakan perekonomian pembangunan	Pengembangan kebijakan pembangunan sesuai dengan Perencanaan	n/a	100%	538,00	100%	650,00	100%	400,00	100%	400,00	100%	400,00	100%	400,00	100%	Penunjang (Sekretariat Daerah)	Sekretariat Daerah
Program penataan dan penguatan organisasi, ketatalaksanaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Tingkat kepatuhan pemda dalam pelaksanaan UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (zona hijau)	n/a	-	-	805	650,00										Penunjang (Sekretariat Daerah)	Sekretariat Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan rancangan regulasi daerah menjadi regulasi daerah	73%	100%	1.902,00	100%	2.250,00	100%	2.000,00	100%	2.000,00	100%	2.000,00	100%	2.000,00	100%	Penunjang (Sekretariat Daerah)	Sekretariat Daerah, dll
Program Kerjasama Pembangunan	Terjalinya kerjasama pembangunan antar daerah	n/a	5 MoU	100,00	5 MoU	200,00	5 MoU	200,00	5 MoU	200,00	5 MoU	200,00	5 MoU	200,00	30 MoU	Penunjang (Sekretariat Daerah)	Sekretariat Daerah
Program Pembinaan BUMD	Terbinanya BUMD	100%	100%	184,00	100%	200,00	100%	200,00	100%	200,00	100%	200,00	100%	200,00	100%	Penunjang (Sekretariat Daerah)	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan Raperda menjadi Perda	73%	100%	17.500,00	100%	19.800,00	100%	19.300,00	100%	19.800,00	100%	19.500,00	100%	19.800,00	100%	Penunjang (SEKRETARIAT DPRD)	Sekretariat DPRD
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu	71%	80%	2.389,00	80%	2.606,21	85%	2.650,00	85%	2.700,00	90%	2.750,00	90%	2.800,00	90%	Penunjang (Pengawasan)	Sekretariat Daerah/ Inspektorat Daerah
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya	Assesment inspektorat	Level II	level II	192,69	level III	271,20	level III	300,00	level III	300,00	level IV	300,00	level IV	250,00	level IV	Penunjang (Pengawasan)	Inspektorat Daerah
Program perencanaan pembangunan daerah	Penghargaan Pangripta Tingkat Propinsi	-	-	1.906,00	3	1.475,00	3	2.000,00	2	1.600,00	2	1.600,00	1	2.000,00	1	Penunjang (Perencanaan)	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang
Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Keberhasilan Indikator Sasaran Daerah Bidang Ekonomi	44%	100%	469,00	100%	650,00	100%	650,00	100%	650,00	100%	650,00	100%	650,00	100%	Penunjang (Perencanaan)	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang
Perencanaan Sosial Budaya	Persentase Keberhasilan Indikator Sasaran Daerah Bidang Sosial & Budaya	56%	100%	1.153,00	100%	1.250,68	100%	1.200,00	100%	1.200,00	100%	1.200,00	100%	1.200,00	100%	Penunjang (Perencanaan)	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang
Program Perencanaan Pengembangan Bidang Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Persentase Keberhasilan Indikator Sasaran Daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	57%	100%	78,86	100%	265,00	100%	400,00	100%	500,00	100%	700,00	100%	800,00	100%	Penunjang (Perencanaan)	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang
Program perencanaan Pengembangan Wilayah Setratgis Cepat Tumbuh	Persentase Keberhasilan Indikator Sasaran Daerah Bidang Fisik & Prasarana	65%	100%	897,00	100%	1.291,64	100%	1.000,00	100%	1.000,00	100%	1.000,00	100%	1.000,00	100%	Penunjang (Perencanaan)	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang
Program Pengendalian dan Evaluasi perencanaan daerah	Persentase Pengendalian dan Evaluasi yang dilakukan terhadap dokumen perencanaan	100%	100%	-	100%	350,00	100%	350,00	100%	400,00	100%	400,00	100%	650,00	100%	Penunjang (Perencanaan)	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Cakupan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan potensi daerah	100%	100%	312,30	100%	585,00	100%	1.000,00	100%	1.000,00	100%	1.000,00	100%	1.000,00	100%	Penunjang (LITBANG)	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang
Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai Kompetensi	n/a	100%	-	100%	1.687,00	100%	2.040,00	100%	2.040,00	100%	2.040,00	100%	2.040,00	100%	Penunjang (Kepegawaian)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Jumlah rekrutmen JPT yang menggunakan sistem seleksi terbuka	0%	7 jabatan		2 jabatan		1 jabatan		6 jabatan		3 jabatan		1 jabatan		20 jabatan		
Program Peningkatan Kompetensi ASN	Persentase Pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan sesuai kebutuhan	n/a	0,10%	-	0,10%		0,20%	5.400,00	0,20%	6.000,00	0,30%	6.500,00	0,30%	7.000,00	0,30%	Penunjang (Kepegawaian)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase Tingkat pendidikan aparaturnya Pemerintah Daerah yang berpendidikan minimal Strata-1	49,87%	50%		50%		52%		52%		52%		52%		52%		

PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir (2021)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021				
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
	Persentase menurunnya kasus pelanggaran peraturan kepegawaian	4 kasus	0%	-	0%	-	50%	-	0%	-	0%	-	100%	-	0 kasus		
Program Pemanfaatan Data Base ASN dan layanan kesejahteraan	Persentase Kelengkapan Jaminan Kesejahteraan ASN	N/A	100%	-	100%	700,00	100%	350,00	100%	350,00	100%	550,00	100%	350,00	100%	Penunjang (Kepegawaian)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Cakupan Pemberian Remunerasi/Kompensasi/TPP sesuai beban kerja	N/A	-	-	-	70%	-	70%	-	80%	-	80%	-	80%			
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kualitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	4.130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	Penunjang (Kepegawaian)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Setda
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas	Kualitas Aparatur yang pensiun	100%	100%	54,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	Penunjang (Kepegawaian)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Menurunnya Temuan atas Audit BPK terhadap LKD Pemda	20	16	1.926,40	12	1.913,95	10	2.000,00	10	2.100,00	8	2.200,00	6	2.300,00	6	Penunjang (Keuangan)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Menurunnya Temuan atas audit BPK terkait aset/BMD Pemda	7	7	960,00	6	1.130,98	5	1.200,00	4	1.200,00	3	1.300,00	3	1.500,00	3	Penunjang (Keuangan)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Program Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan PAD	56,3 M	1%	2.300,56	14%	1.090,44	14%	1.100,00	14%	1.100,00	14%	1.200,00	14%	1.200,00	109,57 M	Penunjang (Keuangan)	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Program Optimalisasi PBB & BPHTB	Persentase PBB & BPHTB terhadap Total PAD	5,3%	5,5%	-	5,7%	1.910,00	5,8%	2.000,00	6,0%	2.000,00	6,3%	2.100,00	6,5%	2.100,00	6,5%	Penunjang (Keuangan)	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Program Peningkatan Semangat Kebangsaan	Terlaksananya peringatan hari besar nasional	100%	100%	623,00	100%	325,00	100%	350,00	100%	350,00	100%	350,00	100%	350,00	100%	Penunjang	Kecamatan
Program Penyempurnaan Kualitas Pelayanan	Peningkatan kualitas pelayanan	100%	100%	1.947,00	100%	2.500,00	100%	2.500,00	100%	2.500,00	100%	2.500,00	100%	2.600,00	100%	Penunjang	Kecamatan
Program Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah	Cakupan tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh Kecamatan	n/a	62%	-	69%	-	77%	1.500,00	85%	1.500,00	92%	1.800,00	100%	2.000,00	100%	Penunjang	Kecamatan
Program Penyelenggaraan tugas pelimpahan kewenangan Kepala Daerah	Cakupan tugas pelimpahan kewenangan Kepala Daerah yang dilakukan secara efektif	100%	100%	-	100%	-	100%	220,00	100%	250,00	100%	300,00	100%	400,00	100%	Penunjang	Kecamatan
Program Pembinaan Kehidupan Beragama	Meningkatnya pembinaan kehidupan beragama	100%	100%	6.748,00	100%	2.300,00	100%	2.400,00	100%	2.450,00	100%	2.600,00	100%	2.800,00	100%	Penunjang	Kecamatan/ Sekretariat Daerah
JUMLAH FUNGSI PENUNJANG			56.290,04		54.204,06		61.980,00		63.235,00		65.360,00		67.760,00				
TOTAL BELANJA PEMBANGUNAN			487.764,81		516.573,24		553.902,66		581.606,87		611.232,53		641.539,94				

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan lima tahun, khususnya dalam memenuhi target kinerja pembangunan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada periode 2016-2021 yang telah direncanakan.

IKD secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau komposisinya (*impact*). IKD dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Ukuran kemajuan yang dicapai daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah. Kemampuan pengukuran kinerja tersebut diantaranya sangat bergantung kepada data dan informasi yang mengolah hasil-hasil atau kinerja pembangunan sehingga dapat diperbandingkan kondisi-kondisi awal yang diinginkan dengan hasil yang dicapai. Indikator kinerja tersebut juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Penentuan target Indikator Makro Kabupaten Bangka Barat didasarkan pada situasi dan kondisi yang ada dan dengan memperhatikan target capaian yang ada dalam RPJMN 2014-2019 dan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025. Target Indikator Makro Pembangunan RPJMD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 9.1 Penetapan Target Indikator Makro RPJMD
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

Indikator Makro Daerah	Kondisi 2015	Target					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,73	4,77	4,83	4,88	4,93	4,98	5,05
2. IPM	67,23	68,15	68,94	69,75	70,55	71,32	72,23
3. Kemiskinan (%)	3,08	3,07	3,05	3,00	2,95	2,90	2,85
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,92	5,9	5,85	5,80	5,75	5,70	5,65
5. PDRB Perkapita (ribu rupiah)	58.335	61.530	64.341	66.693	68.525	69.780	70.428

Di sisi lain, gambaran dan proyeksi capaian pelaksanaan dari setiap Aspek/Fokus/Bidang Urusan, dapat dilihat dari IKD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 pada tabel berikut. IKD dibagi dalam tiga aspek, meliputi (i) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (ii) Aspek Pelayanan Umum dan (iii) Aspek Daya Saing Daerah.

Tabel 9.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Pertumbuhan ekonomi	%	4,73	4,77	4,83	4,88	4,93	4,98	5,05	5,05
2	Indeks Pembangunan Manusia	Angka Indeks	67,23	68,15	68,94	69,75	70,55	71,32	72,23	66,43 (2014)
3	Kemiskinan	%	3,08	3,07	3,05	3,00	2,95	2,90	2,85	2,85
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	5,92	5,9	5,85	5,80	5,75	5,70	5,65	5,65
5	PDRB Perkapita	Ribu rupiah	58.335	61.530	64.341	66.693	68.525	69.780	70.428	58.335
II	ASPEK PELAYANAN UMUM									
	Urusan Pendidikan									
6	Peringkat ujian Nasional se-provinsi Bangka Belitung	Peringkat	SD, Peringkat 3	7	3	2	2	2	1	1
			SMP, Peringkat 6	6	5	4	3	2	1	1
7	Angka rata rata lama sekolah Kabupaten	Tahun	7,43	7,50	7,60	7,83	7,93	8,07	8,26	8,26
8	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,48	11,70	12,03	12,38	12,72	13,05	13,35	13,35
	Kesehatan									
9	Angka harapan hidup	Tahun	69,47	69,53	69,55	69,57	69,59	69,61	69,53	69,83
	Pekerjaan umum dan penataan ruang									
10	Persentase desa/kelurahan/titik banjir yang dimitigasi thd banjir/genangan air	%	N/A	-	20	40	60	80	100	100
11	Persentase ruang terbuka hijau	%	2	2,25	2,25	2,5	2,6	2,75	2,9	2,9
	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman									

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Persentase penduduk yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak	%	78,75	80	82	85	87	90	95	95
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
13	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	38 kasus	100	97,73	94,44	91,43	88,23	84,85	33 kasus
	Lingkungan Hidup									
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	N/A	-	61	63	66	68	70	70
15	Persentase desa/kelurahan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat desa/kelurahan	%	N/A	-	2	3	5	8	11	11
16	Jumlah organisasi masyarakat sipil (LSM), komunitas (Civil Society Organization/CSO) yang bergerak dibidang lingkungan hidup secara aktif	unit	N/A	7	7	8	9	11	12	12
17	Persentase usaha dan atau kegiatan yang melakukan pengelolaan & pemantauan lingkungan secara baik	%	30	30	35	40	50	60	70	70
18	Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu	%	9	9	9	13	14	16	19	19
19	Persentase luas lahan kritis yang berhasil dipulihkan menjadi produktif	%	N/A	-	-	0,5	1	1,5	2	2
20	Persentase sumber air yang telah di konservasi	%	26	26	26	27	27	28	28	28
21	Persentase pengajuan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	%	N/A	100	100	100	100	100	100	100
	Kepemudaan & Olahraga									
22	Prestasi olah raga pendidikan di tingkat Provinsi	Peringkat	Peringkat 7	Popda 7	Kejurda 6	Popda 5	Kejurda 4	Popda 3	Kejurda 3	Kejurda 3
23	Peringkat olahraga prestasi di tingkat provinsi	Peringkat	Peringkat 6	-	-	Peringkat ke 4	-	-	-	Peringkat ke 4
24	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	35,47	45	50	55	60	65	70	70
25	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	CC /57	59 (CC)	61 (CC)	63 (B)	65 (B)	67 (B)	70 (B)	70 (B)
26	Opini BPK terhadap Laporan keuangan	Opini	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	N/A	68,73	72,98	75,98	77,73	80,73	82,73	82,73
28	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	%	N/A	-	60	65	70	75	80	
29	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas pelayanan publik	Nilai	78	79	80	81	82	83	85	85
30	Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD)	%	5.50%	6%	7%	7.50%	8%	8.50%	9%	9%
	Pekerjaan umum dan penataan ruang									
31	Persentase luas areal pertanian yang beririgasi teknis	%	0,0 ha	18,43	27,56	57,27	77,12	94,76	94,76	2.386 ha
	Perhubungan									
32	Indeks konektivitas kabupaten	nilai	1	1	1	1,02	1,03	1,05	1,06	1,06
	Penanaman Modal									
33	Peningkatan Jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN)	milyar	82	100	100	100	100	100	100	100
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
34	Persentase peningkatan unit usaha mikro	%	22.006 unit	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	24.782 unit
35	Persentase peningkatan unit industri kecil dan menengah	%	2.028 unit	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	2.718 unit
36	Peningkatan Skala usaha Umi	%	1,32%	1,32%	1,5%	1,5%	2%	2%	2,5%	2,5%
37	Kapasitas usaha industri kecil dan menengah unggulan (industri makanan olahan/kuliner)	Ton / tahun	3.127,18	3.127,18	3,132,18	3.137,18	3.142,18	3.147,18	3.152,18	3.152,18
38	Kapasitas usaha industri kecil dan menengah unggulan (industri kerajinan)	unit / tahun	162.492	162.492	172.492	182.492	197.492	212.492	222.492	222.492
39	Jumlah ragam usaha / produk UMi	unit	86	86	100	120	130	140	150	150
40	Jumlah ragam usaha Industri kecil dan menengah	unit	44	44	46	48	50	52	54	54
41	Jangkauan pasar produk UMi	%	DK=100%	DK=100%	DK=100%	DK=99,5% AK=0,5%	DK=99 % AK=1 %	DK=99% AK=0,65% AP =0,35%	DK=98,5% AK=1,0% AP = 0,5%	DK=98,5% AK=1,0% AP = 0,5%
42	Jangkauan pasar produk unggulan industri kecil dan menengah		DK=100%	DK=100%	DK=100%	DK=99% AK=1%	DK=98,5% AK=1% AP=0,5%	DK=98% AK=1,25% AP =0,75%	DK=98% AK=1% AP = 1%	DK=98% AK=1% AP = 1%
43	Kontribusi Umi, industri kecil dan menengah terhadap PDRB		8.88%	9.06%	9.23%	9.38%	9.53%	9.66%	9.78%	9.78%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kebudayaan									
44	Persentase benda, situs, kawasan cagar budaya, seni dan kebudayaan daerah yang dilestarikan yang terintegrasi dengan program pariwisata	%	25	25	28	34	37	39	42	42
	Kelautan dan Perikanan									
45	Nilai produksi perikanan tangkap	Juta rupiah	287.000,29	441.226,56	486.112,83	517.402,22	518.317,09	563.254,42	633.268,73	633.268,73
46	Nilai produksi perikanan budidaya air tawar	Juta rupiah	3.164,53	5.024,66	5.612, 57	6.042,18	6.462,77	6.365,20	7.520,05	7.520,05
47	Nilai produksi perikanan budidaya air laut	Juta rupiah	3.042,50	3.419.10	3,944.64	4,654.00	5,478.70	6,493.00	7,982.00	7,982.00
	Pariwisata									
48	Kunjungan wisata	Kunjungan	44.222	48.000	52.000	59.000	69.000	84.000	104.000	104,000
49	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1.11%	1.21%	1.31%	1.42%	1.54%	1.66%	1.80%	1.80%
50	Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	%	1,2 milyar	2%	2%	10%	10%	20%	20%	2,1 milyar
	Pertanian									
51	Rata-rata pendapatan bersih petani per bulan	Juta rupiah	1,1	1,2	1,3	1,5	1,6	1,8	2	2
52	Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	Juta rupiah	1,362.76	1,635.32	1,962.38	2,354.86	2,825.83	3,391.00	4,069.20	4,069.20
53	Nilai produksi ternak ruminansia	Juta rupiah	26.509	27.835	29.227	30.688	32.222	33.833	35.525	35.525
54	Nilai produksi ternak unggas	Juta rupiah	21.930	22.369	22.481	22.593	22.706	22.820	22.934	22.934
55	Persentase peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dalam arti luas	%	918.697	1.90%	2.00%	2.25%	2.50%	4.00%	4.50%	1.087.636
56	Persentase peningkatan jumlah usaha dalam rantai agribisnis (hulu hingga hilir)	%	20.000 unit usaha	0,50%	0,60%	0,64%	0,74%	0,98%	1,45%	1,45%

Tabel 9.3 Matriks Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Indikator pembangunan makro daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Selisih PDRB tahun yang bersangkutan dengan PDRB tahun sebelumnya terhadap PDRB tahun sebelumnya [dikali] 100	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	BPS
		Penurunan angka kemiskinan	jumlah penduduk miskin dibagi total penduduk [dikali] 100	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	BPS
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah pencari kerja dibagi jumlah angkatan kerja [dikali] 100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPS
		PDRB perkapita	Total PDRB ADHB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	BPS
2.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai atas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Kesimpulan hasil evaluasi BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.	Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD)	PAD [dibagi] Total Pendapatan [dikali] 100	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
4.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP Daerah	Nilai hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemda oleh pihak Kemenpan RB/ instansi lain yang berwenang.	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	Kemenpan RB, Inspektorat Provinsi, BPKP
5.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	Indeks Profesionalitas ASN	Penjumlahan antara gap kompetensi pejabat dengan jabatan yang disyaratkan ditambah dengan kinerja pejabat yang bersangkutan ditambah dengan kompetensi dikurangi pelanggaran disiplin	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
6.	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	SPM Pelayanan Dasar yang Terpenuhi [dibagi] nilai SPM yang seharusnya dilaksanakan [dikali] 100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dindikpora, Dinkes, Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Dinas Sat Pol PP	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dindikpora, Dinkes, Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Dinas Sat Pol PP
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas pelayanan publik	Jumlah nilai SKM seluruh SKPD [dibagi] jumlah SKPD [dikali] 100	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
7.	Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	Rata-rata pendapatan bersih petani per bulan	Rata-rata pendapatan bersih petani perbulan (dalam juta)	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
8.	Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat	Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	Jumlah produksi komoditi unggulan perkebunan dikalikan harga	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
9.	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap dikalikan harga	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Nilai produksi perikanan budidaya air tawar	Jumlah produksi budidaya air tawar dikalikan harga	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Nilai produksi perikanan budidaya air laut	Jumlah produksi budidaya air laut dikalikan harga	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
10.	Meningkatnya nilai produksi peternakan	Nilai produksi ternak ruminansia	Jumlah produksi daging ruminansi dikalikan harga	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
		Nilai produksi ternak unggas	Jumlah produksi daging unggas dikalikan harga	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
11.	Berkembangnya sistem agribisnis/ agroindustri	Persentase peningkatan jumlah usaha dalam rantai agribisnis (hulu hingga hilir)	Untuk setiap sub-sistem: jumlah unit usaha tahun ke-t dikurangi tahun ke t-1 [dibagi] jumlah unit usaha tahun ke t-1 [dikali] 100	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
		Persentase peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dalam arti luas	nilai tambah komoditas pertanian tahun t dikurangi t-1 [dibagi] nilai tambah komoditas pertanian t-1 [dikali] 100	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
12.	Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah	Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN)	Jumlah investasi tahun t dikurangi t-1	Dinas PM, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Nakertrans	Dinas PM, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Nakertrans
13.	Berkembangnya jumlah unit dan kapasitas Umi, Industri kecil dan menengah yang mandiri	Persentase peningkatan Umi	Jumlah UMi tahun ini dikurangi jumlah UMi tahun sebelumnya [dibagi] jumlah Umi tahun awal [dikali] 100	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
		Persentase peningkatan unit IKM	Jumlah industri kecil dan menengah tahun ini dikurangi jumlah industri kecil dan menengah tahun sebelumnya [dibagi] jumlah industri kecil dan menengah tahun sebelumnya [dikali] 100	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
		Peningkatan skala usaha Umi	Jumlah UMI yang meningkat [dibagi] dengan jumlah UMI secara keseluruhan [dikali] 100	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
		Kapasitas usaha IKM unggulan	Jumlah produksi industri kecil dan menengah unggulan per tahun menurut jenis produk (industri makanan olahan/ kuliner serta industri kerajinan)	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
14.	Berkembangnya ragam usaha dan produk Umi, Industri kecil dan menengah yang berdaya saing	Jumlah ragam usaha Umi	Jumlah ragam usaha dalam satu tahun	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
		Jumlah ragam usaha IKM	Jumlah ragam usaha industri kecil dan menengah dalam satu tahun	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
		Jangkauan pasar produk unggulan Umi	Jumlah UMI yg memiliki jangkauan pemasaran tertentu [dibagi] Jumlah UMi [dikali] 100	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Jangkauan pasar produk unggulan IKM	Jumlah IKM Unggulan yang memiliki jangkauan pemasaran tertentu [dibagi] Jumlah IKM Unggulan [dikali] 100	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
		Kontribusi Umi dan IKM terhadap PDRB	Nilai PDRB yang bersumber dari Umi, industri kecil dan menengah [dibagi] nilai PDRB [dikali] 100	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
15.	Berkembangnya destinasi wisata	Kunjungan Wisata	Jumlah kunjungan wisata setiap tahun	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		kontribusi Sektor pariwisata terhadap PDRB	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata [dibagi] jumlah PDRB [dikali] 100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	Kontribusi PAD sek. pariwisata tahun n dikurangi kontribusi PAD sek. pariwisata tahun n-1 [dibagi] kontribusi sektor pariwisata pada tahun n-1 [dikali] 100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
16.	Terjaganya kelestarian warisan budaya sebagai aset wisata	Persentase benda, situs, kawasan cagar budaya, seni dan kebudayaan daerah yang dilestarikan yang terintegrasi dengan program pariwisata	Jumlah benda, situs, kawasan cagar budaya, seni dan kebudayaan daerah yang terintegrasi dengan program pariwisata [dibagi] seluruh benda, situs, kawasan cagar budaya, seni dan kebudayaan daerah [dikali] 100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
17.	Meningkatnya konektivitas daerah	Indeks konektivitas kabupaten	Jumlah jaringan jalan [dibagi] jumlah desa/kelurahan	Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
18.	Tersedianya air baku untuk usaha budidaya komoditas pertanian	Persentase luas areal pertanian yang beririgasi teknis	Luas areal yang memiliki jaringan irigasi teknis [dibagi] luas areal pertanian [dikali] 100	Dinas PU dan Penataan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang
19.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks pembangunan Manusia	$IPM = \sqrt[3]{I1 \times I2 \times I3}$ I1= kesehatan (harapan hidup) I2= pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) I3= pendapatan (pengeluaran pendapatan riil)	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	BPS
		Peringkat ujian Nasional se-provinsi Bangka Belitung	Posisi Bangka Barat menurut deret hitung dari peringkat kelulusan kabupaten/ kota di provinsi Bangka Belitung	Dindikpora	Dindikpora
		Angka rata rata lama sekolah Kabupaten	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	Dindikpora	BPS
		Angka Harapan Lama Sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak	Dindikpora	BPS

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			pada umur tertentu di masa mendatang		
20.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	Angka Harapan hidup	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir	Dinkes	BPS
21.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	2 kali capaian dikurang baseline [dibagi] capaian [dikali] 100	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA
22.	Meningkatnya minat dan wadah pengembangan olah raga	Prestasi olah raga pendidikan di tingkat Provinsi	Peringkat olah raga pelajar di tingkat Provinsi melalui popda dan kejurda	Dindikpora	Dindikpora
		Peringkat olahraga prestasi di tingkat provinsi	Peringkat olahraga prestasi di tingkat provinsi dalam poprov	Dindikpora	Dindikpora
23.	Terwujudnya masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang berbudaya/ berwawasan lingkungan	Persentase desa/kelurahan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat desa/kelurahan	Jumlah desa & kelurahan yang melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup [dibagi] jumlah seluruh desa & kelurahan [dikali] 100	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah organisasi masyarakat sipil (LSM), komunitas (Civil Society Organization/CSO) yang bergerak dibidang lingkungan hidup secara aktif	Jumlah LSM/CSO yang bergerak di bidang lingkungan hidup yang terdaftar/ berdomisili di Bangka Barat dan berperan aktif	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase usaha dan atau kegiatan yang melakukan pengelolaan & pemantauan lingkungan secara baik	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan [dibagi] jumlah seluruh usaha dan atau kegiatan yang wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan [dikali] 100	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
24.	Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan	Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu	Jumlah desa/kelurahan mendapat layanan pengelolaan sampah [dibagi] jumlah seluruh desa/kelurahan kabupaten Bangka Barat [dikali] 100	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
25.	Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan permukiman	Persentase penduduk yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak	Jumlah penduduk yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak di suatu wilayah pada periode tertentu [dibagi] jumlah penduduk di wilayah dan dalam periode yang sama [dikali] 100	Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
26.	Terkendalinya bencana banjir	Persentase desa/kelurahan/titik banjir yang dimitigasi thd banjir/genangan air	Jumlah desa/kelurahan/titik banjir kumulatif yang dimitigasi terhadap banjir [dibagi] dengan jumlah /desa/kelurahan/titik banjir yang perlu dimitigasi thd banjir kondisi tahun awal [dikali] 100	Dinas PU dan Penataan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
27.	Terwujudnya pemulihan lahan kritis	Persentase luas lahan kritis yang berhasil dipulihkan menjadi produktif	Luas lahan kritis (diluar kawasan hutan dan bukan lahan izin usaha perusahaan) yang dipulihkan menjadi produktif [dibagi] luas lahan kritis kondisi awal yang ditetapkan [dikali] 100	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
28.	Terwujudnya konservasi sumber air	Persentase sumber air yang telah di konservasi	Jumlah sumber air yang telah dikonservasi [dibagi] jumlah seluruh sumber [dikali] 100	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
29.	Menjaga dan meningkatkan perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	Persentase pengajuan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	Total jumlah izin yang dikeluarkan sesuai dengan produk hukum penataan ruang [dibagi] jumlah total pengajuan perizinan pemanfaatan ruang [dikali] 100	Dinas PU dan Penataan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang
30.	Meningkatnya luasan kawasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	Persentase ruang terbuka hijau	Luas ruang terbuka hijau [dibagi] luas kawasan perkotaan [dikali] 100	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

X.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kebijakan umum dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masa transisi yaitu tahun pertama masa kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Melalui pedoman transisi ini, maka diharapkan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD sebelumnya dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru dapat terselesaikan.

X.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program unggulan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih masa bakti 2016-2021, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 (tahap III), serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021, berikut disusun kaidah-kaidah pelaksanaannya :

1. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Bangka Barat dengan dibantu Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Bangka Barat dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat;

3. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016- 2021;
4. RPJMD digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis;
5. RPJMD digunakan sebagai panduan pemerintah daerah dalam menyusun RKPD;
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021, dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021, sebagai berikut :
 - a. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021, mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD;
 - b. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra kepada Bupati Bangka Barat melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat;
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD;
 - d. Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - e. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Bupati Bangka Barat melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat;

7. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam RPJMD, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan RKPD;
8. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap perubahan pada capaian akhir indikator sasaran pembangunan, maka RPJMD dapat dirubah dan ditetapkan kembali melalui peraturan daerah;
9. Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

BAB XI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah yang menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 ini juga merupakan tahapan ketiga dari upaya mewujudkan visi jangka panjang kabupaten yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 yaitu "Bangka Barat Bersih, Mandiri dan Makmur 2025". Sebagai sebuah visi jangka panjang, maka diharapkan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 dapat menjadi bagian integral menuju terwujudnya visi tersebut melalui visi Pembangunan Tahun 2016-2021 yaitu "Menuju Bangka Barat Hebat 2021".

Proses penyusunan RPJMD ini dilakukan bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, melalui proses-proses teknokratis, partisipatif, politis, serta *top-down* dan *bottom-up*. Beberapa instrumen yang digunakan antara lain adalah pelibatan tim ahli, serangkaian FGD di setiap kecamatan, hingga penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD. Melalui rangkaian proses tersebut maka RPJMD telah menjabarkan visi dan misi pembangunan daerah ke dalam tujuan, sasaran yang terukur, strategi, kebijakan, dan program-program pembangunan daerah yang dijalankan selama periode RPJMD.

Pada akhirnya, keseluruhan proses hingga tersusunnya dokumen RPJMD ini ditujukan untuk mewujudkan sinergitas dan keterpaduan pembangunan antar sektor pemerintahan, antar elemen masyarakat dan antar hirarki pemerintahan. Melalui sinergitas dan keterpaduan ini, maka visi dan misi pembangunan daerah akan dapat terwujud di akhir periode perencanaan.

BUPATI BANGKA BARAT,



H. PARHAN ALI